LKPJ

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

KABUPATEN MANGGARAI 2022

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur pantaslah dihaturkan kepada Tuhan Maha Kuasa, Sang Pemilik Kehidupan, karena atas berkat dan cintaNya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manggarai Akhir Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKPJ Bupati Manggarai dilaksanakan untuk memenuhi Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sesuai dengan regulasi tersebut, LKPJ dimaknai sebagai laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai serta memuat pertanggungjawaban kinerja yang secara langsung mengarah pada pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, kebijakan strategis yang ditetapkan, tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya, pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Penyusunan LKPJ ini juga merujuk pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Manggarai Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Manggarai Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026. LKPJ akhir tahun anggaran 2022 merupakan laporan pelaksanaan pembangunan tahun pertama periode RPJMD 2021-2026 dengan tema **Pengembangan Infrastruktur, Meningkatkan Prodiktivitas**. LKPJ terkonstruksi oleh berbagai bidang yang telah dijabarkan dalam berbagai sektor pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan analisis dan indikator kinerja pembangunan, dapat dipastikan ada kemajuan pembangunan Kabupaten Manggarai yang dicapai selama tahun 2022. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, belum seluruh harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, belum semua permasalahan dapat diatasi dalam waktu relatif singkat. Namun, apa yang telah kita capai selama ini merupakan modal dasar bagi upaya perbaikan maupun upaya penajaman program Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD, Jajaran Eksekutif, Kalangan Dunia Usaha, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Orsospol/Ormas/Organisasi Wanita, Rekan–rekan Wartawan serta seluruh komponen masyarakat Manggarai atas segala dukungan yang positif dan konstruktif selama ini, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan selama Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan lancar dan aman.

Akhirnya kami berharap, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai selama Tahun Anggaran 2022, khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Sealur dengan itu, kami juga berharap, Sidang Dewan yang

terhormat ini dapat menilai dan mengevaluasi serta memberikan masukan yang kritis-konstruktif demi perbaikan dan inovasi serta peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang. Semua ini pada gilirannya bermuara pada terwujudnya ***Manggarai yang Maju, Adil dan Berdaya Saing - Bolek Loke Baca Tara, Tela Galang Pe'ang Kete Api One.***

Semoga rahmat dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian.

Ruteng, 30 Maret 2023

BUPATI MANGGARAI,

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, S.E., M.A

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Dasar Hukum..... 1
1.2. Visi dan Misi..... 3
1.2.1 Visi 3
1.2.2 Misi..... 5
1.2.3 Prioritas Pembangunan..... 6
1.3. Gambaran Umum Daerah 6
1.3.1 Kondisi Geografis..... 6
1.3.2 Penduduk 13
1.3.3 Jumlah PNS..... 16
1.3.4 Pengelolaan Pendapatan Daerah 18
1.3.5 Pengelolaan Belanja Daerah 29
1.3.6 Pengelolaan Pembiayaan Daerah..... 32
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 35
2.1 Perubahan Pendapatan Daerah..... 35
2.2 Perubahan Belanja Daerah 37
2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah..... 39
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 42
3.1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Manggarai..... 42
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Manggarai..... 50
3.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 52
3.3.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... 52
1. Urusan Pendidikan 52
2. Urusan Kesehatan..... 65
A. Sub Urusan Dinas Kesehatan 65
B. Sub Urusan RSUD Ruteng..... 85
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 92
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..... 137
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat 143
A. Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah 143
B. Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja 150
6. Urusan Sosial 157
3.3.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... 163
1. Urusan Tenaga Kerja; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 163
2. Urusan Penanaman Modal 170
3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 183
4. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 177
5. Urusan Pangan 196
6. Urusan Pertanahan 200
7. Urusan Lingkungan Hidup 203
8. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 212
9. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 219
10. Urusan Perhubungan..... 225
11. Urusan Komunikasi dan Informatika; Statistik; Persandian 241
12. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga..... 251
13. Urusan Kebudayaan 255
14. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan..... 260
3.3.3 Urusan Pilihan 265
1. Urusan Perikanan..... 266
2. Urusan Pertanian..... 270
A. Sub Urusan Pertanian..... 270
B. Sub Urusan Peternakan 280
3. Urusan Pariwisata..... 287
4. Urusan Industri dan Perdagangan 291
3.3.4 Urusan Fungsi Penunjang Pengelolaan Belanja Daerah 307
1. Urusan Perencanaan 307
2. Urusan Keuangan 315
3. Urusan Pendapatan 325
4. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan..... 332
5. Urusan Pengawasan 340
6. Urusan Penunjang Pemerintahan Umum (Kesbangpol) 347

7. Urusan Sekretariat DPRD 354
8. Urusan Sekretariat Daerah 358
A. Bagian Pemerintahan 358
B. Bagian Organisasi 361
C. Bagian Umum 373
D. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 377
E. Bagian Hukum 382
F. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 387
G. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 391
H. Bagian Administrasi Pembangunan 397
I. Bagian Kesejahteraan Rakyat 401
J. Bagian Kerja Sama 404
8. Urusan Kecamatan 408
A. Kecamatan Langke Rembong 408
B. Kecamatan Wae Ri'i 413
C. Kecamatan Cibal 418
D. Kecamatan Cibal Barat 425
E. Kecamatan Reok 432
F. Kecamatan Reok Barat 439
G. Kecamatan Rahong Utara 446
H. Kecamatan Ruteng 451
I. Kecamatan Lelak 460
J. Kecamatan Satar Mese Utara 465
K. Kecamatan Satar Mese Barat 470
L. Kecamatan Satar Mese 475
3.4 Kebijakan Strategis Daerah 481
3.5 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 504
3.6 Penghargaan 539
BAB IV PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 540
BAB V PENUTUP 543

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan kewajiban konstitusional Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat dan ketentuan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.

Dasar hukum penyusunan LKPJ tahun 2022 ini, adalah:

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DaerahKabupaten Manggarai Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 014);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 05);
12. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Sekretariat Daerah, Staf Ahi Bupati, Sekretariat DRPD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai (Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 045);
13. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai (Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 044);

14. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 053);
16. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 05);
17. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022;

1.2 Visi dan Misi

1.2.1 Visi

Visi Kabupaten Manggarai tahun 2022- 2026 adalah **"Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing ".**

- **Manggarai**
  - Memiliki makna **spasial** sebagai lokus pembangunan yang dijalankan di seluruhwilayah Kabupaten Manggarai, yang kemudian dirasakan manfaatnya di seluruh wilayah, sehingga menghindarkan adanya ketimpangan;
  - Memiliki makna **masyarakat beserta sosial budaya Manggarai** yang menjadi modal penting bagi pembangunan, sekaligus menjadi sasaran agar seluruh masyarakat Manggarai merasakan manfaat pembangunan.

- **Maju**
  - Kondisi perbaikan atau peningkatan kualitas dari masa-masa melalui proses pembangunan yang berkelanjutan dan sistematis;
  - Maju merupakan kondisi mempertahankan dan semakin mengoptimalkan capaian pembangunan yang sudah baik pada periode-periode sebelumnya, serta responsif dan sistematis dalam melaksanakan perbaikan atas capaian pembangunan yang belum optimal;
  - Kondisi maju harus dicapai di segala bidang, mulai dari sumber daya manusia, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan hidup sebagai penentu keberlanjutan pembangunan di masa depan, serta kemajuan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- **Adil**
  - Pembangunan harus memberikan kesamaan akses bagi seluruh pemangku kepentingan;
  - Adil terkait dengan konsep pembangunan inklusif, yakni tanpa adanya diskriminasi berbasis SARA maupun gender, usia, dan pilihan politik dalam menjalankan proses dan merasakan hasil pembangunan;
  - Adil dalam konteks outcome dan impact pembangunan, yakni terkait keseluruhan wilayah yang menjadi sasaran pembangunan, serta seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan;
  - Pembangunan yang berorientasi kesejahteraan, maka tanpa menciptakan ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi, sehingga kemiskinan juga semakin berkurang dan indeks pembangunan manusia semakin meningkat;
  - Pembangunan yang adil tidak hanya mementingkan kepentingan generasi sekarang, namun juga generasi masa depan, sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup harus diutamakan dan menjadi pengendali proses pembangunan;
  - Adil menjadi kata kunci yang menjadi dasar bagi penyusunan misi sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola

pemerintahan.

- **Berdaya Saing**
  - Kondisi berdaya saing diciptakan dengan adanya keunggulan komparatif Kabupaten Manggarai. Berbagai potensi unggulan Manggarai perlu diciptakan daya saing yang berbasis alam, budaya, dan inovasi;
  - Daya saing juga tercipta ketika sumber daya manusia Manggarai mampu menjawab tuntutan zaman memasuki era Revolusi Industri 4.0 dengan digitalisasi yang semakin masif. Oleh karena itu, berbagai inovasi perlu diciptakan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat maupun inovasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat;
  - Daya saing memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, karena pemerintah daerah tidak mungkin menjadi aktor tunggal dalam menjawab tuntutan pembangunan. Kolaborasi diperlukan antar institusi pemerintahan, maupun antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat.

1.2.2 Misi

Selanjutnya berdasarkan Visi tersebut ditetapkan Misi Kabupaten Manggarai. Rumusan misi menggambarkan seluruh aspek umum pembangunan yang menjadi arah dan prioritas pembangunan yang akan dijalankan Kabupaten Manggarai 2022- 2026, yaitu :

Pertama	:	Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia
Kedua	:	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
Ketiga	:	Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup
Keempat	:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani

1.2.3 Prioritas Pembangunan

Mengacu pada tema RKPD kabupaten Manggarai tahun 2022: "Pengembangan Infrastruktur, Memacu Produktivitas, maka ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai tahun 2022, yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
b. Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM;
c. Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
e. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

1.3 Gambaran Umum Daerah

1.3.1 Kondisi Geografis

a. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Manggarai berada di Pulau Flores bagian barat yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wilayah Kabupaten Manggarai yaitu 2.096,44 km² (Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau). Secara administratif Kabupaten Manggarai yang berpusat pemerintahan di kota Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, dibagi menjadi 12 (dua belas) kecamatan, 26 kelurahan, 145 desa dan 52 Desa Persiapan, secara terinci dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Data Administrasi Wilayah Kabupaten Manggarai

No.	Kecamatan	Dasar Hukum Pembentukan	Desa/ Kelurahan Cakupan
1	2	3	4
01.	Kecamatan Ruteng	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, tanggal 28 Februari 1962, No. Pem.66/I/2, dan No. Pem.66/I/32, tanggal 20 Juli 1963 tentang Pembagian Wilayah-wilayah Administratif Kecamatan dalam Kabupaten Manggarai di NTT	1. Desa Cumbi 2. Desa Kakor 3. Desa Pong Murung 4. Kelurahan Wae Belang 5. Desa Bulan 6. Desa Pong Lao 7. Desa Beo Rahong 8. Desa Golo Worok 9. Desa Meler 10. Desa Benteng Kuwu 11. Desa Belang Turi 12. Desa Pong Leko 13. Desa Rai 14. Desa Poco Likang 15. Desa Bangka Lao

No.	Kecamatan	Dasar Hukum Pembentukan	Desa/ Kelurahan Cakupan
1	2	3	4
			16. Desa Compang Dalo 17. Desa Bea Kakor 18. Desa Compang Namut 19. Desa Pong Lale 20. Desa Persiapan Bung 21. Desa Persiapan Bangka wela 22. Desa Persiapan Golo Cumang 23. Desa Persiapan Pong Ndung 24. Desa Persiapan Benteng Wake
02.	Kecamatan Satar Mese	sda	1. Desa Jaong 2. Desa Pongkor 3. Desa Wae ajang 4. Desa Papang 5. Desa Wewo 6. Desa Lungar 7. Desa Mocok 8. Desa Koak 9. Desa Langgo 10. Desa Legu 11. Desa Paka 12. Desa Tal 13. Desa Golo Lambo 14. Desa Ngkaer 15. Desa Umung 16. Desa Tado 17. Desa Gara 18. Desa Golo Muntas 19. Desa Ponggeok 20. Desa Iteng 21. Desa Satar Loung 22. Desa Lolang 23. Desa Ulu Belang 24. Desa Persiapan Ulungali 25. Desa Persiapan Bangka Gonggor 26. Desa Persiapan Pongmeleng 27. Desa Persiapan Ulu Koak 28. Desa Persiapan Bangka Redeng 29. Desa Persiapan Satarloleng 30. Desa Persiapan Kaca 31. Desa Persiapan Nanga Woja
03.	Kecamatan Cibal	sda	1. Kelurahan Pagal 2. Desa Nenu 3. Desa Rado 4. Desa Wudi 5. Desa Welu 6. Desa Golo 7. Desa Barang 8. Desa Perak 9. Desa Bea mese 10. Desa Langkas 11. Desa Ladur 12. Desa Kentol 13. Desa Riung 14. Desa Pinggang 15. Desa Lando 16. Desa Gapong 17. Desa Golo Ncuan 18. Desa Persiapan Lura

No.	Kecamatan	Dasar Hukum Pembentukan	Desa/ Kelurahan Cakupan
1	2	3	4
			19. Desa Persiapan Benteng Todo 20. Desa Persiapan Liang Tongkeng 21. Desa Persiapan Golo Roci 22. Desa Persiapan Bangka Gumbang
04.	Kecamatan Reok	sda	1. Kelurahan Reo 2. Kelurahan Mata Air 3. Kelurahan Baru 4. Kelurahan Wangkung 5. Desa Robek 6. Desa Ruis 7. Desa Bajak 8. Desa Watu Baur 9. Desa Salama 10. Desa Watu Tango 11. Desa Persiapan Ruis Timur
05.	Kecamatan Langke Rembong	Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 1992 Tentang Peningkatan Status Eks Perwakilan Kecamatan Ruteng Menjadi Kecamatan Langke Rembong	1. Kelurahan Golo Dukal 2. Kelurahan Wali 3. Kelurahan Karot 4. Kelurahan Pitak 5. Kelurahan Lawir 6. Kelurahan Pau 7. Kelurahan Waso 8. Kelurahan Watu 9. Kelurahan Mbaumuku 10. Kelurahan Tenda 11. Kelurahan Carep 12. Kelurahan Compang Carep 13. Kelurahan Laci Carep 14. Kelurahan Satar Tacik 15. Kelurahan Poco Mal 16. Kelurahan Bangka Nekang 17. Kelurahan Rowang 18. Kelurahan Bangka Leda 19. Kelurahan Compang Tuke 20. Kelurahan Tadong
06.	Kecamatan Wai Ri'i	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kecamatan Wae Ri'i	1. Desa Satar Ngkeling 2. Desa Lalong 3. Desa Poco 4. Desa Wae Mulu 5. Desa Ndehes 6. Desa Golo Cador 7. Desa Longko 8. Desa Ranggi 9. Desa Compang Ndehes 10. Desa Bangka Jong 11. Desa Bangka Kenda 12. Desa Golo Mendo 13. Desa Golo Wuas 14. Desa Wae Rii 15. Desa Ranaka 16. Desa Golo Watu 17. Desa Benteng Poco 18. Desa Persiapan Golo Ling 19. Desa Persiapan Bangka Wade 20. Desa Persiapan Bangka Nderu 21. Desa Persiapan Compang Rua 22. Desa Persiapan Compang Kaweng

No.	Kecamatan	Dasar Hukum Pembentukan	Desa/ Kelurahan Cakupan
1	2	3	4
07.	Kecamatan Satar Mese Barat	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Satar Mese Barat, Kecamatan Lelak dan Kecamatan Rahong Utara	1. Desa Hilihintir 2. Desa Bea Konda 3. Desa Golo Ropong 4. Desa Terong 5. Desa Ceka Luju 6. Desa Satar Luju 7. Desa Satar Lenda 8. Desa Satar Ruwuk 9. Desa Nuca Molas 10. Desa Borik 11. Desa Cambir Leca 12. Desa Wongka 13. Desa Persiapan Denge 14. Desa Persiapan Luju Mas 15. Desa Persiapan Muku Tee 16. Desa Persiapan Hilihintir Selatan 17. Desa Persiapan Pasir Putih 18. Desa Persiapan Bea Terong 19. Desa Persiapan Lereng
08.	Kecamatan Lelak	sda	1. Desa Bangka Lelak 2. Desa Gelong 3. Desa Urang 4. Desa Ketang 5. Desa Pong Ompu 6. Desa Bangka Dese 7. Desa Nati 8. Desa Ndiwar 9. Desa Bangka Tonggur 10. Desa Lentang 11. Desa Persiapan Redo 12. Desa Persiapan Wae Nanga 13. Desa Persiapan Raong 14. Desa Persiapan Watu Weri
09.	Kecamatan Rahong Utara	sda	1. Desa Buar 2. Desa Benteng Tubi 3. Desa Compang Dari 4. Desa Dimpong 5. Desa Bangka Ajang 6. Desa Liang Bua 7. Desa Tengku Lese 8. Desa Golo Langkok 9. Desa Pong Lengor 10. Desa Manong 11. Desa Bangka Ruang 12. Desa Wae Mantang 13. Desa Persiapan Compang Ntala 14. Desa Persiapan Cunca Lega 15. Desa Persiapan Bangka Putuk 16. Desa Persiapan Golo Wangko 17. Desa Persiapan Mbau Langke
10.	Kecamatan Reok Barat	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Reok Barat dan Kecamatan Cibal Barat	1. Desa Kajong 2. Desa Lante 3. Desa To,e 4. Desa Sambi 5. Desa Nggalak 6. Desa Loce 7. Desa Lemarang 8. Desa Torong Koe 9. Desa Paralando

No.	Kecamatan	Dasar Hukum Pembentukan	Desa/ Kelurahan Cakupan
1	2	3	4
			10. Desa Rura 11. Desa Persiapan Benteng Loce 12. Desa Persiapan Kajong Timur 13. Desa Persiapan Kajong Barat 14. Desa Persiapan Pasat
11.	Kecamatan Cibal Barat	sda	1. Desa Timbu 2. Desa Golo Woi 3. Desa Bangka Ara 4. Desa Wae Renca 5. Desa Wae Codi 6. Desa Latung 7. Desa Compang Cibal 8. Desa Lenda 9. Desa Bere 10. Desa Golo Lanak 11. Desa Persiapan Compang Bere 12. Desa Persiapan Golo Taas 13. Desa Persiapan Golo Lada 14. Desa Persiapan Bea Denger 15. Desa Persiapan Madona
12	Kecamatan Satar Mese Utara	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai.	1. Desa Renda 2. Desa Todo 3. Desa Gulung 4. Desa Popo 5. Desa Lia 6. Desa Kole 7. Desa Ling 8. Desa Nao 9. Desa Cireng 10. Desa Ruang 11. Desa Mata Wae 12. Desa Persiapan Compang Wotol 13. Desa Persiapan Compang Repok 14. Desa Persiapan Ndajang

Peta administrasi Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Manggarai

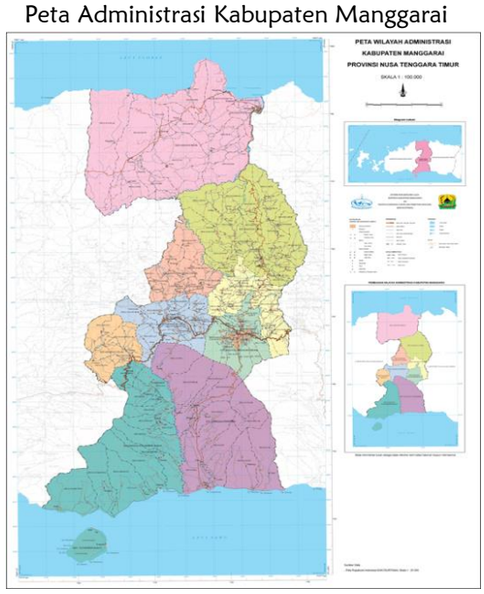

Kabupaten Manggarai memiliki wilayah dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Barat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu.

Kabupaten Manggarai diapiti oleh dua Kabupaten hasil pemekaran yakni Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur. Dengan melihat posisi tersebut, maka Kabupaten Manggarai sebagai kabupaten induk mempunyai peran yang strategis dan potensial untuk menjadi sentral berbagai kegiatan perekonomian serta potensi-potensi lainnya dibidang pertanian dan perkebunan.

b. Geologi

Komposisi jenis tanah di Kabupaten Manggarai, terdiri dari :

a. Latosol : 53,357 km² (31,96%)
b. Mediterian : 60,984 km² (36,53%)
c. Litosol : 52,601 km² (31,51%)

c. Klimatologi

Secara umum Kabupaten Manggarai mengenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan hujan. Secara umum musim kemarau terjadi pada bulan Juni – September, sedangkan hujan pada Desember – Maret.

Tahun 2022, temperature tertinggi terjadi pada bulan September (27,3^{0}C) dan terendah pada bulan Agustus (10^{0}C).

- Suhu dan Kelembaban Udara

  Rata-rata suhu dan kelembaban udara perbulan dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meterologi Frans Sales Lega Tahun 2022

No	Bulan	Suhu			Kelembaban		
		Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
1.	Januari	16,0	21,1	26,6	55,0	86,9	100,0
2.	Februari	15,2	20,7	25,6	59,0	89,0	100,0
3.	Maret	16,0	21,0	26,8	64,0	88,1	100,0
4.	April	13,6	21,6	27,2	44,0	79,2	98,0
5.	Mei	13,2	21,7	26,8	56,0	84,5	100,0
6.	Juni	12,2	21,0	26,0	48,0	83,3	100,0

No	Bulan	Suhu			Kelembaban		
		Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
7.	Juli	10,02	20,4	25,0	47,0	79,6	98.0
8.	Agustus	10,0	20,7	26,0	26,0	78,5	99,0
9.	September	13,2	21,5	27,3	38,0	79,7	100,0
10.	Oktober	14,0	21,5	26,6	49,0	84,7	100,0
11.	November	15,6	21,2	26,6	59,0	86,8	100,0
12.	Desember	14,2	21,2	27,0	43,0	83,6	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Manggarai, Januari 2023

- Curah Hujan

Curah hujan di Kabupaten Manggarai selama tahun 2022 tergambar pada tabel 1.3

Tabel 1.3
Curah Hujan Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
1.	Januari	387,1	21	7,1
2.	Februari	507,9	26	3,2
3.	Maret	504,2	27	4,2
4.	April	350,7	18	6,6
5.	Mei	212,1	13	6,0
6.	Juni	192,0	17	5,7
7.	Juli	85,4	9	6,7
8.	Agustus	23,0	9	6,9
9.	September	402,7	16	7,2
10.	Oktober	551,3	24	4,9
11.	November	600,5	25	4,2
12.	Desember	467,6	20	4,6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Manggarai, Januari 2023

- Kecepatan Angin

Rata-rata kecepatan angin, dapat dilihat pada Gambar 1.2

Gambar 1.2
Rata-rata Kecepatan Angin Menurut Bulan, Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

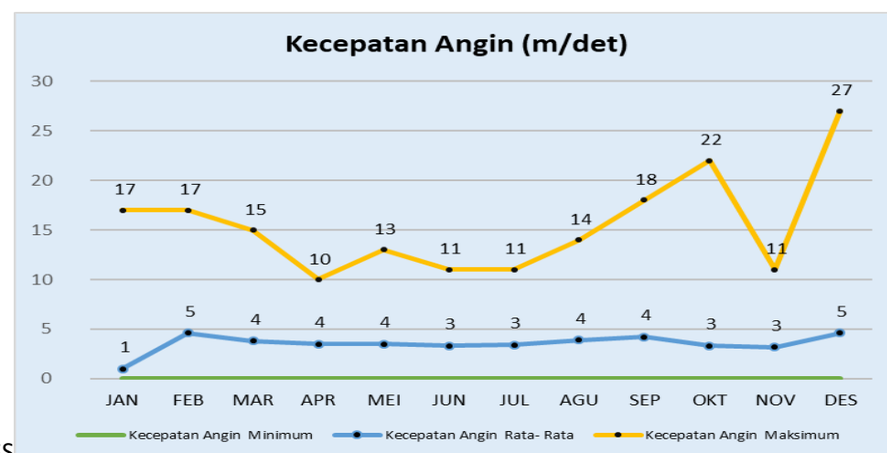

SS

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Manggarai, Januari 2023

d. Topografi

- Komposisi ketinggian wilayah Kabupaten Manggarai dari permukaan laut, yakni:
  a. 0 – 100 m dpl : 28.512 Ha (17,08%)
  b. 100 – 500 dpl : 64.362 Ha (38,55%)
  c. 500 – 1.000 dpl : 56.528 Ha (33,86%)
  d. > 1.000 m dpl : 17.540 Ha (10,51%)

- Kemiringan Tanah
  a. 0 – 2^0 : 5.621 Ha (3,37%)
  b. 2 - 15^0 : 18.732 Ha (11,22%)
  c. 15 – 40^0 : 52.986 Ha (31,74%)
  d. > 40^0 : 89.603 Ha (53,07%)

1.3.2 Penduduk

Jumlah Penduduk di Kabupaten Manggarai (Data Konsolidasi Bersih Semester II) Tahun 2022 adalah 326.737 Jiwa, yang terdiri dari 163.504 laki-laki dan 163.233 perempuan.

Sebaran penduduk Kabupaten Manggarai disajikan dalam tabel 1.4

Tabel 1.4
Sebaran Penduduk Kabupaten Manggarai Tahun 2022

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%	Jumlah KK	%
1	Wae Rii	15.205	15.144	30.349	9.29	8.947	9,46
2	Ruteng	21.971	22.073	44.044	13.48	12.616	13,34
3	Satar Mese	18.643	17.917	36.554	11.19	10,177	10,76
4	Cibal	13.766	13.751	21.517	8,42	8.203	8,67
5	Reok	9.780	9.717	19.497	5,97	5.784	6,11
6	Langke Rembong	31.745	32.531	64.276	19,67	18.713	19,78
7	Satarmese Barat	10.297	10.087	20.384	6,24	5.808	6,14
8	Rahong Utara	11.812	11.997	23.809	7,29	6.913	7,31
9	Lelak	6.512	6.301	12.813	3,92	3.662	3,87
10	Reok Barat	7.700	7.677	15.377	4,71	4.346	4,59
11	Cibal Barat	7.848	7.903	15.751	4,82	4.703	4,97
12	Satarmese Utara	8.231	8.135	16.366	5,01	4.726	5,00
TOTAL		**163.504**	**163.233**	**326.737**	**100,00**	**94.598**	**100**

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Manggarai, Januari 2023

Gambar 1.3
Presentase Sebaran Penduduk Kabupaten Manggarai 2022

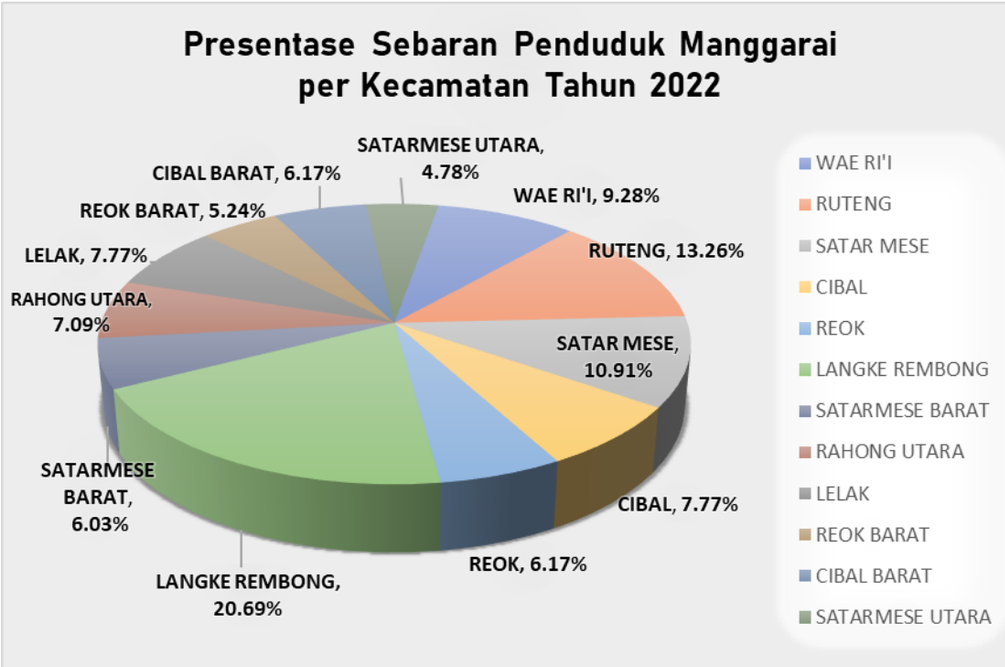

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Manggarai, Januari 2023

Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai berdasarkan struktur usia dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.5 dan 1.6

Tabel 1.5
Penduduk Kabupaten Manggarai Tahun 2022
Berdasarkan Kelompok Usia

No	Struktur Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	0 – 4	11.784	10.931	22.715	6,95
2	5 – 9	16.812	16.070	32.882	10,06
3	10 – 14	18.500	17.539	36.039	11,03
4	15 – 19	15.680	15.597	31.277	9,57
5	20 – 24	18.155	18.109	36.264	11,10
6	25 – 29	14.733	14.745	29.478	9,02
7	30 – 34	11.547	12.178	23.725	7,26
8	35 – 39	10.628	11.258	21.886	6,70
9	40 – 44	9.770	10.190	19.960	6,11
10	45 – 49	8.526	9.281	17.807	5,45
11	50 – 54	7.706	8.259	15.965	4,89
12	55 – 59	7.013	7.240	14.253	4,36
13	60 – 64	4.975	4.982	9.957	3,05
14	65 – 69	3.350	3.199	6.549	2,00
15	70 – 74	2.027	1.900	3.927	1,20
16	75 – 79	1.358	1.078	2.436	0,75
17	>79	940	677	1.617	0,49
TOTAL		**163.504**	**163.233**	**326.737**	**100,00**

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Manggarai, Januari 2023

Tabel 1.6
Penduduk Kabupaten Manggarai Tahun 2022
Berdasarkan Tingkat Pendidkan

No	PENDIDIKAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	BELUM SEKOLAH	35.492	35.163	70.655	22,57
2	TDK TAMAT SD	25.882	24.643	50.525	16,14
3	TAMAT SD	48.073	52.420	100.493	32,10
4	SLTP	17.795	18.028	35.823	11,44
5	SLTA	26.143	23.375	35.823	11,44
6	DIP. 11	492	588	1.080	0,35
7	DIP. 111	1.420	2.314	3.734	1,19
8	STR.I	7.917	6.593	14.510	4,64
9	STR. II	273	105	378	0,12
10	STR. III	17	4	21	0,01
TOTAL		**163.504**	**163.233**	**313.042**	**100,00**

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Manggarai, Januari 2023

Penduduk Kabupaten Manggarai tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.4

Gambar 1.4

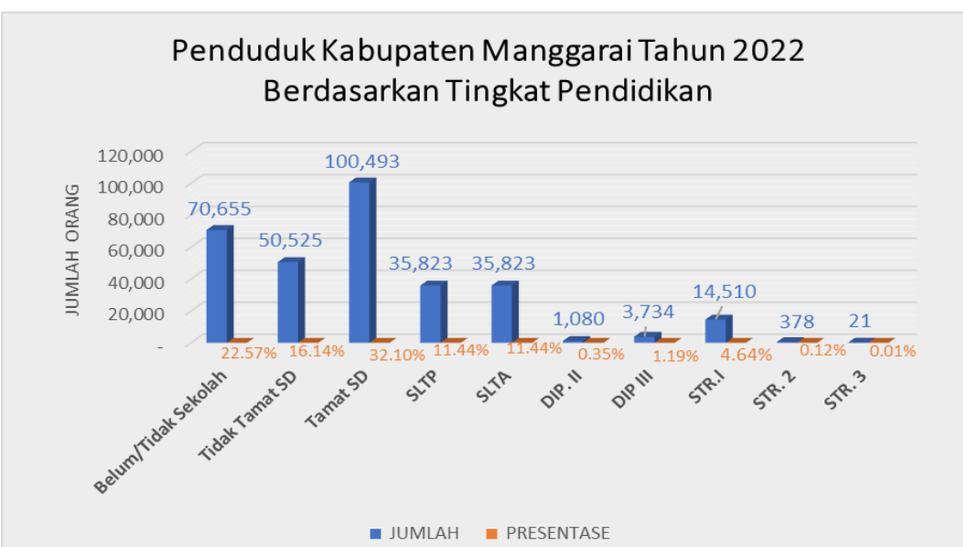

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Manggarai, Januari 2023

Penduduk Kabupaten Manggarai menurut Agama dapat dilihat pada tabel 1.7

Tabel 1.7
Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Tahun 2022
Berdasarkan Agama

NO	KECAMATAN	AGAMA							JUMLAH
		KATOLIK	ISLAM	KRISTEN	HINDU	BUDHA	KEPERCA YAAN	KONG HUCU	
1.	Wae Ri'i	30.234	20	86	9	0	0	0	30.349
2.	Ruteng	43.846	63	128	6	1	0	0	44.044
3.	Satar Mese	35.451	931	143	28	0	0	0	36.554
4.	Cibal	27.420	28	60	7	1	0	1	27.517
5.	Reok	12.988	6.194	315	0	0	0	0	19.497
6.	Langke Rembong	59.255	3.096	1.692	219	14	0	0	64.276
7.	Satar Mese Barat	18.526	1.825	33	0	0	0	0	20.384
8.	Rahong Utara	23.752	7	45	2	0	0	0	23.809
9.	Lelak	12.771	14	24	4	0	0	0	12.813
10.	Reok Barat	14.910	459	7	0	0	0	1	15.377
11.	Cibal Barat	15.711	16	22	1	1	0	0	15.751
12.	Satar Mese Utara	16.323	15	26	1	0	0	1	16.366
	JUMLAH	**311.187**	**12.668**	**2.581**	**277**	**17**	**0**	**7**	**326.737**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, Januari 2023

1.3.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Jumlah ASN Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 5.089 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 4.430 orang, laki-laki 2.128 orang, Perempuan 2.302 orang dan PPPK sebanyak 659 orang.

a. Jumlah PNS menurut Pendidikan dapat dilihat pada gambar 1.5

Gambar 1. 5
PNS Kabupaten Manggarai Menurut Pendidikan

Sumber: BKPSDMD Kabupaten Manggarai, Jan 2023

b. Jumlah PNS menurut Golongan, dapat dilihat pada table 1.8

Tabel 1.8
PNS Kabupaten Manggarai Menurut Golongan

NO	URAIAN	RUANG A	RUANG B	RUANG C	RUANG D
1	GOLONGAN I	1	5	6	10
2	GOLONGAN II	3	116	348	300
3	GOLONGAN III	421	488	559	1013
4	GOLONGAN IV	473	685	16	1

Sumber: BKPSDMD Kabupaten Manggarai, Jan 2023

c. Data PNS berdasarkan jabatan, disajikan dalam tabel 1.9.

Tabel 1.9
PNS Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	**Fungsional Tertentu**	**0**	**0**	**0**
	- Kesehatan	158	661	817
	- Guru	715	808	1.523
	- Pamong Belajar	3	3	6
	- Pengawas Sekolah	10	2	12
	- Penyuluh Keluarga Berencana	0	0	0
	- Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah	1	0	1
	- Analis Kepegawaian	4	0	4
	- Pengendali Organisme Tanaman	1	2	3
	- Penyuluh Pertanian	47	9	56
	- Analis Pasar Hasil Pertanian Muda(Jabatan Fungsional Penyetaraan	185	140	325
2.	**Pelaksana**	**726**	**520**	**1.246**
3.	**Administrasi:**	**0**	**0**	**0**
	Pengawas:			
	-Eselon IV-B	29	28	57
	-Eselon IV-A	121	45	166
	- Eselon III-B	90	27	117
	- Eselon III-A	45	9	54
4.	**Pimpinan Tinggi Pratama:**			
	- Eselon II-B	27	2	29
	- Eselon II-A	1	0	1
	JUMLAH	**2.170**	**2.260**	**4.430**

Sumber: BKPSDMD Kab. Manggarai, Jan 2023

d. Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Manggarai keadaan sampai dengan 31 Desember 2022 sejumlah 659 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 329 orang dan perempuan sebanyak 339 orang.

1.3.4 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam APBD Kabupaten Manggarai pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.1.148.633.546.856,- dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.112.498.294.818,69.- atau 96,85% dengan rincian target dan realisasi pendapatan tergambar pada tabel 1.10.

Tabel 1.10
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	% Kontribusi
	1	2	3	4	5
1	**Pendapatan**	**1.148.633.546.856**	**1.112.498.294.818,69**	**96,85**	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	121.176.876.649	110.628.187.541,69	91,29	9,94
1.2	Pendapatan Transfer	941.000.860.207	928.295.624.485	98,65	83,44
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	86.455.810.000	73.574.482.792	85,10	6,61

Sumber: BKAD Kabupaten Manggarai, Januari 2023 (unaudited)

Adapun rincian dari masing-masing pendapatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat terlihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap aahunnya. Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self supporting).* Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Tahun anggaran 2022 dengan target sebesar Rp.121.176.876.649,- dan realisasi sebesar Rp.110.628.187.541,69 atau mencapai 91,29%, dengan rincian seperti pada tabel 1.11.

Tabel 1.11
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Daerah
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**121.176.876.649**	**110.628.187.541,29**	**91.29**
1.1	Pajak Daerah	23.859.795.327	17.599.050.545,64	73.76
1.2	Retribusi Daerah	14.616.143.756	6.627.969.044	45.35
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.580.221.250	3.371.631.127,65	51.24
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	76.120.716.316	83.029.536.824,40	109.08

Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)

1) **Pajak Daerah**

Pada era otonomi daerah, masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat antara lain melalui pungutan kepada masyarakat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan komponen utama Pendapatan Asli daerah (PAD) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang- Undang tersebut, pajak daerah yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota adalah sebanyak 11 jenis. Sedangkan, Jenis pajak dalam APBD kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 dari komponen PAD hanya 9 jenis, antara lain:

(1) Pajak Hotel
(2) Pajak Restoran,
(3) Pajak Hiburan,
(4) Pajak Reklame,
(5) Pajak Penerangan Jalan,
(6) Pajak Air Tanah
(7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
(8) PBB Pedesaan dan Perkotaan
(9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dua jenis pajak yang tidak dipungut adalah pajak burung wallet dan pajak barang dan jasa tertentu karena belum diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Penerimaan Pajak Daerah pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.23.859.795.327,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.17.599.050.545,64 atau mencapai 73,76%. Namun demikian dari 9 (sembilan) obyek pajak, terdapat 6 (enam) obyek pajak yang tidak mencapi target 100% yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan, ada 3 obyek pajak yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Rincian pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada tabel 1.12.

Tabel 1.12
Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	(%)
1	**Pajak Daerah**	**23.859.795.327**	**17.599.050.545,64**	**73,76**
1.1	Pajak Hotel	572.902.000	486.514.239	84,92
1.2	Pajak Restoran	2.700.081.317	2.373.208.666	87,89
1.3	Pajak Hiburan	50.142.763	1.530.000	3,05
1.4	Pajak Reklame	168.642.335	163.110.000	96,72
1.5	Pajak Penerangan Jalan	4.688.000.000	4.875.749.226	104,00
1.6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	10.000.000.000	3.826.485.102	33,41
1.7	Pajak Air Bawah Tanah	100.000.000	105.518,510	105,52
1.8	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.617.870.962	3.950.741.674	85,55
1.9	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	962.155.950	1.173.350.511	121,95

Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan. Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai meliputi :

1. Retribusi Jasa Umum
   A Retribusi Pelayanan Kesehatan
   B Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
   C Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
   D Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
   E Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
   F Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
   G Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha
   A Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
   B Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
   C Retribusi Tempat Pelelangan
   D Retribusi Terminal
   E Retribusi Rumah Potong Hewan
   F Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
   G Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
   H Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu
   A Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
   B Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Pendapatan Hasil Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.14.616.143.756,- dan terealisasi sebesar Rp.6.627.969.044,- atau sebesar 45,35%. Rincian pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 1.13.

Tabel 1.13
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	(%)
1	**Retribusi Daerah**	**14.616.143.756**	**6.627.969.044**	**45,35**
1.1	Retribusi Jasa Umum	2.598.459.100	1.573.401.800	60,55
1.2	Retribusi Jasa Usaha	11.621.677.887	5.031.653.350	43,30
1.3	Retribusi Perizinan Tertentu	396.006.769	22.913.894	5,79

Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun anggaran 2022 diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan milik daerah/BUMD sebesar Rp3.371.631.127,65 atau 51,24% dari target sebesar Rp.6.580.221.250. Realisasi sebesar 51,24 % disebabkan karena deviden yang diperolah langsung ditambahkan sebagai penyertaan modal pada Bank NTT. Rincian pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana tabel 1.14.

Tabel 1.14
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	JUMLAH (Rp)		CAPAIAN (%)
	TARGET	REALISASI	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**6.580.221.250**	**3.371.631.127,65**	**51,24**
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.580.221.250	3.371.631.127,65	51,24

Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Komposisi pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
2 Jasa Giro
3 Pendapatan Bunga
4 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
5 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

6 Pendapatan Denda Retribusi Daerah

7 Pendapatan dari Pengembalian

8 Pendapatan BLUD

9 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.76.120.716.316.- dan dapat terealisasikan sebesar Rp.83.029.536.824,40 atau 109,08%. Perincian dari pos pendapatan tersebut pada Tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 1.15.

Tabel 1.15
Perincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	TARGET (RP.)	REALISASI (RP.)	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	**76.120.716.316**	**83.029.536.824,40**	**109,08**
Hasil Penjualan Asset Daerah yang Tidak Dipisahkan	551.550.000	1.650.000	0,30
Jasa Giro	1.951.949.217	1.403.679.766,90	71,91
Pendapatan Bunga	1.984.000.000	376.587.006,96	18,98
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.874.753.000	1.820.880.186,83	97,13
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	753.000.000	26.678.097	3,54
Pendapatan Denda Pajak Daerah	50.500.000	19.105.000	37,83
Pendapatan dari Pengembalian	1.002.500.000	815.904.022,40	81,39
Pendapatan BLUD	55.746.232.992	67.968.747.874,31	121,93
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	12.206.231.107	10.596.304.870	86,81

Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)

b. **Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan Transfer ini terdiri atas:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
   - Dana Perimbangan
   - Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak
   - Dana Alokasi Umum
   - Dana Alokasi Khusus
   - Dana Desa
2) Pendapatan Transfer Antar Daerah
   - Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.941.000.860.207,- dan terealisasi sebesar Rp.928.295.624.485,- atau 98,65%. Adapun perincian penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 1.16

Tabel 1.16
Rincian Pendapatan Transfer Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	TARGET (RP.)	REALISASI (RP.)	%
Pendapatan Transfer	**941.000.860.207**	**928.295.624.485**	**98.65**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	900.812.876.993	902.068.026.862	100.14
Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.187.983.214	26.227.597.623	65.26

Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana perimbangan

- Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak

  Penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah dalam APBN dibagihasilkan kepada daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Dana bagi hasil ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah

Daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pos penerimaan dari Bagi Hasil terdiri atas :

1. DBH Pajak Bumi dan Bangunan
2. DBH PPh Pasal 21
3. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
4. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
5. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi
6. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent
7. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan

Penerimaan dari Bagi Hasil pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 13.529.879.485,- terealisasi sebesar Rp. 16.491.607.210,- atau 121,89%.

- Dana Alokasi Umum

  Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.549.185.477.000,- dan terealisasi sebesar Rp.549.006.319.085,- atau 99,97%.

- Dana Alokasi Khusus

  Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik daerah. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang bersumber dari DAK Fisik pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar

Rp.118.842.262.588,- dan terealisasi sebesar Rp.129.027.318.317,- atau 108,57%. DAK Non Fisik pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.96.069.676.920,- dan terealisasi sebesar Rp.84.357.201.250,- atau 87,81%.

Perincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.17.

Tabel 1.17
Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022

URAIAN	JUMLAH (Rp)		CAPAIAN
	TARGET	REALISASI	%
Dana Perimbangan	**777.627.295.993**	**778.882.445.862**	**100,16**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.529.879.485	16.491.607.210	121,89
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	549.185.477.000	549.006.319.085	99,97
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	118.842.262.588	129.027.318.317	108,57
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	96.069.676.920	84.357.201.250	87,81

Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)

b. Dana Desa

Dana Desa yang dialokasikan bagi Kabupaten Manggarai tahun 2022 sebesar Rp.123.185.581.000,- dan terealisasi sebesar Rp.123.185.581.000,- atau 100%.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah kabupaten Manggarai tahun 2022 sebesar Rp.40.187.983.214,- yang bersumber dari Dana Bagi hasil dengan realisasi sebesar Rp.26.227.597.623,- atau 65,26%

Perincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.18

Tabel 1.18
Pendapatan Transfer Antar Daerah
Tahun anggaran 2022

URAIAN	JUMLAH (Rp)		%
	TARGET	REALISASI	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**40.187.983.214**	**26.227.597.623**	**65,26**
Bagi Hasil Pajak	40.187.983.214	26.227.597.623	65,26

Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)

c. **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun anggaran 2022 bersumber dari Hibah Pemerintah Pusat yang ditargetkan sebesar Rp.86.455.810.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.73.574.482.792,- atau mencapai 85,10% sebagaimana terlihat pada tabel 1.19

Tabel 1.19
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Manggarai Tahun anggaran 2022

URAIAN	JUMLAH (Rp)		CAPAIAN
	TARGET	REALISASI	(%)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**86.455.810.000**	**73.574.482.792**	**85,10**
Pendapatan Hibah	10.000.000.000	-	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	76.455.810.000	73.574.482.792	96,23

Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)

3. Permasalahan dan Solusi

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 secara keseluruhan sebesar Rp.1.112.498.294.818,69 atau 96,85% dari target sebesar Rp1.148.633.546.856,-. Masih terdapat beberapa obyek Pendapatan pada komponen pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan dari Dana Perimbangan yang belum mencapai target.

Permasalahan :

- Pendapatan transfer mengalami penurunan karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat;
- Kemampuan aparatur mengidentifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah masih rendah;
- Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi yang masih rendah;
- Belum optimalnya kinerja beberapa unit usaha daerah, sehingga kontribusi terhadap PAD masih rendah;
- Keterbatasan manajemen dan sumber daya pengelolaan pajak dan retribusi, sehubungan dengan luasnya cakupan objek pajak danretribusi.

Solusi atas permasalahan tersebut adalah:

- Mengembangkan strategi dan inovasi peningkatan pendapatan Pajak Daerah/Retribusi Daerah melalui digitalisasi pendapatan;
- Memperluas basis penerimaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah baik yang sudah terdata maupun yang masih potensial;
- Meningkatkan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) bidang pajak daerah;
- Meningkatkan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan disertai peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif dan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- Penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak melalui kegiatan sosialisasi yang lebih luas dan penyuluhan pajak dengan fokus pada peran pajak/retribusi daerah dalam pembangunan di daerah;
- Berkenaan dengan Dana Perimbangan sebagai kewenangan pemerintah, maka dalam hal penetapan rencana pendapatan diperlukan koordinasi intensif sehingga realisasi dari dana perimbangan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Perimbangan dilaksanakan lebih optimal melalui percepatan pelaksanaan teknis kegiatan.

1.3.5 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Manggarai, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang–undangan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Belanja daerah disusun berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun 2022 terdapat penyesuaian berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ, tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah dan berdasarkan PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Daerah mengganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari Dana Transfer Umum.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar **Rp.1.203.443.264.459**.- dan terealisasi sebesar **Rp.1.127.108.988.701,94** atau **93,66%** yang perinciannya dapat dilihat pada tabel 1.20.

Tabel 1.20
Ringkasan Perhitungan Anggaran Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	**Belanja Operasi**	**832.537.175.122**	**769.450.722.785,96**	**92,42**
	a. Belanja Pegawai	443.203.536.777	416.729.625.059,24	94.03
	b. Belanja barang dan jasa	291.767.608.712	267.835.777.623	91.80
	c. Belanja Bunga	1.000.000.000	727.530.923,72	72.75
	d. Belanja Subsidi	1.045.090.000	-	0.00
	e. Belanja Hibah	93.399.088.641	82.045.623.310	87.84
	f. Belanja Bantuan Sosial	2.121.850.992	2.112.165.870	99.54
2.	**Belanja Modal**	**180.784.326.029**	**169.206.541.293,98**	**93.60**
	a. Belanja modal tanah	3.798.889.291	1.962.083.000	51.65
	b. Belanja modal Peralatan & Mesin	35.369.435.891	33.377.856.959,98	94.66
	c. Belanja modal Gedung & Bangunan	74.043.179.369	71.649.025.218	94,37
	d. Belanja modal Jalan. Jaringan & Irigasi	67.572.821.478	62.217.576.116	92,07
3.	**Belanja Tidak Terduga**	**7.000.000.000**	**5.329.997.314**	**76,14**
4.	**Belanja Transfer**	**183.121.763.308**	**183.121.727.308**	**100**
	Total Belanja	**1.203.443.264.459**	**1.127.108.988.701,94**	**93,66**

Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)

a. Belanja Operasi

Belanja operasi pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.832.537.175.122,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.769.450.722.785,96 atau 92,42%

b. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.180.784.326.029,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.169.206.541.293,98 atau 93,60%.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran Belanja Tidak terduga sebesar Rp.7.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.329.997.314,- atau 76,14%. Rincian anggaran dan realisasi belanja belanja TidakT Tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 1.21.

Tabel 1.21
Realisasi Belanja Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2022

	Belanja Tidak Terduga	
	Anggaran :	**7.000.000.000**
1.	Penanganan Covid 19	
	BPBD	200.728.000
	DINAS KESEHATAN	1.309.027.650
	BLUD RSUD BEN MBOY	144.975.714
2.	Penanggulangan Bencana	3.720.046.350
I	JUMLAH PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA	5.374.777.714
II	PENYETORAN KEMBALI	44.780.000
	TOTAL REALISASI (I – II)	**5.329.997.714**

Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)

- Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan COVID 19

  Sampai dengan 31 Desember 2022, total Belanja Tidak Terduga yang dicairkan untuk Penanganan Covid 19 melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai selaku Bendahara Umum Daerah sebesar Rp.1.654.731.364. Dana ini dicairkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai sebesar Rp.200.72.000,-, Dinas Kesehatan sebesar Rp.1.309.027.650,- dan kepada RSUD Ruteng sebesar Rp.144.975.714,-.

- Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan bencana.

  Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan bencana yang dicairkan sampai tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.720.046.350. Dana ini seluruhnya dicairkan kepada Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, jumlah penyetoran kembali Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.44.780,000,-. Dengan demikian total realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Manggarai tahun 2022 sebesar Rp.5.329.997.714.-.

d. Belanja Transfer

Pada tahun 2022, Anggaran Belanja Transfer Kabupaten Manggarai sebesar Rp.183.121.763.308,- dan teralisasi sebesar Rp.183.121.727.308,- atau 99,99%.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan belanja daerah khususnya belanja langsung antara lain:

a. Terdapat beberapa pekerjaan pengadaan yang gagal lelang;
b. Keterlambatan penyelesaian dokumen serah terima pekerjaan yang menyebabkan belum terbayarnya beberapa paket pekerjaan fisik;

Solusi permasalahan sebagaimana dimaksud di atas adalah :

1. Melaksanakan pengawasan/ monitoring, pengendalian dan evaluasi secara intensif terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada setiap tahapan pekerjaan
2. Perangkat daerah membayar paket pekerjaan yang telah selesai di tahun anggaran berikutnya serta dilaksanakan penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pada tahun berjalan.

1.3.6 Pembiayaan Daerah

Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/defisit anggaran. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali. Dengan demikian, komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 terdapat bagian Pembiayaan yang pada dasarnya merupakan transaksi keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka menutup Defisit Anggaran. Dalam bagian pembiayaan tersebut, Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan kembali pinjaman. Sementara pada sisi Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban, serta menjadi kredibilitas pemerintah daerah. Penganggaran komponen pembiayaan diarahkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan untuk mengurangi beban pemerintah pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, penetapan kebijakan pembiayaan daerah disertai dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam menyeimbangkan pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Manggarai yang telah ditetapkan. Optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam menyeimbangkan Pos Penerimaan dan Pos Pengeluaran Daerah pada komponen pembiayaan, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yang telah ditetapkan.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar **Rp.74.809.717.603,-** atau yang diperoleh dari perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.68.559.000.049,-** sedangkan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar **Rp.6.250.717.554,-** tidak terealisasi.

Perincian Pembiayaan Daerah dalam tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 1.22.

Tabel 1.22
Komposisi Pembiayaan Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**74.809.717.603**	**74.809.717.603**	**100**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	68.559.000.049	68.559.000.049	100
1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.250.717.554	6.250.717.554	100
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**20.000.000.000**	**19.300.000.000**	**96,50**
2.1	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	19.300.000.000	96,50
	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.000.000.000	19.300.000.000	96,50
PEMBIAYAAN NETTO		**54.809.717.603**	**55.509.717.603**	**101,28**

Sumber: BKAD Kabupaten Manggarai, 2023(unaudited)

SILPA Tahun Anggaran 2022 bersumber dari:

1. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
3. Sisa Dana BOS
4. Sisa Dana Kapitasi

Rincian realisasi Penyertaan Modal Daerah pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.21
Komposisi Penyertaan Modal Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	REALISASI (Rp.)
1	BANK NTT	10.000.000.000
2	PDAM TIRTA KOMODO	
	Tahap 1	5.000.000.000
	Tahap 2	4.300.000.000
TOTAL		**19.300.000.000**

Sumber: BKAD Kabupaten Manggarai, 2023(unaudited)

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.20.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.19.3000.000.000,- yang terdiri dari penyertaan modal pada Bank NTT sebesar Rp.10.000.000.000,- serta penyertaan modal pada PERUMDA Tirta Komodo sebesar Rp.9.300.000.000,-.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran. Dengan demikian dalam APBD 2022, SILPA yang dimasukkan adalah sisa realisasi APBD di tahun anggaran 2022 sebesar Rp.45.994.014.557,-.

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal kepada BUMD.

Pembiayaan Netto sebesar Rp.55.509.717.603,- digunakan untuk menutup defisit anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Perubahan Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah. salah satu unsur penting adalah pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah merupakan pendorong bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diperlukan kebijakan strategis serta upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara terus menerus. Kebijakan strategis serta upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui program dan kegiatan terukur. terkoordinasi serta berkelanjutan dengan mengedepankan optimalisasi potensi pendapatan daerah dan aspek pelayanan publik yang diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah sejalan dengan perkembangan perekonomian.

Kebijakan Umum Anggaran di bidang Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD TA. 2022 tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat untuk membayar.

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah. penyederhanaan birokrasi. peningkatan tertib administrasi. penegakan sanksi. peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian-penyesuaian tarif Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) Bidang Pendapatan Daerah. yang dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Manggarai.

Permasalahan utama dalam Perubahan Pendapatan Daerah. antara lain:

a. Pendapatan transfer mengalami penurunan karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat;
b. Kemampuan aparatur mengidentifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah masih rendah;
c. Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi yang masih rendah;
d. Belum optimalnya kinerja beberapa unit usaha daerah sehingga kontribusi terhadap PAD masih rendah;
e. Keterbatasan manajemen dan sumber daya pengelolaan pajak dan retribusi. sehubungan dengan luasnya cakupan objek pajak dan retribusi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Pemantapan kelembagaan. regulasi. dan sistem operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
4. Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
6. Mengembangkan inovasi peningkatan pendapatan Pajak Daerah/Retribusi Daerah
7. Memperluas basis penerimaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah baik yang sudah terdata maupun yang masih potensial;
8. Meningkatkan upaya penegakan hukum (law enforcement) bidang pajak daerah.

Anggaran Pendapatan Daerah dianggarkan berkurang sebesar Rp.13.290.720.837.- atau turun 1.14% dari target dalam APBD induk sebesar Rp.1.161.924.267.693.- menjadi sebesar Rp.1.148.633.546.856.- Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perubahan Anggaran Pendapatan
Kabupaten Manggarai Tahun 2022

NO	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
A.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**113.292.566.220**	**121.176.876.649**	**7.884.310.429**	**6,96**
1.	Pajak Daerah	25.515.735.647	23.859.795.327	(1.655.940.320)	-6,49
2.	Retribusi Daerah	14.433.636.356	14.616.143.756	182.507.400	1,26
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.610.000.000	6.580.221.250	(3.029.778.750)	-31,53
4.	Lain-lain PAD yang Sah	63.733.194.217	76.120.716.316	12.387.522.099	19,44
B.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**962.175.891.473**	**941.000.860.207**	**(21.175.031.266)**	**-2,20**
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	927.048.413.000	900.812.876.993	(26.235.536.007)	-2,83
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.127.478.473	40.187.983.214	5.060.504.741	14,41
C.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**86.455.810.000**	**86.455.810.000**	**-**	**0,00**
1.	Pendapatan Hibah	10.000.000.000	10.000.000.000	-	0,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	76.455.810.000	76.455.810.000	-	0,00
	Jumlah Pendapatan	**1.161.924.267.693**	**1.148.633.546.856**	**(13.290.720.837)**	**-1,14**

Sumber: BKAD Kabupaten Manggarai Januari 2023

2.2 Perubahan Belanja Daerah

Dalam konteks belanja. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan Belanja Daerah secara adil dan merata serta transparan agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. khususnya berkaitan dengan pelayanan publik. Karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran. maka dalam perencanaan belanja perlu diperhatikan:

1. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator capaian kinerja yang ingin dicapai;
2. Penetapan prioritas program dan kegiatan;
3. Sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih perencanaan dan penganggaran terkait juga dengan berbagai kebijakan yang melibatkan kebijakan pemerintah kabupaten/kota.

Berkenaan dengan itu, kebijakan belanja untuk perubahan APBD Tahun 2022 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Alokasi anggaran ini diarahkan untuk dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap Perangkat Daerah baik pelayanan yang bersifat langsung terhadap Aparatur Daerah maupun pelayanan kepada publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Permasalahan Utama Belanja Daerah adalah keterbatasan kemampuan keuangan untuk mendanai kebutuhan belanja. Penyediaan anggaran belanja juga masih didominasi oleh penerimaan dari dana transfer pemerintah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah belum mampu menopang kebutuhan belanja publik.

Dengan kondisi keterbatasan pendapatan yang ada dan untuk tetap menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, maka dalam mengalokasikan Belanja Daerah ditetapkan kebijakan menggunakan pendekatan skala prioritas dalam memilih berbagai alternatif program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat antara lain: pelayanan hak dasar masyarakat khususnya terkait dengan pendidikan dan kesehatan serta kemiskinan.

Berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 maka ditetapkan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 mencakup capaian program serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian Perangkat Daerah.

Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp.1.219.431.496.229.- naik sebesar Rp.55.587.851.346.- atau 4.78% dari anggaran induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.163.843.644.883.- Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perubahan Anggaran Belanja
Kabupaten Manggarai Tahun 2022

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (RP.)	SETELAH PERUBAHAN (RP.)	BERTAMBAH/(BERKURANG) (RP.)	%
A.	**BELANJA OPERASI**	**843.553.014.571**	**832.537.175.122**	**(11.015.839.449)**	**-1,31**
1.	Belanja Pegawai	453.040.631.239	443.203.536.777	(9.837.094.462)	-2,17
2.	Belanja Barang dan Jasa	288.368.920.140	291.767.608.712	3.398.688.572	1,18
3.	Belanja Bunga	2.500.000.000	1.000.000.000	(1.500.000.000)	-60,00
4.	Belanja Subsidi	-	1.045.090.000	1.045.090.000	
5.	Belanja Hibah	97.315.713.000	93.399.088.641	(3.916.624.359)	-4,02
6.	Belanja Bantuan Sosial	2.327.750.192	2.121.850.992	(205.899.200)	-8,85
B.	**BELANJA MODAL**	**396.308.192.962**	**180.784.326.029**	**(215.523.866.933)**	**-54,38**
1.	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000	3.798.889.291	798.889.291	26,63
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.805.421.932	35.369.435.891	3.564.013.959	11,21
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.120.209.255	74.043.179.369	(74.077.029.886)	-50,01
4.	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	213.382.561.775	67.572.821.478	(145.809.740.297)	-68,33
C.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**8.500.000.000**	**7.000.000.000**	**(1.500.000.000)**	**-17,65**
1.	Belanja Tidak Terduga	8.500.000.000	7.000.000.000	(1.500.000.000)	-17,65
D.	**BELANJA TRANSFER**	**183.468.482.600**	**183.121.763.308**	**(346.719.292)**	**-0,19**
1.	Belanja Bagi Hasil	3.859.437.200	3.847.593.908	(11.843.292)	-0,31
2.	Belanja Bantuan Keuangan	179.609.045.400	179.274.169.400	(334.876.000)	-0,19
	Jumlah Belanja	**1.431.829.690.133**	**1.203.443.264.459**	**(228.386.425.674)**	**-15,95**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai. Januari 2023

2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (Silpa) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2022, dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dan menutup defisit anggaran Tahun 2022. Berdasakan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021, Silpa dianggarkan sebesar Rp.68.559.000.049.-.

- **Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan**

Permasalahan utama pembiayaan adalah adanya pengurangan penerimaan pembiayaan dan penambahan pengeluaran pembiayaan dari target pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 yang berdampak pada pengurangan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- **Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan**

Memperhatikan komposisi rencana Perubahan pendapatan dan belanja pada Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Umum Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.68.559.000.049.-
2. Penerimaan pinjaman Daerah sebesar Rp.6.250.717.554.-.

Kebijakan Umum Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 adalah:

1. Mengalokasikan Penyertaan Modal pada Bank NTT Rp.10.000.000.000.-
2. Mengalokasikan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Komodo Rp.10.000.000.000.-
3. Dana Cadangan Rp.5.341.377.560.-

Pembiayaan Netto sebesar Rp.54.809.717.603.- digunakan untuk menutup defisit anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen Pembiayaan tersebut. dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perubahan Pembiayaan
Kabupaten Manggarai Tahun 2022

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (RP.)	SETELAH PERUBAHAN (RP.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (RP.)	%
A.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**287.405.422.440**	**74.809.717.603**	**(212.595.704.837)**	**-73,97**
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.405.422.440	68.559.000.049	31.153.577.609	83,29
2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	250.000.000.000	6.250.717.554	(243.749.282.446)	-97,50
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**287.405.422.440**	**74.809.717.603**	**(212.595.704.837)**	**-73,97%**
B.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**17.500.000.000**	**20.000.000.000**	**2.500.000.000**	**14,29%**
1.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	
2.	Penyertaan Modal Daerah	17.500.000.000	20.000.000.000	2.500.000.000	14,29%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**17.500.000.000**	**20.000.000.000**	**2.500.000.000**	**14,29%**
	Pembiayaan Netto	**269.905.422.440**	**54.809.717.603**	**(215.095.704.837)**	**-79,69%**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Januari 2023

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

3.1 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022

Capaian kinerja indikator makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah daerah secara umum. Ada beberapa indikator yang menjadi tolok ukur capaian kinerja makro, diantaranya: Laju Pertumbuhan Ekonomi, Presentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, Koefisien Gini (Gini Ratio), Indeks Pembangunan Manusia, dan Produk Domestik Regiobal Bruto (PDRB) Perkapita.

Adapun capaian kinerja indikator makro Kabupaten Manggarai tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Manggarai
Tahun 2020 - 2022

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,89	1,30	2.21
2	Presentase Penduduk Miskin	%	20,34	20,48	19.84
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,09	3,70	3.50
4	Koefisien Gini (Gini Ratio)	angka	0,295	0,308	0,291
5	Indeks Pembangunan Manusia	-	64,54	65,01	65.83
6	Laju Inflasi	%	-	0,55	6,25

Sumber : MDA-BPS Kab. Manggarai & Prov. NTT Dalam Angka-BPS NTT, 2023

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

   Sesuai data Manggarai Dalam Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2022 adalah 2,21% mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 1,30 persen. Secara umum, sebagian besar kategori yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun 2021, bahkan

banyak sektor yang di tahun lalu memiliki laju pertumbuhan negatif kembali menjadi positif.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai. Sektor tersebut mengalami percepatan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yaitu menjadi 3,57 persen. Percepatan laju pertumbuhan tidak hanya terjadi pada sektor pertanian namun juga terjadi di kategori lain. Beberapa sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan Sepeda Motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, adminsitrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial dan jasa lainnya.

Walaupun banyak sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2021, namun masih ada sektor yang mengalami kontraksi dan penurunan pertumbuhan. Beberapa sektor tersebut diantaranya pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kostruksi, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan dan kegiatan sosial.

Sektor yang pertumbuhannya tertinggi di tahun 2022 yaitu sektor penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 19,03 persen. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua yaitu sektor listrik dan gas sebesar 9,08 persen. Sektor ketiga yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan pertumbuhan sebesar 6,75 persen. Sementara itu, kategori dengan kontraksi pertumbuhan terbesar adalah jasa jasa pendidikan yaitu dengan pertumbuhan -0,15 persen disusul konstruksi dengan pertumbuhan -0,07 persen.

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai dan
Perbandingan dengan Kabupaten terdekat dan Provinsi NTT

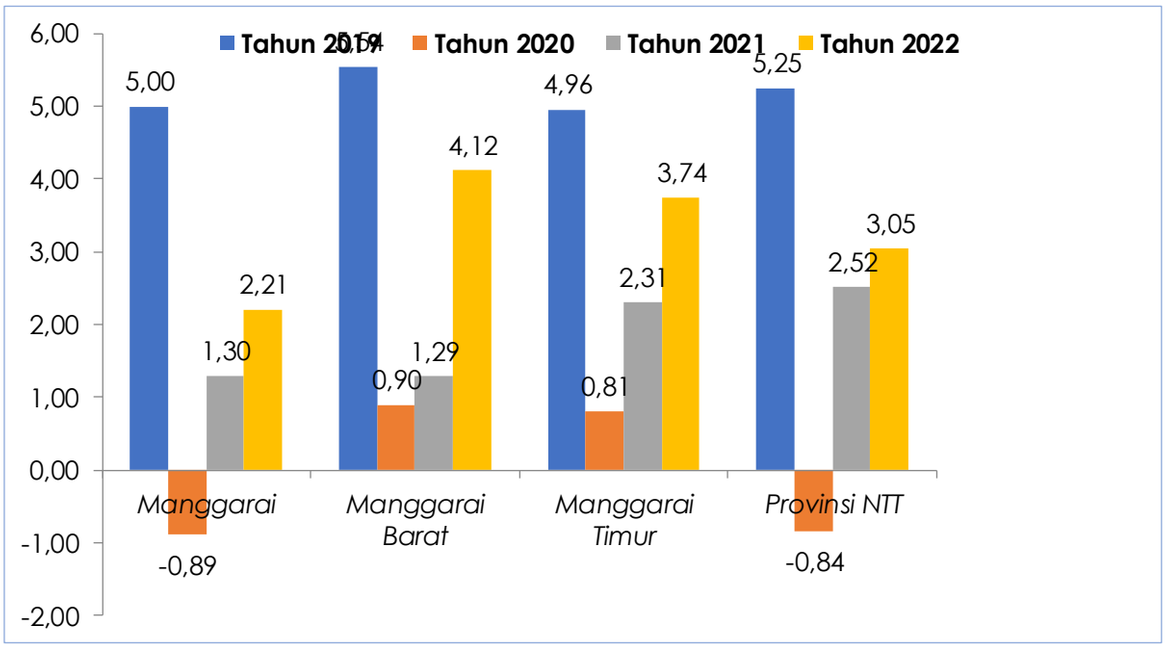

Sumber : Prov. NTT Dalam Angka-BPS Provinsi NTT, 2023

Berdasarkan grafik tersebut di atas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2022 merupakan pertumbuhan yang terendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Provinsi NTT.

2. Persentase Penduduk Miskin

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Manggarai yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Mangarai tahun 2022 sebesar 19,84% atau sekitar 69,68 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2020-2022 berfluktuatif dimana pada tahun 2020 tingkat kemiskinan mencapai 20,24% naik menjadi 20,48% tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 19,84% di tahun 2022.

Gambar 3.2
Angka Kemiskinan Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2022

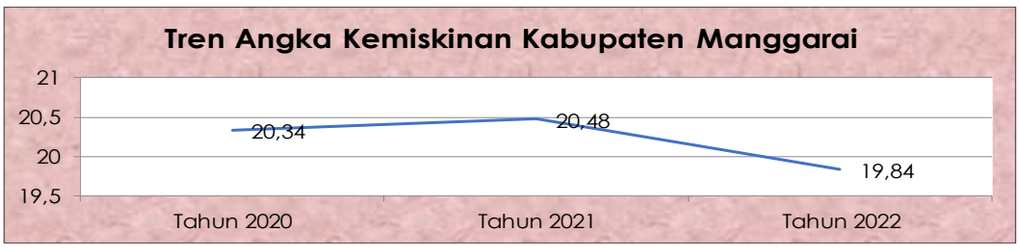

Sumber : MDA-BPS Kab. Manggarai & Prov. NTT Dalam Angka-BPS NTT, 2023

Tabel 3.2
Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Manggarai dan Perbandingan dengan Kabupaten Terdekat
Tahun 2020-2022

No	Tahun	Manggarai		Manggarai Barat		Manggarai Timur	
		Penddk Miskin (Ribu Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)	Penddk Miskin (Ribu Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)	Penddk Miskin (Ribu Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)
1	2020	69.52	20,34	49.40	17,71	76.69	26,52
2	2021	71.03	20,48	51.15	17,92	77.17	26,50
3	2022	69.68	19,84	49.95	17,15	74.55	25,35

Sumber : MDA-BPS Kab. Manggarai & Prov. NTT Dalam Angka-BPS NTT, 2023

Berdasarkan tabel di atas, presentase jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten Manggarai Barat dan lebih rendah dari Kabupaten Manggarai Timur.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam rangka pengentasan kemiskinan atau mengurangi indikator ciri-ciri kemiskinan antara lain bantuan bahan bangunan rumah, sambungan listrik gratis, program Hibah Air Minum Bersih dan lain-lain.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran } (6.616 \text{ Org})}{\text{Jumlah Angkatan Kerja } (189.198 \text{ Org})} \times 100$$

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun s/d 64 Tahun) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penggangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Manggarai yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi NTT tahun 2022 sebesar 3,50% atau turun 0,20 point dibanding tahun 2021 yang mencapai 3,70%. Angka ini diperoleh dari jumlah pengangguran tahun 2022 sebanyak 6.616 orang dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 189.198 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mangarai 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 4,09% tahun 2020 menjadi 3,50% di tahun 2022 dan diharapkan terus mengalami penurunan di tahun-tahun yang akan datang. TPT Kabupaten Manggarai tahun 2022 masih lebih rendah dari Provinsi NTT sebesar 3,54%.

Gambar 3.3
TPT Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2022

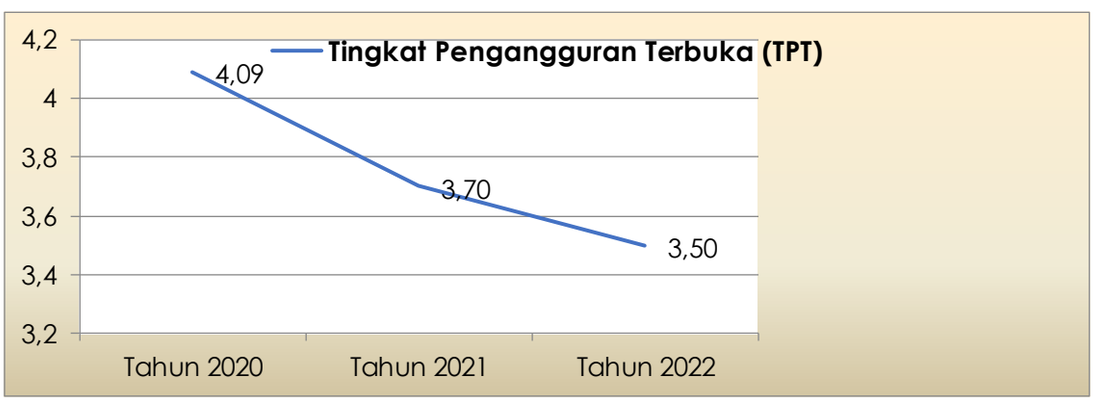

Sumber : MDA-BPS Kab. Manggarai & Prov. NTT Dalam Angka-BPS NTT, 2023

Strategi perbaikan kinerja dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Manggarai :

1. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan pencari kerja sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja.
2. Mendorong penciptaan wirausaha/lapangan kerja/kesempatan kerja baru.
3. Menjalin kerja sama dengan perusahaan berskala nasional agar membuka dan memberi kesempatan lowongan pekerjaan.
4. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi yang sebesar-besarnya di Kabupaten Manggarai.

4. Koefisien Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah, nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat, dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan tinggi.

Angka realisasi Indeks Gini atau Gini Ratio yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai tahun 2023 sebesar 0,291.

Gambar 3.4
Index Gini Kabupaten Manggarai
2020-2023

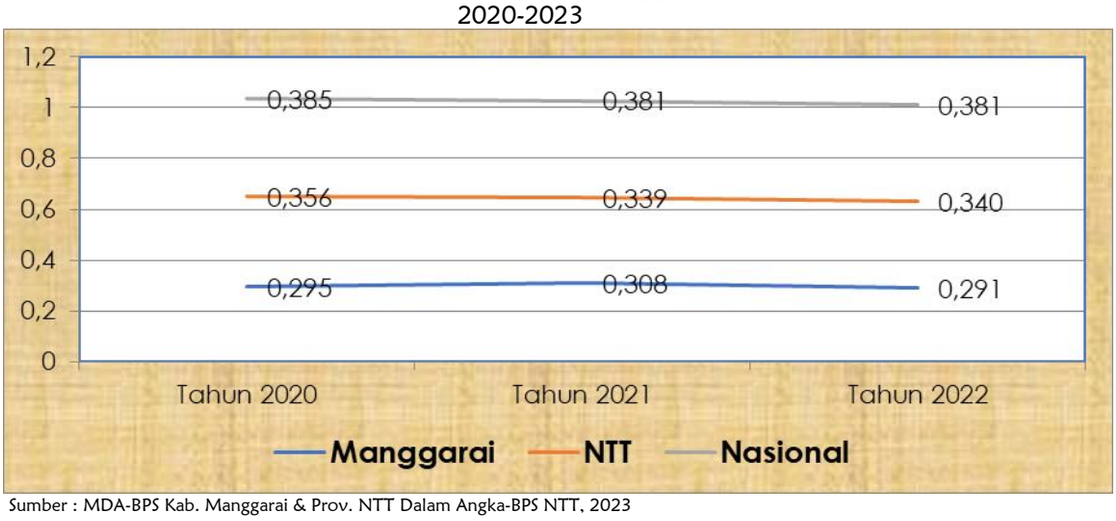

Sumber : MDA-BPS Kab. Manggarai & Prov. NTT Dalam Angka-BPS NTT, 2023

Indeks Gini Kabupaten Manggarai dalam kurun 2020-2022 berfluktuatif dari 0,295 tahun 2020 naik menjadi 0,308 tahun 2021 dan kembali turun menjadi 0,291 tahun 2022. Realisasi 0,291 tersebut masih dalam kategori ketimpangan rendah dan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks gini Provinis NTT yang mencapai 0,340 dan Nasional 0,381 di tahun yang sama.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan indeks gini, melalui peningkatan dan pemerataan ekonomi serta peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

5. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang diukur dari tiga dimensi dasar yaitu umur Panjang dan sehat yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) saat kelahiran, pengetahuan diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) serta standar hidup layak yang diukur dengan kemampuan daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terus menunjukkan kinerja yang positif. Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Mangarai berada pada indeks 64,54 meningkat menjadi 65,01 pada tahun 2021 dan tahun 2022 mencapai 65,83. IPM Kabupaten Manggarai menempati urutan ke-7 dari 22 kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. **PDRB Per Kapita**

Angka PDRB perkapita menunjukan rata-rata PDRB untuk setiap penduduk suatu daerah. PDRB perkapita yang tinggi menunjukan semakin baiknya perekonomian rata-rata penduduk di daerah tersebut. Sebaliknya angka PDRB yang semakin rendah menunjukan semakin rendah pula rata-rata tingkat perekonomian penduduknya. PDRB Perkapita Kabupaten Manggarai tahun 2022 sesuai Data Provinsi NTT Dalam Angka yang dirilis BPS Provinsi NTT Tahun 2023 adalah Rp.9.750.

Gambar 3.5
PDRD Perkapita (ADHK Ribu Rupiah) Kabupaten Manggarai
Tahun 2019-2022

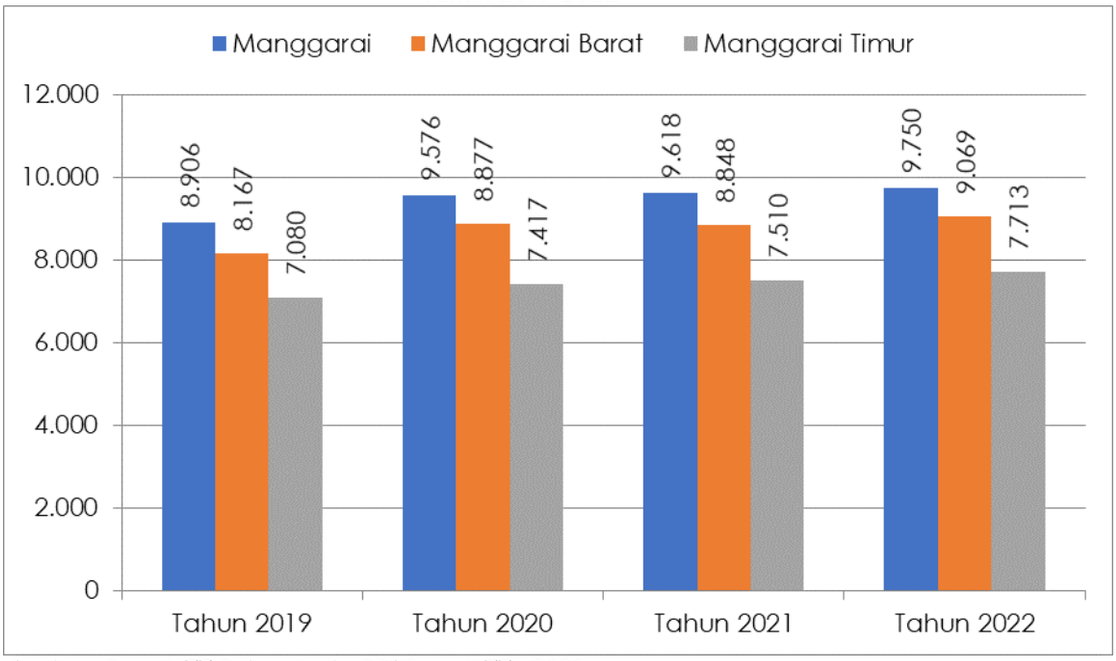

Sumber : Prov. NTT Dalam Angka-BPS Prov. NTT, 2023

PDRB Perkapita (ADHK Ribu Rp.) Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2019-2022 terus mengalami peningkatan dan berada di atas atau lebih besar jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur.

7. Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Inflasi kabupaten/kota di Provinsi NTT dihitung berdasarkan data yang dirilis BPS yang diperoleh dari 3 (tiga) kota inflasi yaitu Kota Kupang, Waingapu dan Kota Maumere. Untuk Kabupaten Manggarai atau Kota Ruteng, laju inflasi diperoleh berdasarkan data inflasi kota Maumere, Provinsi NTT.

Inflasi Kabupaten Manggarai tahun 2022 sesuai data yang rilis BPS Provinsi NTT tahun 2023 menurut wilayah inflasi kota Maumere adalah 6,25%, meningkat sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang

mencapai 0,55%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok transportasi sebesar 28,13%; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,21%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,82%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,90%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 5,13%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/rekreasi sebesar 5,09%; kelompok kesehatan sebesar 1,70%; kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 1,35%; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,83%; kelompok pendidikan sebesar 0,00% dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,61%.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022

Untuk mencapai visi dan misi maka ditetapkan indikator dan target RPJMD 2021-2026 yang harus dicapai. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. IKU Daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian target kinerja dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Manggarai.

Untuk kemudahan membaca tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan capaian indikator sasaran, dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sebagai berikut:

- ≥ 100 : Memuaskan
- $85 \leq 99$: Sangat Baik
- $70 \leq 84$: Baik
- $50 \leq 69$: Cukup
- < 50 : Kurang

Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 diuraikan pada tabel 3.5.

Tabel 3. 5
Capaian IKU
Pemerintah Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2022

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET		REALISASI TAHUN 2022	% CAPAIAN	
			TAHUN 2022	AKHIR RPJMD		TAHUN 2022	AKHIR RPJMD
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	66,24	69,30	65,83	99,38	94,99
2	Prevalensi Stunting	Persen	19,40	9,40	16,24	116,30	27,27
3	Angka PMKS	Angka	19.089	17.089	16.299	85,38	95,38
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	65,84	66,02	64,58	98,09	97,82
5	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Angka	97,12	97,12	54,18	144,21	144,21
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,93	5,23	2,21	44,83	42,26
7	PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)	Ribu Rp per penduduk	10.125	11.706	9.750	96,30	83,29
8	Indeks Gini	Angka	0,289	0,276	0,291	99,31	94,57
9	Tingkat Kemiskinan	Persen	19,47	17,12	19,84	98,10	84,11
10	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,601	0,650	0,618	102,83	95,08
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	81,36	82,16	72,98	89,70	88,83
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai / Predikat	50,10 (CC)	60,10 (B)	53,27 (CC)	106,33	88,64
13	Nilai SAKIP	Angka	63,10	68,00 (B)	63,90 (B)	101,27	93,97
14	Opini BPK	Peringkat	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00
	RATA-RATA					**98,72**	**87,89**
	KATEGORI					SANGAT BAIK	SANGAT BAIK

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai (LAKIP 2022), Jan 2023

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap target yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan diperoleh rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2022 adalah 87,89% dengan kategori SANGAT BAIK. Capaian tersebut merupakan hasil perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan dengan realisasi tahun 2022.

3.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11 urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pangan, Pertanahan; Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan yaitu Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan.

3.3.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. **Urusan Pendidikan**

   a) **Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja**

   Dalam perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, untuk urusan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai menetapkan sasaran strategis yaitu *Meningkatnya Akses, Kualitas dan Daya Saing Pendidikan*, dengan indikator kinerja dan capaian seperti dalam tabel 3.6

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
Tahun 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2021			2022			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
1.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,61	7,61	100	7,61	7,62	100,13	BPS
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,69	13,69	100	13,53	13,70	101,26	BPS
3.	Rata-rata Nilai Ujian	Nilai	56,40	56,40	100	56,42	73,47	130,21	Dinas PPO
	Rata-rata				**100**			**110,53**	
	Kategori							**Memuaskan**	

Sumber: Dinas PPO Kabupaten Manggarai, Januari 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

  Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat Pendidikan Dasar diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

  Rata-rata lama sekolah Kabupaten Manggarai selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu 7,37 pada tahun 2020, meningkat menjadi 7,61 pada tahun 2021 dan 7,62 pada tahun 2022. Angka ini menunjukan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas sudah sampai pada pendidikan SMP Kelas 1 Semester 2.

  Ini menggambarkan kualitas sumber daya manusia Manggarai semakin baik sejalan dengan semakin tingginya jenjang Pendidikan yang telah dicapai penduduk Manggarai. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Manggarai yang lebih baik. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Manggarai selama 3 (tiga) tahun terakhir, dapat diihat pada gambar 3.6

Gambar 3.6
Rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Manggarai
Tahun 2020 s/d 2022

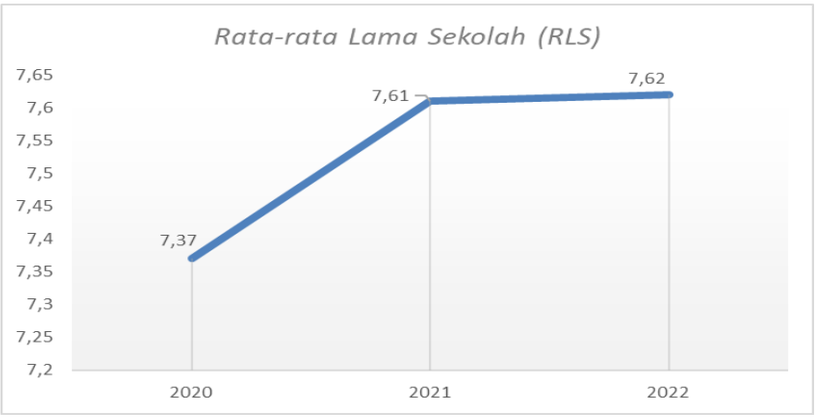

Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai, Januari 2023

- Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu dimasa mendatang. Indikator kinerja Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

  Tujuan dari Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem Pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya Pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. HLS penduduk Manggarai terus meningkat selama periode 2020-2022, yaitu 13,41 tahun 2020, 13,69 tahun 2021 dan 13,7 tahun 2022 yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan Pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D2. Meningkatnya HLS menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk Manggarai yang sekolah.

Gambar 3.7
Harapan lama sekolah (HLS) di Kabupaten Manggarai
Tahun 2020 s/d 2022

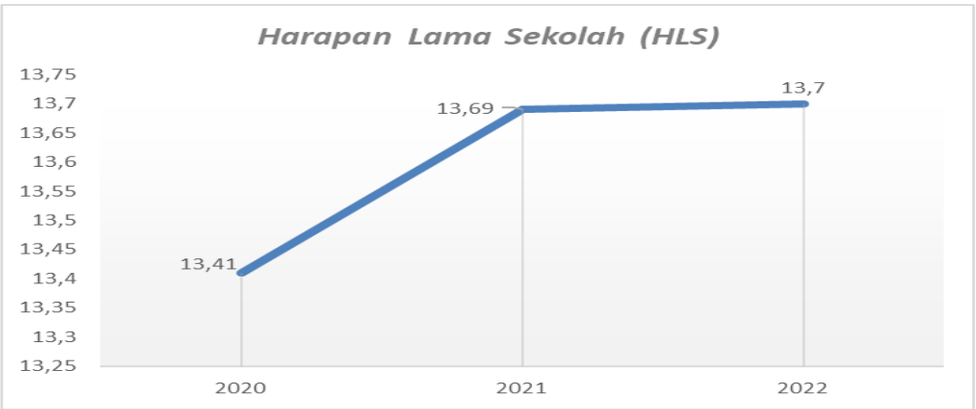

Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai, Januari 2023

- **Rata-rata Nilai Ujian**

  Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.

  Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar.

  Penentuan standar yang meningkat diharapkan akan mendorong peningkatan mutu pendidikan, yang dimaksud dengan penentuan standar pendidikan adalah penentuan nilai batas (*cut off hiscore*). Seseorang dikatakan sudah lulus/kompeten bila telah melewati nilai batas tersebut berupa nilai batas antara peserta didik yang sudah menguasai kompetensi tertentu dengan peserta didik yang belum

menguasai kompetensi tertentu. Bila itu terjadi pada ujian nasional atau sekolah maka nilai batas berfungsi untuk memisahkan antara peserta didik yang lulus dan tidak lulus disebut batas kelulusan, kegiatan penentuan batas kelulusan disebut *standard setting*.

Manfaat pengaturan standar ujian akhir:

- Adanya batas kelulusan setiap mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi minimum.
- Adanya standar yang sama untuk setiap mata pelajaran sebagai standar minimum pencapaian kompetensi.

  Rata-rata nilai ujian di Kabupaten Manggarai tahun 2022 disajikan dalam table 3.7 dan gambar 3.8

Tabel 3.7
Rata-rata Nilai Ujian Tahun 2022

NO	JENJANG	MATA PELAJARAN				RATA-RATA
		BINDO	BING	MATEK	IPA	
1	SD	72,94	-	69,56	72,05	71,52
2	SMP	77,29	75,35	74,02	74,97	75,41
	Rata-rata Nilai Ujian					73,47

Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai, Januari 2023

Grafik 3.8
Grafik Rata-Rata Nilai Ujian di Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

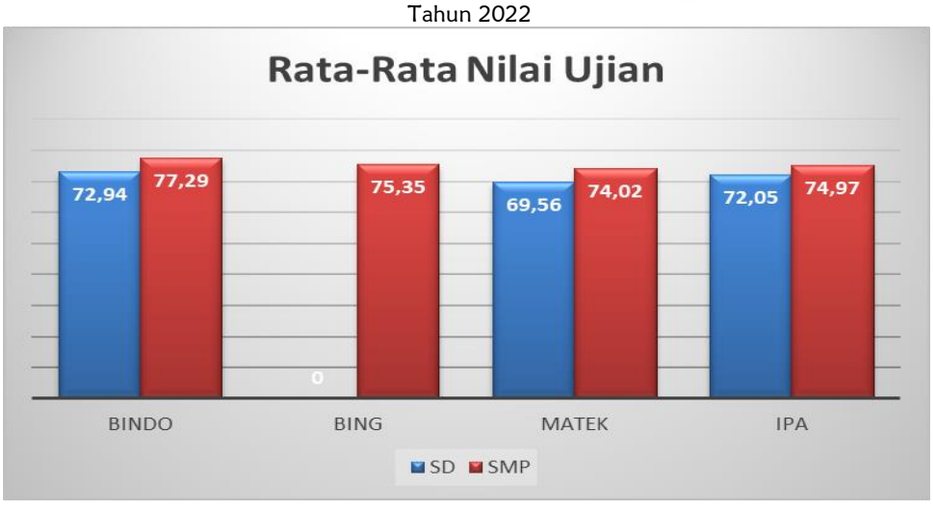

Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai, Januari 2023

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022 untuk Urusan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai melaksanakan 4 program dan 13 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.363.940.902.420**,- terealisasi sebesar **Rp.339.039.935.590**,- atau sebesar **93,16%.** Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8
Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**349.632.653.746**	**324.753.398.537**	**92,88**
	Belanja Pegawai	235.853.662.814	217.244.019.885	92,1
	Belanja Barang dan Jasa	23.504.532.291	21.542.664.298	91,7
	Belanja Hibah	89.699.458.641	85.391.729.354	95,20
	Belanja Bantuan Sosial	575.000.000	574.985.000	100
2.	**Belanja Modal**	**14.308.248.674**	**14.286.537.053**	**99,8**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.459.315.840	1.457.719.539	99,9
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.848.932.834	12.828.817.514	99,8
	TOTAL	**363.940.902.420**	**339.039.935.590**	**93,16**

Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Permasalahan	Solusi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96%			237.063.995.714	218.274.509.139	92	-	-
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan dapodik; Terselenggaranya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi; Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	2 Buku; 1 Tahun ; 1 Dokumen	2 Buku; 1 Tahun ; 1 Dokumen	100	492.424.800	435.872.568	89	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Permasalahan	Solusi
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (renja, renstra, KUA PPAS, LKT, RKT dan profil pendidikan)	5 dokumen	5 dokumen	100	202.375.600	183.251.400	91	Disesuaikan dengan kondisi riil	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100	35.037.500	34.017.500	97	-	-
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penyususnan DPA SKPD dan hasil koordinasi penyususnan DPA SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100	70.129.200	61.801.168	88	-	-
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan DPA perubahan SKPD dan laporan hasil koordinais penyusunan perubahan DPA SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100	145.450.000	118.870.000	82	-	-
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, LKPJ,R KPD)	4 dokumen	4 dokumen	100	39.432.500	37.932.500	96	-	-
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**terlaksananya operasional dan administrasi keuangan; tersedianya gaji PNS dan P3K**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**235.841.583.714**	**217.223.650.945**	**92**	-	-
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN; jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2283 orang; 604 orang	2283 orang; 604 orang	100	235.635.962.814	217.042.769.885	92	-	-
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	100	98.700.000	92.700.000	94	-	-
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100	13.730.000	5.620.000	41	-	-
1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	62.970.000	55.360.160	88	-	-
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah dokumen penyusunan laporan akhir tahun/ triwulan/ semesteran dan laporan koordinasi penyusunsn laporan bulanan/ triwulan/ semesteran	3 Laporan	3 Laporan	100	30.220.900	27.200.900	90	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Permasalahan	Solusi
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**terlaksananya pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD; tersedianya dokumen pencatatan aset daerah yang valid dan akuntabel**	**1 Tahun; 1 Dokumen**	**1 Tahun; 1 Dokumen**	**100**	**33.270.000**	**31.910.000**	**96**	-	-
1.3.1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan pembinaan,pengawasan dan pengendalian aset daerah /pendataan aset	1 Laporan	1 Laporan	100	33.270.000	31.910.000	96	-	-
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**terlaksananya kegiatan administrasi umum di kantor**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**461.447.200**	**408.418.617**	**89**	-	-
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi lisrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Tahun/ Paket	1 Tahun/ Paket	100	27.376.500	22.531.062	82	-	-
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (alat tulis kantor dan peralatan kantor lainnya (printer, proyektor dll)	3 jenis /paket	3 jenis /paket	100	110.723.700	110.707.499	100	-	-
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (makand dan minum kantor)	70 OM			77.670.000	35.985.000	46	-	-
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disedaiakan(foto copy bahan)	1 Paket	1 Paket	100	36.199.500	36.199.500	100	-	-
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan surat kabar	1 Jenis	1 Jenis	100	5.040.000	3.520.000	70	-	-
1.4.6	Penyediaan Bahan/Material	jumlah bahan material yang disediakan (alat kebersihan kantor)	1 tahun /paket	1 tahun /paket	100	8.312.500	8.312.500	100	-	-
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi daerah	16 kali/ laporan	16 kali/ laporan	100	196.125.000	191.163.056	97	-	-
1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**tersedianya mebel di kantor**	**100 Unit**			**75.000.000**	**74.999.900**	**100**	-	-
1.5.1	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	100 Unit	100 Unit	100	75.000.000	74.999.900	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Permasalahan	Solusi
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**telaksananya kegiatan operasional dan administrasi perkantoran**	**1 Tahun**			**111.270.000**	**50.657.109**	**46**	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (belanja surat menyurat	2 jenis/ laporan	2 jenis/ laporan	100	1.920.000	1.920.000	100	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14 laporan	14 laporan		109.350.000	48.737.109	45	-	-
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terpenuhinya pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan dan kendaraan kantor**	**1 Tahun**			**49.000.000**	**49.000.000**	**100**	-	-
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan	20 unit	20 unit	100	49.000.000	49.000.000	100	-	-
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD; Persentase SD dan SMP yang terakreditasi; Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**	**93,84 Angka; 75,30 %; 100 %**			**106.676.612.175**	**102.084.389.597**	**95,69**	-	-
2.1	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Tersedianya sarana prasarana pendidikan jenjang SD; tersedianya siswa yang berprestasi dan berkompetensi; Meningkatnya Rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, rata-rata nilai ujian**	**1 Tahun**			**53.800.381.700**	**51.745.063.528**	**96,18**	-	-
2.1.1	Pembangunan USB	jumlah sekolah baru yang telah dibangun	1 Unit	1 Unit	100	89.639.207	89.179.207	99		
2.1.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	jumlah ruang kelas baru yang bertambah	5 ruang	5 ruang	100	1.118.165.367	1.065.739.341	95	Keterlambatan pembayaran 5% dan 100% RKB SDK Ruteng 2 (DAK), konsultan pengawas 100% RKB (DAU)	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Permasalahan	Solusi
2.1.3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah ruang guru yang telah dibangun	1 ruang	1 ruang	100	245.700.000	243.550.000	99	-	-
2.1.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	jumlah ruang UKS yang telah dibangun	2 ruang	2 ruang	100	247.185.800	245.705.800	99	-	-
2.1.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun	2 ruang	2 ruang	100	459.327.015	458.847.015	100	-	-
2.1.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah /jamban yang telah dibangun	13 Paket	13 Paket	100	1.673.900.901	1.636.320.901	98	-	-
2.1.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	jumlah ruang kelas yang telah direhabilitasi sedang/berat	13 ruang	13 ruang	100	1.343.214.959	1.334.074.945	99	-	-
2.1.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 ruang	1 ruang	100	41.183.900	41.013.900	100	-	-
2.1.9	Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah mebel sekolah yang tersedia	15 paket	15 paket	100	186.631.700	185.271.700	99	-	-
2.1.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	jumlah sekolah yang mengelola Dana BOS sesuai dengan ketentuan	167 sekolah	167 sekolah	100	79.910.000	70.840.000	89	-	-
2.1.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	13 Paket	13 Paket	100	1.656.440.000	1.648.650.000	100	-	-
2.1.12	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan ujian/proses belajar	255 sekolah	255 sekolah	100	61.540.000	54.210.000	88	-	-
2.1.13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah siswa yang menerima bantuan beasiswa; jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetensi lomba akaedemik dan nonakademik	175 siswa; 282 Siswa	175 siswa; 282 Siswa	100	291.213.900	284.722.139	98	-	-
2.1.14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah sekolah yang menerima dana BOS SD	248 sekolah	248 sekolah	100	46.306.328.951	44.386.938.580	95,85	-	-
2.2	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama**	**Meningkatnya Rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, rata-rata nilai ujian, akses dan kualitas pendidikan; tersedianya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP**	**1 Tahun**			**43.772.266.380**	**42.311.312.211**	**96,66**	-	-
2.2.1	Penambahan Ruang Kelas Baru	jumlah ruang kelas baru yang bertambah	16 ruang	16 ruang	100	3.867.287.150	3.835.797.150	99	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Permasalahan	Solusi
2.2.2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah ruang guru /ruang ekpala sekolah yang dibangun	1 ruang	1 ruang	100	611.525.812	607.665.812	99	-	-
2.2.3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	jumlah ruang UKS yang telah dibangun	2 ruang	2 ruang	100	356.330.446	352.635.446	99	-	-
2.2.4	Pembangunan Laboratorium	jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun	6 ruang	6 ruang	100	3.877.973.974	3.865.483.974	100	-	-
2.2.5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarana prasarana sekolah yang telah dibangun	10 ruang	10 ruang	100	1.421.002.062	1.376.399.582	97	Keterlambatan pembayaran 5% pekerjaan fisik SMPN 12 Ruteng (DAU)	
2.2.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	jumlah ruang kelas yang telah direhabilitasi	8 ruang	8 ruang	100	1.051.661.687	1.030.424.556	98	Keterlambatan pembayaran 5% pekerjaan fisik SMPN 1 satarmese (DAU)	
2.2.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	jumlah ruang perpustakaan yang telah di rehabilitasi sedang/berat	1 ruang	1 ruang	100	211.469.400	203.789.200	96	-	-
2.2.8	Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah mebel sekolah yang tersedia	30 paket	30 paket	100	1.057.696.740	1.035.423.540	98	-	-
2.2.9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jjumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	5 paket	5 paket	100	243.623.800	228.288.000	94	-	-
2.2.10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah sekolah yang menyelenggarakan ujian; jumlah siswa penerima bantuan bagi siswa kurang mampu jenjang SMP	85 sekolah; 125 siswa	85 sekolah; 125 siswa	100	280.950.000	272.690.000	97	-	-
2.2.11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetensi kegiatan FLSN dan KSN tingkat Kabupaten Manggarai,	204 siswa	204 siswa	100	117.027.000	112.447.000	96	-	-
2.2.12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah sekolah SMP yang menerima dana BOS Reguler jenjang SMP	83 sekolah	83 sekolah	100	30.650.463.309	29.365.012.951	95,80	-	-
2.2.13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS SMP	85 orang	85 orang	100	25.255.000	25.255.000	100	-	-
2.3	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**APK PAUD; Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD**	**49,66 Angka; 100 %**			**6.739.740.114**	**6.124.957.958**	**90,88**	-	-
2.3.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	jumlah ruang kelas yang dibangun	2 Ruang	2 Ruang	100	371.319.214	369.779.214	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Permasalahan	Solusi
2.3.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	jumlah alat praktik dan peraga PAUD yang tersedia	2 paket	2 paket	100	54.657.000	52.620.000	96	-	-
2.3.3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	jumlah lembaga PAUD yang dibina ; jumlah lembaga peneerima dana Hibah	300 lembaga; 2 Lembaga	300 lembaga; 2 Lembaga	100	367.447.800	363.223.744	99	-	-
2.3.4	Pengelolaan Dana BOP PAUD	jumlah PAUD yang mengelola dana BOP	252 sekolah	252 sekolah	100	5.946.316.100	5.339.335.000	*89,79 %*	Masih rekon dengan badan keunagan dan BPKP	
2.4	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan**	**100%**			**2.364.223.981**	**1.903.055.900**	**80,49**	-	-
2.4.1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	jumlah kursus yang diselenggarakan dalam kegaitan proses belajar non formal; jumlah peserta yang mengikuti kursus	5 kursus; 200 orang	5 kursus; 200 orang	100	1.126.369.254	1.123.281.900	100	-	-
2.4.2	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	jumlah sekolah non formal/kesetaraan yang mengelola dana BOP	379 sekolah	379 sekolah	100	1.237.854.727	779.774.000	62,99	-	-
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal; Persentase siswa yang menjuarai perlombaan**	**40,70 %; 1,75 %**			**72.718.100**	**70.427.700**	**97**	-	-
3.1	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**terlaksananya kurikulum PAUD (lokal)**	**1 paket**	**1 paket**	**100**	**72.718.100**	**70.427.700**	**97**	-	-
3.1.1	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	jumlah silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	1 dokumen	1 dokumen	100	72.718.100	70.427.700	97	-	-
4	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi; Persentase tenaga pendidik yang bersertifikat**	**26,45 %; 56,12 %**			**20.127.576.431**	**18.610.609.154**	**92**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Permasalahan	Solusi
4.1	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**terlaksananya penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan; meningkatnya guru dan tenaga pendidik yang bersertifikasi**	**78 orang; 1142 PTK**	**78 orang; 1142 PTK**	**100**	**20.127.576.431**	**18.610.609.154**	**92**	-	-
4.1.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar,PAUD,dan nonformal/ kesetaraan; jumlah penerima tamsil non PNS (PAUD, TK,SD, SMP)	1 dokumen ; 3598 guru	1 dokumen; 3598 guru	100	19.890.136.431	18.422.329.154	93	-	-
4.1.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah pengawas yang mendapatkan Uang Jalan Tetap (UJT), jumlah laporan hasil pelaksanaan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidkan dasar, PAUD dan kesetaraan	42 pengawas ; 1 laporan	42 pengawas; 1 laporan	100	237.440.000	188.280.000	79	Disesuaikan dengan kondisi riil, dan adanya pengawas yang sudah pensiun	
	Total					**363.940.902.420**	**339.039.935.590**	**93,16**		

Sumber: Dinas PPO Kabupaten Manggarai, Januari 2023

2. Urusan Kesehatan

A. Sub Urusan Dinas Kesehatan

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target Dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2022 menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan 5 (lima) indikator kinerja. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)	110,25/100.000 KH	192,12/100.000 KH	25.74	76,5/100.000 KH	116,49/100.000 KH	47,72
2.	Menurunkan Angka Kematian bayi (AKB)	12,93/1.000 KH	15,37/1.000 KH	81.13	12,36/1.000 KH	16,31/1.000 KH	68,48
3.	Menurunkan Angka Kesakitan	-	24,4	24,4	22,7%	23,76%	95,28
4.	Menurunkan Angka Kematian Anak dan Balita	0/1.000 KH	0	100	0	0	100
5.	Persentase Kecamatan Terverifikasi Melaksanakan 5 Pilar STBMGESI	2 Kec	16,67%	16,67	100%	16,67%	16,67
	Rata-rata						**65,63**
	Kategori					**Cukup**	

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Manggarai, Januari 2023

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

❖ **Indikator Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)**

Angka Kematian Ibu atau *Maternal Mortality Rate* adalah jumlah kematian ibu sebagai akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apapun yang berkaitan dengan atau

diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan (misalnya kecelakaan mobil) tidak digolongkan sebagai kematian ibu.

Realisasi AKI tahun 2022 adalah 116,49/100.000 Kelahiran Hidup atau terdapat 7 kasus kematian seorang ibu dari 6.009 kelahiran. Realisasi 116,49/100.000 KH dari target 76,05/100.000 KH maka tingkat capaian kinerjanya adalah 47,72%.

Namun jika dilihat dari Kasus kematian ibu tahun 2022 sebanyak 7 kasus ini, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 12 kasus dari 6.246 Kelahiran Hidup atau mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 21,98% dari 25,74% menjadi 47,72% pada tahun 2022.

Realisasi AKI tahun 2020-2022, dapat dibaca pada tabel 3.11.

Tabel 3.11
Angka Kematian Ibu Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah KH	Kasus Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu
1	2020	6.325	5	79,05/100.000 KH
2	2021	6.246	12	192,12/100.000 KH
3	2022	6.009	7	116,49/100.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Manggarai, Januari 2023

Kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Manggarai tahun 2022 tersebar pada beberapa Puskesmas di Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12
Data Kematian Ibu di Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	JUMLAH KASUS	DESA
1	Ruteng	Cancar	346	0	
		Wae Mbeleng	275	0	
		Anam	166	0	
2	Rahong Utara	Nanu	208	1	
		Wangko	231	1	Compang Dari
3	Lelak	Ketang	215	1	Lelak
4	Wae Ri'i	Watu Alo	117	0	
		Bangka Kenda	295	0	
		Timung	190	0	
5	Langke Rembong	Kota Lao	569 493	1 0	Langgo
6	Cibal	Pagal	386	1	Bea Mese
		Bea Mese	170	1	
7	Cibal Barat	Wae Codi	307	0	
8	Reok	Reo	380	1	
9	Reok Barat	Wae Kajong	108	0	
		Loce	102	1	Wangkong

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	JUMLAH KASUS	DESA
		Lemarang	69	0	
10	Satar Mese	Iteng	193	0	
		Ponggeok	347	0	
		Langgo	91	0	
		Narang	173	0	
		Dintor	154	0	
11	Satar Mese Utara	Langke Majok	247	1	Kole
		Todo	177		
	TOTAL		**6.009**	**7**	
	AKI = 7/6.009x100.000 = 116,49				

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Manggarai, Januari 2023

Dari tabel di atas menunjukan, jumlah kasus kematian Ibu terbanyak berasal dari wilayah kerja Kecamatan Cibal sejumlah 2 kasus yaitu Puskesmas Pagal dan Puskesmas Beamese masing-masing 1 kasus. Sedangkan kecamatan lain kasus kematian yaitu Kecamatan Rahong Utara (Puskesmas Wangko sebanyak 1 kasus), Kecamatan Lelak (Puskesmas Ketang sebanyak 1 Kasus) Kecamatan Langke Rembong (Puskesmas Kota sebanyak 1 kasus) Kecamatan Reok (Puskesmas Reo sebanyak 1 kasus), Kecamatan Satar Mese Utara (Puskesmas Langke Majok sebanyak 1 kasus).

Berdasarkan data yang diperoleh, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Manggarai mengalami *fluktuasi* yang signifikan pada 5 (lima) tahun terakhir. Kasus kematian Ibu pada tahun 2018 sebanyak 6 kasus atau 98,36/100.000 KH dan pada tahun 2019, jumlah kematian ibu kembali meningkat menjadi 12 kasus atau 202,77/100.000 KH. Pada tahun 2020 jumlah kematian ibu mengalami penurunan menjadi 5 kasus atau 79,05/100.000 KH dan kembali meningkat ditahun 2021 yaitu 12 kasus atau 192,12/100.000 KH dan menurun kembali pada tahun 2022 menjadi 7 kasus atau 116.4/100.000 KH.

Faktor Utama Penyebab Kematian Ibu dari 7 kasus kematian tersebut adalah sebagai berikut:

- Hemoragic Post Partum (HPP) atau Perdarahan: sebanyak 5 kasus

  Hemoragic Post Partum adalah kehilangan darah ≥ 500 ml selama 24 jam pertama yang terjadi setelah kelahiran bayi,

sebelum, selama dan sesudah keluarnya plasenta (Oxorn & Forte, 2010). Kelima kasus tersebut, yaitu:

- Kasus kematian ibu dari wilayah Puskesmas Ketang Kecamatan Lelak;
- Kasus kematian ibu terjadi di puskesmas Langke Majok Kecamatan Satar Mese Utara;
- Kasus kematian ibu terjadi di puskesmas Reo Kecamatan Reok;
- Kasus kematian ibu dari Puskesmas Beamese wilayah Kecamatan Cibal;
- Kasus kematian ibu dari puskesmas Wangko wilayah Kecamatan Rahong Utara.

- Depresi dalam Kehamilan: 1 kasus

  Depresi adalah sebuah penyakit yang ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan dengan senang hati. Kasus kematian akibat Depresi terjadi diwilayah puskesmas Pagal Kecamatan Cibal.
- Ensefalopati Hepatikum (EH): 1 kasus

  Ensefalopati Hepatikum adalah sindrom neuropsikiatri yang dapat terjadi pada penyakit hati akut dan kronik berat dengan beragam manifestasi, mulai dari ringan hingga berat, mencakup perubahan perilaku, gangguan intelektual, serta penurunan kesadaran tanpa adanya kelainan pada otak yang mendasarinya. Kasus Kematian ibu dari Puskesmas Kota wilayah Kecamatan Langke Rembong, Ibu usia 40 tahun.

Penyebab lain dari kematian ibu yang terjadi disebabkan oleh karena faktor 4 Terlalu (Telalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan Terlalu Banyak) dan 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan, terlambat mencari tempat rujukan dan terlambat mendapat penanganan)

Banyak upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk menurunkan AKI antara lain:

1. Mendukung Upaya provinsi NTT melalui kegiatan Revolusi KIA yang mewajibkan semua Ibu bersalin untuk melahirkan di Fasilitas kesehatan memadai. Namun dari 6040 persalinan, masih ada 127 persalinan yang terjadi dirumah dan 77 persalinan ditolong oleh dukun.
2. Kabupaten Manggarai melalui dinas Kesehatan telah menyediakan Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) Kabupaten yang beralamat di Ngencung Kelurahan Bangka Nekang Ruteng.
3. Menyediakan Biaya Transportasi Rujukan Ibu dan Bayi Baru Lahir.
4. WAG/ Sistem Informasi Cepat terkait kasus kegawatdaruratan bersama Bidan Puskesmas dan Petugas RS.
5. Melaksanakan Kegiatan Supervisi Fasilitatif dan Pembinaan Pelayanan ANC, PNC dan Bayi Baru Lahir.
6. Menyediakan dana Jaminan Persalinan yang ditanggung daerah sampai dengan bulan Agustus dan selanjutnya didanai BPJS.

❖ **Indikator Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka Kematian Bayi (AKB) mencerminkan derajat kesehatan masyarakat yang sekaligus juga mencerminkan umur harapan hidup pada saat lahir. AKB yaitu jumlah kematian bayi (usia 0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup.

Pada tahun 2022, realisasi AKB adalah 16,31/1000 KH atau terdapat 98 kasus kematian bayi dari 6.009 kelahiran. Realisais 16,31/1000 KH tidak mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2022 yaitu 12,40/1000 KH dengan tingkat capaian kinerja 68,48%. Angka kematian bayi tahun 2022 sebanyak 98 kasus ini mengalami peningkatan sebanyak sebanyak 2 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 96 kasus.

Kematian Bayi yang terjadi di Kabupaten Manggarai tersebar pada beberapa Puskesmas di Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel 3.13.

Tabel 3.13
Sebaran Kematian Bayi Tahun 2022

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	LAHIR HIDUP	JUMLAH KASUS
1	Ruteng	Cancar	346	7
		Wae Mbeleng	275	3
		Anam	166	3
2	Rahong Utara	Nanu	208	3
		Wangko	231	2
3	Lelak	Ketang	215	5
4	Wae Ri'i	Watu Alo	117	2
		Bangka Kenda	295	5
		Timung	190	5
5	Langke Rembong	Kota	569	3
		Lao	493	4
6	Cibal	Pagal	386	9
		Bea Mese	170	2
7	Cibal Barat	Wae Codi	307	3
8	Reok	Reo	380	5
9	Reok Barat	Wae Kajong	108	1
		Loce	102	3
		Lemarang	69	1
10	Satar Mese	Iteng	193	3
		Ponggeok	347	11
		Langgo	91	0
		Narang	173	0
		Dintor	154	4
11	Satar Mese Utara	Langke Majok	247	6
		Todo	177	8
	TOTAL		**6009**	**98**
	AKB = 98/6009x1000 = 16,31/1000 KH			

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Manggarai, Januari 2023

Penyebab utama dari 98 kasus kematian bayi yang terjadi adalah Asfiksia, Prematur dan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), Pneumonia dan kelainan bawaan.

- Asfiksia merupakan keadaan dimana bayi tidak dapat bernapas spontan setelah bayi lahir. Bayi dengan riwayat gawat janin sebelum lahir umumnya akan mengalami asfiksia pada saat lahir. Masalah ini berhubungan erat dengan gangguan kesehatan ibu hamil, kelainan tali pusat, atau masalah yang mempengaruhi kesejahteraan bayi selama dan sesudah persalinan. Pada tahun 2022 ini, terdapat 45 kasus Kematian Bayi dengan penyebab Asfiksia.
- BBLR yaitu berat badan bayi baru lahir kurang dari 2500 gram yang ditimbang segera setelah lahir. Adapun penyebab BBLR

antara lain karena kelahiran prematur, faktor ibu seperti umur, paritas, dan gizi selama hamil, komplikasi kehamilan, kehamilan kembar, dan lain sebagainya. Pada umumnya, bayi yang lahir prematur/ kurang dari usia 37 minggu kehamilan memiliki berat lahir yang lebih rendah dari bayi normal. Kematian bayi dengan BBLR ada 9 kasus, 4 diantaranya karena prematuritas.

- Pneumonia yaitu kondisi dimana seseorang mengalami infeksi virus, bakteri dan jamur yang menimbulkan peradangan pada kantung udara disalah satu atau kedua sisi paru-paru. Kantung udara bisa berisi cairan atau pus (dahak purulent) yang dapat mengancam jiwa terutama pada bayi dan anak. Pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian pada 7 orang bayi.
- Kelainan bawaan merupakan kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul sejak kehidupan hasil konsepsi. Penyebabnya adalah faktor genetik dan mekanik, seperti infeksi kehamilan, konsumsi obat-obatan, radiasi, hormonal. Kelainan bawaan menjadi salah satu penyebab kematian pada 21 orang bayi.
- Sepsis adalah infeksi berat yang dapat menyebabkan komplikasi yang serius pada paru-paru, ginjal, otak dan pendengaran bahkan kematian. Sepsis menjadi salah satu penyebab kematian pada 2 orang bayi.
- Penyebab lain-lain seperti, Masalah Laktasi (3 Kasus), Febris (2 kasus), MAS (*Meconium Aspirasi Syndrom*) (4 kasus), Diare (1 kasus), gangguan pernapasan (1 kasus), gangguan pencernaan (2 kasus), dan Hepatitis (1 kasus), total 14 kasus.

Selain itu, faktor-faktor lain yang dapat menjadi penyebab kematian bayi adalah status gizi ibu hamil atau adanya penyakit penyerta ibu hamil, faktor lingkungan yang kurang mendukung ibu hamil, kurangnya pendidikan masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat serta akses pelayanan yang masih sangat terbatas. Disamping itu juga peran lintas sektor dalam pendampingan ibu

hamil dan pemberdayaan masyarakat dalam KIA yang belum optimal.

❖ **Indikator Angka Kesakitan**

Indikator Angka Kesakitan dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan yang membatasi aktifitas, dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2022, angka kesakitan di Kabupaten Manggarai tercatat sebesar 95,28% dari target 23,76%

Tabel 3.14
10 Patron Penyakit Terbesar Tahun 2022
di Kabupaten Manggarai

NO	PENYAKIT	%	JUMLAH
1	Penyakit infeksi saluran pernapasan atas	24,7	31.972
2	Penyakit pada SSTM otot dan jaringan pengikat	20,7	26.731
3	Penyakit tekanan arah tinggi	16,1	20.860
4	Penyakit kulit dan jaringan subkutan	5,4	6.967
5	Penyakit infeksi pada usus	5,3	6.907
6	Penyakit rongga mulut	4,2	5.481
7	Penyakit infeksi saluran pernapasan bawah	2,6	3.305
8	Penyakit pada saluran kencing	1,3	1.664
9	Kecelakaan dan keracunan	1,23	1.588
10	Penyakit virus	0,6	797
11	Penyakit lainnya	17,9	23.118
	Total	**100**	**129.390**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Manggarai, Januari 2023

Tabel di atas menunjukkan jumlah kasus yang menjadi keluhan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama di puskesmas sepanjang tahun 2022. Gambaran jumlah kasus ini lebih banyak dari jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, karena 1 orang pasien bisa mengalami lebih dari 1 keluhan kesehatan pada saat kontak dengan fasilitas kesehatan.

- **Indikator Angka Kematian Balita**

Angka Kematian Balita merupakan ukuran jumlah kasus kematian Balita dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama. Sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Manggarai tidak ditemukan kematian balita, sehingga capaian ini sesuai dengan target kinerja Tahun 2022 yaitu tanpa kematian Balita.

- **Indikator Persentase Kecamatan Terverifikasi Melaksanakan 5 Pilar STBM GESI**

STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan agar mencapai 5 pilar STBM GESI yang meliputi perilaku pilar 1) Stop Buang air besar sembarangan, pilar 2) cuci tangan pakai sabun, pilar 3) Pengelolaan air minum dan makanan dengan benar, pilar 4) Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan pilar 5) pengelolaan limbah cair rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melaksanakan 5 Pilar STBM GESI di 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Wae Ri'i dan Kecamatan Ruteng. Sementara 10 kecamatan lainnya baru melaksanakan 2 pilar STBM yang telah diverifikasi oleh Pokja AMPL Propinsi NTT dinyatakan berhasil mencapai 100 persen pada Pilar 1 yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan Pilar 2 yakni Cuci Tangan Pakai Sabun. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Dinas Kesehatan menggelar deklarasi 100 persen pelaksanaan Pilar 1 dan 2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (STBM GESI) yang dilaksanakan di Todo, Kecamatan Satar Mese Barat pada tanggal 4 Agustus Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Manggarai **berkomitmen** untuk melaksanakan 3 pilar lainnya dengan melibatkan masyarakat yang ada di wilayah kecamatan dan desa demi **mensukseskan kecamatan** yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI.

❖ **Penanganan Stunting**

Tingginya prevalensi *Stunting* merupakan permasalahan yang cukup serius di Kabupaten Manggarai. Pemerintah Kabupaten Manggarai berkomitmen melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan. Prevalensi Stunting merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 yang berkontribusi dan memberi dampak luas terhadap perubahan derajat kesehatan masyarakat. Penurunan *Stunting* memerlukan Intervensi Spesifik, Intervensi Sensitif dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah, pemerintah desa/kelurahan dan Pemangku Kepentingan

Sebagai salah satu lokus prioritas penurunan prevalensi *Stunting* di NTT, Kabupaten Manggarai menunjukkan prevalensi *Stunting* yang terus menurun. Pada pengukuran yang dilakukan bulan Agustus 2022, terdapat 4.313 balita terkategori stunting atau mencapai 16,2% dari total 26.563 balita usia 0-59 bulan yang diukur. Angka ini menurun sebanyak 2,7% dari pengukuran yang dilakukan bulan Agustus 2021, dimana terdapat 4.841 balita terkategori stunting atau mencapai 18,9% dari total 25.608 balita usia 0-59 bulan yang diukur.

Selengkapnya Prevalensi *Stunting* Kabupaten Manggarai tahun 2021 – 2022 disajikan pada tabel 3.15.

Tabel 3.15
Prevalensi *Stunting* 2021-2022

No	Tahun Pengukuran	Jumlah Balita Ditimbang dan Diukur Umur 0-59 Bulan	Jumlah Balita Stunting	%
1.	Agustus 2021	25.608	4.841	18,9
2.	Agustus 2022	26.563	4.313	16,2
3.	Februari 2023	27.223	3.886	14,3

Sumber: Dinkes Kabupaten Manggarai, 2023

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian Indikator Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Manggarai :

1. **Kegiatan Rembuk *Stunting* Kabupaten** yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Rembuk *stunting* adalah suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan, intervensi pencegahan, dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara Perangkat Daerah penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat.
2. ***Pembentukan Tim Peludes*** (Pembina Kelurahan dan Desa Bebas *Stunting*) dimana semua Perangkat Daerah masing-masing diberikan tanggung jawab untuk membina beberapa Desa/Kelurahan.
3. ***Lonto Leok*** yaitu kegiatan sarasehan atau penyuluhan kepada keluarga-keluarga di Desa/Keluarahan tentang upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.
4. Intervensi Spesifik, dengan kelompok sasaran, sebagai berikut:
    - Remaja, dengan kegiatan pemberian tablet tambah darah kepada remaja puteri.
    - Calon Pengantin, dengan kegiatan:
        - pemberian tablet tambah darah bagi calon pengantin wanita; dan
        - pemberian makanan bergizi bagi calon pengantin yang Kekurangan Energi Kronis (KEK).
    - Ibu Hamil
        - memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
        - mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
        - mengatasi kekurangan iodium;
        - menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
        - melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan seperti: diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis dan lain-lainnya

- Ibu Menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan, dengan kegiatan:
  - mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD;
  - mendorong pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
  - imunisasi bagi anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
  - menyediakan obat cacing;
  - menyediakan suplementasi zink;
  - melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
  - memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan seperti diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis dan lain-lainnya;
  - memberikan imunisasi lengkap;
  - pelayanan tata laksana gizi buruk;
  - pemberian tambahan asupan gizi bagi anak gizi kurang;
  - melakukan pencegahan dan pengobatan diare dan penyakit lainnya; dan
  - pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya

5. **Intervensi Sensitif**, dengan sasaran masyarakat umum, khususnya keluarga, dengan kegiatan:
   - menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
   - menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
   - memastikan masyarakat tidak buang air besar sembarangan (*Open Defecation Free-ODF*);
   - melakukan fortifikasi bahan pangan;
   - menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
   - menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
   - menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
   - memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;

- memberikan pendidikan anak usia dini universal;
- memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja;
- mencegah kehamilan yang tidak diinginkan;
- memberikan sosialisasi tentang *Stunting*;
- pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin minimal 3 (tiga) bulan sebelum menikah;
- menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian Indikator Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Manggarai:

1. **Sarana:** Belum semua Pustu/Posyandu memiliki alat ukur *anthtropometri*.
2. **Sumber Daya Manusia**
   - Jumlah tenaga gizi di Faskes masih kurang.
   - Belum semua petugas kesehatan memahami cara penggunaan *anthtropometri.*
3. **Anggaran**
   - Belum optimalnya ketersediaan anggaran di beberapa Perangkat Daerah untuk penurunan *stunting*.
   - Pada Tahun Anggaran 2022, beberapa perangkat Daerah terkait tidak menganggarkan program/kegiatan untuk penanganan *stunting*.
4. **Pola Asuh:** Masih banyak orang tua yang kurang/tidak memahami dan/atau kurang/tidak mempraktikkan pola asuh yang benar.

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

- **Pengelolaan Pendapatan**

  Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan, dapat dilihat pada tabel 3.16.

Tabel 3.16
Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan
Tahun 2022

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1.	**Retribusi Umum**	**437.555.000**	**366.384.200**	**88,73**
2.	**Dana JKN**	**16.371.691.987**	**10.596.304.870**	**64,72**
	- Dana JKN Non Kapitasi	1.555.812.100	1.772.926.900	113,96
	- Dana JKN di FKTP	14.815.879.887	8.823.377.970	59,55
	TOTAL	**16.809.246.987**	**10.962.689.070**	**65,22**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Manggarai, Jan 2023

- **Pengelolaan Belanja**

  Dinas Kesehatan melaksanakan 5 Program dan 14 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.193.030.580.834,-** realisasi sebesar **Rp.178.151.044.445,-** dengan tingkat capaian sebesar **92,29%.** Selengkapnya ringkasan anggaran Dinas Kesehatan disajikan pada tabel 3.17.

Tabel 3.17
Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**117.804.763.708**	**107.343.037.519**	**91,12**
	Belanja Pegawai	54.841.228.196	53.509.348.720	97,60
	Belanja Barang dan Jasa	62.713.535.512	53.583.688.799	85,44
	Belanja Hibah	250.000.000	250.000.000	100
2.	**Belanja Modal**	**75.225.817.126**	**70.808.006.926**	**94,68**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.091.910.090	24.225.009.040	92,84
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.133.907.036	46.582.997.886	94,81
	TOTAL	**193.030.580.834**	**178.151.044.445**	**92,29**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Tahun 2022

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Anggaran	Realisasi	%	Permasalahan	Solusi
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**					**54.997.359.603**	**53.644.646.324**	**97,54**	-	-
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah**					**95.205.059**	**56.549.000**	**59,40**	-	-
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Tahun	1 Tahun	100	93.493.059	54.837.000	58,65	-	-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD		9 laporan	9 laporan	100	1.712.000	1.712.000	100,00	-	-
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**53.687.715.144**	**52.581.465.000**	**97,94**	-	-
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		864 orang	837	96,88	53.200.098.244	52.110.285.720	97,98	-	-
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 dokumen	1 dokumen	100	401.950.000	386.000.000	96,03	-	-
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD		22 dokumen	22 dokumen	100	53.066.900	52.580.000	99,08	-	-
1.2.4	Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD		24 laporan	24 laporan	100	32.600.000	32.600.000	100,00	-	-
1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**350.856.400**	**304.640.083**	**86,83**	-	-
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4 laporan	4 laporan	100	4.040.000	4.040.000	100,00	-	-
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		23 paket	23 paket	100	16.000.000	14.000.000	87,50	-	-
1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		87.348 paket	87.348 paket	100	26.204.400	26.204.200	100,00	-	-
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2 dokumen			7.440.000	840.000	11,29	Penyediaan bahan bacaan berkurang sehinggatagihannya disesuaikan	Penyediaan bahan bacaan dar berbagai sumber khususnya bacaan atau jurnal tentang kesehatan

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Anggaran	Realisasi	%	Permasalahan	Solusi
1.3.5	Penyediaan Bahan/Material		26 paket	26 paket	100	67.482.000	67.482.000	100,00	-	-
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10 laporan			229.690.000	192.073.883	83,62	-	-
1.4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**200.583.000**	**178.681.165**	**89,08**	-	-
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1300 laporan	473 laporan	36,38	6.400.000	4.730.000	73,91	Menyesuaiakn dengan kebutuhan	
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik		4 laporan	4 laporan	100	169.600.000	149.470.165	88,13	-	-
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		23 laporan	23 laporan	100	24.583.000	24.481.000	99,59	-	-
1.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**663.000.000**	**508.293.256**	**76,67**	-	-
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		457 unit			663.000.000	508.293.256	76,67	-	-
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**137.424.654.731**	**124.006.336.721**	**90,24**	-	-
2.1	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					**78.605.498.989**	**74.905.097.755**	**95,29**	-	-
2.1.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		1 unit	1 unit	100	63.017.890.083	60.931.920.833	96,69	-	-
2.1.2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		2 unit	2 unit	100	4.101.626.436	3.447.058.136	84,04	-	-
2.1.3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		25 paket	21 paket	84,00	5.835.609.406	5.835.609.406	100,00	-	-

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Anggaran	Realisasi	%	Permasalahan	Solusi
2.1.4	Pengadaan Obat, Vaksin		25 paket	25 paket	100	3.110.922.938	2.540.132.167	81,65	-	-
2.1.5	Pengadaan Bahan Habis Pakai		25 paket	25 paket	100	2.539.450.126	2.150.377.213	84,68	-	-
2.2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**58.637.176.742**	**48.919.289.966**	**83,43**	-	-
2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		7616 orang	5109	67,08	319.521.000	239.694.762	75,02	-	-
2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		7270 orang	5794 orang	81,33	1.104.176.403	639.549.303	57,92	-	-
2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		32058 orang	35816 orang	111,72	213.349.900	208.090.900	97,54	-	-
2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		21876 orang	10217 orang	46,70	100.000.000	93.550.000	93,55	-	-
2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		7515 orang	5794 orang	77,10	127.840.000	127.820.000	99,98	-	-
2.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		18 dokumen	18 dokumen	100	1.016.527.000	768.564.500	75,61	-	-
2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		2 dokumen	2 dokumen	100	41.480.000	35.556.000	85,72	-	-
2.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		5 dokumen	5 dokumen	100	258.520.000	256.400.000	99,18	-	-
2.2.9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		2 dokumen	2 dokumen	100	200.572.000	199.346.900	99,39	-	-
2.2.10	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		9 dokumen	9 dokumen	100	304.112.000	252.723.500	83,10	-	-
2.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		512 orang	512 orang	100	98.423.000	96.373.000	97,92	-	-
2.2.12	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		1 dokumen	1 dokumen	100	227.764.000	227.658.000	99,95	-	-
2.2.13	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan TidakMenular		1 Tahun	1 Tahun	100	262.449.400	256.410.801	97,70	-	-
2.2.14	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		21 dokumen	21 dokumen	100	16.371.691.987	13.026.185.015	79,57	-	-

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Anggaran	Realisasi	%	Permasalahan	Solusi
2.2.15	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kapitasi		25 dokumen	25 dokumen	100	200.000.000	200.000.000	100,00	-	-
2.2.16	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		21 dokumen	21 dokumen		19.876.884.000	15.112.436.145	76,03	-	-
2.2.17	Operasional Pelayanan Puskesmas		12 dokumen	12 dokumen	100	16.149.416.052	15.899.131.140	98,45	-	-
2.2.18	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					464.450.000	0	0,00		
2.2.19	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		0 unit	0 unit	0	464.450.000	0	0,00	Anggaran ini hanya untuk kegiatan survei akreditasi puskesmas tetapi pada tanun 2022 tidak ada kegiatan survei dari kKementrian Kesehatan	Meningkatnya koordinasi dengan Kementrian Kesehatan
2.2.20	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		2 dokumen	2 dokumen	100	1.300.000.000	1.279.800.000	98,45	-	-
2.3	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**					**181.979.000**	**181.949.000**	**99,98**	-	-
2.3.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		3 dokumen	3 dokumen	100	138.022.000	138.022.000	100,00	-	-
2.3.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1 dokumen	1 dokumen	100	43.957.000	43.927.000	99,93	-	-
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**					**50.044.500**	**50.044.500**	**100,00**	-	-
3.1	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**					**50.044.500**	**50.044.500**	**100,00**	-	-
3.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sertaTindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		50 dokumen	50 dokumen	100	50.044.500	50.044.500	100,00	-	-
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**					**328.029.000**	**277.769.000**	**84,68**	-	-

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Anggaran	Realisasi	%	Permasalahan	Solusi
4.1	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**					**87.954.000**	**85.234.000**	**96,91**	-	-
4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		50 dokumen	50 dokumen	100	87.954.000	85.234.000	96,91	-	-
4.2	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**					**137.125.000**	**134.345.000**	**97,97**	-	-
4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk makanan Minuman tertentu yang dapat Diproduksioleh Industri Rumah Tangga		70 dokumen	70 dokumen	100	137.125.000	134.345.000	97,97	-	-
4.3	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanPost Market ada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**					**102.950.000**	**58.190.000**	**56,52**	-	-

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Anggaran	Realisasi	%	Permasalahan	Solusi
4.3.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		50 unit			102.950.000	58.190.000	56,52	-	-
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**230.493.000**	**187.265.000**	**81,25**	-	-
5.1	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**230.493.000**	**187.265.000**	**81,25**	-	-
5.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Tahun	1 Tahun	100	230.493.000	187.265.000	81,25	-	-
	TOTAL					**193.030.580.834**	**178.151.044.445**	**92,30**		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Januari 2023

B. Sub Urusan RSUD Ruteng

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target Dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2022 RSUD Ruteng menetapkan sasaran strategis 'Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat', dengan 2 indikator, yaitu Nilai IKM Rumah Sakit dan Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.19.

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Sub RSUD Ruteng
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**	a. Nilai IKM Rumah Sakit	83,52%	81,53%	97,62
		b. Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,059%	0,637%	1079,66
RATA-RATA					**588,64**
KATEGORI					**Memuaskan**

Sumber: RSUD dr. Ben Mboi, Januari 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, sebagai berikut:

a. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Khusus untuk Pelayanan Kesehatan, Survey IKM diukur berdasarkan kualitas layanan pada 17 (tujuh belas) ruang perawatan yang dijalankan oleh RSUD Ruteng. Survey IKM tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan karakteristik layanannya yang langsung berhadapan dengan masyarakat selaku pengguna jasa. Sebaran jumlah masyarakat pengguna jasa yang membutuhkan layanan dari setiap produk layanan pada RSUD Ruteng pada umumnya merata pada ketujuh belas ruang perawatan sehingga ditetapkan sebagai unit survey. Pada tahun 2022 survey kepuasan dilakukan secara internal dengan metode survey yang terfokus pada jenis pelayanan serta manajemen administrasi. Secara keseluruhan nilai total IKM pada unit pelayanan kesehatan RSUD Ruteng tahun 2022 adalah **81,53%** dari target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu sebesar **83,52%** dengan capaian 97,62%. Meskipun belum mencapai target namun terjadi

peningkatan sebesar 1,34% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai **80,19%.**

Adapun hal-hal yang menyebabkan belum tercapainya target tahun 2022 adalah:

- Waktu pelayanan yang belum cepat dan tepat;
- Prosedur/alur pelayanan yang belum mempermudah proses pelayanan;
- Kurangnya tenaga dokter spesialis, dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya;
- Sarana dan prasarana yang belum optimal.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian IKM, antara lain:

- Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SIM-RS;
- Pemenuhan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang telah tersedia di Rumah Sakit.

b. Indikator Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk

Pada tahun 2021 rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk tidak masuk dalam indikator kinerja Renstra RSUD Tahun 2016-2021, pengukuran indikator tersebut baru dimulai pada Renstra Tahun 2021-2026. Realisasi rasio daya tampung RS melebihi nilai target dikarenakan Sarana/Gedung Perawatan yang tersedia di RSUD Ruteng sudah sesuai dengan master plan RSUD tahun 2018 – 2021 sehingga kapasitas tempat tidur pasien juga bertambah.

Untuk mempertahankan capaian ini dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Pemenuhan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang telah tersedia di Rumah Sakit;
- Upaya Peningkatan Pendapatan dengan penambahan jenis

b) **Capaian Kinerja Sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, RSUD dr. Ben Mboi melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.918.379.087,- realisasi sebesar Rp.107.493.591.236,- atau sebesar 98,69%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.20.

Tabel 3.20
Ringkasan Anggaran BLUD RSUD dr. Ben Mboi Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**100.189.005.551**	**99.267.490.500**	**99,08**
	Belanja Pegawai	27.736.423.636	27.287.143.280	98,38
	Belanja Barang dan Jasa	72.452.581.915	71.980.347.220	99,35
2.	**Belanja Modal**	**8.729.373.536**	**8.226.100.736**	**94,23**
	TOTAL	**108.918.379.087**	**107.493.591.236**	**98,69**

Sumber: RSUD Ruteng, Januari 2023

Tabel 3. 21
Realisasi Pendapataan RSUD Ruteng Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Pendapatan	**55.746.232.992**	**67.968.747.874**	**121,92**
1.	Pendapatan Asli Daerah	55.746.232.992	67.968.747.874	121,92
	TOTAL	55.746.232.992	67.968.747.874	121,92

Sumber: RSUD Ruteng, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target kinerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.22.

Tabel 3.22

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Kesehatan Sub Urusan RSUD Ruteng Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentasi urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standart**	**96 %**	**94,73 %**	**98,68**	**101.876.739.030**	**100.548.151.780**	**99**	**-**	**-**
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja rumah sakit**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**1.810.000**	**1.810.000**	**100**	**-**	**-**
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja	5 laporan	5 laporan	100	1.810.000	1.810.000	100 %	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja rumah sakit**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**28.091.601.665**	**27.627.050.680**	**98**	**-**	**-**
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	378 orang	377 orang	99,74%	27.614.323.636	27.619.593.280	98	-	-
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 laporan	26 laporan	100	477.278.029	457.457.400	96	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**96.240.000**	**45.601.140**	**47**	**Tidak terselenggaranya pelatihan yang telah direncanakan**	
1.3.1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	6 orang	66,67%	96.240.000	45.601.140	47	Tidak terselenggaranya pelatihan yang telah direncanakan	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**374.024.648**	**299.423.401**	**80**	-	-
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	264.464.648	253.943.989	96	-	-
1.4.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	9 Laporan	69,23%	109.560.000	45.479.412	42	Beberapa rapat koordinasi dilaksanakan secara virtual	
1.5	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**17.630.000**	**17.095.517**	**97**	-	-
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyuratpengiriman	200 laporan	154 laporan	77%	17.630.000	17.095.517	97	-	-
1.6	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terlaksanaya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**73.295.432.717**	**72.557.171.042**	**99**	-	-
1.6.1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Penunjang dan Pelayanan Penunjang	1 Unit	1 Unit	100%	**73.295.432.717**	**72.557.171.042**	99	-	-
2.	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Presentase pemenuhan jenis layanan spesialistik**	**56%**	**50%**	**89,29%**	**5.997.383.060**	**5.957.555.809**	**99**	-	-
		Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit dan Puskesmas	**83,52%**	**81,53%**	**97,62%**				-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
2.1	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pembangunan dan tersedianya peralatan kesehatan**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**5.788.895.736**	**5.788.895.736**	**100**	-	-
2.1.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100%	3.901.714.270	3.901.714.270	100	-	-
2.1.2	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	16 Unit	16 Unit	100%	1.887.181.466	1.887.181.466	100	-	-
2.2	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**58.800.000**	**25.448.618**	**43**	-	-
2.2.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 unit	1 Unit	100%	58.800.000	25.448.618	43	Perencanaan awal disiapkan biaya perjalanan dinas untuk 4 orang surveyor, tetapi setelah penetapan APBD Perubahan, RSUD Ruteng mendapat surat dari KARS bahwa tim surveyor yang ditugaskan untuk RSUD Ruteng sebanyak 2 orang.	
2.3	**Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Kesehatan perorangan dan Kesehatan masyarakat yang optimal**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100 %**	**149.687.324**	**143.210.855**	**96**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
2.3.1	Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	71 Dokumen	107 Dokumen	150,70 %	149.687.324	143.210.855	96	-	-
3.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Presentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi**	**98,46%**	**98,46%**	**100%**	**1.044.256.997**	**987.884.247**	**95**	-	-
3.1	**Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100 %**	**891.446.997**	**865.290.900**	97	-	-
3.1.1	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	31 orang	31 orang	100%	891.446.997	865.290.900	97	-	-
3.2	**Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**152.810.000**	**122.593.347**	**80**	-	-
3.2.1	Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat Daerah/ Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	15 orang	17 orang	113,33%	152.810.000	122.593.347	80	Selisish biaya penginapan dan transportasi udara	
	JUMLAH				**98, 20%**	**108.918.379.087**	**107.493.591.236**	**98,69**		

Sumber: RSUD Ruteng, Jan 2023

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target Dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai telah menetapkan 7 (Tujuh) sasaran strategis, dengan 8 indikator kinerja utama. Untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai melaksanakan 10 program strategis. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran dapat dilihat pada tabel 3.23.

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2022

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Prosentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana banjir, erosi, dan abrasi pantai	Prosentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	%	23.74	21,198	89,29
2.	Meningkatnya Prosentase jalan dalam kondisi mantap	Prosentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	56.15	54.80	97.60
3.	peningkatan Prosentase Drainase perkotaan yang dibangun	Prosentase Drainase Perkotaan yang dibangun	%	76.20	72.306	94.89
4.	Meningkatnya Prosentase luas daerah terlayani irigasi primer	Prosentase luas daerah terlayani irigasi primer	%	81.71	72.26	88.43
5.	A. Meningkatnya Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	%	78.09	83.13	106.45
	B. Meningkatnya Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	%	88.00	85.81	97.51
6.	Meningkatnya Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	%	22.00	11.18	50.82
7.	Meningkatnya Persentase sampah tertangani	Persentase sampah tertangani	%	20.97	0.00	0.00
	Rata-rata					**78,12**
	PROGRAM PENUNJANG					

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	Terlaksananya Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas	%	100	100	100
	Terlaksananya penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas dengan baik dan benar	Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas dengan baik dan tepat waktu	%	100	100	100
	Terlaksananya Koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian	Prosentase Jumlah urusan kepegawaian yang terlaksana	%	100	100	100
	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran	%	100	100	100
	Rata-rata					85,42
					Sangat Baik	

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Manggarai, Januari 2023

Adapun capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Prosentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana banjir, erosi, dan abrasi pantai**

   Indikator dari sasaran ini adalah Prosentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana. Realisasi capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase} = \frac{\text{Luas Kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana (Ha)}}{\text{Luas kawasan rawan bencana (Ha)}} \times 100\%$$

$$= \frac{1{,}06}{23{,}12} \times 100\%$$

$$= 4{,}598\%$$

   Kondisi awal capaian kinerja pada RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026, prosentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana sebesar 16,60%. Tahun 2022, Luas Kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana sebesar 1,06 Ha dari total luas Kawasan bencana di Kabupaten Manggarai 23,12 Ha atau mencapai 4,598%. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2022, persentase kawasan

rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana sudah mencapai 21,198% dari target 23,74%, dengan tingkat capaian indicator sebesar 89,29%.

2. **Meningkatnya Prosentase Jalan Dalam Kondisi Mantap**

Indikator dari sasaran ini adalah Prosentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap. Realisasi capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase} = \frac{\text{Panjang jalan Kabupaten kondisi mantap (km)}}{\text{Panjang jalan kabupaten seluruhnya (km)}} \times 100\%$$

$$= \frac{(653,169+298,962)\text{km}}{1959,794\text{km}} \times 100\%$$

$$= 48,583\%$$

Prosentase ini merupakan realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2022. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah akumulasi dari Panjang jalan kabupaten dan desa pada kondisi permukaan **baik dan sedang**, sampai dengan akhir tahun 2022.

Adapun capaian kinerja terhadap target kinerja tahun 2022 adalah

$$\frac{48,583\%}{56,15\%} \times 100\% = \mathbf{86,524\%}$$

❖ **Pembangunan Jalan**

Dalam rangka mendukung konektivitas dan meningkatnya kualitas layanan jalan di Kabupaten Manggarai, tahun 2022 telah dilakukan pembangunan jalan sepanjang 1.759,645 km, dengan rincian seperti dalam tabel 3.24.

Tabel 3.24
Data Penanganan Jalan Tahun 2021-2022

NO	JENIS KONSTRUKSI	SAT	2021	2022
1	HRS	km	10,53	293,75
2	Lapen	km	29,29	1.266,35
3	Telford	km	7,65	199,55
4	Rabat/Paving/ Trotoar	km	0,85	
5	Tanah (Pembukaan Jalan Baru)	km	5,7	
6	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	km	37,1	72.71
	TOTAL		**91,112**	**1.759,645**

Sumber: Dinas PUPR Kab. Manggarai, Jan 2023

Sampai dengan akhir tahun 2022, panjang ruas jalan di Kabupaten Manggarai adalah sepanjang 2161,229 km yang terdiri dari:

a. Panjang Jalan Nasional: 120,935 km
b. Panjang Jalan Provinsi: 80,5 km
c. Panjang Jalan Kabupaten dan jalan desa: 1959,794 km

Data jalan menurut keadaan dan status jalan tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel 3.25.

Tabel 3.25
Daftar Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan (km)

NO	URAIAN	STATUS JALAN					
		AKHIR TA. 2021			AKHIR TA. 2022		
		JK	JD	TOTAL	JK	JD	TOTAL
I	**JENIS PERMUKAAN**						
	a. Hotmix	297.426	-	297.426	293.7500	-	293.750
	b. Aspal	918.746	106.059	1024.806	1176.6120	89.733	1266.345
	c. Kerikil	128.360	168.090	296.450	23.5920	175.958	199.550
	d. Tanah	110.119	136.571	246.689	52.4500	144.691	197.141
	e. Tidak dirinci	7.347	0.150	7.497	2.5200	0.487	3.007
	Jumlah I	**1462.00**	**410.87**	**1872.87**	**1548.92**	**410.87**	**1959.79**
II	**KONDISI PERMUKAAN**						
	a. Baik	1135.768	84.957	1220.725	552.468	100.701	**653.169**
	b. Sedang	24.567	12.120	36.687	296.339	2.623	**298.962**
	c. Rusak	63.183	9.132	72.315	69.130	3.582	72.712
	d. Rusak Berat	238.479	304.661	543.139	630.987	303.963	934.950
	Jumlah I	**1461.997**	**410.87**	**1872.867**	**1548.92400**	**410.870**	**1959.794**
III	**KELAS JALAN**						
	a. Kelas I						
	b. Kelas II						
	c. Kelas III						
	d. Kelas IIIA						
	e. Kelas IIIB	67.000	0.000	67.000	67.000	0.000	67.000
	f. Kelas IIIC	1394.997	410.870	1805.867	1481.924	410.870	1892.794
	g. Kelas tidak dirinci						
	Jumlah III	**1461.997**	**410.87**	**1872.867**	**1548.924**	**410.870**	**1959.794**

Sumber: Dinas PUPR Kab. Manggarai, Jan 2023

Ket:
JK: Jalan Kabupaten
JD: Jalan Desa

❖ **Pembangunan Jembatan**

Berikut gambaran data penanganan jembatan dalam kurun waktu 2021-2022

Tabel 3.26
Data Jembatan 2021-2022

NO	URAIAN	2021	2022	KET
1	2	3	4	6
I	Jumlah jembatan s.d tahun	282 unit	285 unit	
II	KONDISI JEMBATAN			
	a. Baik	276 unit	283 unit	
	b. Rusak Ringan	5 unit	1 unit	
	c. Rusak Berat	1 unit	1 unit	
III	PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN	7 paket	7 paket	
IV	ASET BARU	5 unit	3 unit	

Sumber: Dinas PUPR Kab. Manggarai, Jan 2023

Pembangunan jembatan pada tahun 2022 sebanyak 7 paket terdiri dari 3 (tiga) paket pembangunan baru dan 4 (empat) paket rekonstruksi/rehabilitasi, yaitu:

a. Jembatan Baru

- Jembatan Wae Kuli II, Desa Lemarang, Kec. Reok Barat;
- Jembatan Wae Kebong, Kecamatan Ruteng – Rahong Utara;
- Jembatan Wa Pangajaran, Kec. Satar Mese.

b. Jembatan Rehabilitasi

- Jembatan Gantung, Kec. Satar Mese (penggantian dan renovasi);
- Jembatan Wae Kang, Kec. Rahong Utara;
- Jembatan Wae Locak Kec. Langke Rembong;
- Jembatan Wae Naong, Kec. Cibal.

Dengan demikian, total aset jembatan sampai dengan tahun 2022 menjadi 285 unit.

3. **Peningkatan Prosentase Drainase Perkotaan yang Dibangun**

Indikator dari sasaran ini adalah Prosentase Drainase Perkotaan yang dibangun. Realisasi capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Prosentase $= \frac{\text{Panjang Saluran drainase terbangun (km)}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2022 (km)}} \times 100\%$

$= \frac{1,61715 \text{ km}}{1461,997 \text{ km}} \times 100\%$

= 0,1106%

Data Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2022 diambil dari database Panjang Jalan Kabupaten pada pada tahun 2021. Prosentase ini merupakan realisasi capaian kinerja tahun 2022, kemudian dijumlahkan dengan kondisi awal capaian kinerja pada RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 sebesar 72,2%.

Realisasi Prosentase kinerja s.d tahun 2022:

= 0,1106%+ 72,2%

= 72,311%

Adapun capaian kinerja terhadap target kinerja tahun 2022 adalah

$\frac{72,311\%}{76,20\%} \times 100\%$ = **94,896%**

4. **Meningkatnya Prosentase Luas Daerah Terlayani Irigasi Primer**

Indikator dari sasaran ini adalah Prosentase luas daerah terlayani irigasi primer. Realisasi capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Prosentase $= \frac{\text{Luas D.I. yang terlayani irigasi primer (Ha)}}{\text{Luas Seluruh Daerah Irigasi (Ha)}} \times 100\%$

$= \frac{14.330,99}{19.833} \times 100\%$

= 72,26%

Adapun capaian kinerja terhadap target kinerja tahun 2022 adalah

$\frac{72,26\%}{81,71\%} \times 100\%$ = **88,435%**

Capaian kinerja infrastruktur irigasi tahun 2022 adalah bertambahnya cakupan layanan jaringan irigasi sebesar 121,99 Ha dan terbangunnya jaringan irigasi sepanjang 2.521,2 meter. Sehingga total jaringan irigasi yang terbangun sampai akhir tahun 2022 adalah 127,632 meter atau sebesar 42,21% dari total panjang 302.369 meter. Sedangkan cakupan layanan irigasi sampai akhir tahun 2022 menjadi 14.330,99 Ha atau 72.26% dari 19.833 Ha total seluruh luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten. (SK Bupati Manggarai Nomor: HK/332/2019 tentang penetapan Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Kabupaten Manggarai, maka luas penanganan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Manggarai).

Capaian ini diperoleh melalui pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya berkaitan dengan ketersediaan debit air yang semakin menurun, penyediaan infrastruktur jaringan irigasi serta kegiatan operasi dan pemeliharaan yang belum optimal.

Strategi Dinas PUPR dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kinerja irigasi adalah dengan:

- Melakukan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi;
- Pembangunan/peningkatan/Rehabilitasi sarana dan prasarana sungai;
- Pengembalian kondisi sempadan sungai, mata air sesuai dengan aslinya.

Tabel 3.27
Data Jaringan Irigasi Sesuai Kewenangan Kabupaten

NO	IRIGASI	TAHUN		KETERANGAN
		2021	2022	
1	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	71,64	72.26%	
2	Rasio Jaringan Irigasi	18,99	16,87	(Rasio Panjang saluran irigasi lahan terhadap Luas Lahan Budidaya Pertanian)
		80,28%	90,36%	Bertambahnya cakupan pelayanan irigasi pertanian rakyat yang terlayani oleh air irigasi
3	Jenis Prasarana Irigasi / Pengairan			
	a. Non Teknis (m)	177.258	174.737	

NO	IRIGASI	TAHUN		KETERANGAN
		2021	2022	
	b. Teknis (m)	125.111	127.632	
	Primer	100.779,00	100.779,00	
	Sekunder	22.921,00	25.442,20	
	Tersier	1.411	1.411	
	c. Panjang jaringan(m)	302.369	302.369	
	d. Panjang yang tertangani (m)	3.821	2.521,2	
	e. Luas Irigasi (Ha)	19.833	19.833	
	f. Luas Irigasi dalam Kondisi Baik (Ha)	14.209	14.330,99	
	g. Luas Irigasi yang tertangani (Ha)	566	121,99	

Sumber: Dinas PUPR Kab. Manggarai, Jan 2023

5. **Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni**

- **Meningkatnya Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan Berkelanjutan**

  Indikator dari sasaran ini adalah Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan. Realisasi capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase} = \frac{\text{Jumlah RT yang memiliki akses sanitasi layak (RT)}}{\text{Jumlah seluruh RT daerah Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{78.643}{94.598} \times 100\%$$

$$= 83{,}13\%$$

  Adapun capaian kinerja terhadap target kinerja tahun 2022 adalah

$$\frac{83{,}13\%}{78{,}09\%} \times 100\% = 106{,}454\%$$

- **Meningkatnya Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak dan Berkelanjutan**

  Indikator dari sasaran ini adalah Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan. Realisasi capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Prosentase $= \frac{\text{Jumlah RT yang memiliki akses Air Minum (RT)}}{\text{Jumlah seluruh RT daerah Kabupaten}} \times 100\%$

$= \frac{81.176}{94.598} \times 100\%$

$= 85{,}81\%$

Adapun capaian kinerja terhadap target kinerja tahun 2022 adalah

$\frac{83{,}13\%}{78{,}09\%} \times 100\% =$ **106,454%**

Pendayagunaan air bersih/air minum yang dilaksanakan Dinas PUPR adalah melalui pembangunan, peningkatan/perluasan dan rehabilitasi sarana prasarana jaringan air bersih/air minum serta operasi dan pemeliharaan jaringan air minum. Capaian hingga akhir tahun 2022 total penduduk yang terlayani air minum bersih adalah 81.176 Rumah Tangga, atau 85,81 % dari 94.598 Total Rumah Tangga.

Permasalahan umum yang menyebabkan tidak tercapainya target ini adalah ketersediaan infrastruktur jaringan air minum bersih, ketersediaan air pada kawasan mata air dan sekitarnya yang semakin menurun; keterbatasan anggaran; serta masalah pembebasan lahan.

6. **Meningkatnya Persentase Cakupan Pemanfaatan Ruang yang Terkendali**

Indikator dari sasaran ini adalah Prosentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana. Adapun program yang merepresentasikan pemanfaatan ruang terkendali adalah Informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Pemasangan Plang.

Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 merupakan akumulasi dari capaian tahun 2022 ditambah dengan kondisi awal capaian kinerja pada RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 sebesar 12%, selengkapnya dalam tabel 3.28.

Tabel 3.28
Cakupan Pemanfaatan Ruang Terkendali

NO	URAIAN	REALISASI	SATUAN	TARGET RPJMD 2021-2026	%
I	**Kondisi awal RPJMD 2021-2026**				**12**
II	**Tahun 2022**				**11,183**
	- *Permohonan Rekomendasi*	*110*	*bangunan*	*76.918*	*0,14*
	- *Pemasangan Plang Dalam Kegiatan Insentif/Disinsentif RTRW*	*8*	*plang*	*36*	*22,22*
	Jumlah I + II				**23,183**

Persentase capaian kinerja sampai tahun 2022 adalah:

= 11,183% + 12%

= 23,183%

Dengan demikian. tingkat capaian kinerja terhadap target kinerja tahun 2022 adalah:

$$\frac{23,183\%}{22\%} \times 100\% = 105,377\%$$

7. **Meningkatnya Persentase Sampah Tertangani**

Indikator dari sasaran ini adalah Persentase sampah tertangani. Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2022 adalah 0%. Kegiatan yang terdapat pada indikator ini adalah kegiatan Pengadaan Tanah. Kegiatan Pengadaan tanah tidak dilaksanakan karena kegiatan ini dialihkan ke dinas Lingkungan Hidup, sehingga kegiatan pengadaan Tanah tidak terdapat pada dinas PUPR. Dinas PUPR hanya menyiapkan sarana penunjang untuk penanganan sampah. Kegiatan penyiapan sarana penunjang untuk penanganan sampah belum bisa dilaksanakan karena belum adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dalam proses perjalanannya, sebuah kegiatan konstruksi dihadapkan pada berbagai kendala. Berhasil atau tidaknya suatu proyek ditentukan oleh banyak pihak baik penyedia, pemerintah atau juga masyarakat sebagai penerima manfaat.

Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pekerjaan-pekerjaan konstruksi dinas PUPR Tahun 2022 :

1. Kelalaian kontraktor pelaksana
2. Perubahan lingkup pekerjaan/detail konstruksi
3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

Pada tahun 2022, terdapat 8 paket pekerjaan yang tidak diselesaikan, yaitu:

1. Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering di Desa Satar Luju, Kecamatan Satarmese Barat;
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Wae Denger, Ds. Lemarang, Kecamatan Reok Barat);

3. Peningkatan Jalan Teflord Lingko Ranggo-Ndaher-Lekos, Mangko Pengang, Kel. Satartacik, Kecamatan Langke Rembong;
4. Peningkatan Struktur Jalan Ling - Nereng, Lapen, Kecamatan Satar Mese Utara;
5. Peningkatan Jalan Sp.Toe - Wangkal - Sambor, Lapen, Kecamatan Reok Barat;
6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lapen Dari Kp. Werong Menuju Mbohang, Ds. Bangkalelak, Kecamatan Lelak;
7. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kp.Cumbi - Gereja Paroki Wangkung, Ds. Cumbi, Kecamatan Ruteng;
8. Pemeliharaan Periodik Lapen Poka - Mendo - Bts. Kabupaten, Lapen, Kecamatan Wae Rii;

b) Capaian Kinerja Sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai melaksanakan 10 program, 20 kegiatan dan 61 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp.85.157.558.290,-** dan terealisasi sebesar **Rp.78.788.225.300,- (92.52%)**. Ringkasan belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.29.

Tabel 3.29
Anggaran Dinas PUPR Kab. Manggarai Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	17.082.422.312	16.187.050.384	94,75
	Belanja Pegawai	5.837.841.448	5.247.832.351	89,92
	Belanja Barang dan Jasa	11.244.580.864	10.939.218.033	97,25
2.	**Belanja Modal**	68.075.135.978	62.601.174.916	91,96
	TOTAL	**85.157.558.290**	**78.788.225.300**	**92,52**

Sumber:Dinas PUPR Kab. Manggarai, Jan 2023

Dinas PUPR merupakan salah satu Perangkat Daerah yang diberi tanggung jawab untuk mengelola pendapatan daaerah. Selanjutnya realisasi jenis pendapatan dapat digambarkan pada tabel 3.30.

Tabel 3.30
Realisasi pendapatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2022

No	Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Retribusi Pemakaian alat	1.568.916.550	227.538.880	12.1
	Retribusi Pemberi izin Mendirikan Bangunan	302.393.000	18.663.894	6.17
	TOTAL	**1.871.309.550**	**246.202.774**	**13.16**

Sumber:Dinas PUPR Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.31.

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Urusan penunnjang Urusan pemerintah daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100**	**6.912.705.364**	**6.625.678.533**	**98,85**	-	-
1.1	**Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Urusan penunnjang Urusan pemerintah daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100**	**117.280.200**	**116.060.200**		-	-
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD	3 dok	3 dok	**100**	42.378.000	41.678.000	98,35	-	-
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	**100**	2.550.000	2.550.000	100	-	-
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA_SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	**100**	4.340.000	4.140.000	95,39	-	-
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA_SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	**100**	1.345.000	1.345.000	100	-	-
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPPA SKAPD	1 Dokumen	1 Dokumen	**100**	1.300.200	1.300.200	100	-	-
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	**100**	2.807.000	2.807.000	100	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100	62.560.000	62.240.000	99,49	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**				**5.116.891.914**	**4.861.539.511**		-	-
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100	4.998.091.914	4.747.759.511	95,02	-	-
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 Orang	27 Orang	100	118.800.000	112.200.000	94,44	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana**				**756.880.000**	**744.817.793**		-	-
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	8 Jenis	100	6.965.000	6.965.000	100	-	-
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 jenis	12 jenis	100	294.491.500	283.539.065	96,28	-	-
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik KantoR	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100	98.700.000	98.676.400	99,98	-	-
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	100	147.343.500	147.342.428	100	-	-
1.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	2 Jenis	100	4.660.000	4.180.000	89,70	-	-
1.3.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				5.140.000	5.140.000	100	-	-
1.3.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				199.580.000	198.974.900		-	-
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**58.000.000**	**57.094.500**		-	-
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000	4.748.000	94,96	-	-
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				53.000.000	52.346.500	98,77	-	-
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**863.653.250**	**847.746.529**		-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52 unit	52 unit		682.653.250	666767729	97,67	-	-
1.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	15 unit		7.250.000	7250000	100	-	-
1.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	100	173.750.000	173728800	99,99	-	-
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					**6.075.730.800**	**5.751.574.170**	**94,66**	-	-
2.1	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Organisasi**					**1.959.299.400**	**1.943.629.104**		-	-
2.1.1	**Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya**	**Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun**	**1600 M**	**1600 M**	**100**	**878.960.000**	**863.681.401**	**98,26**	-	-
	Belanja Operasi					**18.160.000**	**17.157.000**	**94,48**	-	-
	Belanja Modal					**860.800.000**	**846.524.401**	**98,34**	-	-
1	Konsultan Pengawasan				100	65.000.000	64.986.615	99,98	-	-
2	Konsultan Perencanaan				100	35.000.000	34.944.465	99,84	-	-
3	[#] Pengaman Pantai Desa Lemarang Kec. Reok Barat				100	476.760.000	476.760.000	100	-	-
4	[#] Pengaman Sungai/Pantai Nanga Ramut Desa Terong Kec. Satar Mese Barat				100	284.040.000	269.833.321	95	-	-
2.1.2	**Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai**	**Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi**	**1200 M**	**1200 M**	**100**	**1.080.339.400**	**1.079.947.703**	**99,96**	-	-
	Belanja Operasi					**20.339.400**	**20.339.400**	**100**	-	-
	Belanja Modal					**1.060.000.000**	**1.059.608.303**		-	-
1	konsultan pengawas 14				100	35.000.000	34.999.000	100	-	-
2	konsultan perencana 12				100	25.000.000	24.866.220	99,46	-	-
3	Normalisasi Sungai Wae Renca Ds. Wae Renca Kec. Cibal Barat				100	200.000.000	199.933.048	99,97	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
4	Pengaman Kali Wae Ces bagian barat kongregasi Fransiskanes Sambas RT.011/RW.004 Kel. Tenda Kec Langke Rembong				100	200.000.000	199.944.497	99,97	-	-
5	Pengaman Kali Wae Kaap Ds. Salama Kec. Reok				100	200.000.000	199.955.123	99,98	-	-
6	Pengaman Kali Wae Kala Lingko Muwang Kel. Satar Tacik Kec. Langke Rembong				100	200.000.000	199.955.485	99,98	-	-
7	Pengaman Kali Wae Locak Sebelah barat paroki Katedral Kel. Watu				100	200.000.000	199.954.930	99,98	-	-
2.2	**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**					**4.116.431.400**	**3.807.945.066**		-	-
2.2.1	**Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan**	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	**5000 M**	**5000 M**	**100**	**3.564.401.200**	**3.428.835.448**	**96,20**	-	-
	Belanja Operasi					241.421.200	237.413.330	98,34		
	Belanja Modal									
1	[#] Pengawasan Paket II				100	100.000.000		-	Keterlambatan pengajuan SP2D ke Bank Pembangunan daerah	pembayaran sisa pekerjaan diusulkan di anggaran perubahan
2	[#] Perencanaan E-Paksi Jaringan Irigasi Permukaan				100	85.000.000	84.932.038	99,92	-	-
3	[#] Perencanaan Paket I				100	100.000.000	99.750.400	99,75	-	-
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi								-	-
1	Peningakatan Jaringan Irigasi D.I Wae Kuli II Ds. To'e Kec. Reok Barat				100	462.980.000	462.980.000	100	-	-
2	Peningkatan jarinagnIrigasi D.I Wae Mugu Toso Desa Meler Kec. Ruteng				100	200.000.000	199.950.000	99,98	-	-
3	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Dara Ds. Kajong Kec. Reok Barat				100	200.000.000	199.983.000	99,99	-	-
4	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Decer Lingko Ndaher Kel. Satar Tacik Kec. Langke Rembong				100	200.000.000	199.935.000	99,97	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
5	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Helung Desa Cambir Leca Kecamatan Satarmese Barat				100	150.000.000	149.904.000	99,94	-	-
6	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Kajong Ds. Kajong Kec. Reok Barat				100	200.000.000	199.950.000	99,98	-	-
7	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Lamba Desa Matawae Kecamatan Satarmese Utara				100	100.000.000	99.957.780	99,96	-	-
8	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Lente Ds. Lentang Kec. Lelak				100	200.000.000	189.956.300	94,98	-	-
9	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Liwu Lewe Ds. Ladur Kec. Cibal				100	100.000.000	99.575.000	99,58	-	-
10	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Mantang Desa Wudi Kecamatan Cibal				100	100.000.000	99.936.000	99,94	-	-
11	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Ngenor Desa Nao Kecamatan Satarmese Utara				100	150.000.000	149.979.000	99,99	-	-
12	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Poncung Ds. Kel Golo Dukal Kec. Langke Rembong				100	200.000.000	189.851.800	94,93	-	-
13	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Rebak Ds. Timbu Kec. Cibal				100	75.000.000	74.984.000	99,98	-	-
14	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Rongo Desa pong Leko Kecamatan Ruteng				100	100.000.000	99.976.000	99,98	-	-
15	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Temek Desa Meler Kecamatan Ruteng				100	200.000.000	199.924.000	99,96	-	-
16	[#] Peningkatan Jaringan irigasi D.I Wae Tenda Ds. Ruis Kec. Reo				100	200.000.000	199.951.000	99,98	-	-
17	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Tiwu Takeng Ds. Iteng Kec. Satar Mese				100	200.000.000	189.946.800	94,97	-	-
2.2.2	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**	**Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi**	**500 M**	**500 M**	**90,95**	**552.030.200,00**	**379.109.618**	**68,68**	-	-
	BELANJA OPERASI					61.950.200	60.235.100	97,23	-	-
	Pengadaan Printer			1 UNIT	100	4.820.000	4.820.000	100	-	-
	Belanja Modal								-	-
	[#] Pengawasan				100	20.000.000	19.987.000	99,94	-	-
	[#] perencanaan				100	15.000.000	14.979.450	99,86	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
	[#] Operasi dan Pemeliharaan (OP)				100	250.000.000	206.344.668	82,54	Keterlambatan pengajuan SP2D ke Bank Pembangunan daerah	pembayaran sisa pekerjaan diusulkan di anggaran perubahan
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Wae Denger Ds. Lemarang Kec. Reok Barat				75,05	200.260.000	72.743.400	36,32	Pekerjaan tidak selesai sampai akir masa kontrak karena kelalaian kontraktor	1. diberikan tambahan waktu 50 hari kalender sejak berakirnya kontrak 2. kontraktor membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan sisa pekerjaan 3. pembayaran sisa pekerjaan diusulkan di anggaran perubahan
3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					**2.078.826.956**	**1.972.021.051**	94,86	-	-
3.1	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**					**2.078.826.956**	**1.972.021.051**	**94,86**	-	-
3.1.1	**Sub KegiatanPenyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM**	**Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100**	**871.326.000,00**	**856.947.800**	**98,35**	-	-
3.1.2	**Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan**	**Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat**	**22 lokasi**	**22 lokasi**	**97,53**	**802.100.956,00**	**721.344.260**	**89,93**	-	-
	Belanja Operasional					334.259.700,00	331.920.706	99,30		
	Belanja Modal									
	[#] Konsultan Pengawasan Pembangunan SPAM				100	28.000.000,00	-	-	Keterlambatan pengajuan SP2D ke Bank Pembangunan daerah	pembayaran sisa pekerjaan diusulkan di anggaran perubahan
	[#] Konsultan Perencanaan Pembangunan SPAM				100	16.399.000,00	16.389.000	99,94	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
	[#] Pembangunan SPAM di Dsn Poncong,Desa Lolang,Kec ,Satar Mese				100	200.000.000,00	189.823.300	94,91	-	-
	[#] pembangunan SPAM Dusun Ndehes Desa Compang Ndehes Kecamatan Wae Rii				100	100.000.000,00	99.769.000	99,77	-	-
	Konsultan Perencana Kegiatan Pembangunan Air Minum Bersih di Desa Todo kecamatan Satar Mese dan Desa Urang Kecamatan Lelak Tahun 2023					40.000.000		-	tidak dilaksanakan karena tidak ada petunjuk lebih lanjut dari BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) Propinsi NTT terkait dengan pekerjaan fisik perencanaan tersebut	Menunggu Petunjuk dari BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) Propinsi NTT
	KDP				100					
	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Barang Kecamatan Cibal				100	51.702.593,00	51.702.592	100	-	-
	] Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Ulu Belang Kec. Satar Mese				100	31.739.663,00	31.739.662	100	-	-
3.1.3	**Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan**	**Meningkatnya Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu**	**48 lokasi**	**48 lokasi**	**100**	**7.177.985.593**	**7.127.651.157**	9,30	-	-
	Belanja Operasional					50.189.000,00	39.299.000	78,30		
1	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Cireng Kec. Satar Mese Utara				100	366.403.565	366.403.565	100	-	-
2	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Compang Namut Kec. Ruteng				100	601.790.000	601.790.000	100	-	-
3	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Koak Kec. Satar Mese				100	576.660.000	576.660.000	100	-	-
4	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Lenda Kec. Cibal Barat				100	602.000.000	602.000.000	100	-	-
5	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Mata Wae Kec. Satar Mese Utara				100	384.000.000	384.000.000	100	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
6	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Papang Kec. Satar Mese				100	593.000.000	593.000.000	100	-	-
7	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Pong Lale Kec. Ruteng				100	463.500.000	463.500.000	100	-	-
8	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Pong Leko Kec. Ruteng				100	459.587.278	459.587.278	100	-	-
9	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Pong Murung Kec. Ruteng				100	465.000.000	465.000.000	100	-	-
10	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Robek Kec. Reok				100	322.607.454	322.607.454	100	-	-
11	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Tengku Lese Kec. Rahong Utara				100	476.750.000	476.750.000	100	-	-
12	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Toe Kec. Reok Barat				100	575.000.000	575.000.000	100	-	-
13	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Wae Kajong Kec. Reok Barat				100	575.757.001	575.757.001	100	-	-
14	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Bangka Ruang Kec. Rahong Utara				100	340.340.000	340.340.000	100	-	-
15	Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/broncaptering di Desa Borik Kec. Satar Mese Ba				100	46.268.502	46.268.502	100	-	-
16	Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/broncaptering di Desa Nao Kec. Satar Mese Utara				100	32.642.175	32.642.175	100	-	-
17	J Penambahan Sumur dalam Terlindungi/Broncaptering di Desa Satar Luju Kec. Satar Mese Barat				100	26.490.618	7.294.518	27,54	-	-
18	konsultan pengawas 31 Spesifikasi :				100	120.000.000	99.999.899	83,33		

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
19	konsultan perencana 27 Spesifikasi :				100	100.000.000	99.751.765	99,75		
3.1.4	**Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat**	Terbinanya dan Terawasinya Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat	**100 orang**	**100 orang**	**100**	**2.300.000**	**2.300.000**	100	-	-
3.1.5	**Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan**	Terpeliharanya SPAM Jaringan Perpipaan	**100%**	**100%**	**100**	**403.100.000**	**391.428.991**	97,10	-	-
	Belanja Operasional					3.100.000	2.950.000	95,16		
	Belanja Modal									
	[#] OP SWAKELOLA					400.000.000	388.478.991	97,12		
4	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					**5.311.000.000**	**5.250.861.375**	98,87	-	-
4.1	**Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**					**5.311.000.000**	**5.250.861.375**	98,87	-	-
4.1.1	**Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota**	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluas an Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	**178 kali**	**178 kali**	**100**	**34.682.000**	**34.022.000**	98,10	-	-
4.1.2	**Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat**	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	**3200 Unit**	**3200 Unit**	**100**	**5.276.318.000**	**5.216.839.375**		-	-
	Belanja Operasional					670.318.000	610.839.375			
	Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat								-	-
1	[#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Bangka Lelak Kec. Lelak				100	350.000.000	350.000.000	100	-	-
2	[#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Benteng Kuwu Kecamatan Ruteng				100	350.000.000	350.000.000	100	-	-
3	[#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Bere Kecamatan Cibal Barat				100	420.000.000	420.000.000	100	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
4	[#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Buar Kecamatan Rahong Utara				100	350.000.000	350.000.000	100	-	-
5	[#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Cambir Leca Kecamatan Satar Mese Barat				100	420.000.000	420.000.000	100	-	-
6	[#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Golo Mendo Kecamatan Wae Ri'i				100	420.000.000	420.000.000	100	-	-
7	[#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Golo Ncuang Kecamatan Cibal				100	350.000.000	350.000.000	100	-	-
8	[#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Pongkor Kec. Satar Mese				100	350.000.000	350.000.000	100	-	-
9	[#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Pong Lengor Kecamatan Rahong Utara				100	420.000.000	420.000.000	100	-	-
10	[#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Pong Umpu Kec. Lelak				100	406.000.000	406.000.000	100	-	-
11	[#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Ruis Kecamatan Reok				100	350.000.000	350.000.000	100	-	-
12	[#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Sambi Kecamatan Reok Barat				100	420.000.000	420.000.000	100	-	-
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					5.405.443.606	5.091.027.422	94,18	-	-
5.1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.405.443.606	5.091.027.422	94,18	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
5.1.1	**Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan**	**Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan**				**30.570.000**	**29.850.000**	**97,64**	-	-
5.1.2	**Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan**	**Terbangunnya Saluran Drainase Perkotaan**				**1.479.474.360**	**1.355.284.923**		-	-
	Belanja perasional				100	52.830.700	37.370.700	70,74		
	Belanja Modal									
1	[#] Pembangunana Drainase RT.20 Kampung Ngawe,Kel Pau Kec. Langke Rembong				100	149.972.760	142.474.156	95	-	-
2	[#] Pembangunan Drainase dalam Kp.Kumba, Kelurahan Satar Tacik				100	170.000.000	169.977.800	99,99	-	-
3	[#] Pembangunan Drainase Gang Bali-Jalan Wae Sosor RW.01,Kel.Tadong, Kec. Langke Rembong				100	100.000.000	99.974.618	99,97	-	-
4	[#] PEMBANGUNAN DRAINASE HORISONTAL DALAM KOTA RUTENG 2				100	217.217.000	217.217.000	100	-	-
5	[#] Pembangunan Drainase RT.018, RT 019, Kel,Tenda Kec. Rembong				100	170.000.000	84.975.244	49,99	Keterlambatan pengajuan SP2D ke Bank Pembangunan daerah	pembayaran diusulkan di anggaran perubahan
6	[#] PEmbangunan Drainase RT.01 RW.01 Gewak,Kelurahan Poco Mal Kec. Langke Rembong				100	199.540.920	189.563.875	95	-	-
7	[#] Pembangunan Drainase RT.12, RW.05, Kelurahan Mbaumuku, Kec. Rembong				100	120.000.000	113.818.550	94,85	-	-
8	[#] PEmbangunan Drainase RT.33 - RT 34 Goro, Kel. Pau, Kec. Langke Rembong				100	99.972.460	99.972.460	100	-	-
9	[#] Pembangunan Saluran Drainase Di Jalan Dahlia Utara Kel. Pau Kecamatan, Langke Rembong				100	199.940.520	199.940.520	100	-	-
5.1.2	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan**	**Terehabilitasinya Saluran Drainase Perkotaan**				**1.464.838.913**	**1.301.125.564**	**88,82**	-	-
	Belanja Operasional				100	26.585.000	24.585.000	92,48		
	Belanja Modal									
1	[#] KONSULTAN PENGAWAS				100	60.000.000				
2	[#] KONSULTAN PERENCANA				100	40.000.000	39.900.000	99,75		

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
3	[#] PENINGKATAN DRAINASE PRIMER DALAM KOTA REO				100	287.000.000	204.487.500	71,25	Keterlambatan pengajuan SP2D ke Bank Pembangunan daerah	pembayaran diusulkan di anggaran perubahan
4	[#] PENINGKATAN DRAINASE PRIMER KELURAHAN MBAUMUKU/KAROT/TADONG				100	275.500.001	275.500.000	100	-	-
5	[#] PENINGKATAN DRAINASE PRIMER KELURAHAN WASO/ROWANG				100	268.800.000	268.800.000	100	-	-
6	[#] Rehabilitasi Saluran Drainase Di Kelurahan Pau				100	124.986.000	124.983.548	100	-	-
7	[#] Rehabilitasi Saluran Drainase Di Kelurahan Pau II				100	381.967.912	362.869.516	95	Keterlambatan pengajuan SP2D ke Bank Pembangunan daerah	pembayaran diusulkan di anggaran perubahan
5.1.3	**Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase**	**Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase**			**100**	**422.870.000**	**420.198.302**	**99,37**	-	-
	Belanja Operasional				100	950.000	800.000			
	Belanja Modal									
1	[#] OP DRAINASE				100	421.920.000	419.398.302			
5.1.4	**Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan**	**Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan**			**100**	**2.007.690.333**	**1.984.568.633**	**98,85**	-	-
	Belanja Operasional				100	38.801.000	35.741.000			
	Belanja Modal									
1	[#] Drainase dari Cabang Wohe - RT 01, Desa Golo CADOR Kec. Wae Rii				100	99.922.262	99.922.262	100	-	-
2	[#] Drainase Desa Rai Pongko - Jln Tengah - Terminal Cancar, Kec. Ruteng				100	189.790.741	189.790.741	100	-	-
3	[#] Drainase Lingkungan Tado - Nunang, Desa Paka, Kec ,Satar Mese				100	200.000.000	199.939.440	99,97	-	-
4	[#] JASA KONSULTAN PENGAWAS DRAINASE LINGKUNGAN				100	60.000.000	59.987.952	99,98	-	-
5	[#] JASA KONSULTAN PERENCANA DRAINASE LINGKUNGAN				100	39.630.330	39.630.330	100	-	-
6	[#] Pembangunan Drainase dalam Kp.Rejo, Kec. Satar Mese Barat				100	99.976.027	99.976.027	100	-	-
7	[#] Pembangunan Drainase dari Sirek menuju ulungali Desa Ponggeoek Kec. satar Mese				100	99.976.207	94.977.397	95	Keterlambatan pengajuan SP2D ke Bank Pembangunan daerah	pembayaran diusulkan di anggaran perubahan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
8	[#] Pembangunan Drainase dari Wae Tueng menuju wae garit desa wae ajang, Kec. Satar Mese				100	199.937.615	189.940.734	95	Keterlambatan pengajuan SP2D ke Bank Pembangunan daerah	pembayaran diusulkan di anggaran perubahan
9	[#] Pembangunan Drainase Desa Rai dari Jembatan Wae Rempo - Ktr Desa Rai, Kec. Ruteng				100	189.975.900	189.975.900	100	-	-
10	[#] Pembangunan Drainase di Kelurahan Wae Belang Kec. Ruteng				100	199.910.212	199.910.212	100	-	-
11	[#] Pembangunan Drainase di kp.Rondong,Desa Lolang,Kec Satar Mese				100	189.975.984	189.975.982	100	-	-
12	[#] Pembangunan Drainase Lingkungan depan SMPN 7 Cibal Desa Wudi Kecamatan Cibal				100	149.969.940	149.969.940	100	-	-
13	[#] Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan di Wotok Desa Riung Kecamatan Cibal				100	149.956.140	149.956.140	100	-	-
14	Pembangunan Tembok Penahan RT 004/RW 002 Kampung Wakel Desa Bangka Lelak Kec. Lelak				100	99.867.975	94.874.576	95	Keterlambatan pengajuan SP2D ke Bank Pembangunan daerah	pembayaran diusulkan di anggaran perubahan
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**					**4.103.975.819**	**3.339.350.052**		-	-
6.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**					**4.103.975.819**	**3.339.350.052**		-	-
6.1.2	**Sub KegiatanPembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**			**85,35**	**3.339.350.052**	**3.339.350.052**	**81,37**	-	-
	Belanja Operasional				100	68.051.000,00	52.971.000		-	-
	belanja modal								-	-
1	[#] Jasa Konsultan Pengawasan Penataan Bangunan dan lingkungan pertokoan kecamatan Langke Rembong				100	100.000.000	99.995.000	100	-	-
2	[#] Jalan Lingkungan Pertigaan Kp,Rega-SMPN Pongkor,Kec,Satar Mese				100	200.000.000	189.735.900	94,87	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
3	[#] KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DALAM KOTA RUTENG				100	140.000.000	99.833.400	71,31	-	-
4	[#] KONSULTAN PERENCANA PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DALAM KOTA RUTENG				100	120.000.000	99.900.000	83,25	-	-
5	[#] Pekerjaan Jalan Setapak (Paving Block) di Ngencung,Kel Watu, Kec. Langke Rembong				100	199.960.026	189.962.025	95	-	-
6	[#] PEKERJAAN Setapak di Dsn Poncong,Desa Lolang, Kec. Satar Mese				100	199.945.975	189.948.676	95	-	-
7	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kota Cancar (Lanjutan)				100	300.000.000	300.000.000	100	-	-
8	[#] PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DALAM KOTA RUTENG				100	284.198.682	269.988.748	95	-	-
9	[#] pembangunan jalan Lingkungan Rabat/Paving Di Kel. Mbaumuku Kec. Langke Rembong				100	125.000.000	124.859.000	99,89	-	-
10	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.003,RT,005,Kel Waso, Kec. Langke Rembong				100	150.000.000	149.962.000	99,97	-	-
11	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.011,RW.003 DAN RT 016,RW.004, KEL.WALI Kec. Langke Rembong				100	149.855.418	149.855.418	100	-	-
12	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan Ruas Pertigaan Kp.Ngkaer-SDI Ine Nggajah Desa Ngaker,Kec,Satar Mese				100	199.946.242	189.948.930	95	-	-
13	[#] Pembangunan Lingkungan RT.035,Rw,04,Kel Karot, Kec. Langke Rembong				100	199.943.678	99.971.839	50	-	-
14	[#] Pembangunan Pedestrian Dalam Kota Ruteng				100	292.511.373	277.885.830	95	-	-
15	[#] Penataan Kawasan Pemukiman Kp.Ladur,Jalan Lingkungan (Paving) Natas Ladur,Kec,Cibal				100	74.976.721	74.976.721	100	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
16	[#] Peningakatan Jalan Lingkungan RT.10,RW 05 Hombel,Kel,Mbaumuku Kec. Langke Rembong				100	150.000.000	142.465.800	94,98	-	-
17	[#] Peningkatan Jalan Lingkungan Paving ,RT 17,18,19 Kp.Ngawe, Kel. Pau Kec. Langke Rembong				100	149.978.972	142.480.023	95	-	-
18	[#] Peningkatan Jalan Lingkungan Paving ,RT 20 Kp.Ngawe,Kel Pau Kec. Langke Rembong				100	149.977.215	149.977.215	100	-	-
19	[#] Peningkatan Jalan Stapak Ruas Jalan RT.004.RW.001 menuju Gendang Ntala,Kel,Watu Kec. Langke Rembong				100	99.956.040	99.956.040	100	-	-
20	[#] Ruang Terbuka Publik Dalam Kota Ruteng				0.00	500.000.000,00	-	-	lokasi kegiatan bersinggungan dengan jalan negara dan sampai masa tender selesai belum mendapatkan izin terkait dengan penggunaan lokasi tersebut	Menunggu Izin penggunaan lokasi dari APBN
21	Pembangunan TPT Jalan Poka Timung (Perang) Desa Bangka Jong,Kec,Wae Ri,i				100	99.959.801,00	94.961.811	95	Keterlambatan pengajuan SP2D ke Bank Pembangunan daerah	pembayaran diusulkan di anggaran perubahan
22	Pembangunan TPT Menuju Gereja Golo Worok,Kec Ruteng				100	149.714.676,00	149.714.676	100	-	-
7	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**				**96,59**	**461.452.800**	**391.766.800**	84,90	-	-
7.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**				**96,59**	**461.452.800**	**391.766.800**	**84,90**	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
7.1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			100	133.600.800	110.090.800	82,40	-	-
7.1.2	Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota			94.49	286.081.000	242.115.000	84,63	-	-
7.1.3	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			100	41.771.000	39.561.000	94,71	-	-
8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					46.408.276.032	42.136.924.420	90,79	-	-
8.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**					**46.408.276.032**	**42.133.244.420**	**90,79**	-	-
8.1.1	**Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan**	**Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan**			**100**	**598.516.000**	**598.486.000**	**99,99**	-	-
	belanja Operasional					11.040.000	11.010.000		-	-
	Belanja Modal					587.476.000	587.476.000		-	-
1	] Penyusunan data base jalan				100	487.576.000	487.576.000		-	-
2	Penyusunan data base jembatan				100	99.900.000	99.900.000		-	-
8.1.2	**Sub Kegiatan Pembangunan Jalan**	**Panjang Jalan yang Dibangun**			**98.10**	**23.229.554.973**	**20.566.492.283**	**88,54**	-	-
	belanja Operasional				100	551.198.000	484.591.450			
	Belanja Modal									
1	[#] Pembangunan Jalan Bea Sebu-Bandang,Lapen,Kec,Satar Mese Barat				100	1.786.596.138	1.786.596.138	100	-	-
2	Lanjutan Pembangunan Jalan Dari dari cabang Iteng-Nanga Woja Menuju Persawahan cb.Wotol-Kampas Koe,Lapen,Ds,Tal,Kec,Satar Mese				100	119.654.350	59.982.718	50,13	Keterlambatan pengajuan SP2D ke Bank Pembangunan daerah	pembayaran diusulkan di anggaran perubahan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
3	Pembukaan Jalan Baru dusun Makin desa Kajong dusun lemarang desa lemarang, Reok Barat, Kajong				100	150.000.000	150.000.000	100	-	-
4	Pembukaan Jalan Baru Dusun Wunis,Kp.Bapa-Rongkam,Kec,Rahong Utara (Swakelola)				100	200.000.000	199.999.700	100	-	-
5	Pembukaan JALAN BARU Kp. Lecem â€"Kolong Desa Waerenca, Kab. Manggarai, Cibal barat, (Karya Bakti TNI) Swakelola				100	500.000.000	499.999.300	100	-	-
6	Pembukaan Jalan Baru Rua-Kenda,Desa Golo Watu,Kec,Wae Ri,I (Swakelola)				100	200.000.000	199.999.295	100	-	-
7	[#] PENGAWASAN PENANGANAN JALAN DAK (SUMBER DAU)				-	200.000.000	-	-	- Pada tahun anggaran 2022, jumlah paket pembangunan jalan yang didanai dari sumber dana alokasi khusus (DAK) adalah 1 (satu) paket kegiatan, yakni : Pembangunan jalan Bea Sebu - Bandang, Lapen, Kecamatan Satar Mese Barat - dengan pagu pengawasan yang berjumlah Rp.200.000.000,- , dinilai terlalu besar, dan pengawasan kegiatan ini disatukan dengan pengawasan pembangunan jembatan gantung, yang juga didanai dan Sumber Dana Alokasi Umum (DAU)	
8	[#] PENGAWASAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 1)				100	160.000.000	159.459.000	99,66	-	-
9	[#] PENGAWASAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 2)				100	160.000.000	158.732.000	99,21	-	-
10	[#] PENGAWASAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 3)				100	160.000.000	154.348.000	96,47	-	-
11	[#] PENGAWASAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 4)				-	160.000.000	-	-	-	-
12	[#] PENGAWASAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 5)				100	160.000.000	156.781.000	97,99	-	-
13	[#] PENGAWASAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 6)				100	160.000.000	158.732.000	99,21	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
14	[#] Peningkatan Jalan Dalam Kota Anam,Desa Bulan, Lapen,Kecamatan Ruteng				100	236.230.000	236.230.000	100	-	-
15	[#] Peningkatan Jalan Dalam Kota Iteng,Lapen,Kec Satar Mese				100	284.806.000	70.869.000	24,88	Keterlambatan pengajuan SP2D ke Bank Pembangunan daerah	pembayaran diusulkan di anggaran perubahan
16	[#] Peningkatan Jalan Dalam Kota Lelak,Lapen,Kec,Lelak				100	342.124.000	342.124.000	100	-	-
17	[#] Peningkatan Jalan Dalam Kota Narang,Lapen,Kec,Satar Mese Barat				100	391.977.000	391.977.000	100	-	-
18	[#] Peningkatan Jalan Dalam Kota Pagal,Lapen,Kec,Cibal				100	287.193.000	287.193.000	100	-	-
19	[#] Peningkatan Jalan Dalam Kota Reok segmen RT.22 Rw 06,Dusun Jeneluma,Kel.Mata Air,Lapen,Kec,Reok				100	283.399.000	283.399.000	100	-	-
20	[#] Peningkatan Jalan Dalam Kota Ruteng,Segmen Dari Pertigaan Jalan Poco Ndeki Ke Barat menuju SDK Taga Kel. Golo Dukal,Lapen,Kec.L. Rembong				100	250.000.000	228.786.000	91,51	-	-
21	[#] Peningkatan Jalan dari Kp.La,o-Kantor Desa Bangka La,o,Lapen,Kec,Ruteng				100	199.952.614	199.952.614	100	-	-
22	[#] Peningkatan Jalan dari Redang - Pong Pahar Desa Hili Hintir, Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Hilihintir, LAPEN				100	473.737.000	450.050.150	95	-	-
23	[#] Peningkatan Jalan Galang-Lujang,Lapen,Kec,Ruteng				100	238.757.000	238.757.000	100	-	-
24	[#] Peningkatan Jalan Gangkas-Pedeng,Lapen,Kec, Cibal Barat				100	289.315.000	289.315.000	100	-	-
25	[#] Peningkatan Jalan Golo Namut-Pedang,Wotol,Lapen,Ds.Nao,Kec,Satar Mese				100	283.615.000	85.084.500	30	-	-
26	[#] Peningkatan Jalan Kampung Damer Desa watu Tango Kec. Reok, menuju kampung kilit Desa Torong koe kec. Reok Barat, Kab. Manggarai, Reok, Watu Tango				100	287.980.000	273.581.000	95	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
27	[#] Peningkatan Jalan Kembur - Hawut - Kp. Roang,Lapen, Kec. Satar Mese Utara				100	397.926.000	397.926.000	100	-	-
28	[#] Peningkatan Jalan Lapen dari Cab.Bahong-Novisiat menuju Komunitas unio Projo St,Klaus Kuwu,Kec,Ruteng				100	199.988.231	199.988.231	100	-	-
29	[#] Peningkatan Jalan Lingko Ndiring, Lingko laru, Lingko Roga, Lingko Nderu, Kab. Manggarai, Langke Rembong, Karot,lapen				100	383.492.000	383.492.000	100	-	-
30	[#] Peningkatan Jalan Lingko Toe-Bangka Kenda,Telford,Kec, Wae Ri,i				100	199.961.000	99.980.500	50	-	-
31	[#] Peningkatan Jalan Lungar-Mesir-Mano,Lapen,Kec,Satar Mese				100	478.255.000	454.342.250	95	-	-
32	[#] Peningkatan Jalan Menuju Pekuburan Langke Teras,Lapen,Kec,Rahong Utara				100	200.000.000	189.952.541	94,98	-	-
33	[#] Peningkatan Jalan meti - sdi golo watu + dalam kpg golo watu, Lapen,Kec. Wae Rii				100	398.000.000	398.000.000	100	-	-
34	[#] Peningkatan Jalan Mondo-Ojang,Lapen,Kecamatan Reok Barat				100	400.000.000	380.756.236	95,19	-	-
35	[#] Peningkatan Jalan Mowol-Repok,Lapen,Kec,Satar Mese Utara				100	290.910.000	276.364.500	95	-	-
36	[#] Peningkatan Jalan Nanga Ramut-Ros,Lapen,Kec,Satar Mese Barat				100	199.942.697	199.942.697	100	-	-
37	[#] Peningkatan Jalan Nggori Desa Bangka Jong,Kec. Wae Rii, TELFORD				100	200.000.000	99.963.923	49,98	-	-
38	[#] Peningkatan Jalan Papang-Torok-Ulu Belang,Lapen,Kec,Satar Mese				100	382.253.000	382.253.000	100	-	-
39	[#] Peningkatan Jalan Pau-Bere,Lapen,Kec,Rahong Utara				100	497.807.000	497.807.000	100	-	-
40	[#] Peningkatan Jalan Pekuburan Rejo-Pampa-Liang Motang,Lapen,Kec, Satar Mese Barat				100	199.860.000	199.860.000	100	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
41	[#] Peningkatan Jalan Rangkeng - Golo Ropong, Lapen,Kec. Satar Mese Barat				100	287.986.000	287.986.000	100	-	-
42	[#] Peningkatan Jalan Ringkas Menuju Lingko Radit, Kab. Manggarai, Perak,Kec,Cibal,LAPEN				100	479.996.000	479.996.000	100	-	-
43	[#] Peningkatan Jalan Ruas Jalan Nege-Kaca-Timbu ,Desa Wae Ajang,Kec,Satar Mese,Lapen				100	199.940.728	199.940.728	100	-	-
44	[#] Peningkatan Jalan Ruas Lando - Lalong, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, LAPEN				100	237.030.000	237.030.000	100	-	-
45	[#] Peningkatan Jalan SD Koko - Akel, LAPEN, Kec. Cibal				100	389.681.000	389.681.000	100	-	-
46	[#] Peningkatan Jalan SD Langgo - Kampung Langgo,Lapen,Kec,Satar Mese				100	287.602.000	273.221.900	95	-	-
47	[#] Peningkatan Jalan Sp. Lait - Tongke - Topak - Langke, Lapen,Kec. Rahong Utara				100	535.464.000	535.464.000	100	-	-
48	[#] Peningkatan Jalan Teflord Lingko Ranggo-Ndaher-Lekos,Mangko Pengang,Kel,Satar Tacik,Kec,L.Rembong				88,62	135.000.000	67.482.386	49,99	Pekerjaan tidak selesai sampai akir masa kontrak karena kelalaian kontraktor	1. diberikan tambahan waktu 50 hari kalender sejak berakirnya kontrak 2. kontraktor membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan sisa pekerjaan 3. pembayaran sisa pekerjaan diusulkan di anggaran perubahan
49	[#] Peningkatan Kapasitas Jalan Dalam Desa Golo Ropong,Lapen,Kec, Satar Mese Barat				100	199.751.051	99.875.526	50	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
50	[#] Peningkatan Kapasitas Jalan Dalam Kota Ruteng Ruas dari RPH menuju Belakang Terminal Mena.Lapen,Kel,Wali,Kec,L.Rembong				100	236.748.000	236.748.000	100	-	-
51	[#] Peningkatan Kapasitas Jalan Dalam Kota Ruteng Segmen Di samping susteran Putra putri Kebijaksanaan menuju jalan lingkar luar, lingko satar, RT 05 RW 002 Kel. Poco Mal,Telford,Kec.L.Rembong				100	199.875.310	199.875.310	100	-	-
52	[#] Peningkatan Kapasitas Jalan Dalam Kota Ruteng Segmen Lingko Bakar-Lingko Pau,Telford ,Kel.Wali,Kec,L.Rembong				100	199.959.822	199.959.822	100	-	-
53	[#] Peningkatan Kapasitas Jalan Dari Dusun Gulung Menuju Ntaur,LAPEN,Desa Gulung,Kec.Satar Mese Utara				100	199.963.808	199.963.808	100	-	-
54	[#] Peningkatan Kapasitas Jalan dari Telfort ke Lapen Cumbi Dalo,Kec,Ruteng				100	199.927.257	99.963.629	50	-	-
55	[#] Peningkatan Kapasitas Jalan Dusun Rembong Desa Dimpong perbatasan Manggarai Barat, Kab. Manggarai, Rahong Utara, Dimpong,lapen				100	478.780.000	478.780.000	100	-	-
56	[#] Peningkatan Kapasitas Jalan ke Telford di Pemukiman Kumba Kel,Satar Tacik,Kec,L.Rembong				100	175.000.000	174.916.905	99,95	-	-
57	[#] Peningkatan Kapasitas Jalan Lapen Golo Borong Ponto,Ds,Ladur,Kec ,Cibal				100	199.941.000	199.941.000	100	-	-
58	[#] Peningkatan Kapasitas Jalan Lingko Ntemu, Kec,L.Rembong ,Telford				100	199.967.000	199.967.000	100	-	-
59	[#] Peningkatan Kapasitas Jalan menuju kantor desa wae ajang-Gegang Wae Tueng,Ds,Wae Ajang,Telford				100	199.910.544	99.955.272	50	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
60	[#] Peningkatan Kapasitas Jalan Telford Tiwu Tana (SMPN4 BeaNio,Kec,Cibal-Menuju Kp.Rengket,Kec,Cibal Barat				100	149.961.983	149.961.983	100	-	-
61	[#] Peningkatan Kapasitas Jalan Telford Wetok-Lando,,Kec,Cibal Barat				100	149.920.408	142.424.388	95	-	-
62	[#] Peningkatan Ruas Jalan dari Kantor Desa Pong Murung menuju Ke Bengkel PU Lumu,Lapen,Kec Ruteng				100	199.927.322	199.927.322	100	-	-
63	[#] Peningkatan Ruas jalan dari SMPN Rangkang Kalo menunju SMPN Pau,Desa Benteng Tubi,Kec,Rahong Utara,Lapen				100	199.959.828	199.959.828	100	-	-
64	[#] Peningkatan Struktur Jalan Ling - Nereng, LAPEN, Kec. Satar Mese Utara				88,75	278.784.000	235.049.760	84,31	Pekerjaan tidak selesai sampai akir masa kontrak karena kelalaian kontraktor	1. diberikan tambahan waktu 50 hari kalender sejak berakirnya kontrak 2. kontraktor membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan sisa pekerjaan 3. pembayaran sisa pekerjaan diusulkan di anggaran perubahan
65	[#] Peningkatan Struktur Jalan Lujang-Kuwu, LAPEN, Kec. Cibal				100	374.716.000	374.716.000	100	-	-
66	[#] Relokasi Jalan Toda-Lemarang,Kec.Reok Barat (Swaekelola)				100	250.000.000	249.999.100	100	-	-
67	] Peningkatan Jalan Kp. Redong - Lingko Po'ong, Kel. Wali, Lapen Kec. Langke Rembong				100	200.000.000	199.868.000	99,93	-	-
	Belanja Modal Jalan Lainnya					-	-		-	-
68	[#] PERENCANAAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 1)				100	99.700.000	99.700.000	100	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
69	[#] PERENCANAAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 2)				100	99.644.256	99.644.256	100	-	-
70	[#] PERENCANAAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 3)				100	99.700.000	99.700.000	100	-	-
71	[#] PERENCANAAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 4)				100	99.627.650	99.627.650	100	-	-
72	[#] PERENCANAAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 5)				100	99.749.595	99.749.595	100	-	-
73	[#] PERENCANAAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 6)				100	99.704.196	99.704.196	100	-	-
74	[#] Perencanaan Teknis Jalan Dana Alokasi Khusus(DAK) Tahun Anggaran 2023				100	782.257.000	782.257.000	100	-	-
75	Pembukaan Jalan Baru Kp.Jengkalang - SDN Jengkalang, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok(Swakelola)				100	150.000.000	150.000.000	100	-	-
76	Pembukaan Jalan Baru Kp.Munta - Kp.Tureng, Desa Nggalak, Kecamatan Reok Barat(Swakelola)				100	240.000.000	239.999.900	100	-	-
77	Pembukaan Jalan Baru Langke NORANG - LALA, DESA CIRENG, KECAMATAN SATAR MESE UTARA					150.000.000	-	-	-	-
78	Pembukaan Jalan Baru Sp. Wae Uwu - Sp. Gendang Umung, Kec. Satar Mese					100.000.000	-	-	-	-
79	pembukaan Jalan Baru Ulu Wae - Limba, Kecamatan Satar Mese(Swakelola)					150.000.000	-	-	- Program kegiatan ini tidak direalisasikan karena adanya kesalahan dalam nomenklatur kegiatan. - Pada ruas jalan ini, pembukaan jalan barunya hanya sekitar 200 meter, dari jembatan gantung ke ujung jalan eksisting. - Ruas jalan Ulu Wae - Limba, sudah dibuka pada tahun 2017 hanya kondisinya sudah tertutup	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
80	Peningkatan Jalan Lingko Toe, Dusun Kaweng, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Ri'i					199.840.000	189.997.150	95,07	-	-
81	Peningkatan Jalan Kp. Pongkor, Kec. Satar Mese (Rabat Beton)					100.000.000	94.882.200	94,88	-	-
	KDP					-	-		-	-
82	] Peningkatan Jalan Bolol - Wae Pesi Hulu, Lapen + Telford, Kecamatan Reok Barat					191.862.055	191.862.055	100	-	-
83	Peningkatan Jalan Sp.Toe - Wangkal - Sambor, Lapen, Kecamatan Reok Barat					541.748.130	-	-	-	-
	SUMBER DANA PINJAMAN DAERAH					-			-	-
84	[#] Pengawasan Penanganan Jalan Paket 1				-	35.000.000	-	-	Dana yang ada ini disiapkan untuk pengawasan pembangunan jalan yang bersumber dari dana pinjaman daerah tahun anggaran 2022, direncanakan untuk pelaksanaan 2 (dua) Paket Pembangunan Jalan, yang bersumber dari Dana Pinjaman Daerah, yakni : 1. Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Langke - Teras - Liang Bua, HRS, Kecamatan Rahonh Utara + Sondeng - Liang Bua, HRS, Kecamatan Wae Ri'i 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Ruteng - Golo Cala, HRS, Kecamatan Langke Rembong/Satarmese dalam Proses Pelelangan, ternyata tidak ada rekanan yang memasukan dokumen penawaran. pelelangan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, dan hasilnya tetap tidak ada Perusahaan yang berminat memasukan dokumen Penawaran. Sehingga, Pelaksanaan kegiatan ini dibatalkan. Dengan batalnya pelaksanaan kegiatan ini, Anggaran Pengawasan kegiatan ini dibatalkan.	
85	Perencanaan Penanganan Jalan Paket 1				100	100.000.000	99.750.100	99,75	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
86	Perencanaan Penanganan Jalan Paket 2				100	100.000.000	99.795.771	99,80	-	-
8.1.3	**Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan**	**Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi**			**99.90**	**1.369.999.000**	**1.331.622.721**		-	-
	Belanja Operasional				100	54.719.000	52.839.000		-	-
	Belanja Modal								-	-
1	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Ketang - Gelong(Segmen Jbt.Wae Dese), Kecamatan Lelak				100	478.780.000	454.841.000		-	-
2	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Lait - Tongke - Topak(Segmen Jbt.Wae Lawar), Kecamatan Rahong Utara				100	300.000.000	287.630.233		-	-
3	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Pagal - Wae Naong, Kecamatan Cibal				100	336.500.000	336.500.000		-	-
4	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Wae Uwu - Lungar, Kecamatan Satar Mese				100	200.000.000	199.812.488		-	-
8.1.4	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan**	**Panjang Jalan yang Direhabilitasi**			**96,86**	**15.615.832.800**	**14.203.357.051**		-	-
	BELANJA OPERASI					**337.746.000**	**145.926.000**		-	-
	Belanja Modal					**15.278.086.800**	**14.057.431.051**		-	-
1	[#] Pemeliharaan Jalan Cancar-Galang-Dimpong,Lapen,Kec,Rahong Utara				100	478.780.000	454.841.000		-	-
2	[#] Pemeliharaan Jalan Compang Dari-Tengkulese,Lapen,Kec Rahong Utara				100	287.998.000	287.998.000		-	-
3	[#] Pemeliharaan Jalan Copu-Kumbang,Lapen,Kec,Reok				100	242.056.023	229.953.222		-	-
4	[#] Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Ruteng,Segmen RT 34, RT 33, RT 32, RT 035, RT 034, RT 033, RT 9, RT 3, Jalan Eforbia ,Kel,Karot Kec,L.Rembong				100	472.907.000	472.907.000		-	-
5	[#] Pemeliharaan Jalan dari Pertigaan Rai Menuju Puskesmas Baru Cancar,Lapen,Kec,Ruteng				100	250.000.000	239.463.985		-	-
6	[#] Pemeliharaan Jalan Lapen Dalam kota Kecamatan Wae Ri,I Ruas: (1). Timung Rt. 12. (2). Timung Rt. 07. (3) Timung Rt. 06. (4)Timung Rt. 05,Ds.Golo Cador,Kec,Wae Ri,i				100	400.000.000	349.352.450		-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
7	[#] Pemeliharaan Jalan Melo-Bangka Sumba,Lapen,Kec,Satar Mese				100	239.999.000	239.999.000		-	-
8	Pemeliharaan Jalan Ngandong - Latung, Lapen, Kecamatan Cibal Barat				100	287.990.000	287.990.000		-	-
9	[#] Pemeliharaan Jalan Rakas-Dopo,Lapen,Kec, Cibal				100	200.000.000	199.840.206		-	-
10	[#] Pemeliharaan Jalan Rejeng-Welu-Gulung,Lapen,Kec,Lelak				100	238.036.000	238.036.000		-	-
11	[#] Pemeliharaan Jalan Todo-Lukup-Rangkeng,Lapen,Kec,Satar Mese Utara				100	259.199.000	259.199.000		-	-
12	[#] Pemeliharaan Periodik Bea Mese - Lando, Lapen, Kec. Cibal				100	243.307.000	243.307.000		-	-
13	[#] Pemeliharaan Periodik Dalam Kota Iteng , Kec. Satar Mese				100	383.600.000	383.600.000		-	-
14	[#] Pemeliharaan Periodik Dalam Kota Narang, Lapen, Kec. Satar Mese Barat				100	289.004.000	289.004.000		-	-
15	[#] Pemeliharaan Periodik Dalam Kota Reok Barat,Lapen, Kec. Reok Barat				100	241.211.000	229.150.450		-	-
16	[#] Pemeliharaan Periodik Dalam Kp.Wae Ri,i,,Lapen,Kec.Wae Ri,i,				100	391.212.000	391.212.000		-	-
17	[#] Pemeliharaan Periodik Dintor - Sdi Wongka - Denge, Lapen, Kec. Satar Mese Barat				100	575.990.000	575.990.000		-	-
18	[#] Pemeliharaan Periodik Jalan Sp.Lait-Tongke-Topak,Lapen,Desa Kakor,Kec,Rahong Utara				100	250.000.000	237.210.000		-	-
19	[#] Pemeliharaan Periodik Jalan Wangkung menuju Kantor Desa Pong Murung,Kec,Ruteng				100	200.000.000	189.952.146		-	-
20	[#] Pemeliharaan Periodik Lapen Muwur - Bapa - Wae Racang, Lapen, Kec. Rahong Utara				100	274.352.000	274.352.000		-	-
21	[#] Pemeliharaan Periodik Lapen Poka - Mendo - Bts. Kabupaten, Lapen, Kec. Wae Rii				80	250.000.000	72.749.400		-	-
22	[#] Pemeliharaan Periodik Lenteng - Ndehes, Lapen, Kec. Rahong Utara				100	479.990.000	455.990.500		-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
23	[#] Pemeliharaan Periodik Lous - Bea Mese, Lapen, Kec. Cibal				100	285.115.000	285.115.000		-	-
24	[#] Pemeliharaan Periodik Lungar - Ulumbu, Lapen, Kec. Satar Mese				100	478.780.000	478.780.000		-	-
25	[#] Pemeliharaan Periodik Sp. Keba - Mowol - Gulung, Lapen, Kec. Satar Mese Utara				100	478.789.000	454.849.550		-	-
26	[#] Pemeliharaan Periodik Wae Manis - Rabo, Lapen, Kec. Reok				100	268.793.000	268.793.000		-	-
27	[#] Pemeliharaan Periodik Wangkung - Rai, Lapen, Kec. Ruteng				100	200.000.000	199.949.505		-	-
28	[#] Pemeliharan Jalan Keka-Rejo-Lalang,Lapen,Kec,Satar Mese Barat				100	245.147.141	232.889.783		-	-
29	[#] PENGAWASAN REHAB/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN SUMBER DAU (PAKET 1)				100	150.000.000	143.212.000		-	-
30	[#] PENGAWASAN REHAB/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN SUMBER DAU (PAKET 2)				-	150.000.000			-	-
31	[#] PENGAWASAN REHAB/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN SUMBER DAU (PAKET 3)				100	150.000.000	147.259.000		-	-
32	[#] PENGAWASAN REHAB/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN SUMBER DAU (PAKET 4)				100	150.000.000	148.445.000		-	-
33	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dalam Kota Cancar, LAPEN (Popor),Kec,Ruteng				100	287.980.000	287.980.000		-	-
34	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Pagal, Lapen, Kec.Cibal				100	290.213.000	275.702.350		-	-
35	[#] Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Dalam Kota reok, Lapen,Kec.Reok				100	364.278.000	364.278.000		-	-
36	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kp.Todo Menuju Rumah Gendang Todo,Desa Todo,Kec,Satar Mese Utara				100	345.590.000	106.377.000		-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
37	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kp,Wae Ri,I Jalan Negara-Wade,Lapen,Kec.Wae Ri,i				100	428.551.000	428.551.000		-	-
38	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dari Jalan Negara menuju SMAN 2 Purang,Ds.Compang Namut,Kec.Ruteng				100	377.167.895	358.309.500		-	-
39	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dari Jbt Wae Lelang-Kp.Lamba-SMUN1 Lelak ,Lapen,Ds,Ketang,Kec,Lelak				100	200.000.000	199.967.237		-	-
40	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kois-Nanga,Lapen,Kec,Cibal Barat				100	379.848.000	360.855.600		-	-
41	[#] Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Kp.Cumbi-Gereja Paroki Wangkung,DS.Cumbi,Kec,Ruteng				95	100.000.000	49.991.018		Pekerjaan tidak selesai sampai akir masa kontrak karena kelalaian kontraktor	1. diberikan tambahan waktu 50 hari kalender sejak berakirnya kontrak 2. kontraktor membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan sisa pekerjan 3. pembayaran sisa pekerjan diusulkan di anggaran perubahan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
42	[#] Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan lapen dari Kp.Werong-Menuju Mbohang,Ds.Bangka Lelak,Kec,Lelak				95	200.000.000	180.469.125		Pekerjaan tidak selesai sampai akir masa kontrak karena kelalaian kontraktor	1. diberikan tambahan waktu 50 hari kalender sejak berakirnya kontrak 2. kontraktor membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan sisa pekerjaan 3. pembayaran sisa pekerjaan diusulkan di anggaran perubahan
43	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nanu-Buar-Tebo,Lapen,Kec,Rahong Utara				100	200.000.000	189.948.883		-	-
44	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nanu-Rongkam,Ds,Bangka Ruang,Kec,Rahut				100	200.000.000	189.952.795		-	-
45	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ndehes-Pane,Desa Compang Dari,Kec,Rahong Utara				100	200.000.000	189.962.721		-	-
46	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ndehes-Redong,Desa Buar,Kec,Rahong Utara				100	200.000.000	189.951.974		-	-
47	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pagal - Wae Naong, Lapen, Kecamatan Cibal				100	383.990.000	383.990.000		-	-
48	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Ra,ong - SDI Gonggong-Urang,Kec,Lelak				100	381.547.663	114.464.299		-	-
49	[#] Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Wudi - Lujang, Lapen, Kec.Cibal				100	200.000.000	199.949.546		-	-
50	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan periodik Pong Lengor - Bonar - Dimpong, Lapen, Kec.Rahong Utara				100	500.000.000	478.773.728		-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
51	belanja Modal Jalan Lainnya					-	-			
52	[#] PERENCANAAN REHAB/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN SUMBER DAU (PAKET 1)				100	99.779.609	99.779.609		-	-
53	[#] PERENCANAAN REHAB/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN SUMBER DAU (PAKET 2)				100	99.613.109	99.613.109		-	-
54	[#] PERENCANAAN REHAB/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN SUMBER DAU (PAKET 3)				100	99.900.000	99.900.000		-	-
55	[#] PERENCANAAN REHAB/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN SUMBER DAU (PAKET 4)				100	99.873.360	99.873.360		-	-
56	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Bakar - Rujung - Sp. Sambi, Lapen, Kec. Reok Barat				100	72.500.000	72.500.000		-	-
57	[#] Perencanaan Jalan Rehab/Pemeliharaan				100	75.000.000	74.900.000		-	-
8.1.4	**Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan**	**Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin**			**99.68**	**1.612.072.128**	**1.585.179.572**	**98,33**	-	-
	BELANJA OPERASI				**100**	**687.072.128**	**676.291.670**	**98,43**		
	BELANJA MODAL					**925.000.000**	**908.887.902**	**98,26**		
1	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Cibal Barat(Swakelola)				100	50.000.000	50.000.000	100	-	-
2	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Cibal(Swakelola)				100	75.000.000	75.000.000	100	-	-
3	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Langke Rembong(Swakelola)				100	150.000.000	148.750.206	99,17	-	-
4	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Lelak(Swakelola)				100	75.000.000	66.807.687	89,08	-	-
5	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Rahong Utara(Swakelola)				100	50.000.000	49.196.146	98,39	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
6	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Reok Barat(Swakelola)				100	75.000.000	74.000.849	98,67	-	-
7	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Reok(Swakelola)				100	75.000.000	73.838.614	98,45	-	-
8	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Ruteng(Swakelola)				100	75.000.000	74.425.820	99,23	-	-
9	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Satar Mese Barat(Swakelola)				100	75.000.000	74.999.994	100	-	-
10	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Satar Mese utara(Swakelola)				100	75.000.000	73.975.418	98,63	-	-
11	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan wae Ri'i(Swakelola)				100	75.000.000	73.998.568	98,66	-	-
12	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Wialayah kecamatan Satar Mese(Swakelola)				100	75.000.000	73.894.600	98,53	-	-
8.1.5	**Pembangunan Jembatan**	**Panjang Jembatan yang Dibangun**			**97.18**	**3.548.051.131**	**3.422.624.840**	96,46		
	BELANJA OPERASI					**100.739.000**	**76.639.000**	**76,08**		
	BELANJA MODAL					**3.447.312.131**	**3.345.985.840**	**97,06**		
1	[#] Pembangunan Deuker Wae Ratung dan Deuker Wae Nito, Ds.Ngkaer, Kec.Satar Mese					100.000.000	-	-	- Program kegiatan ini tidak dilaksanakan karena proses pengadaannya terkendala pada aplikasi LPSE yang mengalami gangguan, sehingga pejabat pengadaan tidak dapat melaksanakan proses pemilihan. Keadaan ini berlangsung sampai dengan akhir november 2022 - Pada saat kegiatannya sudah bisa diproses, jangka waktu pelaksanaan sudah tidak mencukupi, sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan	
2	[#] Pembangunan Jembatan wae Kuli II(Jalan Pendekat), Desa lemarang, Kecamatan Reok barat(Lanjutan)(Swakelola)				100	250.000.000	248.787.491	99,51	-	-
3	[#] Perencanaan pembangunan Jembatan				100	75.000.000	74.992.488	99,99	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
4	[#] Pengawasan Pembangunan Jembatan				100	75.000.000	74.989.380	99,99	-	-
5	[#] Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung(bentang maksimal 120 M), Kecamatan Satar Mese				100	1.457.312.131	1.457.312.131	100	-	-
6	[#] (*)Pembangunan Jembatan Wae kebong(Lait - Tongke), Kecamatan Ruteng/Rahong Utara(Lanjutan)				100	610.000.000	609.910.000	99,99	-	-
7	[#] (*)Pembangunan Jembatan Wae Pangajaran, Kec. Satar Mese(Lanjutan)				100	750.000.000	750.000.000	100	-	-
8	Pengawasan Pembangunan Jembatan				100	30.000.000	30.000.000	100	-	-
9	Perencanaan Pembangunan Jembatan				100	100.000.000	99.994.350	99,99	-	-
8.1.6	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan**	**Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi**			**100**	**434.250.000**	**425.481.953**	**97,98**	-	-
	BELANJA OPERASI				**100**	**9.250.000**	**4.450.000**	**48,11**		
	BELANJA MODAL					**425.000.000**	**421.031.953**	**99,07**		
1	] Rehabilitasi/Pemeliharaan Driff Ruas Jalan Todo - Ramut - Dintor, Kecamatan Satar Mese/Satar Mese Barat(Swakelola)				100	200.000.000	197.621.930	98,81	-	-
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wae Kang, Kec.Rahong Utara				100	50.000.000	49.833.538	99,67	-	-
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wae Locak(Depan Katedral Baru), Kecamatan Langke Rembong				100	100.000.000	99.999.684	100	-	-
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wae Kang, Kec.Rahong Utara				100	75.000.000	73.576.801	98,10	-	-
9	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**				**79.19**	**257.028.700**	**192.365.500**		-	-
9.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**				**57.34**	**124176000**	**65944600**		-	-
9.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan			63.85	111.263.000	65.781.600		-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
9.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi			1.26	12.913.000	163.000	1,26	tidak terlaksana karena adanya perubahan aturan terkait skema pembiayaan pelatihan tenaga terampil	Dianggarkan Biaya sertifikasi ke APBD
9.2	**Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**99.81**	**102.936.500**	**101.414.700**	**98,52**	-	-
9.2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI			99,60	50.036.000	49.774.200	99,48	-	-
9.2.2	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Jumlah Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur			100	8.228.000	7.888.000	95,87	-	-
9.2.3	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha			100	5.660.000	5.000.000	88,34	-	-
9.2.4	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan			100	39.012.500	38.752.500	99,33	-	-
9.3	**KegiatanPengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**				**99**	**29.916.200**	**25.006.200**	**83,59**	-	-
9.3.1	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			99	29.916.200	25.006.200	83,59	-	-
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**				**99.31**	**965.132.620**	**909.004.820**		-	-
10,1	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**				**99.35**	**412.354.500**	**390.152.400**	**94,62**	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
10.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			100	241.897.000	234.537.100	96,96	-	-
10.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			98,43	170.457.500	155.615.300	91,29	-	-
10.2	**KegiatanKoordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**				**98.89**	**193.705.420**	**190.149.720**	**98,16**	-	-
10.2.1	Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang			97,50	193.705.420	190.149.720	98,16	-	-
10.3	**KegiatanKoordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**				**100**	**359.072.700**	**328.702.700**	**91,54**	-	-
10.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			100	199.247.200	188.365.200	94,54	-	-
10.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang			100	159.825.500	140.337.500	87,81	-	-
	Belanja Operasional					159.825.500	140.337.500			
	TOTAL					**85.157.558.290**	**78.788.225.300**	**92,52**		

Sumber: Dinas PUPR , Januari 2023

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2022 menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.32.

Tabel 3.32
Pengukuran Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya akses terhadap permukiman layak huni	Rasio rumah layak huni	90,80%	92,56%	101,94
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	90,11%	64,97%	72,10
		Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani	5,20%	58,38%	1.122,69
		Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	32,50%	11,36%	34,95
		Persentase rumah tangga yang teraliri listrik	44,89%	40,13	89,40
		Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum	33,60%	46,78	139,22
		Rata-rata			**260,05**
		Kategori		Memuaskan	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Januari 2023

a. Rasio Rumah Layak Huni

Total Rumah yang ada di Kabupaten Manggarai sebanyak 69.439 unit. Dari jumlah ini, sampai dengan tahun 2022, terdapat 64.275 unit dengan kategori rumah layak huni. Dengan demikian persentase rumah tidak layak huni yang masih harus ditangani mencapai 5.164 unit atau sebesar 7,44%. Sedangkan sebaran proyek bantuan rumah layak huni dapat dilihat pada tabel 3.33.

Tabel.3.33
Sebaran Proyek Bantuan Rumah Layak Huni
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah s.d. Tahun 2022

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Bantuan Perumahan								
1	KSPN	-	-	-	-	-	28	-	-
2	Bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	-	400	388	290	100	200	140	-
3	Bantuan stimulan Perumahan Swadaya Provinsi (BSPSP)	-	-	-	40	19	-	-	-
4	DAK			487	247	170	135	126	-
5	DAU	536	656	413	232	104	50	-	-
6	Dana Desa/APBDes	792	1.937	1.449	2.184	2.323	1.796	801	-
7	DAK/DAU (Dana Sharing)	-	-	-	-	-	-	-	180
	Jumlah	**1.328**	**2.993**	**2.737**	**2.993**	**2.716**	**2.209**	**1.067**	**180**
	Total								**16.223**
	Rumah Layak Huni s/d 2022	**48.052**	**52.373**	**55.110**	**58.103**	**60.819**	**63.028**	**64.095**	**64.275**
	Rumah Tidak Layak Huni s/d 2022	**20.059**	**17.066**	**14.329**	**11.336**	**8.620**	**6.411**	**5.344**	**5.164**
	Jumlah Rumah Tahun 2022								**69.439**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Januari 2023

b. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Rumah Layak Huni

Jumlah seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Manggarai yaitu sebanyak 98.932 Unit. Dari Jumlah tersebut, rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni sebanyak 64.275 Unit. Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 64,97%.

c. Persentase Luas Wilayah Kumuh yang Tertangani

Sampai dengan tahun 2022, luas wilayah kumuh di Kecamatan Langke Rembong yang tertangani sebesar 59,77 Ha atau 58,38% dari jumlah luas wilayah kumuh seluruhnya sebesar 102,38 Ha, sehingga sisa luas wilayah kumuh mencapai 42,61 Ha (41,62%). Untuk penanganan KOTAKU pada tahun 2022, diberikan kepada 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Watu dan Kelurahan Karot, dengan rincian pada tabel 3.34.

Tabel 3.34
Penanganan KOTAKU Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP.)
1.	Kelurahan Watu	
	- Pembangunan drainase dan plat beton dengan volume 50,33 meter	40.000.000
2	Kelurahan Karot	
	- Rehab jalan setapak dengan volume 79,7 m	10.208.000
	- Pembangunan saluran pembuangan air limbah rumah tangga dengan volume 98 m	29.792000
3	Dana Badan Keswadayaan Masyarakat	10.000.000
	Jumlah	**90.000.000**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Januari 2023

d. **Persentase Rumah Korban Bencana yang Direhabilitasi.**

Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi sebanyak 5 unit, rumah korban bencana sebanyak 44 unit atau sebesar 11,36%.

e. **Persentase Rumah Tangga yang Teraliri Listrik.**

Sampai dengan tahun 2021, Total Rumah Tangga yang teraliri listrik yaitu sebanyak 39.614 rumah. Bantuan Sambungan Meteran Listrik Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tahun 2022 sebanyak 90 unit, sehingga total rumah tangga yang teraliri listrik pada tahun 2022 sebanyak 39.704 dari jumlah rumah rumah tangga seluruhnya sebanyak 98.932.

f. **Persentase Unit Kawasan Permukiman yang Terpasang Lampu Penerangan Jalan Umum**.

Jumlah kawasan permukiman yang tersebar pada 26 kelurahan dan 145 desa sebanyak 171 unit. Dari 171 unit kawasan permukiman, baru terpasang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebanyak 80 tempat (46,78%) yang tersebar di kecamatan Langke Rembong. Sedangkan 11 Kecamatan lainnya belum terpasang.

b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 4 program dan 9 kegiatan untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Alokasi anggaran belanja sebesar **Rp.11.909.581.172,-** dan capaian realisasi sebesar **Rp.11.785.361.102,- (98,95%).** Selengkapnya ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.35.

Tabel 3.35
Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**11.819.581.172**	**11.695.361.102**	**98,44**
	Belanja Pegawai	3.122.537.798	3.021.401.832	96,76
	Belanja Barang dan Jasa	8.697.043.374	8.673.959.270	99,73
2.	**Belanja Modal**	**90.000.000**	**90.000.000**	**100**
	TOTAL	**11.909.581.172**	**11.785.361.102**	**98,95**

Sumber: DPRKP Kabupaten Manggarai, 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai indikator dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, disajikan dalam tabel 3.36.

Tabel 3.36
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, asset dan dokumen penting lainnya**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**3.410.869.122**	**3.300.844.552**	**96,8**	**-**	**-**
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**6.200.000**	**6.200.000**	**100**	**-**	**-**
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	5.200.000	5.200.000	100	-	-
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	1.000.000	1.000.000	100	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**3.122.345.122**	**3.020.002.832**	**96,7**	**-**	**-**
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.057.287.798	2.958.101.832	96,8	-	-
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					65.057.324	61.901.000	95,1	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**230.674.000**	**227.863.053**	**99**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100	5.000.000	5.000.000	100	-	-
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100	49.333.500	49.187.000	100	-	-
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100	4.200.000	4.200.000	100	-	-
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100	32.390.000	32.390.000	100	-	-
1.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100	51.230.500	51.230.500	100	-	-
1.3.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100	1.680.000	910.000	54	-	-
1.3.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					86.840.000	84.945.553	98	-	-
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**22.400.000**	**17.942.800**	**77**	-	-
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000	4.500.000	90	-	-
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					17.400.000	13.442.800	77	-	-
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**29.250.000**	**28.835.867**	**99**	-	-
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					21.000.000	20.645.867	98	-	-
1.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.750.000	5.750.000	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya					2.500.000	2.440.000	98	-	-
2	**Program Pengembangan Perumahan**	**Sasaran: Meningkatnya Akses Terhadap Permukiman Layak Huni**				**128.310.000**	**126.510.000**	**100**	-	-
2.1	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Terwujudnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**				**128.310.000**	**126.510.000**	**100**	-	-
2.1.1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana					128.310.000	126.510.000	99	-	-
3	**Program Kawasan Permukiman**	**Sasaran: Meningkatnya Akses Terhadap Permukiman Layak Huni**				**7.353.602.600**	**7.351.542.600**	**100**	-	-
3.1	**Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Sasaran: Terwujudnya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**				**584.677.600**	**584.597.600**	**100**	-	-
3.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh					584.677.600	584.597.600	100	-	-
3.2	**Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10(sepuluh) Ha**	**Sasaran: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10(sepuluh) Ha**	100	100		6.768.925.000	6.766.945.000	100	-	-
3.2.1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Layak huni					6.668.925.000	6.667.015.000	100	-	-
3.2.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan/Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh					100.000.000	99.930.000	100	-	-
4	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**	**Sasaran: Terwujudnya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**	100	100		1.016.799.450	1.006.463.950	99	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
4.1	**Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Terwujudnya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni**	100	100	100	**1.016.799.450**	**1.006.463.950**	**99**	-	-
4.1.1	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU	Tersedianya Data LPJU dan Meteran Listrik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	5.238.000	4.800.000	92	-	-
4.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan PSU di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Tersedianya bantuan meteran listrik Tersedianya LPJU	64 41 Unit	64 0	100 0	1.011.561.450	1.001.663.950	99	-	-
	TOTAL					**11.909.581.172**	**11.785.361.102**	**98,95**		

Sumber: Dinas PRKP2 Kab. Manggarai, Jan 2023

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Sub Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Urusan wajib bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan salah satunya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai. Dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022, menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis: Mitigasi, Tanggap Darurat, dan Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Aset, Keuangan dan Dokumen Penting Lainnya, dengan indikator kinerja seperti pada tabel 3.37.

Tabel 3.37
Pengukuran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Mitigasi	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Ancaman, Dampak dan Risiko Bencana	200 orang	200 orang	100
		Jumlah Lokasi Rawan Bencana yang Terpasang Rambu Peringatan Dini Bencana.	20 buah	20 buah	100
2.	Tanggap Darurat	Persentase Jumlah Lokasi Bencana yang Teridentifikasi	12 kec	12 kec	100
		Persentase Jumlah Bantuan Bencana yang Terdistribusi	12 kec	12 kec	100
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Aset, Keuangan dan Dokumen Penting Lainnya	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Terdata Dengan Baik	25 orang	25 orang	100
		Jumlah Dokumen Aset	1 dok	1 dok	100
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 dok	1 dok	100
		Rata-rata			100
		Kategori		Memuaskan	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Januari 2023

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Ancaman, Dampak dan Risiko Bencana**

  Pada tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang ancaman, dampak dan risiko bencana, sebanyak 200 orang atau 5 lokasi, dari target yang ditetapkan dapat tercapai 100%.

- **Jumlah Lokasi Rawan Bencana yang Terpasang Rambu Peringatan Dini Bencana**

  Pada tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan Jumlah lokasi rawan bencana yang terpasang rambu peringatan dini bencana, sebanyak 20 buah atau 20 titik lokasi rawan bencana, dari target yang ditetapkan dapat tercapai 100%.

- **Persentase Jumlah Lokasi Bencana yang Teridentifikasi**

  Pada tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan target persentase jumlah lokasi bencana yang teridentifikasi sebanyak 100% atau sebanyak 12 kecamatan. Dari target yang ditetapkan, semua laporan kejadian bencana teridentifikasi atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- **Persentase Jumlah Bantuan Bencana yang Terdistribusi**

  Pada tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan target persentase jumlah bantuan bencana yang terdistribusi sebanyak 100% atau sebanyak 12 kecamatan. Dari target yang ditetapkan, semua bantuan berncana terdistribusi atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- **Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Terdata Dengan Baik**

  Pada tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan target Jumlah dokumen kepegawaian yang terdata dengan baik sebanyak 25 pegawai atau 100%. Dari target yang

ditetapkan, semua dokumen kepegawaian terdata dengan baik atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

❖ **Jumlah Dokumen Aset**

Pada tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan target Jumlah dokumen aset sebanyak 1 dokumen atau 100%. Dari target yang ditetapkan, semua dokumen asset terdata dengan baik atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

❖ **Jumlah Dokumen Laporan Keuangan**

Pada tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan target Jumlah dokumen laporan keuangan sebanyak 1 dokumen atau 100%. Dari target yang ditetapkan, semua dokumen laporan keuangan terdata dengan baik atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

b) **Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 program, 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.**2.550.054.338**,- realisasi sebesar Rp.**2.471.619.752**,- dengan tingkat capaian sebesar 96,92 %. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.38.

Tabel 3.38
Realisasi Anggaran BPBD Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**2.438.014.338**	**2.360.169.232**	**96,81**
	Belanja Pegawai	1.682.665.290	1.680.333.507	99,86
	Belanja Barang dan Jasa	755.349.048	679.835.725	90,00
2.	**Belanja Modal**	**112.040.000**	**111.450.520**	**99,47**
	TOTAL	**2.550.054.338**	**2.471.619.752**	**96,92**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Januari 2023

Khusus untuk penanganan darurat bencana disiapkan Dana Tak Terduga pada pos Belanja Tak Terduga pada Badan Keuangan Kabupaten Manggarai, dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.7.000.000.000,-**, dengan realisasi sebesar **Rp.3.720.046.350,-** atau 53,14%, Sedangkan untuk percepatan penanganan covid 19 di tingkat

Kabupaten Manggarai Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat langsung dalam percepatan penanganan covid-19 dengan jumlah anggaran **Rp.200.728.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.200.161.000,-**

No	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah (%)
I	**BTT Bencana Alam**	**7.000.000.000**	**3.720.046.350**	**53,14**
II	**BTT Bencana Non Alam (Belanja Penanganan Covid 19)**	**200.728.000**	**200.161.000**	**99,72**
	BPBD	46.047.500	45.540.500	98,90
	Bagian Kesra	2.030.000	2.030.000	100
	Satpol PP dan Damkar	126.640.500	126.640.500	100
	Dinas PUPR	26.010.000	25.950.000	99,77
Total		**7.200.728.000**	**3.920.2007.350**	**54,44**

Capaian kinerja Program dan Kegiatan sesuai target kinerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.39.

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota**	**Terwujudnya Penyelenggaran Urusan Pelayanan Administrasi Pemerintah Daerah Yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**2.092.481.890**	**2.049.405.646**	**97,94**	-	-
1.1	**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**22.789.000**	**21.809.000**	**95,7**	-	-
1.1.1	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	1 dok	1 dok	100	21.789.000	20.809.00	95,5	-	-
1.1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LAKIP, LKPJ & LPPD	3 jenis	3 jenis	100	1.000.000	1.000.000	100	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.2	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, asset dan dokumen penting**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**1.687.449.290**	**1. 685.177.507**	**99,86**	-	-
1.2.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 tahun	100	1.654.165.290	1.652.833.507	99,92	-	-
1.2.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor pengelola APBD	9 orang	9 orang	100	33.284.000	32.284.000	97	-	-
1.3	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1 tahun**	**1 tahun**	-	**7.850.000**	**0**	**0**	-	-
1.3.1	Sub Kegiatan : Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Terwujudnya disiplin aparatur	1 tahun	1 tahun	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkompeten	1 orang	1 orang	-	7.850.000	0	0	-	-
1.4	**Kegiatan : Administrasi umum perangkat Daerah**	**Terwujud penyelenggaraan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**152.808.600**	**151.731.729**	**99,3**	-	-
1.4.1	Sub kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis	6 jenis	100	1.175.000	1.175.000	100	-	-
1.4.2	Sub kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	54 jenis	54 jenis	100	26.275.500	26.275.500	100	-	-
1.4.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	5612 om	5612 om	100	31.560.000	31.560.000	100	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.4.4	Sub Kegiatan : Penyediaan barang Cetak dan Penggadaan	Tersedianya Barang cetak dan Penggadaan	2 jenis	2 jenis	100	11.598.100	11. 598. 100	100	-	-
1.4.5	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	2 jenis	50	1.680.000	840.000	50	-	-
1.4.6	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Materil	Tersedianya Bahan/Material	15 jenis	15 jenis	100	1.270.000	1.270.000	100	-	-
1.4.7	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisiar kinerja SKPD	6 kali	6 kali	99,7	79.250.000	79.013.129	99,7	-	-
1.5	**Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1 tahun**	**1 tahun**	100	**28.540.000**	**28.534.420**	**99,98**	-	-
1.5.1	Sub Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya BMD penunjang urusan pemerintah daerah	3 jenis	3jenis	100	28.540.000	28.534.420	99,98	-	-
1.6	**Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1 tahun**	**1 tahun**	100	**52.350.000**	**27.904.850**	**53,3**	-	-
1.6.1	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	2 jenis	2 jenis	100	3.750.000	2.529.000	67,44	-	-
1.6.2	Sub kegiatan: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	3 jenis	3 jenis	100	48.600.000	25.375.850	52,21	-	-
1.7	**Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1 tahun**	**1 tahun**	100	**140.495.000**	**134.308.140**	**95,46**	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.7.1	Sub Kegiata : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21 unit	21 unit	100	127.120.000	124.239.590	97,73	-	-
1.7.2	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	4 jenis	100	13.575.000	10.068550	74,17	-	-
2.	**Program Penanggulangan Bencana**	**Sasaran: Terwujudnya Penanggulangan Bencana**				**434.072.448**	**422.214.106**	**97.27**	-	-
2.1	**Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**74.258.000**	**74.258.000**	**100**	-	-
2.1.1	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ancaman, risiko dan dampak bencana	1 tahun	1 tahun	100	74.258.000	74.258.000	99,51	-	-
2.2	**Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**101.326.000**	**100.742.100**	**129,45**	-	-
2.2.1	Sub Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	Tersedianya rambu peringatan dini bencana	10 buah	10 buah	100	77.479.000	77.473.600	99,99	-	-
2.2.2	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	2 jenis	2 jenis		23.847.000	23.268.500	100	-	-
2.3	**Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Terwujudnya Pelyanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**281.988.448**	**247.214.006**	**87,67**	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
2.3.1	Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota	Tersedianya data dan laporan	12 Kec	12 kec	100	190.015.648	173.876.206	91,51	-	-
2.3.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Terwujudnya pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana	5 kali	5 kali	27,54	4.499.000	1.239.000	27,54	-	-
2.3.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Terdistribusinya Bantuan Tanggap darurat bagi korban bencana	12 kec	12 kec	100	87.473.800	72.098.800	82,42	-	-
	JUMLAH					**2.550.054.338**	**2.471.619.752**	**96,92**		

Sumber: BPBD Kab. Manggarai, Jan 2023

B. Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Urusan wajib bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat salah satunya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai. Berikut capaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2022.

Tabel 3.40
Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Manggarai Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Ket.
1.	Meningkatnya Penegakan PERDA	Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA	13,86	18,09	68,03	
2.	Penanganan Kebakaran Sesuai Waktu Tanggap	*Respon Time Rate* (RTR)	15 Menit	15 Menit	100	Wilayah yang mampu dijangkau oleh sarana pemadam kebakaranyang ada hanya kecamatan Langke Rembong
		Rata-rata			84,015	
		Kategori			Baik	

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, Januari 2023

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

❖ **Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA**

Pada Tahun 2022, terdapat 6 target produk PERDA yang dijalankan, diantaranya:

- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 2 Thn 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Instruksi Bupati Manggarai No. HK/3/2012 tentang Larangan Berjualan di emperan / pinggiran toko atau tempat lainnya yang tidak sesuai peruntukannya di kota Ruteng;
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No.2 tahun 1992 tentang Pengaturan tempat usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2013 tentangPengelolaan Sampah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2018 tentangPenyelesaian Sengketa Berbasis Adat;
- Instruksi Bupati Manggarai No. HK/10/2016 Tentang Pengawasan & Penertiban Penduduk.

Dari keenam produk PERDA tersebut diatas, pada umumnya terlaksana dengan baik, meski masih terdapat beberapa pelanggaran.

Persentase penurunan pelanggaran PERDA dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Presentase penurunan pelanggaran Perda} = \frac{Jumlah\ pelanggaran\ PERDA\ tahun\ n - (Jumlah\ pelanggaran\ PERDA\ tahun\ n - 1)}{Jumlah\ pelanggaran\ PERDA\ tahun\ n - 1} \times 100$$

$$= \frac{124\text{-}105}{105} \times 100$$

$$= 18{,}09$$

Pada tahun 2022, sebanyak 124 total jumlah pelanggaran yang terjadi, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 105 kali pelanggaran.

Sehingga tingkat capaian untuk mengukur kinerja ini menggunakan rumus menurun, yaitu:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Target- (Realisasi – Target)}}{\text{Target}} \times 100$$

$$= \frac{18{,}09}{13{,}86} \times 100$$

$$= 68{,}03$$

❖ ***Respon Time Rate*** **(RTR)**

Selama tahun 2022, ada 4 (empat) kejadian kebakaran dalam wilayah Kecamatan Langke Rembong yang mendapat penanganan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, berlokasi di Kelurahan Carep, Kelurahan Pau, Kelurahan Tenda, dan Kelurahan Compang Carep.

Sedangkan 5 (lima) kejadian kebakaran di luar wilayah Kecamatan Langke Rembong tidak bisa ditangani sesuai Waktu Tanggap (*Rensponse Time Rate*), yaitu kebakaran di Kelurahan Mata Air Reok, Kelurahan Reok, Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Rahong Utara dan Golo Kukung, Riung Kecamatan Cibal.

b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai melaksanakan 3 program, 9 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.367.753.695,- realisasi sebesar Rp. 4.268.832.040,- atau sebesar 97,74%. Ringkasan anggaran disajikan pada tabel 3.41.

Tabel 3.41
Anggaran Satuan Pol PP dan Damkar
Kabupaten Manggarai Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**4.277.153.695,-**	**4.178822.140,-**	**97.70**
	Belanja Pegawai	2.578.675.835,-	2.496.186.211,-	96,80
	Belanja Barang dan Jasa	1.698.477.860,-	1.682.635.929,-	99,07
2.	**Belanja Modal**	**90.600.000,-**	**90.009.900,-**	**99,35**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.600.000,-	90.009.900,-	99,35
	TOTAL	**4.367.753.695,-**	**4.268.832.040,-**	**97,74**

Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja Progam dan Kegiatan sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.42.

Tabel 3.42
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Sasaran: Presentase urusanrutin yang terpenuhi sesuaistandar**	**96 %**	**96,52 %**	**100,54**	**2.754.378.135**	**2.658.496.330**	**96,52**	-	-
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**27.016.000**	**26.706.000**	**98,85**	-	-
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	26.016.000	25.706.000	98,81	-	-
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja& Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan	100	1.000.000	1.000.000	100	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terlaksananya administrasi keuangan kantor**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**2.579.375.835**	**2.496.886.211**	**96,80**	-	-
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33org/bulan	32org/bulan	95,95	2.548.275.835	2.465.786.211	96,76	-	-
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium Pengelola APBD	9 orang	9 orang	100	31.100.000	31.100.000	100	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya administrasi umum kantor**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**77.076.300**	**72.505.857**	**94,07**	-	-
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/PenerganganBangunan	1 Paket	1 Paket	100	1.250.000	1.250.000	100	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	27 Paket	27 Paket	100	39.926.300	39.926.300	100	-	-
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100	10.500.000	10.500.000	100	-	-
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	2.000.000	2.000.000	100	-	-
1.3.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	2 Laporan	2 Laporan	100	23.400.000	18.829.557	80,46	-	-
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Tersedianya JasaPenunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	50	**2.300.000**	**1.500.000**	**65,21**	-	-
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100	1.500.000	1.500.000	100	-	-
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	0 Laporan	0	800.000	0	0	-	-
1.5	**Kegiatan PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terpeliharaanyabarang milik daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**68.610.000**	**60.898.262**	**88,76**	-	-
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	30 unit	100	65.610.000	57.898.262	88,24	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara printer	12 unit	12 unit	100	3.000.000	3.000.000	100	-	-
2	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Sasaran: Presentase Gangguan TRANTIBUM yang diselesaikan**	**100 %**	**100 %**	**100**	**1.593.291.560**	**1.590.251.710**	**99,81**	-	-
2.1	**Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Sasaran: Terwujudnya Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.347.194.560**	**1.344.324.710**	**99,79**	-	-
2.1.1	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah MelaluiDeteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawalan	2 Kasus	2 Kasus	100	1.237.794.560	1.226.759.250	99,11	-	-
2.1.2	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraan dan Ketertiban Umum	mlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 dokumen	4 dokumen	100	16.500.000	16.500.000	100	-	-
2.1.3	b Kegiatan Pengadaan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana Ketentraman &Ketertiban Umum	mlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 unit	30 unit	100	92.900.000	92.309.900	99,36	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
2.2	**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Sasaran: Terwujudnya penegakan Perda**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**246.097.000**	**245.927.000**	**99,93**	-	-
2.2.1	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerahdan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	4 Laporan	4 Laporan	100	40.472.000	40.472.000	100	-	-
2.2.2	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7 Laporan	7 Laporan	100	205.625.000	205.455.000	99,91	-	-
3	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran & Penyelamatan Non Kebakaran**	**Sasaran: Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan & evakuasi korban kebakaran**	**100 %**	**100 %**	**100**	**20.084.000**	**20.084.000**	**100**	-	-
3.1	**Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, & Penanganan Bahan Berbahaya & Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Terwujudnya kesiagaan & Pencegahan bahaya kebakaran**	1 Tahun	1 Tahun	100	2.000.000	2.000.000	100	-	-
3.1.1	Sub Kegiatan Pemadaman & Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piketdan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100	2.000.000	2.000.000	100	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
3.2	**Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**saran: Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kebakaran**	1 Tahun	1 Tahun	100	18.084.000	18.084.000	100	-	-
3.2.1	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi & Edukasi Masyarakat	Sasaran : Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan KebakaranSetiap Tahunnya	90 Orang	90 Orang	100	18.084.000	18.084.000	100	-	-
	JUMLAH					**4.367.753.695**	**4.268.832.040**	**97,74**		

Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, Januari 2023

6. Urusan Sosial

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan Urusan Sosial dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2022 Dinas Sosial menetapkan sasaran strategis **'Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Untuk Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**, dengan indikator dan capaian seperti pada tabel 3.43.

Tabel 3.43
Pengukuran Kinerja Urusan Sosial

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase PMKS yang Tertangani	1,12	85,38%	76,24
		19.089	16.299	85,38%
	Rata-rata			85,38
	Kategori			

Sumber: Dinas Sosial Kab. Manggarai, Januari 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penanganan PMKS pada tahun 2022 sebanyak 16.299 orang dari target yang ditetapkan 19.089 orang, dengan rincian seperti dalam tabel 3.44.

Tabel 3.44
Penanganan PMKS Tahun 2022

NO	JENIS PMKS	JUMLAH	SUMBER DANA
1.	Lanjut Usia / Lansia	50 Orang	APBD II
2.	Anak Terlantar	7 Orang	APBD II
3.	Disabilitas	58 Orang	APBD II
4.	Warsosek	7 Kelompok	APBD II
5.	Karang Taruna	10 Kelompok	APBD II
6.	Bencana Alam / Sosial	16.167 Orang	APBD I
	TOTAL	**16.299**	

Sumber: Dinas Sosial Kab. Manggarai, Januari 2023

b) **Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai melaksanakan 5 program, 10 kegiatan dan 25 subkegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.**3.689.956.358**,- realisasi sebesar Rp.**3.402.402.904**,- dengan tingkat capaian 95,94%. Ringkasan realisasi anggaran disajikan dalam tabel 3.45.

Tabel 3.45
Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**3.636.709.658**	**3.349.272.904**	**92,10**
	Belanja Pegawai	2.453.653.274	2.248.672.540	91,65
	Belanja Barang dan Jasa	500.306.384	426.019.494	85,15
	Belanja Bantuan Sosial	682.750.000	674.580.870	98,80
2.	**Belanja Modal**	**53.246.700**	**53.130.000**	**99,78**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.246.700	53.130.000	99,78
	TOTAL	**3.689.956.358**	**3.402.402.904**	**95,94**

Sumber: Dinas Sosial Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.46.

Tabel 3.46
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Sosial 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TERGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.873.263.358**	**2.612.858.034**	**91**	-	-
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**28.950.800**	**28.660.500**	**99**	-	-
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	999.800	815.500	82	-	-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	27.951.000	27.845.000	100	-	-
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.486.831.758**	**2.281.393.540**	**92**	-	-
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	30 Orang	2.425.653.274	2.222.022.540	92	-	-
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Dokumen	11 Dokumen	61.178.484	59.371.000	97	-	-
1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**194.184.100**	**182.618.694**	**94**	-	-
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.155.000	3.155.000	100	-	-
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	56.656.000	56.656.000	100	-	-
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	35.980.000	35.980.000	100	-	-
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.838.100	16.838.100	100	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TERGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	8.360.000	2.520.000	30	-	-
1.3.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.225.000	4.225.000	100	-	-
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	68.970.000	63.244.594	92	-	-
1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**53.246.700**	**53.130.000**	**100**	-	-
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	53.246.700	53.130.000	100	-	-
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**36.800.000**	**15.444.100**	**42**	-	-
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	6.800.000	5.180.000	76	-	-
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	30.000.000	10.264.100	34	-	-
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**73.250.000**	**51.611.200**	**70**	-	-
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	47.000.000	37.600.200	80	-	-
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	6.250.000	6.250.000	100	-	-
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	20.000.000	7.761.000	39	-	-
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**484.663.000**	**475.037.500**	**98**	-	-
2.1	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**				**484.663.000**	**475.037.500**	**98**	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TERGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
2.1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga	100 Keluarga	150.332.000	148.435.000	99	-	-
2.1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	10 Lembaga	334.331.000	326.602.500	98	-	-
3	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**261.268.000**	**260.384.370**	**100**	-	-
3.1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				**228.114.000**	**227.697.370**	**100**	-	-
3.1.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	115 Orang	201.216.000	200.802.000	100	-	-
3.1.2	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	14 Orang	26.898.000	26.895.370	100	-	-
3.2	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**				**33.154.000**	**32.687.000**	**99**	-	-
3.2.1	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dokumen	20 Dokumen	33.154.000	32.687.000	99	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TERGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**41.786.000**	**34.477.000**	**83**	-	-
4.1	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**41.786.000**	**34.477.000**	**83**	-	-
4.1.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	206054 Orang	206054 Orang	31.148.000	31.148.000	100	-	-
4.1.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	61589 Keluarga	61589 Keluarga	10.638.000	3.329.000	31	-	-
5	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**28.976.000**	**19.646.000**	**68**	-	-
5.1	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**				**28.976.000**	**19.646.000**	**68**	-	-
5.1.1	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	16000 Orang	16167 Orang	28.976.000	19.646.000	68	-	-
	JUMLAH				**3.689.956.358**	**3.402.402.904**	**92,21**		

Sumber: Dinas Sosial Kab. Manggarai, Jan 2023

3.3.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. **Urusan Tenaga Kerja; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

a) **Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja**

Penanganan urusan Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menetapkan 2 sasaran Strategis dengan 5 indikator kinerja. Capaian indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel 3.47.

Tabel 3.47
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
I	**URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				
1.	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	1. Persentase Koperasi Aktif	90,91	47.80	52,58
		2. Persentase Koperasi yang Sehat	90,91	7,55	8,30
		3. Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omzet Usahanya	10	0,35	3,5
II	**URUSAN TENAGA KERJA**				
1.	Menurunnya angka pengangguran	1. Tingkat Kesempatan Kerja	70	77,60	110,86
		2. Persentase konflik/kasus hubungan indutri	63,63	92,31	145,07
	Rata-rata				**64,06**
	Kategori				**Cukup**

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. Manggarai, Jan 2023

- **Indikator Persentase Koperasi Aktif**

  Pada tahun 2022, jumlah Koperasi Aktif mencapai sebanyak 76 koperasi atau mencapai 47,80% dari 159 jumlah seluruh koperasi, mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yang mencapai 129 koperasi aktif dari total 145 koperasi di Kabupaten Manggarai.

- **Indikator Persentase Koperasi Sehat**

  Jumlah Koperasi Sehat tahun 2022 mencapai 12 koperasi dari 159 jumlah seluruh koperasi atau hanya mencapai 7,55%. Jumlah ini masih sama dengan keadaan tahun 2021, sebanyak 12 koperasi sehat dari total 145 koperasi di Kabupaten Manggarai.

- **Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omzet Usahanya**

  Jumlah usaha yang meningkat omzet usahanya dari mikro ke kecil hanya sebesar 13 usaha dari total jumlah UMKM yang mencapai 3.678 unit.

Tabel 3.48
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1.	Jumlah Koperasi	145	159
2.	Persentase Koperasi Aktif	88,96%	47,80%
3.	Persentase Koperasi sehat	8,27%	7,55%
4.	Jumlah Seluruh UKM	2.892	3.678
5.	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omzet Usahanya		0,35%

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. Manggarai, Jan 2023

- **Indikator Tingkat Kesempatan Kerja**

  Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja sebesar 177.494 dan Jumlah angkatan kerja sebesar 184.367 sehingga capaian dari indikator ini sebesar 110,86%.

- **Indikator Persentase Konflik/Kasus Hubungan Industri**

  Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan Kebijakan Pemerintah yang diselesaikan mencapai 12 kasus dari 13 total kasus atau 92,31%

Tabel 3.49
Data Penanganan Urusan Tenaga Kerja
Tahun 2021-2022

No	Uraian	2021	2022
1.	Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja	152.393	177.494
2.	Jumlah Angkatan Kerja	216.047	184.307
3.	Tingkat Kesempatan Kerja	70,54	77,60
4.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	10	12
5.	Jumlah Kasus	10	13
6.	Persentase Konflik/Kasus Hubungan Industri	100%	92,31%

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. Manggarai, Jan 2023

b) **Capaian Kinerja sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Untuk pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai melaksanakan 8 program, 14 kegiatan dan 25 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.2.165.330.561**,- realisasi sebesar **Rp.2.053.723.164**,- atau sebesar 94,85%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.50
Anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kab. Manggarai Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I	**Urusan Koperasi dan UKM**			
1.	**Belanja Operasi**	**2.040.238.637**	**1.930.013.024**	**94,59**
	Belanja Pegawai	1.418.093.813	1.327.032.499	93,69
	Belanja Barang dan Jasa	572.067.500	554.504.985	96,92
2.	**Belanja Modal**	-	-	-
	Total I	**2.040.238.637**	**1.930.013.024**	**94,59**
I	**Urusan Tenaga Kerja**			
1.	**Belanja Operasi**	125.091.924	123.710.140	98,89
	Belanja Pegawai	29.727.324	29.625.540	99,66
	Belanja Barang dan Jasa	95.364.600	94.084.600	98,66
2.	**Belanja Modal**	-	-	-
	Total II	125.091.924	123.710.140	98,89
	TOTAL I+II	**2.165.330.561**	**2.053.723.164**	**94,85**

Sumber: DKUKMTK Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target kinerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, disajikan dalam tabel 3.51.

Tabel 3.51
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. Manggarai Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Urusan Koperasi dan UKM									
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja PMKUT**	1 tahun	1 tahun		2.406.285.722	2.334.765.519		-	-
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	1 tahun	1 tahun	100	10.440.000,-	10.440.000,-	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedinaya dokumen anggaran,evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Tahun	1 tahun	100	9.440.000,-	9.440.000,-	100	-	-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	1 tahun	100	1.000.000,-	1.000.000,-	100	-	-
1.1.3	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.468.171.137,-**	**1.375.508.039,-**	**93,69**	-	-
1.1.4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan Daerah	6 orang	6 orang	100	1.418.093.813	1.327.032.499,-	93.58	Anggaran untuk pembantu bendahara pengeluaran dikembalikan karena ketiadaan personil	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**110.318.700,-**	**110,244,159**	**74,54**	-	-
1.2.1	Penyediaan komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	9 jenis		2.450.000	2.450.000	100	-	-
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38 jenis	39 jenis	100	39.280.000,-	39.280.000,-	100	-	-
1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 tahun	1 tahun	100	14,960,000,-	14,960,000,-	100	-	-
1.2.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	100	4.210.200,-	4.210.200,-	100	-	-
1.2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	100	840.000,-	840.000,-	100	Kelebihan anggaran untuk pembayaran bahan bacaan tipe A (koran Nasional)	-
1.2.6	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	13 jenis	13 jenis	100	2.328.500,-	2.328.500,-	100	-	-
1.2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1 tahun	100	46,175.459,-	46,175.459,-	100	-	-
1.3	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**35.955.000**		**86,4**	-	-
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	100	1.851.000,-	1.362.500,-	73,61	Belanja paket pengiriman tidak terpakai karena tidak ada pengiriman paket	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.3.2	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Jenis	3 Jenis		22.700.000,-	5.276.750,-	76,79	Kelehihan anggaran air dan internet	
1.3.3	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor (perbaikan laptop dan printer)	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (perbaikan laptop dan printer)	2 jenis	2 jenis		2.500.000,-	2.500.000,-	100	-	-
1.4	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.000.000,-**	**927.770,-**	**92,78**	-	-
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dnas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	5 unit	100	1.000.000,-	927.770,-	92,78	Sisa pajak yang tidak terpakai -	
2	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang baik dan optimal**				**11.360.000,-**	**11.360.000,-**	**100**	-	-
2.1	**kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**				**11.360.000,-**	**11.360.000,-**	**100**	-	-
2.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kec.	12 kec.		11.360.000,-	11.360.000,-	100	-	-
3	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**387.200.000**	**375.560.506,-**	**96,99**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
3.1	**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**104 peserta**	**104 peserta**		**387.200.000**	**375.560.506,-**	**96,99**	**-**	**-**
3.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terwujudnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi yang baik dan optimal	104 peserta	104 peserta		387.200.000	375.560.506,-	96,99	Anggaran untuk narasumber yang tidak jadi datang -	
4	**Program Pemberdayaan usaha, Menengah, Usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)**	**Terwujudnya Pemberdayaan usaha, Menengah, Usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)**	**12 Kec**	**12 Kec**		**11.852.000,-**	**11.852.000,-**	**100**	**-**	**-**
4.1	**kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para pemangku kepentingan**	**Terlaksannya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para pemangku kepentingan**	**12 Kec**	**12 Kec**		**11.852.000,-**	**11.852.000,-**	**100**	**-**	**-**
4.1.1	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro (Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja)	Terlaksananya pemberdayaan melalui kemitraan UMKM	12 Kec	12 Kec		**11.852.000,-**	**11.852.000,-**	**100**	**-**	**-**
	URUSAN TENAGA KERJA									
1	**Program Pelatihan kerja dan Produktifitas Tenaga kerja**	**Tersedianya tenaga kerja yang terlatih dan produktif**	**70 peserta**	**70 peserta**		**37.787.324,-**	**37.685.540,-**	**99,73**	**-**	**-**
1.1	**Kegiatan Pengukuran produktifitas tingkat daerah Kabupaten/kota**	**Terlaksannanya Pengukuran produktifitas tingkat daerah Kabupaten/kota**	**12 Kec.**	**12 Kec.**		**37.787.324,-**	**37.685.540,-**	**99,73**	**-**	**-**
1.1.1	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Terlaksannanya Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	12 Kec.	12 Kec.		37.787.324,-	37.685.540,-	99,73	-	-
2	**Program Penempatan Tenaga kerja**	**Terwujudnya Penempatan Tenaga kerja yang baik dan optimal**	**80 Peserta**	**80 Peserta**		**25.141.000,-**	**25.1.1.00,-**	**99,84**	**-**	**-**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
2.1	**kegiatan pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten /kota**	**Terwujudnya pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten /kota**	**80 Peserta**	**80 Peserta**		**18.780.000,-**	**18.740.000,-**	**100**	-	-
2.1.1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja	80 Peserta	80 Peserta		18.780.000,-	18.740.000,-	100	-	-
2.2	**Kegiatan Pengelolaan informasi pasar kerja**	**Terwujudnya Pengelolaan informasi pasar kerja**	**12 Kec.**	**12 Kec.**		**6.361.000,-**	**6.361.000,-**	**100**	-	-
2.2.1	Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Terlaksananya Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	12 Kec.	12 Kec.		6.361.000,-	6.361.000,-	100	-	-
3	**Program Hubungan Industri**	**Terwujudnya Hubungan Industri yang baik dan optimal**				**62.163.600,-**	**60.923.600,-**	**98,01**	-	-
3.1	**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**60 peserta**	**60 peserta**		**34.323.600,-**	**34.323.600,-**	**100**	-	-
3.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan (Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja)	erlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	60 orang.	60 orang.		34.323.600-	34.323.600,-	100	-	-
3.2	**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**				**27.840.000,-**	**26.600.000,-**	**95,55**	-	-
3.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 kec.	12 kec.		16.700.000,-	15.460.000,-	92,57	Anggaran untuk pemulangan jenasah yang dikembalikan karena sampai akhir tahun tidak ada TKI yang dipiuangkan	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
3.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 kec.	12 kec.		11.140.000,-	11,140.000,-	100	-	-

Sumber: DKUKMTK Kab. Manggarai, Jan 2023

2. Urusan Penanaman Modal

a). Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, dengan capaian seperti dalam tabel 3.52.

Tabel 3.52
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Manggarai	1. Jumlah Nilai Investasi Perusahaan Berskala Nasional (PMA/PMDN)	374.223.000	1.396.803.390.601	373,25
		2. Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN	50	753	230
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	89,32	89,09	99,57
		4. % Layanan Perizinan Tepat Waktu	100	100	100
		5. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindak Lanjuti	100	100	100
	Rata-rata 1				180,96
	Kategori				Memuaskan

Sumber: DPMPTSP Kab. Manggarai, Jan 2023

- **Jumlah Nilai Investasi Perusahaan Berskala Nasional (PMA/PMDN)** mencapai Rp.1.396.803.390.601,- dari target Rp.374.223.000,- atau sebesar 373,25%. Jumlah investor berskala nasional PMA/PMDN sebanyak 753 perusahaan, meningkat sebanyak 638 perusahaan dari tahun 2021 sejumlah 115 perusahaan.

Tabel 3.53
Perusahaan Berskala Nasional (PMA/PMDN) dan Investasi Berskala Nasional PMA/PMDN Tahun 2021-2022

No	Uraian	2021	2022
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDM/PMA)	115	753
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp)	Rp.522.090.993.413	Rp.1.396.803.390.601

Sumber: DPMPTSP Kab. Manggarai, Jan 2023

Keberhasilan Kabupaten Manggarai meningkatkan nilai investasi pada tahun 2022 didukung oleh :

- Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan Bimtek/Sosialisasi terhadap pelaku usaha;
- Penyederhanaan sistem pelayanan penanaman modal sehingga memberikan kemudahan kepada investor;
- Pembangunan dan pengembangan Inovasi Puspita.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Manggarai di antaranya:

- Sebagian besar pelaku usaha tidak memahami dengan baik dan benar tentang proses perijinan secara mandiri melalui OSS RBA, sehingga pelaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian data-data dari OSS versi 1.1 ke dalam OSS RBA;
- Sebagian besar pelaku usaha tidak memahami dengan baik dan benar tentang tatacara penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) *Online*;
- Pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakan komitmen usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kurangnya promosi potensi investasi.

Solusi dalam upaya meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Manggarai, antara lain:

- Perlu melaksanakan Bimtek/Sosialisasi bagi pelaku usaha, guna peningkatan kapasitas SDM terkait pemahaman tentang OSS yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu;
- Perlu melaksanakan Bimtek/Sosialisasi bagi aparatur DPMPTSP, terkait pemahaman tentang OSS RBA dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
- Perlu melaksanakan promosi potensi investasi.

❖ **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.**

Realisasi IKM pada tahun 2022 yakni 89,09% dan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 89,32%. IKM pelayanan perizinan dan non perizinan diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna jasa layanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan publik. IKM diperoleh melalui pengisian kuisiner oleh pengguna layanan perizinan dan nonperizinan secara mandiri dan rahasia sesudah mereka menikmati pelayanan perizinan dan non perizinan oleh para petugas layanan perizinan dan non perizinan. Untuk memperoleh hasil IKM dibutuhkan 100 responden.

❖ **Persentase Layanan Perizinan Tepat Waktu**.

Pada tahun 2022 jumlah perizinan dan non perizinan yang diajukan pemohon dan diterbitkan sebanyak 1.988 buah. Rata-rata proses perizinan tersebut diselesaikan dalam 3 (tiga) hari dari target Standar Pelayanan 3-10 hari kerja, bahkan ada izin tertentu yang bisa diproses selama 1 (satu) hari kerja. Selain izin dan non izin yang diproses secara manual, Dinas PMTPSP juga menerbitkan izin melalui aplikasi digital OSS berupa penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang selama tahun 2022 berjumlah 753 buah dengan rata-rata waktu penyelesaian antara 1 –20 menit dari target waktu antara 10-30 menit.

❖ **Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti.**

Pada tahun 2022, jumlah pengaduan masyarakat sebanyak 25 (dua puluh lima) buah dan semuanya berhasil ditindaklanjuti atau diselesaikan.

Untuk mewujudkan indikator tersebut di atas, dilakukan melalui **Aplikasi SP4 Lapor dan Pengaduan Langsung** Program pelayanan perizinan, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.54
Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1	IKM/ SKM perizinan	89,32%	89,09%
2	% layanan perizinan tepat waktu.	100%	100%
3	% pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%

Sumber: DPMPTSP Kab. Manggarai, Jan 2023

b). Capaian Kinerja sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Untuk pelaksanaan urusan Penanaman Modal, DPMPTSP Kabupaten Manggarai melaksanakan 4 program dan 4 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.055.365.012,-** realisasi sebesar **Rp. 1.923.374.089**,- atau sebesar **93,58**%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.55.

Tabel 3. 55
Anggaran DPMKUT Kab. Manggarai Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**			
	Belanja Pegawai	1.257.314.364	1.141.330.900	90,25
	Belanja Barang dan Jasa	758.753.648	742.746.189	99,32
2.	**Belanja Modal**	39.297.000	39.297.000	100
	Total I	**2.055.365.012**	**1.923.374.089**	**93,58**

Sumber: DPMPTSP Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target kinerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, disajikan dalam tabel 3.56.

Tabel 3.56
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal
Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja DPMPTSP**	**1 tahun**	**1 tahun**		**1.529.942.364**	**1.408.400.847**		-	-
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**500.000**	**500.000**	**100**	-	-
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP, LPPD, LKPj, RKT, IKU, LPJ, RKPD, LKPD, PK, Renstra, Renja. KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA	10 Dok	16 Dok	100	500.000	500.000	100	-	-
1.1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal	1 tahun	1 tahun	100	1.257.314.364	1.141.330.900	90.77	-	-
1.1.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	31 org	17 org	100	1.187.059.716	1.071.280.558	90.24	-	-
1.1.4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan administrasi pelaksanaan 1 Tahun Tugas ASN	7 org	5 org	100	70.254.648	70.050.342	99.71	Kelebihan Iuran Jaminan Kematian Non ASN	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**181.070.000**	**180.956.072**	**99,94**	-	-
1.2.1	Penyediaan komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan instalasi 1 tahun listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	9 jenis		2.420.000	2.420.000	100	-	-
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 jenis	2 jenis	100	39.307.500	**39.307.500**	100	-	-
1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2 jenis	2 jenis	100	**14.250.000**	**14.245.000**	**99.96**	-	-
1.2.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4 jenis	4 jenis	100	**5.004.000**	**5.004.000**	100	-	-
1.2.5	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	13 jenis	13 jenis	100	**2.338.500**	**2.338.500**	**100**	-	-
1.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 kali	12 kali	100	**117.750.000**	**117.641.072**	**99.91**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.3	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**11 buah**	**11 buah**	**100**	**39297000**	**39.297.000**	**100**	-	-
1.3.1	Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya (Laptop & Printer)	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya (Laptop & Printer)	5 buah	5 buah	100	26.861.000	26.861.000	100	-	-
1.3.2	Belanja Mebel	Tersedianya Mebel	6 buah	6 buah	100	12.436.000	12.436.000	100	-	-
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**35.955.000**		**86,4**	-	-
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Jenis	1 Jenis	100	1.461.000	1.461.000	100	-	-
1.4.2	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Jenis	3 Jenis		17.800.000	13.751.425	77.26	Kelehihan anggaran air dan internet	-
1.4.3	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor (perbaikan laptop dan printer)	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (perbaikan laptop dan printer)	38 jenis	38 jenis		2.500.000	2.500.000	100	-	-
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**30.000.000**	**28.604.450**	**95.35**	-	-
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dnas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	10 unit	100	20.000.000	18.604.450	93.02	Sisa pajak yang tidak terpakai dan Bahan Pelumas	-
1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit		100	10.000.000	10.000.000	100	-	-
2	**Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Sasaran: Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100**	**8.310.000**	**8.160.000**	**98.19**	-	-
2.1	**Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi**				**8.310.000**	**8.160.000**	**98.19**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
2.1.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Peraturan Perundang-undangan tentang RUPM Kabupaten Manggari	1 Dokumen	1 Dokumen	100	8.310.000	8.160.000	98.19	-	-
3	**Program : Promosi Penanaman Modal**	**Sasaran: Meningkatnya Promosi Investasi Penanaman Modal**	**12 kec**	**12 kec**		**7.632.000**	**7.632.000**	**100**	-	-
3.1	**Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	**12 kec**	**12 kec**		**7.632.000**	**7.632.000**	**100**	-	-
4	**Program : Pelayanan Penanaman Modal**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan**			**100**	***149.264.648***	148.310.342	**98, 40**	-	-
4.1	**Kegiatan: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Sasaran: Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**				**149.264.648**	**148.310.342**	**98, 40**	-	-
4.1.1	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Elektronik	1 tahun	1 tahun	100	24.630.000	23.880.000	96.95	-	-
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksannya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 Kec.	12 Kec.	100	**124.634.648**	**124.430.342**	**99.84**	-	-
5	**Program: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**				**360.216.000**	**350.870.900**	**98**	-	-
5.1	**Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**360.216.000**	**350.870.900**	**98**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 kec.	12 kec		250.076.000	241.481.000	96.56	Kelebihan anggaran makan untuk peserta dan panitia	-
	TOTAL					**2.055.365.012**	**1.923.374.089**	**95,58**		

Sumber: DPMPTSP Kab. Manggarai, Jan 2023

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan 2 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja, dengan capaian seperti pada tabel 3.57.

Tabel 3.57
Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	Ket
	Sasaran: Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan				
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,84	64,58	98,09	Sumber Data: BPS
2.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	64,11	81,91	127,66	Sumber Data: BPS
	Sasaran: Optimalnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak				
3.	Angka Kekerasan Terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	25,45	26,34	96,50	
4.	Angka Kekerasan Terhadap Anak (per 1000 penduduk anak)	0,019	0,025	68,61	
	Rata-rata			95,90	
	Kategori		Sangat Baik		

Sumber: DP3A Kab. Manggarai, Jan 2023

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

❖ **Index Pemberdayaan Gender**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Manggarai tahun 2021 berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi NTT Tahun 2022 mencapai 64,58 Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan IDG tahun 2020 yang mencapai 66,32. IDG Kabupaten Manggarai menempati urutan ke-6 dari 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.

Langkah peningkatan kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu :

1. Pelibatan seluruh steakholder untuk menghilangkan anggapan bahwa perempuan kodratnya hanya sebagai pengurus rumah tangga dan bukan sebagai penunjang kebutuhan keluarga.
2. Mendorong perempuan agar meningkatkan kapasitasnya dan ikut serta dalam proses pembangunan masyarakat.
3. Memberikan bimbingan dan pelatihan di segala bidang tentang pentingnya peran serta perempuan dalam membangun keluarga.
4. Sinergitas dan optimalisasi program kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak lintas sektoral.

❖ **Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Angkatan Kerja Perempuan adalah penduduk perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan, sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\text{Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan} = \frac{\text{Jlh. Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jlh. Penduduk Perempuan (15 tahun ke atas)}} \times 100$$

Data Manggarai Dalam Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai tahun 2023, angkatan kerja perempuan tahun 2022 sebanyak 90.065 orang atau 81,91% dari jumlah perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) sebanyak 109.962 orang.

Tabel 3.58
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jlh. Perempuan Usia Kerja 15 tahun ke atas	Jlh. Angkatan Kerja Perempuan	%
1.	2019	111.407	70.312	63,11
2.	2020	120.570	83.475	69,23
3.	2021	122.334	88.108	72,02
4.	2022	109.962	90.065	81,91

Sumber: MDA-BPS Kab. Manggarai 2023

Grafik 3.59
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Tahun 2019-2022

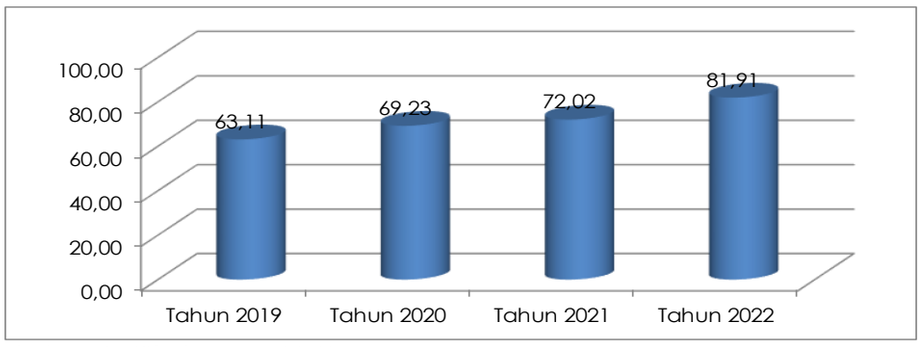

Sumber: MDA-BPS Kab. Manggarai 2023

❖ **Angka Kekerasan Terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)**

Kasus kekerasan terhadap perempuan (usia 18 tahun ke atas) di Kabupaten pada tahun 2022 sebanyak 43 kasus atau 26,34% dari total jumlah penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas sebanyak 163.233 orang.

❖ **Angka Kekerasan Terhadap Anak (per 1000 penduduk anak)**

Kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak tahun 2022 sebanyak 29 anak/kasus atau 0,025% dari jumlah anak usia kurang dari 18 tahun sebanyak 116.171 anak. Kasus kekerasan tersebut meningkat sebanyak 10 kasus dari tahun 2021 yang mencapai 19 kasus.

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai melaksanakan 4 Program, 8 kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggarannya **Rp.1.861.252.558,-** realisasinya sebesar **Rp.1.738.418.835**,- dengan tingkat capaiannya **93,40%.** Ringkasan realisasi anggaran disajikan dalam tabel 3.60.

Tabel 3.60
Anggaran Dinas P3A Kab. Manggarai
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**1.861.252.558**	**1.738.418.835**	**93,40**
	Belanja Pegawai	1.392.455.258	1.270.758.847	91,26
	Belanja Barang dan Jasa	323.797.300	322.659.988	99,65
	Belanja Hibah	145.000.000	145.000.000	100
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	
	TOTAL	**1.861.252.558**	**1.738.418.835**	**93,40**

Sumber: DP3A Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.61.

Tabel 3.61
Capaian Program dan Kegiatan
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda**							-	-
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**18.663.000**	**18.663.000**	**100**	-	-
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100	17.320.000	17.320.000	100	-	-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100	1.343.000	1.343.000	100	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**				-	-
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	22 orang	100	1.289.192.258	1.167.495.847	90,56	Sisa Rp. 121.696.411 merupakan selisih gaji	Perencanaan untuk tahun berikutnya akan di hitung dengan baik
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honor bagi pengelolaan keuangan dan honor pengadaan barang dan jasa	4 orang	4 orang	100	15.450.000	15.450.000	100	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honor bagi tenaga harian lepas	3 orang	3 orang	100	230.563.000	230.563.000	100	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**72.951.000**	**72.923.600**	**99,96**	-	-
1.3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 tahun	1 tahun	100	6.900.000	6.900.000	100	-	-
1.3.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 jenis	1 jenis	100	3.750.000	3.750.000	100	-	-
1.3.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	100	-	-	100	-	-
1.3.4	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	28 jenis	28 jenis	100	39.214.000	39.213.000	99,99	-	-
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1 tahun	100	13.400.000	13.373.600	99,80	-	-
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**					-	-
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				2.800.000	2.800.000	100	-	-
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya tagihan listrik, telpon, air dan internet kantor	3 rekening	1 rekening	100	1.800.000	1.790.000	99,44	-	-
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	8 jenis	8 jenis	100	2.493.000	2.493.000	100	-	-
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**17.000.000**	**16.200.000**	**95,29**	-	-
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	3 unit	3 unit	100	17.000.000	16.200.000	95,29	-	-
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin berjalan dengan baik	8 unit	8 unit	100	2.730.000	2.730.000	100	-	-
1.5.3	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya Gedung kantor yang baik	1 unit	1 unit	100				-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASA LAHAN	SOLUSI
2	**Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	**Sasaran: Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**60.485.000**	**60.485.000**	**100**	-	-
2.1	**Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan dan Gender**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**60.485.000**	**60.485.000**	**100**	-	-
2.1.1	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan Gender	18 kali	18 kali	100	60.485.000	60.485.000	100	-	-
3	**Program Perlindungan Perempuan**	**Sasaran: Menurunnya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**28.590.000**	**28.480.000**	**99.62**	-	-
3.1	**Kegiatan Penyediaan Layanan bagi perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota**	**Terwujudnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berjalan dengan baik**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**28.590.000**	**28.480.000**	**99.62**	-	-
3.1.1	Penyediaan Layanan bagi perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya layanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan	8 kali	8 kali	100	28.590.000	28.480.000	99.62	-	-
4	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Sasaran: Menurunnya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**108.535.300**	**108.345.388**	**99.83**	-	-
4.1	**Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**Terwujudnya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**108.535.300**	**108.345.388**	**99.83**	-	-
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	5 kali	5 kali	100	108.535.300	108.345.388	99.83	-	-
	JUMLAH				**100**	**1.861.252.558**	**1.738.418.835**	**93.40**		

Sumber: DP3A Kab. Manggarai, Jan 2023

4. Urusan Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Manggarai, menetapkan sasaran strategis Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan 14 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.62
Pengukuran Kinerja Dinas P2KB Kab. Manggarai
Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%
	Sasaran: Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk				
1.	Angka Kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR)	angka	2,056	2,09	98,35
2.	Persentase peserta KB aktif metode	%	44,89	35,28	78,59
3.	Persentase pemakaian kontrasepsi	%	73,22	62,12	84,85
4.	Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin berKBte tapi Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	%	11,21	13,097	83,17
5.	Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	%	2,461	2,906	118,09
6.	Persentase perangkat daerah yang meyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	2,44	4,651	190,62
7.	Persentase keluarga sejahtera	%	29,22	48,93	167,45
8.	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	8,33	17	200,08
9.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	Per 1000	25,71	27,25	94,01
10.	Presentase fasilitas kesehatan yang siap melayani KB MKJP	%	100	100	100
11.	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	%	44,49	87,54	196,77
12.	Presentase kesertaan KB di Kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah	%	58,6	42,86	73,14
13.	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	47,4	59,016	124,51
14.	Persentase anggota Poktan Bina Keluarga Balita (BKB) yang berKB	%	71,64	29,221	40,79
	Rata-rata				117,89
	Kategori			Memuaskan	

Sumber: DP2KB Kab. Manggarai, Januari 2023

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Indikator Total Fertility Rate (TFR)**

  Total Fertility Rate adalah jumlah kelahiran hidup tiap 1.000 wanita hingga akhir masa reproduksinya. Dalam praktiknya, TFR dihitung dengan cara menjumlahkan tingkat fertilitas wanita menurut umur (ASFR). Realisasi TFR tahun 2022 sesuai data Dinas

P2KB adalah 2,09 dari target 0,056. Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin menurun. Maka capaian kinerja indikator ini adalah:

$$= \frac{2{,}056 - (2{,}09 - 2{,}056)}{2{,}056} \times 100\%$$

$$= 98{,}35\%$$

Angka Kelahiran Kabupaten Manggarai tahun 2020-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.63
TFR Kabupaten Manggarai
2020-2022

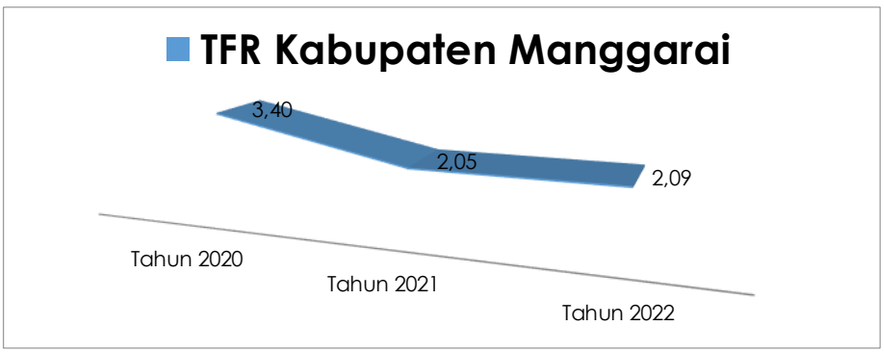

Sumber:DP2KB Kabupaten Manggarai, 2023

- Indikator kinerja "**Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)" ditargetkan 44,89%** dan terealisasi 35,28% yang artinya terdapat 35 sampai 36 peserta KB yang menggunakan MKJP per 100 peserta KB aktif. Nilai realiasi ini diperoleh dari "Jumlah peserta KB aktif yang menggunakan MKJP (10.806) dibagi jumlah total peserta aktif KB (30.629) dikali 100%.

- Indikator kinerja **"Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)**" ditargetkan 73,22% dan terealisasi 62,12%. Ini artinya terdapat 62 sampai 63 akseptor KB per 100 pasangan usia subur. Nilai realisasi ini diperoleh dari "Jumlah peserta KB aktif (30.629) dibagi jumlah PUS riil (49.303) dikali 100 %".

- Indikator kinerja **"Persentase sasaran PUS ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)"**, ditargetkan 11,21% dan terealisasi 21,615%. Angka realisasinya diperoleh dari "Jumlah PUS tak ber-KB yaitu PUS yang **Ingin Anak Tapi Ditunda (IAT)** dan PUS yang **Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)** yang tidak mendapat pelayanan kontrasepsi sebanyak 10.657 PUS dibagi total PUS riil (49.303) dikali 100%".

  Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin menurun, maka capaian kinerja indikator ini :

$$= \frac{11{,}21 - (21{,}65 - 11{,}21)}{11{,}21} \times 100\%$$

$$= 7{,}18\%$$

- Indikator kinerja "**Persentase Masyarakat yang Tersosialisasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)"**, ditargetkan 2,461% dan terealisasi 2,906% dengan tingkat capaian 118,09%. Ini artinya terdapat 2 sampai 3 orang yang tersosialisasi program KKBPK per 100 orang. Nilai realisasi ini diperoleh dari "Jumlah masyarakat yang tersosialisasi program KKBPK (9.496) dibagi jumlah masyarakat Manggarai (326.737) dikali 100 %.

- Indikator kinerja **"Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk"**, ditargetkan 2,44% dan terealisasi 4,651% dengan tingkat capaian 190,62%. Nilai realisasi ini diperoleh dari "Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (2 perangkat daerah) dibagi jumlah total perangkat daerah di Kabupaten Manggarai (43 perangkat daerah) dikali 100%.

- Indikator kinerja **"Persentase Keluarga Sejahtera"**, ditargetkan 29,22% dan terealisasi 48,93%. Untuk menghitung indikator ini, DP2KB tidak memiliki data khusus tentang jumlah keluarga

sejahtera dan pra sejahtera. Oleh karena itu, untuk saat ini DP2KB Kabupatei Manggarai menggunakan data jumlah keluarga yang menghuni rumah layak huni berdasarkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) sebagai data dasar. Dengan demikian nilai realisasi di atas diperoleh dari "jumlah keluarga yang menghuni rumah layak huni dibagi jumlah keluarga dikali 100 %".

- Indikator kinerja **"Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan yang Aktif "**, ditargetkan 8,33% dan terealisasi 17%. Angka realisasi diperoleh dari "Jumlah PPKS dari 12 Kecamatan yang aktif (2 PPKS) dibagi jumlah Kecamatan (12 Kecamatan) dikali 100%".

- Indikator kinerja **"Rasio Angka Kelahiran Remaja Umur 15 – 19 tahun",** ditargetkan 25,71% dan **te**realisasi 27,25%. Angka realisasi ini diperoleh dari "Jumlah kelahiran wanita usia 15 – 19 tahun (425) dibagi jumlah total wanita usia 15 – 19 tahun (15.597) dikali 100%". Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin menurun, maka capain kinerja indikator ini dihitung dengan rumus menurun:

$$= \frac{25{,}71 - (27{,}25 - 25{,}71)}{25{,}71} \times 100\%$$

$$= 94{,}01\%$$

- Indikator kinerja **"Persentase Fasilitas Kesehatan yang Siap Melayani Metode Kontrasesi Jangka Panjang (MKJP)"**, ditargetkan 100% dan berhasil terealisasi 100% dimana 23 fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Manggarai, semuanya dapat melakukan pelayanan MKJP khususnya implan dan IUD.

- Indikator kinerja **"Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan"**, ditargetkan 44,49% dan terealisasi 87,541%, dengan tingkat capaian 196,77%. Angka realisasinya diperoleh dari "Jumlah

peserta KB baru pasca persalinan (2.902) dibagi jumlah total peserta KB baru (3.315) dikali 100%".

- Indikator kinerja **"Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota Dengan Kesertaan Rendah",** ditargetkan 58,6% dan terealisasi 42,86%, dengan tingkat capaian 73,14%. Angka realisasi ini diperoleh dari "Jumlah peserta KB aktif di Desa/Kelurahan dengan CPR di bawah 50 % (3.830) dibagi jumlah PUS di Desa/Kelurahan dengan CPR di bawah 50 % (8.936) dikali 100%.
- Indikator kinerja **"Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)"**, ditargetkan 47,4% dan terealisasi 59,016%. Angka realisasi ini diperoleh dari "Jumlah peserta aktif penerima bantuan iuran (19.732) dibagi jumlah pasangan usia subur penerima bantuan iuran (33.435) dikali 100%".
- Indikator kinerja **"Persentase Anggota Poktan Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB"**, ditargetkan 71,64% dan terealisasi 29,221%. Angka realisasi ini diperoleh dari "Jumlah anggota BKB yang ber KB (90) dibagi jumlah anggota BKB (308) dikali 100%".

Upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk menekan laju pertumbuhan penduduk diantaranya:

a. Melakukan penyuluhan dan KIE secara intensif mengenai Keluarga Berencana.
b. Adanya upaya-upaya pendekatan yang intensif oleh tenaga lapangan (PKB, PPKBD dan Sub PPKBD).
c. Ketersediaan Alat Kontrasepsi yang mencukupi.
d. Pelayanan Kontrasepsi KB yang intensif sampai di pelosok-pelosok.
e. Adanya pelatihan bagi kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menunda usia pernikahan sampai berusia di atas 20 tahun.
b. Kurangnya motivasi dari generasi yang lebih tua bagi PUS Mupar (muda paritas rendah), yaitu PUS yang jumlah anaknya

masih atau dibawah 2 orang, agar memiliki cukup 2 (dua) anak.

c. Masih adanya keraguan dan ketakutan dari masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan untuk pelayanan kontrasepsi karena berpikir akan dikenakan biaya yang mahal untuk pelayanan kontrasepsi.

d. Alat kontrasepsi yang diminati calon akseptor KB belum/tidak tersedia.

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kekurangberhasilan pencapaian sasaran tersebut di atas yaitu:

a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan risiko melahirkan di bawah usia 20 tahun dengan sosialisasi/penyuluhan.

b. Membentuk wadah PIK-R/M (Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa).

c. Mengupayakan agar Alokon KB selalu tersedia di Gudang DP2KB

b) **Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022 untuk penanganan urusan **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**, Dinas P2KB melaksanakan 4 Program, 12 kegiatan dan 398 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggarannya Rp.7.558.120.170,- realisasinya sebesar Rp.5.440.568.495,- dengan tingkat capaiannya 71,98%. Ringkasan realisasi anggaran disajikan dalam tabel 3.64.

Tabel 3.64
Anggaran Dinas P2KBP3A Kab. Manggarai
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**7.552.870.170,-**	**5.435.318.495,-**	**71,96**
	Belanja Pegawai	1.741.444.378,-	1.700.713.033,-	97,66
	Belanja Barang dan Jasa	5.811.425.792,-	3.734.605.462,-	64,26
2.	**Belanja Modal**	**5.250.000,-**	**5.250.000,-**	**100**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.250.000,-	5.250.000,-	100
	Jumlah	**7.558.120.170,-**	**5.440.568.495,-**	**71,98**

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.65.

Tabel 3.65
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas P2KB Kab. Manggarai Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda**				**2.143.346.678**	**2.078.760.295**	**96,99**	-	-
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**2.760.000**	**2.760.000**	**96,99**	-	-
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100	2.030.000	2.030.000	100	-	-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dok	5 Dok	100	730.000	730.000	100	-	-
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi keuangan perangkat Daerah**	**1 Tahun**	**1 Tahun**		**1.825.207.378**	**1.790.476.033**	**98,10**	-	-
1.2.1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	30 Orang	100	1.710.094.378	1.675.963.033	**98,10**	-	-
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Orang	12 Orang	100	29.550.000	28.950.000	98,10	-	-
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Orang	3 Orang	100	85.563.000	85.563.000	100	-	-
1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 Tahun**	**1 Tahun**		**88.373.3000**	**86.842.308**	**98,27**	-	-
1.3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	6.720.000	6.720.000	100	-	-
1.3.2	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	16.375.500	16.375.500	100	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.3.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	12 Dok	100	840.000	840.000	100	-	-
1.3.4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	51.037.800	51.003.000	99,93	-	-
1.3.5	Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5 Laporan	100	13.400.000	11.903.808	88,83	-	-
1.4	**Penyediaan Jasa Penunjangurusan Pemerintah Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Tahun**	**1 Tahun**		**53.256.000**	**28.542.448**	**53,59**	-	-
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	1000 Laporan		12.500.000	10.172.415	83,38	-	-
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	49 Laporan	48 Laporan	100	38.200.000	16.534.033	43,28	-	-
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	2.556.000	1.836.000	71,83	-	-
1.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**173.750.000**	**170.139.506**	**97,92**	-	-
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	72 Unit	72 Unit	100	**158.000.000**	**154.389.506**	97,71	-	-
1.5.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	23 Unit	100	5.750.000	5.750.000	100	-	-
1.5.3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	10.000.000	10.000.000	100	-	-
2.	**PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Sasaran: Meningkatnya Upaya Pengendalian Penduduk**				**107.772.500**	**102.855.000**	95,44	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
2.1	**Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerahProvinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Terwujudnya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalamrangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**19.640.000**	**19.640.000**	**100**	**-**	**-**
2.1.1	Pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian ProgramBangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kali	1 Kali	100	19.640.000	19.640.000	100	-	-
2.2	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Terwujudnya Pemetaan Perkiraan Pengendalian PendudukCakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**88.132.500**	**83.215.000**	**94,14**	**-**	**-**
2.2.1	Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yangtersedia	36.350 Lembar	36.850 Lembar	100	11.055.000	11.055.000	100	-	-
2.2.2	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangandan pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangandan Pelayanan KB	12 Balai	12 Balai	100	28.800.000	23.882.500	82,93	-	-
2.2.3	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaandan Pengawasan	12 Kali	12 Kali	100	48.277.500	48.277.500	100	-	-
3.	**PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**	**Sasaran : Meningkatnya Capaian Keluarga Berencana**				**3.064.282.492**	**2.640.124.700**	**86,16**		
3.1	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Sasaran: Terwujudnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Pendudukdan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**914.155.000**	**686.024.000**	**75,04**		
3.1.1	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2 Mitra	3 Mitra	100	15.600.000	12.690.000	81,35		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
3.1.2	Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	54.560.000	54.340.000	99,60		
3.1.3	Penyediaan dan distribusisarana KIE prgram KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Balai	12 Balai	100	88.800.000	83.600.000	94,14		
3.1.4	Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massacetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Jenis	3 Jenis	100	42.575.000	42.575.000	100		
3.1.5	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), RapatKoordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Kali/Kecamatan	1 Kali/Kecamatan	8,333	183.600.000	14.025.000	7,64		
3.1.6	Pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasionaldan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Balai	12 Balai	100	486.000.000	456.884.000	94,01		
3.1.7	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan HasilPengendalian Program KKBPK	2 Kali	1 Kali	50	43.020.000	21.910.000	50,93		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
3.2	**Pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Sasaran: Terwujudnya Pendayagunaan Tenagapenyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**1.015.657.492.**	**1.015.594.000**	**99,99**		
3.2.1	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakkan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanandan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Lokasi	12 Lokasi	100	192.857.492	192.794.000	99,97		
3.2.2	Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	748 Orang	748 Orang	100	822.800.000	822.800.000	100		
3.3	**Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Terwujudnya Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan PelayananKB di Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**720.470.000**	**644.661.700**	**89,48**		
3.3.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke FasilitasKesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23 Klinik	23 Klinik	100	10.000.000	10.000.000	100		
3.3.2	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2432 orang	1946 orang	80,02	608.902.300	534.974.000	83,86		
3.3.2	Pembinaan Pelayanan keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23 faskes	23 faskes	100	10.247.700	10.247.700	100		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
3.3.3	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di fasilitas Kesehatan dan kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak- Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	25 Kali	25 Kali	100	33.775.000	32.600.000	96,23		
3.3.4	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	22 Kali	22 Kali	100	57.545.000	56.840.000	98,77		
3.4	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Oraganisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**	**Terwujudnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Oraganisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**	**1 Tahun**	**1 Tahun**		**414.000.000**	**293.845.000**	**70,98**		
3.4.1	Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	27 Lokasi	27 Lokasi	100	414.000.000	293.845.000	**70,98**		
4.	**PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Sasaran : Meningkatnya Jumlah Keluarga Sejahtera**				**2.242.718.500**	**618.828.500**	**27,59**		
4.1	**Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Sasaran: Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**1 Tahun**	**1 Tahun**		**2.242.718.500**	**618.828.500**	**27,59**		
4.1.1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Set	20 Set	100	342.191.000	342.191.000	100		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
4.1.2	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20.775 Orang	6.302 Orang	30,33	1.836.060.000	222.870.000	12,14		
4.1.3	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Katahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Keg	4 Keg	100	11.944.000	11.944.000	100		
4.1.4	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Katahanandan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Keg	2 Keg	100	52.523.500	41.823.500	79,63		
	TOTAL					**7.558.120.170**	**5.440.568.495**	**71,98**		

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab. Manggarai, Jan 2023

5. Urusan Pangan

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, menetapkan sasaran strategis 'Meningkatnya Kondisi Ketahanan Pangan Daerah'. Capaian indikator kinerja disajikan dalam tabel 3.66.

Tabel 3.66
Capaian Kinerja Urusan Pangan
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Indeks Ketersediaan	89,85	90,91	101,18
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Indeks Pemanfaatan	63,12	63,12	100,00
3.	Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Indeks Keterjangkauan	67,59	67,59	100,00
	Rata-rata				100,39
	Kategori				

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, Januari 2023

- Capaian kinerja indikator Indeks Ketersediaan adalah 101,18% di kategorikan aman. Hal ini disebabkan karena produksi pangan pokok padi, jagung, umbi-umbian dan Kacang-kacangan masih mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah, akses infrastruktur yang terjangkau sehingga mempermudah jumlah ketersediaan pangan.

- Capaian kinerja indikator Indeks pemanfaatan adalah 100%. Hal ini disebabkan karena tingginya intervensi bantuan dari pemerintah untuk KK miskin, stunting dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.

- Capaian kinerja indikator Indeks Keterjangkauan adalah 100%. Hal ini disebabkan karena pemerintah masih mampu untuk mengontrol kestabilan harga pangan, sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi terlebih untuk masyarakat berpenghasilan rendah, selain itu insfrastruktur juga memliki pengaruh signifikan terhadap keterjangkauan pangan

b) **Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, untuk penanganan urusan pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai melaksanakan 4 Program, 5 Kegiatan dan 13 subkegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.379.173.500,- realisasi sebesar Rp.364.360.996,- dengan tingkat capaian sebesar **96,09**%. Ringkasan anggaran urusan pangan dapat dilihat pada tabel 3.67.

Tabel 3.67
Anggaran Urusan Pangan
Kabupaten Manggarai Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**379.173.500**	**364.360.996**	**96,09**
	Belanja Pegawai	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa	379.173.500	364.360.996	96,09
2.	**Belanja Modal**	**-**	**--**	
	TOTAL	**379.173.500**	**364.360.996**	**96,09**

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.68.

Tabel 3.68

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Pangan Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan**					**8.679.000**	**8.679.000**	**100**	-	-
1.1	**Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemantauan Lumbung Pangan Masyarakat**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**8.679.000**	**8.679.000**	**100**	-	-
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Terbinanya Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat	40 Kelompok	40 Kelompok	100	4.467.000	4.467.000	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Data dan Informasi Kemandirian Pangan	12 Buku	12 Buku	100	4.212.000	4.212.000	100	-	-
2	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**					**360.385.500**	**346.372.996**	**96**	-	-
2.1	**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Terlaksanaanya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**22.563.000**	**9.311.000**	**41**	-	-
2.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	8.734.000	5.974.000	68,40	-	-
2.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksanaanya Promosi Pangan Lokal	1 Kali	1 Kali	100	262.000	-	0	-	-
2.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Tersedianya Data dan Informasi Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3.216.000	-	0	-	-
2.1.4	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksanaanya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100	3.804.000	-	0	-	-
2.1.4	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100	3.337.000	-	0	-	-
2.1.5	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Terbinanya Kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	5 Kelompok	5 Kelompok	100	3.210.000	-	0	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
2.2	**Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**337.822.500**	**337.061.996**	**99,77**	-	-
2.2.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersedianya Dokumen Analisis Target Konsumsi Pangan	9 Dokumen	9 Dokumen	100	4.168.500	4.168.500	100,00	-	-
2.2.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terbinanya Kelompok Wanita Tani	10 Kelompok	10 Kelompok	100	333.348.000	332.893.496	99,86	-	-
2.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksanaya Kegiatan Hari Pangan Sedunia	1 Kali	-	0	306.000	-	0	-	-
3	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**					**5.516.000**	**5.516.000**	**100**	-	-
3.1	**Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100**	**5.516.000**	**5.516.000**	**100**	-	-
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	5.516.000	5.516.000	100	-	-
4	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**					**4.593.000**	**3.793.000**	**82,58**	-	-
4.1	**Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksanaya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**6 Pasar**	**6 Pasar**	**100**	**4.593.000**	**3.793.000**	**82,58**	-	-
4.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaskanaya Pengawasan Pangan Segar	6 Pasar	6 Pasar	100	4.593.000	3.793.000	82,58	-	-
	TOTAL					**379.173.500**	**364.360.996**	**96,09**		

Sumber: Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Manggarai, Jan 2023

6. Urusan Pertanahan

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan urusan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2022, menetapkan sasaran strategis 'Terwujudnya Penyelesaian Konflik Tanah dan Masalah Sosial Lainnya'. Capaian indikator kinerja disajikan dalam tabel 3.69.

Tabel 3.69
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	100%	25%	25
		Rata-rata			25
		Kategori		Kurang	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Manggarai, Jan 2023

Sampai dengan tahun 2022, jumlah kasus sengketa tanah yang terdaftar di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai sebanyak 10 kasus. Dari jumlah tersebut, 1 kasus berhasil diselesaikan pada tahun 2022, yaitu Kasus Tanah Nanga Banda, Kec. Reok. Dengan demikian, termasuk Kasus Puni tahun 2018 sudah 2 kasus yang berhasil ditangani.

Tabel 3.70
Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terdaftar

No	Lokasi	Kecamatan	Ket.
1	Golo Woi	Cibal Barat	Belum Tuntas
2	Gendang Nao	Satarmese Utara	Belum Tuntas
3	Gendang Tengger	Satarmese Utara	Belum Tuntas
4	Gendang Pawo	Satarmese	Belum Tuntas
5	Pustu Pau	Kelurahan Pau, Kec. L. Rembong	Belum Tuntas
6	Pekuburan Woang	Kelurahan Pitak, Kec. L. Rembong	Belum Tuntas
7	SDI Barang	Cibal	Belum Tuntas
8	Pustu Barang	Cibal	Belum Tuntas
9	Pasar Puni	L. Rembong	Tuntas pada tahun 2018
10	Nangabanda	Reo	Tuntas pada tahun 2022

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Manggarai, Jan 2023

b) **Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

- Realisasi Pendapatan

  Realisasi Pendapatan menurut jenis pendapatan disajikan pada tabel 3.71.

Tabel 3.71
Realisasi Pendapatan Urusan Pertanahan
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Retribusi Jasa Umum**	**2.062.000**	**400.000**	**19,40**
	Retribusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman	2.062.000	400.000	19,40
	TOTAL	**2.062.000**	**400.000**	**19,40**

Sumber: Dinas PRKPP Kab. Manggarai, Januari 2023

- Pada Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 1 Program dan 1 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.225.709.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.165.466.180,- dengan capaian 73%. Selengkapnya ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.72.

Tabel 3.72
Anggaran Urusan Pertanahan

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**225.709.800**	**165.466.180**	**73**
	Belanja Pegawai	34.400.000	34.400.000	100
	Belanja Barang dan Jasa	191.309.800	131.066.180	69
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**225.709.800**	**165.466.180**	**73**

Sumber: Dinas PRKPP Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.73.

Tabel 3.73

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Pertanahan Tahun 2022

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Sasaran: Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**225.709.800**	**165.466.180**	**73**	-	-
1.1	**Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Tingkat Penyelesaian Konflik**				**225.709.800**	**165.466.180**	**73**	-	-
1.1.1	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 Daerah Kab/Kota	Tersedianya Inventarisasi Sengketa dan Konflik daerah				184.679.800	124.436.180	67	Pada Sertifikat sekolah tidak dikenakan biaya dan adanya pengembalian uang perjalanan dinas -	
1.1.2	Sub Kegiatan Mediasi penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 Daerah Kab/kota	Tersedinya Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				41.030.000	41.030.000	100	-	-
	TOTAL					**225.709.800**	**165.466.180**	**73**		

Sumber: DPRKPP Kab. Manggarai, 2023

7. Urusan Lingkungan Hidup

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2022, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk mencapai 4 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja. Secara lengkap sasaran strategis beserta target kinerja, realisasi dan persentase pencapaiannya dapat dilihat pada tabel 3.74.

Tabel 3.74
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	71,50	50	69,9
2.	Meningkatnya kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,37	93,82	106
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	85,32	73,89	86,6
4.	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3	Persentase Sampah Tertangani	20,97%	9,05%	43,3
		Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3	26,13%	69,64%	266,5
	Rata-rata				**107,3**
	Kategori				

Sumber: DLH Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja masing-masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

❖ **Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Air**

Sasaran strategis meningkatnya kualitas air memiliki indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026. Target IKA 2022 didasarkan pada capaian IKA Tahun 2020 dengan nilai 70 maka ditetapkan target nilai IKA untuk Tahun 2022 adalah **71,50,** dan terealisasi IKA 2022 adalah **50** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **69,9%.** Target ini dianggap terlalu tinggi dikarenakan adanya perubahan pada metode pengujian dan penambahan parameter uji dari 4 parameter menjadi 8 paramenter oleh laboratorium yang terdaftar dan terakreditasi.

Pengujian IKA dilakukan pada sampel air sungai yang dipilih dari DAS dengan kriteria bahwa sungai tersebut merupakan sungai lintas kabupaten atau merupakan sungai prioritas yang akan

dikendalikan pencemarannya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai melakukan pengujian IKA pada 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Wae Mese dan DAS Wae Pesi. Hasil rekapitulasi Nilai Indeks Permutu Air Kabupaten Manggarai adalah 50,00. Mutu air terhadap DAS Wae Pesi dan DAS Wae Mese adalah **Keadaan Air Cemar Ringan**. Penyebab keadaan air cemar ringan adalah karena adanya beberapa parameter pengujian yang berada diatas baku mutu. Parameter yang berada diatas baku mutu pada sebagian besar titik sampel yaitu parameter hasil uji Fecal Coliform, hasil uji *Dissolved Oxygen* (DO) dan *Biological Oxygen Demand* (BOD). Indeks Kualitas Air dalam 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 70,00 tahun 2020 menjadi 60,00 tahun 2021 dan 50,00 di tahun 2022.

❖ **Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Udara**

Sasaran strategis meningkatnya kualitas udara memiliki indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU). Hasil pengujian dan perhitungan indeks kualitas udara dilaksanakan melalui aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Target IKU 2022 adalah **88,37,** terealisasi sebesar **93,82** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **106%.** IKU merupakan suatu nilai yang menunjukan mutu atau tingkat kualitas udara berupa gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter polusi udara yang berhubungan, menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dilakukan melalui pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Manggarai melalui metode *passive sampler* dengan parameter NO_2 (Nitrogen dioksida) dan SO_2 (Sulfur dioksida). Hal ini menunjukan kualitas udara di wilayah pengujian masih baik dan parameter kualitas udara masih di bawah baku mutu. Indeks Kualitas Udara dalam 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 87,87 tahun 2020 menjadi 92,57 tahun 2021 dan 93,82 di tahun 2022.

❖ **Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan**

Sasaran strategis meningkatnya kualiats tutupan lahan memiliki indikator kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKL merupakan indeks yang mewakili penilaian terhadap isu hijau dalam IKLH. Perhitungan ini akan mengelaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Hasil analisis tutupan lahan berdasarkan sumber data citra satelit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. IKLT menggunakan standar luas kawasan hutan di setiap kabupaten yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Target IKTL 2022 adalah **85,32,** dan terealisasi **73,89** dengan tingkat capaian **86,6%**. IKTL tahun 2020 mencapai 85,32%, turun menjadi 73,89% tahun 2021-2022.

Ketiga indikator di atas (IKA, IKU dan IKTL) merupakan indikator pembentuk Index Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, yaitu mencapai 72,98%, diperoleh dengan rumus:

IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Lahan
72,98	50,00	93,82	73,89

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Manggarai :

1. Peningkatkan pengawasan terhadap jenis usaha/atau kegiatan yang menghasilkan polutan baik berupa limbah padat, cair dan udara (emisi/ambient).
2. Kerja kolaborasi dan sinergi bersama masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti: pengelolaan

sampah, melestarikan sumber mata air, melakukan penanaman terhadap lahan kritis dan menjaga sungai bersih.

3. Kolaborasi bersama lembaga-lembaga swadaya pegiat lingkungan dalam penanganan, pengelolaan persampahan serta pendampingan dan edukasi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat mengenai sampah

❖ **Sasaran Strategis Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3**

Sasaran Strategis meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 memiliki 2 indikator kinerja yaitu persentase sampah tertangani dan persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3. Target persentase sampah tertangani tahun 2022 adalah **20,97%,** realisasinya adalah **9,05%** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **43,3%.** Target persentase sampah tertangani tahun 2022 merupakan target untuk seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Sementara wilayah pelayanan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai hanya mencakup 4 kecamatan dari total 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai. Kecamatan yang menjadi wilayah pelayanan persampahan yaitu Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Cibal, Kecamatan Reok dan Kecamatan Ruteng. Sebagian besar pelayanan persampahan dilaksanakan pada wilayah Kecamatan Langke Rembong. Sementara pada wilayah Kecamatan Cibal, Reok dan Ruteng hanya dilaksanakan pada wilayah pusat kecamatan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia dan sarana yang ada hanya cukup untuk beberapa kecamatan tersebut.

Target persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 Tahun 2022 adalah **26,13%,** realisasi ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 Tahun 2022 adalah **69,64%** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **266,5%.** Nilai ini menunjukan bahwa persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 Tahun 2022 lebih dari target Tahun 2022.

b) **Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

- **Pengelolaan Pendapatan**

  Realisasi pendapatan urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 3.75.

Tabel 3.75
Realisasi Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	303.370.000	434.314.000	143,16
	Jumlah	**303.370.000**	**434.314.000**	**143,16**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai, Januari 2023

- Pada Tahun 2022 Dinas Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 7 program dan 10 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.**10.803.007.459**,- realisasi sebesar Rp.**9.705.808.222,- atau 89,84%.** Selengkapnya ringkasan anggaran disajikan dalam tabel 3.76.

Tabel 3.76
Anggaran DLH Kabupaten Manggarai Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**			
	Belanja Pegawai	3.176.312.026	3.087.277.150	97
	Belanja Barang dan Jasa	3.594.502.842	3.931.452.272	99
2.	**Belanja Modal**			
	Belanja Modal Tanah	2.947.196.791	1.962.083.000	66,5
	Belanja Modal Peralatan	724.995.800	724.995.800	100
	TOTAL	**10.803.007.459**	**9.705.808.222**	**89,84**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.77.

Tabel 3.77
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai
Tahun 2022

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasa lahan	Solusi
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**3.587.598.326**	**3.228.603.588**	**94,78**	-	-
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen pencanaan dan evaluasi kinerja DLH**	**14 dokumen**	**14 dokumen**	**100**	**97.576.500**	**97.556.500**	**99**	-	-
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Prangkat Daerah	Tersedianya dokumen perancanaan DLH	7 dokumen	7 dokumen	100	14.624.200	14.624.200	100	-	-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	3.135.000	3.135.000	100	-	-
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi DLH	7 dokumen	7 dokumen	100	79.817.300	79.797.300	99	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya gaji dan tunjangan ASN**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**3.163.062.026**	**3.074.027.150**	**97,00**	-	-
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100	3.121.662.026	2.991.227.150	99	-	-
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya jasa administrasi keuangan pengelolaan APBD	11orang	11 orang	100	41.400.000	41.400.000	100	-	-
1.4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum DLH**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**236.589.800**	**236.396.853**	**100**	-	-
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi istrik/penerangan gedung/kantor	4 jenis	4 jenis	100	2.570.000	2.570.000	100	-	-
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	38 jenis	32 jenis	100	48.385.000	48.385.000	100	-	-
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat bulanan pegawai	105 Orang	105 Orang	100	55.200.000	55.200.000	100	-	-

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	59.346 lembar	59.346 lembar	100	17.803.800	17.803.800	100	-	-
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar	2 Jenis	2 Jenis	100	1.120.000	1.120.000	100	-	-
1.4.6	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor	9 jenis	9 jenis	100	1.431.000	1.431.000	100	-	-
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	22 kali	27 kali	100	110.080.000	109.887.053	99	-	-
1.5	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**19.500.000**	**16.203.450**	**83**	-	-
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya meterai	200 lembar	260lembar	100	2.600.000	2.600.000	100	-	-
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100	16.900.000	13.603.450	80	-	-
1.6	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah pendukung pelaksnaan tugas DLH berfungsi optimal**	**25 unit**	**25 unit**	100	**70.870.000**	**69.984.990**	**99**	-	-
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	15 unit	15 unit	100	33.000.000	32.094.990	97	-	-
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya komputer dan printer	11 unit	11 Unit	100	7.870.000	7.870.000	100	-	-
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung/kantor	3 Unit	3 Unit	100	30.000.000	30.000.000	100	-	-
2	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Tersedianya neraca lingkungan, RPPLH, SLHD**	1 dokumen	1 dokumen	100	**339.810.000**	**338.827.612**	**99**	-	-
2.1	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Tersedainya dokumen KLHS RPJMD**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100**	**339.810.000**	**338.827.612**	**99**	-	-
2.1.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terlaksananya KLHS Renvana Tata Ruang	1 dokumen	1 dokumen	100	**339.810.000**	338.827.612	99	-	-

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
3	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Terwujudnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**109.131.800**	**108.302.800**	**99**	-	-
3.1	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pemantauan dan pengujian kualitas air**	**39 lokasi**	**39 lokasi**	**100**	**109.131.800**	**108.302.800**	**99**	-	-
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersedianya data kualitas air dan udara	39 lokasi	39 lokasi	100	109.131.800	108.302.800	99	-	-
4	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**	**Penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan persyaratan teknis dan administratif**	**51 lokasi**	**56 lokasi**	**109**	**63.341.000**	**63.341.000**	**99**	-	-
4.1	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Tersedianya data verifikasi pemenuhan persyaratan administratif dan teknis penyimpanan limbah B3**	**51 lokasi**	**56 lokasi**	**109**	**63.341.000**	**63.341.000**	**100**	-	-
4.1.1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya verifikasi pemenuhan persyaratan administratif dan teknis penyimpanan limbah B3	51 lokasi	**56 lokasi**	**109**	**63.341.000**	63.341.000	100	-	-
5	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Persentasi usaha/ kegiatan yang yang taat terhadap izin lingkungan**	**9 %**	**40,38 %**	**444**	**193.705.000**	**193.668.635**	**99,9**	-	-

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
5.1	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya rekomendasi kelayakan lingkungan**	**20 dokumen**	**31 dokumen**	**155**	**193.705.000**	**193.668.635**	**99,9**	-	-
5.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	20 dokumen	31 dokumen	155	93.187.000	93.150.635	99,9	-	-
5.1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan hidup dan izin PPLHnya dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten	100 usaha/kegiatan	112 usaha/kegiatan	112	84.978.000	84.978.000	100	-	-
5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaaya dan rencana PPLH	Terlaksananya koordinasasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan	4 Kali	2 Kali	50	15.540.000	15.540.000	100	-	-
6	**Program Pengelolaan Persampahan**	Persentase penangnan sampah	20,97 %	9,05%	43,15	**6.639.276.733**	**5.469.031.432**	**82**	-	-
6.1	**Pengelolaan Sampah**	Jumlah sampah yang ditangani	180 m3	73,71 m3	40	**6.639.276.733**	**5.469.031.432**	**99,12**	-	-
6.1.1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengangkutan sampah	180 m3	73,71m3	40	6.639.276.733	5.469.031.432	82,12	-	-
	JUMLAH				**149,36**	**10.803.007.459**	**9.705.808.222**	**89,84**		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai, Jan 2023

8. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan sasaran strategis 'Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil', dengan indikator kinerja, target, realisasi dan capaian seperti dalam tabel 3.78.

Tabel 3.78
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%
1.	**Persentase kepemilikan dokumen kependudukan**	**%**	**16,18**	**25,59**	**160,38**
	Persentase Kepemilikan KTP	%	13,23	18,90	
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	19,13	33,00	
2.	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**%**	**30,03**	**35,57**	**118,46**
	Persentase Kepemilikan Akta Lahir	%	36,04	36,65	
	Persentase Kepemilikan Akta Nikah	%	24,03	34,50	
3.	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disdukcapil**		**78,50**	**80,37**	**120,38**
	Rata-rata				**127,07**
	Kategori				Memuaskan

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Manggarai, Januari 2023

Capaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan**
  - Persentase Kepemilikan KTP

    Jumlah wajib KTP yang memiliki KTP tahun 2022 sebanyak 42.258 dari total wajib KTP sebanyak 223.556 atau mencapai 18,90%.
  - Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

    Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga di tahun 2022 sebanyak 31.217 dari total jumlah Kepala Keluarga sebanyak 94.598 atau mencapai 33% dari target 19,13%.

    Dengan demikian presentase kepemilikan dokumen penduduk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

= **presentase Kepemilikan KTP + presentase Kepemilikan Kartu Keluarga / 2**

= (18,90% + 33%) / 2 = 25,95%

- **Presentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**
  - Persentase Kepemilikan Akta Lahir

    Jumlah penduduk yang memiliki Akta Lahir pada tahun 2022 sebanyak 119.752 jiwa dari total penduduk yang wajib memiliki Akta Lahir sebanyak 326.737 jiwa atau mencapai 36,65% dari target 36,04%.
  - Persentase Kepemilikan Akta Nikah

    Jumlah pasangan nikah yang memiliki Akta Nikah tahun 2022 sebanyak 44.956 dari total jumlah pasangan nikah sebanyak 130.320 atau mencapai 34,50% dari target 24,03%

  Dengan demikian Presentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

  = **presentase Kepemilikan Akta Lahir + presentase Kepemilikan Akta Nikah / 2**

  = 36,65% + 34,50% / 2 = 35,57 %

- **IKM Disdukcapil**

  IKM Disdukcapil tahun 2022 mencapai 80,37 atau kategori BAIK. Ini merupakan hasil survei kepuasan masyarakat bulan Desember tahun 2022. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dispendukcapil yang diambil dari 40 responden atau sampel. Cara perhitungannya sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 Program dan 13 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.112.391.302,- realisasi sebesar Rp. 4.960.247.820,- dengan tingkat capaian sebesar 97,02%. Ringkasan anggaran disajikan dalam tabel 3.79.

Tabel 3.79
Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Manggarai Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**4.680.785.412**	**4.600.467.812**	**98,28**
	Belanja Pegawai	1.933.033.880	1.914.040.140	99,02
	Belanja Barang dan Jasa	2.747.751.532	2.686.427.672	97,77
2.	**Belanja Modal**	**431.605.890**	**359.780.008**	**83,36**
	TOTAL	**5.112.391.302**	**4.960.247.820**	**97,02**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jan 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target kinerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.80.

Tabel 3.80
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Prosentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar**	**96%**	**96%**	**96,43**	**4.764.730.777**	**4.346.027.078**	**91,21**	**-**	**-**
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**100**	**174.574.000**	**173.774.000**	**99,54**	**-**	**-**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Renstra dan Renja	12 Kecamatan 2 Dokumen	12 Kecamatan 2 Dokumen	100	16.859.000	16.859.000	100	-	-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP, LPPD, LKPD, LKPj, RKT, LPJ APBD Laporan Penduduk	6 Dokumen 2 Jenis	6 Dokumen 2 Jenis	100	3.676.000	3.676.000	100	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga	2 Jenis	2 Jenis	100	154.039.000	153.239.000	99,48	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**100**	**2.048.841.880**	**2.030.748.140**	**99,12**	-	-
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100	1.901.933.880	1.883.840.140	99,05	-	-
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola APBD Honor (THL)	8 orang 4 orang	8 orang 4 orang	100	146.908.000	146.908.000	100	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**100**	**240.500.000**	**240.450.000**	**99,98**	-	-
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Banner, Brosur, Liflet, Spanduk Sosialisasi Akta-akta Pencatatan Sipil	4 Jenis 1 Kegiatan	3 Jenis 1 Kegiatan	100	135.670.000	135.170.000	99,63	-	-
1.4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 Jenis**	**7 Jenis**	**100**	**1.457.242.200**	**1.122.444.941**	**86,35**	-	-
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik (Alat Listrik)	5 jenis	5 jenis	100	2.065.000	2.065.000	100	-	-
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Perekaman Mobile, Printer Cetak KTP	2 Jenis	2 Jenis	100	1.128.765.700	1.043.747.570	92,47	-	-
		Alat Tulis Kantor	34 Jenis	34 Jenis					-	-
		Film Printer, Pembersih Printer, Ribbon Cetak KIA,Ribbon Cetak KTP, Kartu SAM	5 Jenis	5 Jenis					-	-
		Kartu Identitas Anak	18500 Keping	18500 Keping					-	-
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan Dan Minuman harian	5520 OM	5520 OM	100	43.700.000	43.700.000	100	-	-
		Makanan Dan Minuman Rapat	460 OM	460 OM	100				-	-
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	100	37.300.000	37.300.000	100,00	-	-
1.4.5	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	14 Jenis	14 Jenis	100	5.131.500	5.131.500	100	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dan Propinsi	7 Kali	7 Kali	100	240.280.000	238.493.463	99,26	-	-
		Laporan Penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan hasil Rakornas/Kegiatan sejenis/Bimtek Dukcapil serta kegiatan koordinasi dan Konsultasi ke pusat dan propinsi	16 Kali	16 Kali					- -	- -
		Laporan Perjanjian Kerja Sama	1 Dokumen	1 Dokumen					-	-
1.5	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3 Jenis**	**1 Jenis**	**75**	**83.230.890**	**71.925.003**	**86,42**	-	-
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kantor	3 Jenis	1 Jenis	75	83.230.890	71.925.003	86,42	-	-
1.6	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**8 Jenis**	**8 Jenis**	**100**	**374.022.000**	**370.380.250**	**99,03**	-	-
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Paket pengiriman	2 Jenis	2 Jenis	100	4.900.000	4.388.500	89,56	-	-
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Air, Telepon dan Listrik	3 Jenis	3 Jenis	100	39.000.000	35.909.750	92,08	-	-
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Akte Kelahiran	4500 Dokumen	4500 Dokumen	100	330.122.000	330.082.000	99,99	-	-
		Akte Perkawinan	1500 Dokumen	1500 Dokumen					-	-
		Kartu Keluarga	6970 Dokumen	6970 Dokumen					-	-
		KTP E	16000 Keping	16000 Keping					-	-
1.7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**100**	**29.750.000**	**21.684.820**	**72,89**	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Suku Cadang, BBM, Pelumas, STNK kendaraan dinas	9 unit	9 unit	100	23.000.000	14.934.820	64,93	Suku cadang kendaraan roda 4 dan pajak kendaraan dinas roda 2 tidak terpakai semua	
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Gedung Kantor	2 Jenis	2 Jenis	100	6.750.000	6.750.000	100	-	-
2	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Sasaran: Persentase Kepemilikan E-KTP**	**89 %**	**89 %**	**100**	**242.753.592**	**237.536.130**	**97,85**	-	-
		Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen KIA	**38,65**	**38,65**					-	-
		Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen KK	**0,75%**	**0,75%**					-	-
2.1	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Sasaran: Terlaksananya pelayanan dokumen pendaftaran penduduk kepada masyarakat**	**8 Orang**	**8 Orang**	**100**	**242.753.592**	**237.536.130**	**97,85**	-	-
2.1.1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Honor THL	8 Orang	8 Orang	100	242.753.592	237.536.130	97,85	-	-
3	**Program Pencatatan Sipil**	**Sasaran : Persentase Kepemilikan dokumen akta Kematian**	**5 %**		**100**	**275.601.268**	**270.584.080**	**98,18**	-	-
		Persentase Kepemilikan dokumen akta Perceraian	**16,7 %**						-	-
		Persentase Kepemilikan dokumen akta Kelahiran	**301,3 %**						-	-
		Persentase Kepemilikan dokumen akta Pernikahan	**25,8 %**						-	-
3.1	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Sasaran: Terlaksananya pelayanan dokumen Pencatatan Sipil kepada masyarakat**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**100**	**275.601.268**	**270.584.080**	**98,18**	-	-
3.1.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Honor THL	7 Orang	7 Orang	100	100	**270.584.080**	**98,18**	-	-
		Terlaksananya Penginputan Data Akta Non SIAK	34 Desa	34 Desa					-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
4	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Sasaran : Presentase Peningkatan Data Kependudukan yang valid**	**8, 7 %**	**8,7 %**	**100**	**259.806.472**	**181.747.480**	**95,30**	-	-
4.1	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Sasaran: Tersedianya Laporan Kependudukan**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**100**	**51.615.000**	**51.235.000**	**99,26**	-	-
4.1.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Laporan Penduduk	2 Jenis	2 Jenis	100	51.615.000	51.235.000	99,26	-	-
4.2	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terselenggarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**100**	**169.813.972**	**163.186.328**	**96,09**	-	-
4.2.1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Honor THL	3 Orang	3 Orang	100	129.966.972	123.509.328	95,03	- -	- -
4.2.2	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggarana Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100	39.847.000	39.677.000	99,57	-	-
4.3	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terselenggarana Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100**	**38.377.500**	**32.687.536**	**85,17**	-	-
4.3.1	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Tenaga Pengelola SIAK dan Pengelola Data Kependudukan	42 orang	42 orang	100	38.377.500	32.687.536	85,17	-	-
5	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Sasaran : Presentase Peningkatan Ketersediaan Data Profil Kependudukan sesuai ketentuan**	**4,35 %**	**4,35 %**	**100**	**30.899.000**	**30.899.000**	**100**	-	-
5.1	**Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan**	**Sasaran: Tersedianya Laporan Data Kependudukan**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100**	**30.899.000**	**30.899.000**	**100**	-	-
5.1.1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Data Kependudukan	20 Lembaga	20 Lembaga	100	30.899.000	30.899.000	100	-	-
	JUMLAH				**99,29**	**5.112.391.302**	**4.960.247.820**	**97,02**		

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jan 2023

9. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai. Tahun 2022 menetapkan sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif "**, dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.81.

Tabel 3.81
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
I	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
1	**Jumlah desa yang difasilitasi dan dibina**			
	- Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa			
	- Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan BPD	142 desa	142 desa	100
	- Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan APBDes dan RRK Desa	145 desa	145 desa	100
	- Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes	145 desa	145 desa	100
	- Jumlah Aparat Pemdes yang mengikuti Rapat Evaluasi	-	-	-
	- Jumlah Penjabat Kades dan BPD yang dilantik	-	-	-
2	**Pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa**	1 satker	1 satker	100
3	**Jumlah desa yang pengelolaan administrasinya baik**	75 desa	75 desa	100
II	SASARAN: MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF			
1	**Jumlah Lembaga ekonomi pedesaan yang dibentuk dan dibina**			
	- Jumlah Bumdes yang dibina	58 Bumdes	58 Bumdes	100
2	**Jumlah Kelompok masyarakat yang dibina**			
	- Jumlah Pokjanal Posyandu yang dibina	20 pokjanal	20 pokjanal	100
	- Jumlah UPK kelompok SPKP yang dibina dan jumlah aset kelompok yang ditata	11 UPK	11 UPK	100
3	**Jumlah desa dan lembaga masyarakat desa yang difasilitasi dan dibina**			
	- Jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan dana desa	145 Desa	145 Desa	100
	- Desa yang ditetapkan untuk peringatan BBGRM	1 Desa	1 Desa	100
	- Jumlah kelompok PKK yang dibina dan difasilitasi	184 PKK	184 PKK	100
	- Jumlah Desa yang dimekarkan (Penataan Desa)	52 desa	-	-
	- Jumlah lembaga adat yang difasilitasi dan dibina	29 lembaga	29 lembaga	100
	- Jumlah posyandu juara lomba strata	3 juara	3 juara	100
	Rata-rata			**100**
	Kategori			

Sumber: DPMD Kab. Manggarai, Januari 2023

b) **Capaian Kinerja Sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai melaksanakan 4 Program, 12 Kegiatan dan 26 Subkegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.449.828.360,- realisasi sebesar Rp.4.502.275.821,- dengan tingkat capaian sebesar 82,61%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.82.

Tabel 3.82
Anggaran Dinas PMD Kab. Manggarai Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**5.449.828.360**	**4.502.275.821**	**82,6**
	Belanja Pegawai	2.093.417.060	1.918.929.166	91,6
	Belanja Barang dan Jasa	3.356.599.411	2.579.837.856	76,86
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**5.449.828.360**	**4.498.362.022**	**82,54**

Sumber: Dinas PMD Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.83.

Tabel 3.83
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda**				**2.337.125.860**	**2.153.603.026**	**92,15**	-	-
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**26.121.000**	**25.943.500**	**99**	-	-
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi laporan keuangan				24.893.0000	24.715.500	99,0	-	-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	1 tahun	100	1.228.000	1.228.000	100	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Perkantoran berjalan optimal**				**2.117.067.060**	**1.943.674.166**	**91.8**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.2.1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Jumlah Dokumen gaji dan terbayarnya gaji pegawai				2.066.717.060	1.893.324.166	91.6	-	-
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan				50.350.000	50.350.000	100	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**148.397.800**	**147.275.828**	**99,24**	-	-
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	12 bulan			1.808.000	1.808.000	100	-	-
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29 jenis	46 jenis	100	41.055.000	41.055.000	100	-	-
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman harian	1 tahun	1 tahun	100	32.760.000	32.760.000	100	-	-
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	100	10.678.800	10.678.800	100	-	-
1.3.5	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				1.946.000	1.946.000	100	-	-
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1 tahun	100	60.150.000	59.028.028	98,1	-	-
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**15.600.000**	**13.904.532**	**89,13**	-	-
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	100	1.300.000	1.300.000	100	-	-
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, internet dan air	3 jenis	3 jenis	100	14.300.000	12.604.532	88,1	-	-
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**29.940.000,00**	**22.400.000**	**89,3**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dnas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 unit	7 unit	100	21.000.000	17.800.000	84,7	Sisa Anggaran Rp. 3.200.000 sisa pagu pajak kendaraan.	-
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	6 unit	6 unit	100	3.940.000	3.940.000	100	-	-
1.5.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya bahan / material	1 unit	1 unit	100	5.000.000	5.000.000	100	-	-
2	**Program Penataan Desa**	**Persentase Desa yang ditata**				**1.790.593.100**	**1.025.828.401**	**57,29**	-	-
2.1	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentase Desa yang ditata**				**1.790.593.100**	**1.025.828.401**	**57,29**	-	-
2.1.1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Penataan Desa				1.790.593.100	1.025.828.401	57,29	Sisa Anggaran Rp. 764.764.699	-
3	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa tertib administrasi**				**412.918.000**	**407.958.000**	**98,80**	-	-
3.1	**Pembinaan dan Pengawsan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan pemberdayaan BUMDESA dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**				**412.918.000**	**407.958.000**	**98,80**	-	-
3.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan penyelenggaraan Administrasi pemerintahan Desa				129.762.000	129.562.000	99,80	-	-
3.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Perencanaan pembangunan Desa yang berkualitas				44.619.000	44.619.000	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
3.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa yang baik				212.577.000	207.817.000	97,8	Sisa Anggaran Rp. 4.760.000 terdiri dari: sisa honorarium tim Satgas Pencegahan, Pengawasan, dan Penangangan Permasalahan Dana Desa sebesar Rp. 1.520.000 (1 orang sedang mengikuti PIM dan 1 anggota polisi yang pindah tugas ke sumba. Tambahan Penghasilan bagi Pendamping Lokal Desa sebesar Rp. 2.400.000 (1 orang meninggal dunia pada semester 2)	
3.1.4	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Lembaga BUMDEsa				25.960.000	25.960.000	100	-	-
4	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase desa yang memiliki Lembaga adat aktif, persentase konflik social yang diselesaikan oleh Lembaga adat dan persentase TP. PKK yang aktif dalam pembangunan**				**909.191.400**	**903.802.595**	**99,41**	-	-
4.1	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah / Kabupaten / Kota**					**909.191.400**	**903.802.595**	**99,41**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
4.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna)Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.					20.812.000	20.812.000	100	-	-
4.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna)Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.					44.495.400	40.975.500	91,1	-	-
4.1.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapan Asli Desa.					44.955.500	44.930.500	99,9	-	-
4.1.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					29.038.500	29.038.500	100	-	-
4.1.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					769.890.000	768.481.195	99,82	-	-
	JUMLAH				**100**	**5.449.828.360**	**4.498.362.022**	**82,54**		

Sumber: Dinas PMD Kab. Manggarai, Jan 2023

9. Urusan Perhubungan

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, menetapkan 1 sasaran strategis yaitu **'Meningkatnya Layanan Perhubungan Guna Mendukung Perekonomian Masyarakat'** dengan 10 indikator kinerja. Capaian kinerja urusan perhubungan sesuai indikator dalam perjanjian kinerja disajikan dalam tabel 3.84.

Tabel 3.84
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KET.
1.	Rasio Konektivitas	Angka	0,81	0,74	91,36	Masyarakat jarang menggunakan transportasi umum
2.	Kinerja Lalu Lintas	Angka	46,22	21,74	47,03	Jumlah kendaraan umum lebih banyak dibanding Panjang ruas jalan yang ada
3.	Cakupan layanan angkutan umum layak	Persen	59,25	19,32	32,60	Jumlah Trayek yang ada lebih sedikit dibanding jumlah angkutan umum yang beroperasi
4.	Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	Persen	50	50,00	100.00	
5.	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Persen	46.22	45,61	98,68	
6.	Presentase terminal sesuai standar/ dalam kondisi baik	Persen	25	33,33	133.33	
7.	Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	Persen	49,18	37,27	75,77	Fasilitas parkir yang ada sudah tidak memenuhi standar pelayanan; diperlukan penataan dan rekayasa untuk lokasi parkir baru; dan memerlukan biaya pembangunan fasilitas parkir yang lebih memadai
8.	Presentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	Persen	80	75	93,75	
9.	Presentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	Persen	62,5	50	80.00	
10.	Persentase tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi	Persen	20	18,60	93.02	
	Rata-rata				**84,55**	
	Kategori					

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, Januari 2023

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja 1 : Rasio Konektivitas**

Rasio Konektivitas, adalah jumlah dari rasio konektivitas transportasi darat dan rasio konektivitas transportasi laut, dengan target 0.81 dan realisasi 0.740.

Rasio konektivitas transportasi darat adalah prosentase jumlah trayek yang dilayani terhadap jumlah kebutuhan trayek pada wilayah kabupaten.

Rasio konektivitas transportasi laut adalah perbandingan prosentase jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada wilayah kabupaten terhadap jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada wilayah kabupaten.

Rumus perhitungan:

Rasio Konektivitas = (**IK**1 x Bobot Angkutan Jalan) + (**IK**2 x Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)

= (0,916667 x 70%) + (0,33 x 30%)

= 0,6416 + 0,09

Keterangan:

Bobot Angkutan Jalan	=	70%
Bobot Angkutan SDP	=	30%
Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu)	=	bobot 1
Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu)	=	bobot 0.8
Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu)	=	bobot 0.5

Rumus IK1 (Angkutan Jalan):

IK1 (Angkutan Jalan) $= \dfrac{\text{Jumlah Trayek yang Dilayani pada Kab/Kota x bobot trayek}}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek pada Kab/Kota}}$

$= \dfrac{66 \times 1}{72}$

= 0,91666772

Rumus **K**2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan):

IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan) $= \dfrac{\text{Jumlah Lintas Penyebrangan yang Beroperasi pada Kabupaten/Kota x Bobot Lintas}}{\text{Jumlah Kebutuhan Lintas Penyebrangan pada Kab/Kota}}$

$= \dfrac{10 \times 0{,}5}{15}$

= 0,33

Keterangan:
Jumlah Lintas Penyeberangan yang Beroperasi pada Wilayah Kabupaten adalah 10, tidak termasuk Sungai dan Danau

- **Indikator Kinerja 2 : Kinerja Lalu Lintas**

Kinerja Lalu Lintas adalah perbandingan jumlah angkutan darat terhadap panjang ruas jalan, dengan target 46.22% dan terealisasi 21.74%.

Rumus perhitungan:

$$\text{Kinerja Lalu Lintas} = \frac{\text{Jumlah Angkutan Darat}}{\text{Panjang Ruas Jalan}} \times 100\%$$

$$= \frac{46.214 \text{ unit}}{2125{,}83 \text{ km}} \times 100\%$$

$$= 21{,}74\%$$

Keterangan:
- Jumlah Angkutan Darat = 46.214 unit
- Panjang ruas jalan = 2.125,83 km (data Dinas PUPR 2022)

- **Indikator Kinerja 3 : Cakupan Layanan Angkutan Umum Layak**

Cakupan Layanan Angkutan Umum Layak adalah perbandingan jumlah angkutan umum terhadap jumlah trayek yang dilayani angkutan umum, dengan target 59,25% dan terealisasi 19.32%.

Rumus perhitungan:

$$\text{Cakupan Layanan Angkutan Umum Layak} = \frac{\text{Jumlah Angkutan Umum}}{\text{Jumlah Trayek yang Dilayani Angkutan Umum}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.275 \text{ unit}}{66 \text{ trayek}} \times 100\%$$

$$= 19{,}32\%$$

- **Indikator Kinerja 4 : Persentase Sarana dan Prasarana Uji KIR Sesuai Standar**

Persentase Sarana dan Prasarana Uji KIR Sesuai Standar adalah perbandingan jumlah sarana prasarana uji KIR yang tersedia pada kabupaten terhadap jumlah sarana prasarana uji KIR sesuai standar, dengan target 50% dan realisasi 50%.

Rumus perhitungan:

$$\text{Persentase Sarana dan Prasarana Uji KIR Sesuai Standar} = \frac{\text{Jumlah Sarana Prasarana Uji KIR yang Tersedia}}{\text{Jumlah Sarana Prasarana Uji KIR sesuai Standar}} \times 100\%$$

$$= \frac{6}{12} \times 100\%$$

$$= 50\%$$

Jumlah sarana prasarana uji KIR yang tersedia di Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai baru sebanyak 6 unit dari jumlah seharusnya sarana prasarana uji KIR sesuai standar sebanyak 12 unit.

- **Indikator Kinerja 5 : Persentase Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Keselamatan Dalam Kondisi Baik**

  Persentase Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Keselamatan Dalam Kondisi Baik adalah perbandingan jumlah perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik terhadap perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan yang tersedia di kabupaten dengan target 46,22% dan realisasi 45,61%.

  Rumus perhitungan:

$$\text{Persentase Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Keselamatan Dalam Kondisi Baik} = \frac{\text{Jumlah Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Keselamatan Dalam Kondisi Baik}}{\text{Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Keselamatan yang Tersedia di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{649 \text{ unit}}{1423 \text{ unit}} \times 100\%$$

$$= 45{,}61$$

- **Indikator Kinerja 6 : Presentase Terminal Sesuai Standar/Dalam Kondisi Baik**

  Persentase terminal sesuai standar/dalam kondisi baik adalah perbandingan jumlah terminal yang dalam kondisi baik (kewenangan kabupaten) terhadap jumlah terminal yang ada di

kabupaten (kewenangan kabupaten) dengan target 25% dan realisasi 33,33%.

Rumus perhitungan:

$$\text{Persentase Terminal sesuai Standar/Dalam Kondisi Baik} = \frac{\text{Jumlah Terminal Dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Terminal yang Ada di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{3} \times 100\%$$

$$= 33{,}33\%$$

- **Indikator Kinerja 7: Persentase Kawasan Parkir yang Tertata dengan Baik dan Memiliki Fasilitas Parkir yang Memadai**

Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai adalah perbandingan luas kawasan parkir yang tertata terhadap Luas seluruh kawasan yang memiliki rambu parkir yang ada di kabupaten dengan target 49,18% dan realisasi 37.26%.

Rumus perhitungan:

$$\text{Persentase Kawasan Parkir yang Tertata dengan Baik dan Memiliki Fasilitas Parkir yang Memadai} = \frac{\text{Luas Kawasan Parkir yang Tertata}}{\text{Luas Seluruh Kawasan yang Memiliki Rambu Parkir}} \times 100\%$$

$$= \frac{1739\text{m}^2}{4667\text{m}^2} \times 100\%$$

$$= 37{,}26\%$$

- **Indikator Kinerja 8 : Presentase Ruas Jalan Rawan Kemacetan yang Perlu Direkayasa**

Presentase Ruas Jalan Rawan Kemacetan yang Perlu Direkayasa adalah perbandingan panjang jalan yang rawan kemacetan yang perlu direkayasa terhadap panjang jalan rawan kemacetan, dengan target 80%, terealisasi 75%. Realisasi ini dihitung menggunakan rumus minimum, yaitu:

$$\text{Presentase Ruas Jalan Rawan Kemacetan yang Perlu Direkayasa} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - (\text{Rencana}))}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{80-(100-80)}{80} \times 100\%$$

$$= 75\%$$

Angka realisasi 100% diperoleh dari:

$$= \frac{\text{Panjang Jalan Rawan Kemacetan yang Perlu Direkayasa}}{\text{Panjang Jalan Rawan Kemacetan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1562\text{m}}{1562\text{m}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

i. **Indikator Kinerja 9 : Presentase Fasilitas Pelabuhan Pengumpan dan Dermaga Rakyat Dalam Kondisi Baik** adalah perbandingan jumlah pelabuhan dengan fasiitas baik terhadap jumlah pelabuhan yang beroperasi di kabupaten dengan target 62,5% dan realisasi 50%.

Rumus perhitungan:

$$\text{Presentase Fasilitas Pelabuhan Pengumpan dan Dermaga Rakyat Dalam Kondisi Baik} = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan dengan Fasiitas Baik}}{\text{Jumlah Pelabuhan}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{4} \times 100\%$$

$$= 50\%$$

- **Indikator Kinerja 10: Persentase Tenaga Teknis Terlatih yang Tersertifikasi**

Persentase Tenaga Teknis Terlatih yang Tersertifikasi adalah perbandingan jumlah ASN yang terlatih terhadap jumlah ASN pada Dinas dengan target 20% dan terealisasi 18,60%.

Rumus perhitungan:

$$\text{Presentase Tenaga Teknis Terlatih yang Bersertifikat} = \frac{\text{Jumlah ASN Terlatih yang Bersertifikat}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$$

$$= \frac{8}{43} \times 100\%$$

$$= 18{,}60\%$$

Selain capaian-capaian indikator di atas, berikut kami sampaikan gambaran umum infrastruktur bidang perhubungan di Kabupaten Manggarai keadaan sampai dengan tahun 2022:

- **Terminal**

  Jumlah terminal yang menjadi kewenangan Kabupaten Manggarai sampai tahun 2022 sebanyak 3 terminal, secara rinci pada tabel 3.85.

Tabel 3.85
Data Terminal Kabupaten Manggarai Tahun 2022

NO	Terminal	Tipe Terminal	Kondisi
1	Terminal Lando Kec.Wae Rii	C	Tidak memadai
2	Terminal Karot Kec.Langke Rembong	C	Tidak memadai
3	Terminal Reo Kec. Reok	C	Cukup memadai

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, Januari 2023

Intensitas pemanfaatan terminal menunjukan tren menurun meskipun mobilitas orang dan barang semakin tinggi. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

- Menurunnya penggunaan angkutan umum dan semakin maraknya penggunaan mobil online/sewa atau travel;
- Minimnya kesadaran masyarakat dan pengusaha/sopir terhadap aturan dala berlalu lintas;
- Kondisi dan fasilitas terminal yang belum memadai.

- **Perlengkapan Jalan**

  Data perlengkapan jalan sampai tahun 2022 tertera pada tabel 3.86.

Tabel 3.86
Perlengkapan Jalan Tahun 2022

No	Jenis Rambu	Jumlah	Satuan
1	RPPJ	73	Unit
	RPJ	11	Unit
	Rambu Besar	5	Unit
	Rambu Biasa	724	Unit
	Rambu Hidup (Sedang Ibadah dan Upacara)	32	Unit
	Jumlah 1	845	Unit
2	Marka Jalan, Zebra Cross dan ZOSS	26.413	M2
3	Paku Jalan	351	Buah
4	Guard Rill	139,5	M

No	Jenis Rambu	Jumlah	Satuan
5	Warning Light	7	Unit
6	Traffict Light	3	Unit
7	Traffict Cone	6	Buah
8	Halte	2	Unit
9	Papan Nama Jalan	195	Unit
	Total	1.423	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, Januari 2023

- **Angkutan Darat**

  Data angkutan darat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.87.

Tabel 3.87
Angkutan Darat Tahun 2022

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH
1	Mobil penumpang	1.170
2	Bus	105
3	Truk	3.542
4	Sepeda motor	39.277
5	Mobil Dinas R4 &6	278
6	Motor Dinas	1.842
	TOTAL	**46.214**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, Januari 2023

- **Trayek**

  Data jaringan trayek dalam wilayah Kabupaten Manggarai tahun 2022 disajikan pada tabel 3.88.

Tabel 3.88
Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

No	Kecamatan	Trayek			Panjang Trayek	Lintasan
1	Ruteng	1	Terminal Mena	Wela	23	T.Mena - Golo Worok - Wela
		2	Terminal Mena	Maras	20	T.Mena - Meler - Sampar - Rentung - Maras
		3	Terminal Mena	Pong La'o	16	T.Mena - Cumbi - Ngkor - Pong Lao
		4	Terminal Mena	Galang	22	T.Mena - Cara - Purek - Dimpong - Lengor - Galang
		5	Terminal Mena	Gulung	20	T.Mena - Anam - Gulung
		6	Terminal Mena	Manggaluwa	20	T.Mena - Cancar - Lagur - Longgo - Manggaluwa
		7	Terminal Mena	Dalo	16	T.Mena - Cancar - Dalo
	Jumlah	**7**	**Trayek**			
2	Lelak	1	Terminal Mena	Ndiwar	40	T.Mena - Anam - Ketang - Rejeng - Karot - Pahar - Ndiwar
		2	Terminal Mena	Mbohang	30	T.Mena - Anam - Ketang - Rejeng - Werong - Mbohang
		3	Terminal Mena	Redo	40	T.Mena - Anam - Ketang - Gencor - Redo
		4	Terminal Mena	Urang	29	T.Mena - Anam - Ketang - Urang
	Jumlah	**4**	**Trayek**			
3	Rahong Utara	1	Terminal Mena	Ajang	22	T.Mena - Cireng - Kakor - Beo Kina - Ajang
		2	Terminal Mena	Purang	30	T.Mena - Beo Kina - Lenteng - Purang

No	Kecamatan	Trayek			Panjang Trayek	Lintasan
		3	Terminal Mena	Rongkam	42	T.Mena - Cireng - Pasa - Purang - Nanu - Rongkam
		4	Terminal Mena	Dimpong	30	T.Mena - Purek - Pong Lengor - Dimpong
		5	Terminal Mena	Lait	20	T.Mena - Cireng - Wae Mbeleng - Lait
		6	Terminal Mena	Poka	50	T.Mena - Cireng - Beo Kina - Lenteng - Ntala - Redong - Poka
	Jumlah	**6**	**Trayek**			
4	Satar Mese Barat	1	Terminal Mena	Pong Wakar	33	T.Mena - Pela - Kole - Ruwat - Pong Wakar
		2	Terminal Mena	Nombo	45	T.Mena - Pela - Todo - Lukup - Nombo
		3	Terminal Mena	Narang	50	T.Mena - Pela - Todo - Narang
		4	Terminal Mena	Kende	80	T.Mena - Pela - Todo - Narang - Nanga Ramut - Kende
		5	Terminal Mena	Borik	80	T.Mena - Pela - Todo - Narang - Nanga Ramut - Dintor - Borik
	Jumlah	**5**	**Trayek**			
5	Satar Mese Utara	1	Terminal Mena	L.Majok		T.Mena - Cancar - Pela - L.Majok
	Jumlah	**1**	**Trayek**			
6	Satar Mese	1	Pasar Puni	Iteng	36	Pasar Puni - Nampong - Golo Cala - Ponggeok - Paka - Iteng
		2	Pasar Puni	Mocok	46	Pasar Puni - Ndajang - Lungar - Mocok
		3	Pasar Puni	Pongkor	40	Pasar Puni - Golo Cala - Papang - Pongkor
		4	Pasar Puni	Ulungali	46	Pasar Puni - Golo Cala - Ulungali
		5	Pasar Puni	Kaca	36	Pasar Puni - Ponggeok- Wewo - Kaca
		6	Pasar Puni	Woa	42	Pasar Puni - Iteng- Laci - Tado - Woa
		7	Pasar Puni	Langgo	45	Pasar Puni - Iteng- Paka - Keka - Pong Utung - Langgo
	Jumlah	**7**	**Trayek**			
7	Wae Rii	1	Terminal Karot	Koko	16	T.Karot - Kenda - Ting - Welong - Koko
		2	Terminal Karot	Lidang	16	T.Karot - Pela - Poco - Lidang
	Jumlah	**2**	**Trayek**			
8	Wae Rii	1	Terminal Lando	Ling	13	T.Lando - Wohe - Timung - Ling
	Jumlah	**1**	**Trayek**			
9	Reok	1	Terminal Karot	Reo	60	Terminal Karot – Pagal - Gumbang – Wae Pesi – Reo
	Jumlah	**1**	**Trayek**			
10	Reok Barat	1	Terminal Karot	Kajong	80	T.Karot - Pagal - Reo - Rura - Toe - Kajong
		2	Terminal Karot	Lemarang	110	T.Karot - Pagal - Reo - Robek - Par Lando - Lemarang
	Jumlah	**2**	**Trayek**			
11	Cibal	1	Terminal Karot	Lengor		T.Karot - Wudi - Toak - Welu - Rangat - Nundang - Lengor
					50	T.Karot - Pagal - Laci - Barang - Lengor
		2	Terminal Karot	Lando	21	T.Karot - Pagal - Cumpe - Tungku - Ringkas - Perak - Bea Mese - Lando
						T.Karot-Pagal-Wakal-Ladur-Owak-Bea Mese - Lando

No	Kecamatan	Trayek			Panjang Trayek	Lintasan
		3	Terminal Karot	Nontol	40	T.Karot-Pagal-Bea Leba-Nontol
	Jumlah	**3**	**Trayek**			
12	Cibal Barat	1	Terminal Karot	Lenda	47	Terminal Karot – Ranggi – Bea Ngiung – Teni – Lenda PP
		2	Terminal Karot	Latung	48	Terminal Karot – Compang Cibal – Latung
		3	Terminal Karot	Wae Renca	23	Terminal Karot – Compang Cibal – Wae Renca
	Jumlah	**3**	**Trayek**			
	TOTAL	**37**	**Trayek**		**1573**	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, Januari 2023

- **Dermaga/Pelabuhan**

  Dalam sektor perhubungan laut, hingga tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai memiliki 10 lintas penyebarangan lokal, yaitu:

  - Kali Gongger – Robek;
  - Kali Gongger – Ojang;
  - Iteng – Nanga Ramut;
  - Iteng – Dintor;
  - Iteng – Konggang;
  - Nanga Ramut – Dintor;
  - Nanga Ramut – Konggang;
  - Dintor – Konggang;
  - Kali Gongger – Robek – Ojang;
  - Iteng – Nanga Ramut – Dintor – Konggang.

  Data tambat labuh/dermaga rakyat dalam tabel 3.89.

Tabel 3.89
Dermaga/Pelabuhan di kabupaten Manggarai
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	DESA	LOKASI
1	Reok	Reo	Kali Reo
2	Satar Mese Barat	Nuca Molas	Konggang
		Satar Lenda	Dintor
		Wongka	Rebeng

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, Januari 2023

b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- Realisasi Pendapatan

  Selain melaksanakan program dan kegiatan pelayanan bidang transportasi Dinas Perhubungan juga merupakan unit pengelola PAD. Sumber PAD Dinas Perhubungan adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi pelayanan kepelabuhan. Target PAD Dinas Perhubungan tahun 2022 adalah sebesar **Rp.1.443.400.000,-** dengan realisasi **Rp.328.124.545 (22,73%).** Rincian target dan realisasi PAD tahun 2022 seperti pada tabel 3.90.

Tabel 3.90
Realisasi PAD Dinas Perhubungan Tahun 2022

NO	URAIAN PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	**Retribusi Jasa Umum**	**911.507.100**	**222.917.000**	24,46
1.1	**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**			
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	375.593.300	222.917.000	59,35
1.2	**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**			
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	535.913.800	-	-
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**438.279.131**	**100.897.545**	**23,02**
2.1	**Retribusi Terminal**			
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	424.128.656	91.871.000	21,66
2.2	**Retribusi Pelayanan kepelabuhanan**			
	Retribusi Pelayanan kepelabuhanan	14.150.475	9.026.545	63,79
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**93.613.769**	**4.310.000**	**4,60**
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	93.613.769	4.310.000	4,60
TOTAL		**1.443.400.000**	**328.124.545**	**22,73**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, Januari 2023

Tidak terealisasinya target PAD tahun 2022 disebabkan karena :

1. Belum beroperasinya/dilaksanakanannya uji KIR kendaraan bermotor;
2. Menurunnya jumlah angkutan umum.

- Realisasi Belanja

  Alokasi anggaran Dinas Perhubungan tahun 2022 sebesar **Rp.7.518.951.631.-** realisasi sebesar **Rp.6.500.627.970** atau **86.46%**, Ringkasan anggaran disajikan pada tabel 3.91.

Tabel 3.91
Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**5.122.533.332**	**4.956.017.443**	**96,75**
	Belanja Pegawai	2.902.698.318	2.824.807.034	**97,32**
	Belanja Barang dan Jasa	2.219.835.014	2.131.210.409	**96,01**
2.	**Belanja Modal**	**2.396.418.299**	**1.544.610.526,98**	**64,45**
	TOTAL	**7.518.951.631**	**6.500.627.970**	**86,46**

Sumber: Dishub Kab. Manggarai, Jan 2023

- Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

  Pada tahun 2022, Dinas Perhubungan melaksanakan 3 Program, 14 kegiatan dan 28 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.92
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Tahun 2022

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
1.1	**Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**37.570.600**	**37.445.600**	**99,67**	-	-
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	34.820.000	34.760.000	99.83	-	-
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2.750.600	2.685.600	97.64	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan. keuangan. kepegawaian. aset dan dokumen penting lainnya**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**2.905.698.318**	**2.828.657.034**	**97.35**	-	-
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji.tunjangan dan honorarium PNS	1 Tahun	1 Tahun	100	2.869.098.318	2.792.057.034	97.31	-	-

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	1 Tahun	100	36.600.000	36.600.000	100	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas berjalan dengan baik**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**265.421.700**	**265.042.838**	**98.84**	-	-
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	5.450.000	5.450.000	100	-	-
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	65.529.000	65.494.000	99,95	-	-
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	67.200.000	67.189.000	99,98	-	-
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	12.833.700	12.833.700	100,00	-	-
1.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	2.119.000	2.119.000	100,00	-	-
1.3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100	112.290.000	111.957.138	99,70	-	-
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyedian jasa surat menyurat dengan baik**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**43.110.000**	**31.567.225**	**73.22**	-	-
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	2.110.000	2.110.000	100	-	-
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	41.000.000	29.457.225	71.85	Belum beroperasinya Los Uji sehingga Biaya berlangganan internet dan biaya listrik tidak terealisasi di los pengujian kendaraan bermotor	Dianggarakan kembali di tahun 2023 dikarenakan Los Uji sudah beroperasi
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan baik**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**63.500.000**	**60.562.776**	**93.37**	-	-

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	26 Unit	100	61.000.000	58.062.776	95.18	-	-
1.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	100	2.500.000	2.500.000	100	-	-
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**								-	-
2.1	**Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C**	**Optimalisasi Pengelolaan terminal penumpang tipe C**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**1.441.775.214**	**1.414.527.370**	**98,11**	-	-
2.1.1	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya pengelolaan terminal	1 Tahun	1 Tahun	100	1.441.775.214	1.414.527.370	**98,11**	-	-
2.2	**Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Terwujudnya penertiban.penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**125.300.000**	**123.684.728**	**98,71**	-	-
2.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	100	125.300.000	123.684.728	**98,71**	-	-
2.3	**Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Terlaksananya Identifikasi dan Analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**1.497.105.799**	**1.495.155.799**	**99.87**	-	-
2.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5 Unit	5 Unit	100	1.477.905.799	1.477.555.799	99.98	-	-
2.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	564 Dokumen	500 Dokumen	100	14.100.000	12.500.000	86.65	-	-
2.3.3	Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	1 Laporan	100	5.100.000	5.100.000	100	-	-

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
2.4	**Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Optimalisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**178.620.000**	**173.580.000**	**97,18**	-	-
2.4.1	Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemenn dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	45.000.000	44.880.000	99,73	-	-
2.4.2	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100	133.620.000	128.700.000	97.27	-	-
2.5	**Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya peningkatan kapasitas andalalin**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**8.560.000**	**7.734.900**	**90.36**	-	-
2.5.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	1 Orang	100	8.560.000	7.734.900	90.36	-	-
2.6	**Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**8.580.000**	**8.440.000**	**98.37**	-	-
2.6.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	1 Laporan	100	8.580.000	8.440.000	98.37	-	-
2.7	**Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pendesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya rencana umum jaringan trayek perdesaan**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**6.130.000**	**5.520.000**	**90.05**	-	-
2.7.1	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	6.130.000	5.520.000	90.05	-	-
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**									

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
3.1	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Optimalnya pelayanan penerbitan izi Usaha angkuta laut.**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**10.110.000**	**10.110.000**	**100**	**-**	**-**
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100	10.110.000	10.110.000	100	-	-
3.2	**Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau**	**1 Paket**	**1 Paket**	**100**	**927.470.000**	**38.599.700**	**4.16**		
3.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	100	927.470.000	38.599.700	4.16	1.Masih menunggu pendapat hukum dari kejaksaan Negeri Manggarai; 2. Belum dilakukan pengukuran peta bidang oleh badan pertanahan nasional	Dianggarkan kembali di tahun 2023 untuk kegiaatan pengukuran peta bidang
					100	**7.517.641.631**	**6.500.627.970**	**86,46**		

Sumber: Dishub Kab. Manggarai, Jan 2023

10. Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, menangani 3 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu

- Urusan Komunikasi dan Informatika;
- Urusan Statistik; dan
- Urusan Persandian.

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022, menetapkan 3 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja, dengan capaian seperti dalam tabel 3.93.

Tabel 3.93
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

No	Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Komunikasi dan Informatika	Optimalnya integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik	1. Indeks SPBE	2.10	1.76	84
			2. Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100.00 (4 layanan)	7 layanan	175
			3. Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	20%	5	15
			Rata-rata sasaran 1			91
		Meningkatnya akses informasi publik	4. Persentase kelompok informasi masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	75%	8	89
			5. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	100% (5 layanan)	6	120
			6. Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 % (43 OPD)	7	16
			Rata-rata sasaran 2			75
2	Urusan Persandian	Optimalnya layanan persandian dan kualitas statistik daerah	7. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	100% (43 OPD)	43	100
3	Urusan Statistik		8. Persentase sistem data statistik yang terintegrasi	100 (1 sistem)	0	0
			9. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100% (43 OPD)	43	43
			10. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100% (43 OPD)	43	100
			Rata-rata sasaran 3			75
			Rata-rata seluruh			80
			Kategori			

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Manggarai, Januari 2023

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Indeks SPBE**

  Indeks SPBE merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahap kegiatan yakni penilaian mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klasifikasi dan validasi dokumen pendukung.

  Tingkat atau level tingkat kematangan predikat indeks SPBE:

  4,2 – 5,0 = Memuaskan
  3,4 – <4,2 = Sangat Baik
  2,6 – <3,5 = Baik
  1,8 - <2,6 = Cukup
  <1,8 = Kurang

  Tahun 2022 ditargetkan Indeks SPBE mencapai 2,10 (CUKUP) dan terealisasi sebesar 1,76 dengan Kategori KURANG. Walaupun tidak mencapai target tapi capaian ini mengalami kenaikan sebesar 0,21 dari tahun 2021 pada level 1,55.

  Tahun 2022, beberapa tahapan kegiatan tidak dilaksanakan yakni: Penilaian interviu melalui proses verifikasi, klasifikasi dan validasi dokumen pendukung, yang ada hanya penilaian mandiri, penilaian dokumen dan itu artinya bahwa penilaian hanya dilakukan terhadap dokumen yang di*upload* di dalam aplikasi tanpa meminta penjelasan atau verifikasi dokumen yang di*upload*.

Realisasi Indeks SPBE
Tahun 2020 s/d 2022

Tahun	Indeks	Kategori	Bertambah/Berkurang
2020	1,91	CUKUP	-
2021	1,55	KURANG	Berkurang 0,36
2022	1,76	KURANG	Bertambah 0,21

- Faktor pendukung:

  Walau masih berada pada kategori KURANG, namun terdapat peningkatan nilai sebesar 0,21 dari tahun sebelumnya yang mencapai indeks 1,55 dengan kategori yang sama. Peningkatan ini disebabkan karena Kabupaten Manggarai sudah menerapkan beberapa aplikasi umum dalam memberikan pelayanan kepada publik, seperti Aplikasi SRIKANDI, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah pada Pemerintah Kab. Manggarai, yang menggunakan aplikasi SILPPD dan OMSPAN, serta Layanan Akuntabilitas Kinerja yang menggunakan E-SAKIP Reviu milik Kemenpan-RB.

- Faktor penghambat:
  - Tahun 2022, beberapa tahapan kegiatan tidak dilaksanakan yakni: Penilaian interviu melalui proses verifikasi, klasifikasi dan validasi dokumen pendukung , yang ada hanya penilaian mandiri, penilaian dokumen dan itu artinya bahwa penilaian hanya dilakukan terhadap dokumen yang diupload di dalam aplikasi tanpa meminta penjelasan atau verifikasi dokumen yang diupload.
  - Kebijakan terkait penerapan SPBE di Kabupaten Manggarai belum memadai untuk memenuhi standar kriteria yang ditetapkan dalam Pedoman Kepmenpan 962 tahun 2021 tentang PedomanTeknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- Solusi:
  - Melakukan rapat dengan evaluator SPBE Kementrian PAN-RB untuk meminta penjelasan rinci terkait Hasil Evaluasi SPBE tahun 2022 melalui surat no. 44/Diskominfo/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 perihal Mohon Penjelasan. Rapat secara daring sudah dilaksanakan pada hari Jumat, 10 Februari 2023 yang diikuti oleh

Kepala Dinas Kominfo beserta staf yang menangani SPBE. Rapat ini sangat penting untuk melihat kekurangan pada saat evaluasi SPBE tahun 2022 dan melakukan perbaikan untuk tahun 2023.

- Mengajukan usulan perubahan Perbup Nomor 47 Tahun 2023 tentang SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Manggarai, dan sudah diregistrasi di Bagian Hukum dengan Perbup Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbup 47 Tahun 2022.
- Mengajukan usulan penetapan Perbup tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Manggarai dan sudah diregistrasi di Bagian Hukum dengan Perbup Nomor 10 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Manggarai.
- Terus berproses, terus bergerak untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Manggarai

- **Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi;**

  Pada tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target untuk indicator ini sebesar 100% atau sebanyak 4 layanan yaitu SP4N Lapor, PPID, SPSE, JDIH dan berhasil terealisasi sebanyak 7 layanan, yaitu PPID, SP4N Lapor, SIPD, SIRUP, SPSE, SIMDA, dan JDIHN atau mencapai 175%

- **Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi;**

  Pada tahun 2022 Diskominfo Kabupaten Manggarai menargetkan sebanyak 33 layanan administrasi pemerintahan yang sudah terintegrasi atau mencapai 20% dari total 164 layanan administrasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Manggarai. Namun hanya berhasil direalisasikan sebanyak 5 layanan atau mencapai 3,05% yang terintegrasi yaitu SIPD, SIMDA, PPID, JDIHN, dan SPSE

- **Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang Menyebar Informasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah;**

  Sampai dengan tahun 2022 sudah ada delapan (8) Kelompok Informasi masyarakat yang sudah di bentuk atau mencapai 66,67% dari target 12 kelompok.

- **Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan Sesuai dengan Strategi Komunikasi (STARKOM);**

  Pada tahun 2022 Diskominfo menargetkan 5 layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi yaitu: Website, LPPL RSPD, Antara Digital Media, PPID, dan SP4N Lapor. Dari target tersebut berhasil terealisasi sebanyak 6 layanan ditambah Media Sosial.

- **Persentase OPD yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo;**

  Tahun 2022, hanya 7 Perangkat Daerah dari target 43 PD terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Kominfo, sehingga capaian indicator ini hanya mencapai 16%.

- **Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi;**

  Tahun 2022 semua Perangkat Daerah sudah menggunakan sandi dalam berkomunikasi, yang terlihat dari penggunaan Mail Manggaraikab.go.id

- **Persentase Sistem Data Statistik yang Terintegrasi**

  Sistem data statistik yang ada di kabupaten Manggarai belum terintgrasi dengan aplikasi yang lain yang ada di setiap Perangkat Daerah.

- **Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah;**

  Pada tahun 2022 semua perangkat daerah (43 PD) sudah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan

pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dari pendistribusian buku Manggarai Dalam Angka kepada semua Perangkat Daerah. Dengan demikian, diharapkan semua PD menggunakan data statistik dalam buku tersebut.

- **Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah**

  Pada tahun 2022 semua perangkat daerah (43 PD) sudah menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dari pendistribusian buku Manggarai Dalam Angka kepada semua Perangkat Daerah. Dengan demikian, diharapkan semua PD menggunakan data statistik dalam buku tersebut.

b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

❖ **Pendapatan**

Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan, disajikan pada tabel 3.94.

Tabel 3.94
Realisasi Pendapatan Dinas Kominfo
Tahun 2022

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	470.000.000	279.776.600	59,53
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Terpisahkan (RSPD)	50.500.000	19.105.000	37,83
	TOTAL	**520.500.000**	**298.881.600**	**57,42**

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Manggarai, Jan 2023

❖ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai pada Tahun 2022 melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.4.131.816.629,- realisasi sebesar Rp.4.049.677.696,- atau 98,01%. Ringkasan anggaran disajikan dalam tabel 3.95.

Tabel 3.95
Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**3.796.954.105**	**3.724.635.948**	**98,10**
	Belanja Pegawai	1.960.657.329	1.903.484.708	97,08
	Belanja Barang dan Jasa	1.836.296.776	1.821.151.240	99,18
2.	**Belanja Modal**	**334.862.524**	**325.041.748**	**97,07**
	Belanja modal Peralatan dan Mesin	334.862.524	325.041.748	97,07
	TOTAL	**4.131.816.629**	**4.049.677.696**	**98,01**

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja Program dan Kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran selengkapnya disajikan dalam tabel 3.96.

Tabel 3.96
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Manggarai Tahun 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
I	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2.542.193.725**	**2.475.652.227**	**97.38**	**-**	**-**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran,dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah**					**2.004.000**	**2.004.000**	**100**	**-**	**-**
1.1.1	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1.000.000	1.000.000	100	-	-
1.1.2	Koordinasi dan penyususnan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersediannya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	3 dokumen	150	1.004.000	1.004.000	100	-	-
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**1.960.368.329**	**1.903.195.708**	**97.08**	**-**	**-**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	22 Org	24 org	109	1.917.907.329	1.861.234.708	97.05	-	-
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terbayarnya honorarium pengelola APBD	7 Org	7 Org	100	41.400.000	40.900.000	98.79	-	-
1.2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akir tahun	laporan keuangan akhir tahun	3 Dokumen	3 Dokumen	100	1.061.000	1.061.000	100	-	-
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**11.000.000**	**10.123.000**	**92.03**	**-**	**-**
1.3.1	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin Pegawai	Tersediannya mesin kartu absensi	1 Unit	1 Unit	100	11.000.000	10.123.000	92.03	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.4	**Administrasi umum Perangkat Daerah**					**245.437.000**	**242.896.783**	**98.97**	-	-
1.4.1	Penyediaan Komponen instalasi listrik	Tersediannya Komponen instalasi listrik	9 jenis	9 jenis	100	9.580.500	9.580.500	100	-	-
1.4.2	Penyrdiaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya Alat tulis kantor	56 Jenis	56 Jenis	1000	48.920.500	48.920.500	100	-	-
1.4.3	Penyediaan bahan logistik Kantor	Tersediannya makan dan minum rapat	29 Org	29 Org	100	40.440.000	40.440.000	100	-	-
1.4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	70 Buku	70 Buku	100	16.300.000	16.300.000	100	-	-
1.4.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2 Media	2 Media	100	3.360.000	3.360.000	100	-	-
1.4.6	Penyediaan bahan/material	Tersediannya bahan/material	30 jns	30 jns	100	8.736.000	8.736.000	100	-	-
1.4.7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Kali	12 Kali	100	118.100.000	115.559.783	97.85	-	-
1.5	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**					**267.054.396**	**263.529.236**	**98.68**	-	-
1.6.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya meterai	728 lbr	728 lbr	100	7.500.000	6.137.300	81.83	-	-
1.6.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening internet air dan listrik	3 jns	3 jns	100	259.554.396	257.391.936	99.17	-	-
1.6.3	Pemeliharaan barang milik daerah					56.330.000	53.903.500	95.69	-	-
1.6.4	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, Pajak,dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan	3 unit	3 unit	100	17.000.000	14.574.500	85.73	-	-
1.6.5	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	17 unit	17 unit	100	9.330.000	9.330.000	100		-
1.6.6	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantordan Bangunan lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantordan Bangunan lainnya	1 Paket	1 Paket	100	30.000.000	29.999.000	100		-
2	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					683.003.404	677.900.980	99.25	-	-
2.1	**Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten**					**683.003.404**	**677.900.980**	**99.25**	-	-
2.1.1	Monitoring opini dan aspirasi publik	Tersedianya data jangkauan siaran LPPL RSPD,Blank spot area, dan rekomendasi penyelenggaraan telekomunikas	1 kegiatan	1 kegiatan	100	103.580.000	100.761.300	97.28	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
2.1.2	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Tersedianya data dan informasi untuk konten PPID, Website, i-media, o-media	2 kegiatan	2 kegiatan	100	58.880.000	58.700.000	99.69	-	-
2.1.3	Pengelolaan media komunikasi publik	Tersediannya SDM dan terpeliharanya alat kantor	4 kegiatan	4 kegiatan	100	432.364.604	430.914.680	99.66	-	-
2.1.4	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian menara	1 kegiatan	1 kegiatan	100	37.860.000	37.720.000	99.63	-	-
2.1.5	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Terselenggaranya kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat media dan kemitraan komunitas	4 kegiatan	4 kegiatan	100	50.318.800	49.805.000	98.98	-	-
3	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**					744.824.000	735.012.689	98.68	-	-
3.1	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					**18.777.000**	**18.527.000**	**98.67**	-	-
3.1.1	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4 kegiatan	4 kegiatan	100	18.777.000	18.527.000	98.67	-	-
3.2	**Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					**726.047.000**	**716.485.689**	**98.68**	-	-
3.2.1	Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Terlaksananya pembuatan master plan E-Government Pemerintah kabupaten manggarai	5 kegiatan	5 kegiatan	100	302.007.000	301.587.000	99.86	-	-
3.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Tersediannya Pusat Data Pemerintah Daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	100	78.940.000	76.425.986	96.82	-	-
3.2.3	Pengembangan aplikasi dan proses bisnispemerintahan berbasis elektronik	Tersedianya aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	3 kegiatan	3 kegiatan	100	56.180.000	55.653.024	99.06	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
3.2.3	Pengembangan dan pengelolaan ekosistim kabupaten kota cerdas dan kota cerdas	Terlaksananya pengelolaan Smart city pemerintah kabupaten manggarai	4 kegiatan	4 kegiatan	100	180.940.000	177.162.048	97.91	-	-
3.2.4	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Tersedianya Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	100	58.500.000	57.407.631	98.13	-	-
3.2.5	Monitoring evaluasi pelaporan pengembangan ekosistim SPBE	Terlaksananya penilaian SPBE kabupaten manggarai	1 kegiatan	1 kegiatan	100	49.480.000	48.250.000	97.51	-	-
II	**URUSAN STATISTIK**									
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**					78.115.000	77.875.000	99.69	-	-
4.1	**Penyelenggaraan statistik sektoral**					**78.115.000**	**77.875.000**	**99.69**	-	-
4.1.1	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Diseminasi data statistic sektoral	4 kegiatan	4 kegiatan	100	78.115.000	77.875.000	99.69	-	-
4.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi		-			-	-	-	-	-
III	**URUSAN PERSANDIAN**									
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**					83.680.000	83.236.800	99.47	-	-
5.1	**Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota**					83.680.000	83.236.800	99.47	-	-
5.1.1	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	100	83.680.000	83.236.800	99.47	-	-
	JUMLAH				**100**	**4.131.816.129**	**4.049.677.696**	**98.01**		

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Manggarai, Jan 2023

11. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja serta capaian dijelaskan dalam tabel 3.97.

Tabel 3.97
Pengukuran Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	9,19	16,05	174,66
	Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	5	0	0
			Rata-rata	**87,33**
Kategori				

Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai, Januari 2023

- **Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**

  Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri usia 16–30 tahun yang berwirausaha pada tahun 2022 sejumlah 15.133 orang (16,06%) dari total pemuda sebanyak 94.280 orang, melebihi target 9,19% Tahun 2022 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan bimtek kewirausahaan untuk 30 orang peserta.

Gambar 3.98
Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri
di Kabupaten Manggarai Tahun 2022

Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai, 2023

- **Peringkat Pada Event Olahraga Daerah (POPDA)**

  Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak mengirim atlet di tingkat Provinsi untuk mengikuti lomba karena keterbatasan anggaran, sehingga capaian untuk indikator ini 0%.

b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022 untuk urusan Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 4 program dan 6 kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.**1.477.645.980** dan realisasi sebesar Rp.**1.443.776.862**,- atau 97,7%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.99.

Tabel 3.99
Anggaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**1.244.645.980**	**1.214.466.042**	**97,6%**
	Belanja Pegawai	500.000	500.000	100,0%
	Belanja Barang dan Jasa	644.145.980	614.568.342	95,4%
	Belanja Hibah	600.000.000	599.397.700	99,9%
2.	**Belanja Modal**	**233.000.000**	**229.310.820**	**98,4%**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	233.000.000	229.310.820	98,4%
	TOTAL	**1.477.645.980**	**1.443.776.862**	**97,7%**

Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.100.

Tabel 3.100
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN	ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar**	**96 %**			**233.500.000**	**229.810.820**	**98**	**-**	**-**
1.1	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksannya pemeliharaan gedung**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**233.500.000**	**229.810.820**	**98**	**-**	**-**
1.1.1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 paket	2 paket	100	233.500.000	229.810.820	98	Keterlambatan pembayaran 5% pembayaran kegiatan rehabilitasi kantor	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase organisasi kepemudaan yang aktif; Persentase organisasi kepemudaan yang dibina/mengikuti pelatihan; Persentase pemuda yang mengikuti organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan**	**50%; 2%; 1,69%**			**308.840.000**	**297.616.200**	**96**	**-**	**-**
2.1	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten**	**terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan kapasitas daya saing wirausaha pemula**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	**100**	**308.840.000**	**297.616.200**	**96**	**-**	**-**
2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	jumlah wirausaha pemuda kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	30 orang	30 orang	100	40.000.000	38.895.000	97	-	-
2.1.2	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	jumlah kegiatan yang diselenggaran pada seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	4 kegiatan; 350 orang	4 kegiatan; 350 orang	100	268.840.000	258.721.200	96	-	-
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**presentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik**	**55%**			**742.690.980**	**731.505.280**	**98**	**-**	**-**

3.1	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prsaarana olahraga kab/kota**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	**100**	**51.601.650**	**43.260.750**	**84**	**-**	**-**
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota yang tersedia dan termanfaatka; jumlah waktu dan lamanya ketersediaan pemeliharaan bangunan	1 Unit; 7 bulan	1 Unit; 7 bulan	100	51.601.650	43.260.750	84	-	-
3.2	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**terselenggaranya kejuaraan multi event single event tingkat kab/kota**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**111.089.330**	**109.026.830**	**98**	-	-
3.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penyelenggaraan multi event tingkat kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	100	111.089.330	109.026.830	98	-	-
3.3	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**terlaksananya kegiatan yang diselenggaraakan oleh organisasi masyarakat terkait kegiatan olahraga**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**100**	**580.000.000**	**579.217.700**	**100**	-	-
3.3.1	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	jumlah medali yang diperoleh KONI (Hibah); jumlah pemusatan latihan daerah yang berkualitas, berdasarkan Ilmu pengetahuan dan teknologi (sport science)	10 medali, 1 platda	10 medali, 1 platda	100	580.000.000	579.217.700	100	-	-
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase kegiatan yang diikuti oleh organisasi kepramukaan**	**25%**			**192.615.000**	**184.844.562**	**96**	-	-
4.1	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**jumlah pemuda yang aktif dan yang mengikuti organisasi kepramukaan**	**100 orang**	**100 orang**	**100**	**192.615.000**	**184.844.562**	**96**	-	-
4.1.1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya dan kapabel	13 Kwarcab/Kwaran	13 Kwarcab/Kwaran	100	100.000.000	100.000.000	100	-	-
4.1.2	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	jumlah peserta Partisipasi dalam kegiatan Jambore daerah dan Jambore Nasional	40 orang	40 orang	100	67.615.000	65.544.562	97	-	-
4.1.3	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daeah	1 Laporan	1 Laporan	100	25.000.000	19.300.000	77	-	-
	JUMLAH					**1.477.645.980**	**1.443.776.862**	**97,7**		

Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai, Jan 2023

12. Urusan Kebudayaan

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan Urusan Kebudayaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, tahun 2022 menetapkan sasaran strategis: Meningkatnya Pelestarian Budaya, dengan indikator Persentase Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan. Capaian kinerja, dapat dilihat pada tabel 3.101.

Tabel 3.101
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Tahun 2022

O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan	64%	10,37%	16,20
		Rata-rata			**16,20**
		Kategori		**Kurang**	

Sumber: Disbudpar Kab. Manggarai, Januari 2023

Pada tahun 2022 diperoleh dari jumlah budaya benda dan tak benda dilestarikan sebanyak 485 dari jumlah budaya benda dan tak benda yang terdata sebanyak 485.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tersebut di atas:

1. Banyak temuan cagar budaya yang belum bisa diungkap secara detail latar sejarahnya.
2. Ada beberapa situs yang tidak memiliki latar sejarah yang kuat tetap diminta masuk sebagai cagar budaya.
3. Beberapa lokasi yang jelas latar sejarahnya serta sudah masuk cagar budaya daerah belum tersentuh untuk perawatannya.
4. Kurangnya pengelolaan kekayaan budaya lokal, sehingga nilai-nilai budaya menjadi kurang dikenal dan apresiasi masyarakat kurang.

Strategi pemecahan masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan ke depan:

1. Menginventarisir temuan benda cagar budaya.
2. Merencanakan pembiayaan perawatan benda cagar budaya.
3. Pengembangan dan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan taman budaya daerah.

4. Mendorong dan membina sanggar-sanggar seni budaya untuk tumbuh berkembang serta berperan dalam menjaga kelestarian seni budaya

b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, untuk urusan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 4 Program dan 10 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp3.911.637.939,-** realisasi sebesar **Rp3.875.692.223,-** dengan tingkat capaian sebesar **99,08**%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.102.

Tabel 3.102
Anggaran Urusan Kebudayaan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**3.446.359.531**	**3.420.413.816**	**99,25%**
	Belanja Pegawai	2.474.071.135	2.463.003.154	99,55%
	Belanja Barang dan Jasa	722.288.396	707.410.662	97,94%
	Belanja Hibah	250.000.000	250.000.000	100,00%
2.	**Belanja Modal**	**465.278.408**	**455.278.407**	**97,85%**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.955.600	35.955.600	78,24%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	419.322.808	419.322.807	100,00%
	TOTAL	**3.911.637.939**	**3.875.692.223**	**99,08%**

Sumber: Disbudpar Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target indikator dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.103.

Tabel 3.103

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Kebudayaan Tahun 2022

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun	100	2.438.603.838	2.392.029.580	98,09	-	-
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun	100	45.971.400	45.843.400	99,72	-	-

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	81 Kali	81 Kali	100	44.971.400	44.843.400	99,72	-	-
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah (LAKIP, LPPD & LKPJ)	3 Dokumen	3 Dokumen	100	1.000.000	1.000.000	100	-	-
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan keuangan SKPD**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**2.472.421.135**	**2.461.353.154**	**99,55**	-	-
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	39 pegawai	39 pegawai	100	2.436.531.135	2.425.463.154	99,55	-	-
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honor Pengelola APBD	10 OB	10 OB	100	35.890.000	30.600.000	100	-	-
1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan keuangan SKPD**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**186.887.000**	**186.881.022**	**99,99**	-	-
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	49 Jenis	49 Jenis	100	46.525.500	46.525.500	100	-	-
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minum untuk Rapat	240 Orang 2880 Orang	240 Orang 2880 Orang	100	21.600.000	21.598.600	99,99	-	-
1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	3 Jenis	100	12.471.500	12.471.500	100	-	-
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	24 Eksemplar	24 Eksemplar	100	1.680.000	1.680.000	100	-	-
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar wilayah NTT	12 Kali	12 Kali	100	104.610.000	104.605.422	99,99	-	-
1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan pelaporan SKPD**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**56.055.600**	**56.055.600**	**100**	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Personal Computer	1 Unit	1 Unit	100	10.500.000	10.500.000	100	-	-
1.4.1		Tersedianya Kursi Kantor	23 Unit	23 Unit	100	9.200.000	9.200.000	100	-	-
		Tersedianya Laptop	2 Unit	2 Unit	100	14.000.000	14.000.000	100	-	-

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
		Tersedianya Meteran Listrik (instalasi meteran listrik)	2 Paket	2 Paket	100	2.596.844	100	100	-	-
		Tersedianya Printer	1 Unit	1 Unit	100	2.255.600	2.255.600	100	-	-
		Tersedianya komponen-komponen peralatan komputer	5 Jenis	5 Jenis	100	6.100.000	6.100.000	100	-	-
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan pelaporan SKPD**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**26.894.000**	**21.792.600**	**81,03**	-	-
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	300 lembar	300 lembar	100	3.000.000	3.000.000	100	-	-
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening telepon, air, listrik dan internet	4 Rekening	4 Rekening	100	22.800.000	17.698.600	77,63	-	-
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Kebersihan Kantor	9 Alat/Bahan	9 Alat/Bahan	100	1.094.000	1.094.000	100	-	-
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan keuangan SKPD**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**39.500.000**	**33.878.000**	**85,77**	-	-
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya Biaya Jasa service, Suku Cadang, BBM dan PKB	11 Unit	11 Unit	100	32.000.000	26.378.000	82,43	-	-
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Bahan-bahan pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	1 Unit	100	7.500.000	7.500.000	100	-	-
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaraan Festival Seni Budaya**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**184.907.000**	**184.907.000**	**100**	-	-
2.1	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Penyelenggaraan Festival Seni Budaya**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**184.907.000**	**184.907.000**	**100**	-	-
2.1.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pagelaran Caci dan Malam Budaya	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	184.907.000	184.907.000	100	-	-
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaraan Festival Seni Budaya**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**411.929.000**	**408.408.940**	**99,15**	-	-

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
3.1	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Penyelenggaraan Festival Seni Budaya**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**411.929.000**	**408.408.940**	**99,15**	-	-
3.1.1	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya pembinaan lembaga adat	6 Lembaga Adat	6 Lembaga Adat	100	411.929.000	408.408.940	99,15	-	-
		Terlaksananya pembinaan sanggar	6 Sanggar	6 Sanggar	100				-	-
4	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Sasaran: Terwujudnya pengelolaan kebudayaan yang optimal**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**477.072.508**	**476.572.507**	**99,90**	-	-
4.1	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Terwujudnya pengelolaan cagar budaya**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**28.658.000**	**28.458.000**	**100**	-	-
4.1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Pendataan/Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	23 kali	23 kali	100	28.658.000	28.458.000	99,30	-	-
4.2	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya pengelolaan kebudayaan yang optimal**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**448.414.508**	**448.114.507**	**99,93**	-	-
4.2.1	Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Penataan Kampung Adat dalam kota	4 Lokasi	4 Lokasi	100	435.416.508	435.176.507	99,94	-	-
	JUMLAH				**100**	**3.911.637.939**	**3.875.692.223**	**99,08**		

13. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2022 menetapkan 3 sasaran strategis, dengan rincian indikator dan capaian seperti dalam tabel 3.104.

Tabel 3.104
Pengukuran Kinerja Urusan Perpustakan dan Kearsipan
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Ket.
	Sasaran 1: Meningkatnya Mutu Pelayanan Perpustakaan				
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	24.000	12.044	50	
2.	Jumlah Pengunjung Melalui Mobil Perpustakaan Keliling	24.000 Pengunjung	3.974	17	
3.	Jumlah Tenaga Tenis Pengelola Perpustakaan Sekolah yg Dibina (SD dan SMP)	65 orang	26 orang tenaga teknis	40	
	Sasaran: Meningkatnya Literasi Masyarakat Tentang Khasanah Budaya Manggarai				
4.	Jumlah Kegiatan Lomba Narasi Budaya	1	-	-	
	Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kearsipan yang Handal				
5.	Jumlah Arsip yang Dapat Disimpan dengan Baik	127.636	127.632	99,99	3 arsip telah diserahkan ke Kabupaten Manggarai Barat dan 1 arsip yang diserahkan ke bagian umum.
6.	Jumlah Arsip yang Sudah Di Alih Mediakan/Digitalisasi	214	214	100	
7.	Jumlah Arsip Statis yang Diakuisisi	120 Box	120 Box	100	
	Rata-rata			**67,83**	
	Kategori			**Cukup**	

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Januari 2023

b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Dinas kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan 5 Program, 17 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.092.572.513,- realisasi sebesar Rp.4.031.889.303,- dengan tingkat capaian sebesar 98,52%. Ringkasan anggaran disajikan pada tabel 3.105.

Tabel 3.105
Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Manggarai Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**3.892.572.513**	**3.839.981.206**	**95,41**
	Belanja Pegawai	2.352.251.113	2.313.114.853	98,33
	Belanja Barang dan Jasa	1.540.321.400	1.526.866.353	90,95
2.	**Belanja Modal**	**200.000.000**	**191.908.097**	**98,52**
	TOTAL	**4.092.572.513**	**4.031.889.303**	**98,52**

Sumber: DKP Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.106.

Tabel 3.106
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
I	**Urusan Perpustakaan**									
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya mutu pelayanan Perpustakaan**				**2.629.794.113**	**2.582.341.833**	**98**	-	-
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 Thn**	**1 Thn**		**34.003.000**	**34.003.000**	**100**	-	-
1.1.1	Sub kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dok	10 Dok	100	33.003.000	33.003.000	100	-	-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 jenis	3 jenis	100	1.000.000	1.000.000	100	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**				**2.349.401.113**	**2.310.317.353**	**98**	-	-
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	100	2.329.151.113	2.290.014.853	98	Sisa anggaran gaji dan tunjangan ASN (Mutasi Keluar/ masuk pegawai)	penyesuaian kembali
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Keuangan	1 tahun	1 tahun	100	20.250.000	20.250.000	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**				**184.440.000**	**184.214.342**	**100**	-	-
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 item	10 item	100	3.255.000	3.255.000	100	-	-
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3 jenis	3 jenis	100	32.910.000	32.910.000	100	-	-
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3 item	3 item	100	7.125.000	7.125.000	100	-	-
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	100	6.720.000	6.720.000	100	-	-
1.3.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 keg.	1 keg.	100	134.430.000	134.204.342	100	-	-
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**24.200.000**	**19.782.573**	**82**	-	-
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 item	1 item	100	2.600.000	2.600.000	100	-	-
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 jenis	4 jenis	100	21.600.000	17.182.573	80	Sisa anggaran belanja listrik,air dan telepon -	
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal**				**37.750.000**	**34.024.565**	**90**	-	-
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 jenis	2 jenis	89	35.000.000	31.274.565	89	SISA ANGGARAN PEMBAYARAN PAJAK,BEA DAN PERIZINAN -	
1.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	3 jenis	3 jenis	100	2.750.000	2.750.000	100	-	-
2	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan perputakaan**				**1.136.227.800**	**1.123.695.770**	**99**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasa lahan	Solusi
2.1	**Kegiatan pengelolaan Perpustakaan tingkat daerah kab/kota**	**Sasaran: Terwujudnya pelayanan Perpustakaan yang optimal**			**100**	**1.052.627.800**	**1.040.145.770**	**99**	-	-
2.1.1	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar seluruh wilayah kabupaten /kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Terbinanyan perpustakaan khusus tingkat kabupaten/kota	2 keg.	2 keg.	100	58.904.200	58.794.200	100	-	-
2.1.2	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan rujukan tingkat kab/kota	Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan di tingkat kab/pondok baca kecamatan	25 orang	25 orang	99	948.043.100	935.711.070	99	sisa anggaran belanja modal personal komputer serta iuran jaminan kesehatan/kematian tenaga non ASN -	
2.1.3	Sub Kegiatan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Tersedianya bahan pustaka	100 judul	100 judul		-	-	-	-	-
2.1.4	Sub Kegiatan penyusunan data dan informasi Perpustakaan,tenaga Perpustakaan dan pustakawan	TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN	1 keg.	1 keg.		45.680.500	45.640.500	100	-	-
2.2	**Kegiatan Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota**					**83.600.000**	**83.550.000**	**100**	-	-
2.2.1	Sub kegiatan Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan Pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Terlaksananya sosialisasi budaya baca dan literasi	1 keg.	1 keg.		83.600.000	83.550.000	100	-	-
3	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Meningkatnya pelestarian bahan pustaka**				**74.935.000**	**74.895.000**	100	-	-
3.1	**Kegiatan pelestarian naskah kuno milik daerah**					**49.380.000**	**49.340.000**	**100**	-	-
3.1.1	Sub kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan,perawatan,pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Terlaksananya penyimpanan ,perawatan,pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 keg.	1 keg.		49.380.000	49.340.000	100	-	-
3.2	**Kegiatan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemda**					**25.555.000**	**25.555.000**	**100**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
3.2.1	Sub kegiatan pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	Terlaksananya pengolahan data koleksi budaya secara maksimal	6 jenis	6 jenis	100	25.555.000	25.555.000	100	-	-
	Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan									
4	**Program Pengelolaan Arsip**	**Terlaksananya akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis**				**119.061.800**	**118.561.800**	**100**	-	-
									-	-
4.1	**Kegiatan Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota**	**Tersedianya arsip statis**				**119.061.800**	**118.561.800**	**100**	-	-
4.1.1	Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Tersedianya informasi arsip bagi pencipta arsip	2 Desa	2 Desa	100	119.061.800	118.561.800	100	-	-
5	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai standar**				**132.553.800**	**132.447.400**	**100**	-	-
5.1	**Kegiatan Pemusnahan arsip di lingkungan Pemda yang memiliki retensi dibawah 10 tahun**	**Terlaksanannya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**				**30.385.000**	**30.378.600**	**100**	-	-
5.1.1	Sub kegiatan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh)tahun	Terlaksanannya kegiatan pemusnahan Arsip	1 keg.	1 keg.	100	30.385.000	30.378.600	100	-	-
5.2	**Kegiatan penyelamatan arsip kab/kota yang digabung atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan**	**Jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan**				**62.648.000**	**62.648.000**	**100**	-	-
5.2.1	Sub kegiatan pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran Desa/Kelurahan	Terlaksananya kegiatan penyelamatan arsip	2 lokasi	2 lokasi	100	62.648.000	62.648.000	100	-	-
5.3	**Kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota**					**39.520.800**	**39.420.800**	**100**	-	-
5.3.1	Sub kegiatan Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Tersedianya arsip sesuai penilaian dan penetapan hasil alih media	2 keg.	2 keg.	100	39.520.800	39.420.800	100	-	-
	TOTAL					**4.092.572.513**	**4.031.889.303**	**98,52**		

Sumber: DKP Kab. Manggarai, Jan 2023

3.3.3 Urusan Pilihan

1. **Perikanan**

a) **Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja**

Penanganan urusan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai. Tahun 2022 menetapkan sasaran strategis **'Terwujudnya Peningkatan Produksi Perikanan'**, dengan indikator kinerja dan capaian seperti dalam tabel 3.107.

Tabel 3.107
Pengukuran Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Produksi perikanan tangkap	7,084.21 ton	7,505.56 ton	105.95
2.	Produksi Perikanan Budidaya	157.51 ton	158,30 ton	100.50
3.	Presentase Kualitas Produk Perikanan	100 persen	100 persen	100
	Rata-rata			102,15
	Kategori		Memuaskan	

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai, Januari 2023

Produksi perikanan tangkap tahun 2022 ditargetkan mencapai 7.084,21 ton dan berhasil terealisasi sebesar 7.505,56 ton atau mencapai 105,95%. Sedangkan produksi perikanan budidaya berhasil mancapai 158,30 ton dari target 157,51 ton. Data produksi perikanan tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel 3.108.

Tabel 3.108
Produksi Perikanan Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jlh. Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Jlh. Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Jumlah
1.	2019	7.058,85	137,01	7.195,86
2.	2020	7.067,11	149,69	7.216,80
3.	2021	7.542,00	151,17	7.693,17
4	2022	7.505,56	158,30	7.663,86

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Manggarai, 2021

Langkah-langkah yang dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan produksi perikanan, antara lain:

1. Penambahan sarana penunjang kegiatan penangkapan ikan melalui bantuan alat tangkap baik mesin, jaring dan armada penangkapan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk perluasan lahan perikanan budidaya.

3. Pembentukan kelompok perikanan budidaya.
4. Peningkatan infrastruktur bidang perikanan budidaya.

b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- **Pengelolaan Pendapatan**

  Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai sebagai berikut:

Tabel 3.109
Realisasi Pendapatan Dinas Perikanan Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	23.511.950	25.680.000	109,22
2	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	90.000.000	26.190.000	29,10
3	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	718.450.000	564.700.000	78,60
4	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-ain	41.550.000	1.650.000	3,97
	TOTAL	**873.511.950**	**618.220.000**	**70,77**

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Manggarai, Jan 2023

- Pada tahun 2022, untuk penanganan Urusan Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai melaksanakan 4 Program, 9 Kegiatan dan 24 subkegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.4.635.507.940,-** realisasi sebesar **Rp.4.413.966.147,-** dengan tingkat capaian sebesar 95,22%. Ringkasan anggaran disajikan pada tabel 3.110.

Tabel 3.110
Anggaran Dinas Perikanan
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**4.460.507.940**	**4.413.966.147**	**99.09**
	Belanja Pegawai	2.455.711.228	2.444.953.769	99.97
	Belanja Barang dan Jasa	2.004.796.712	1.969.012.378	98.22
2.	**Belanja Modal**	**175.000.000**	**-**	**0**
	TOTAL	**4.635.507.940**	**4.413.966.147**	**95.22**

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.111

Tabel 3.111
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Terwujudnya pelayanan Administrasi Perkantoran**				**2.786.302.728**	**2.756.105.983**	**98.92**	-	-
1.1	**Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**88.800.000**	**88.720.000**	**99.91**	-	-
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	100	86.800.000	86.720.000	99.91	-	-
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 tahun	1 tahun	100	1.000.000	1.000.000	100.0	-	-
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	100	1.000.000	1.000.000	100	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**2.444.711.228**	**2.436.503.769**	**99.66**	-	-
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100	2.410.411.228	2.402.203.769	99.66	-	-
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium Tenaga Administrasi Keuangan	9 orang	9 orang	100	33.300.000	33.300.000	100	-	-
1.2.3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	Tersedianya dokumen Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	2 dokumen	100	1.000.000	1.000.000	100	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**126.221.500**	**124.134.084**	**98**	-	-
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27 jenis	27 jenis	100	37.765.500	37.765.500	100	-	-
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat	1.800 OM/Omn	1.800 OM/Omn	100	19.800.000	19.275.000	97.35	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	24.000 lembar	24.000 lembar	100	9.000.000	8.965.400	99.62	-	-
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	19 jenis	19 jenis	100	3.906.000	3.686.000	94.37	-	-
1.3.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15 kali	15 kali	100	50.940.000	50.812.184	99.75	-	-
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**32.550.000**	**19.423.650**	**59.67**	-	-
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	100	2.550.000	2.250.000	88.24	-	-
1.4.2	Penyediaan Jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	Tersedianya air. listrik dan Telpon	3 rekening	3 rekening	100	30.000.000	17.173.650	57.25	Ril kost rekening air. telp dan listrik	-
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**93.240.000**	**87.324.480**	**93.66**	-	-
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa service. penggantian suku cadang dan pajak kendaraan bermotor dan BBM	23 unit	23 unit	100	70.240.000	66.888.280	95.23	-	-
1.5.2	Pemeliharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Tersedianya Gedung Kantor Dinas. Gedung BBI. Gedung Tempat Mina Wisata. Pasar Ikan. TPI	2 paket	2 paket	100	17.500.000	14.936.200	85.35	-	-
1.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	20 unit	20 unit	100	5.500.000	5.500.000	100	-	-
2	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap**	**7.084.21 ton**	**7.505.56 ton**	**100**	**181.739.296**	**179.530.684**	**98.78**		
2.1	**Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap**	**13 unit**	**5 unit**	**100**	**181.739.296**	**179.530.684**	**98.78**	-	-
3	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**	**157.51 ton**	**158.30 ton**	**100**	**1.482.285.916**	**1.474.649.480**	**99.48**	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
3.1	**Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**		**25 kali**	**25 kali**	**100**	**13.580.000**	**13.580.000**	**100**	-	-
3.1.1	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan. Teknologi dan Informatika serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		25 kali	25 kali	100	13.580.000	13.580.000	100	-	-
3.2	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Meningkatnya produksi perikanan budidaya**	**157.51 ton**	**158.30 ton**	**100**	**1.468.705.916**	**1.461.069.480**	**99.48**	-	-
3.2.1	Sub Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kolam pembenihan rakyat	2 paket	2 paket	100	183.880.000	181.355.091	98.63	-	-
3.2.2	Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya benih ikan untuk masyarakat	275.000 ekor	275.000 ekor	100	1.284.825.916	1.279.714.389	99.60	-	-
4	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**	**100 persen**	**100 persen**	**100**	**185.180.000**	**3.680.000**	**1.99**	-	-
4.1	**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**25 kali**	**25 kali**	**100**	**185.180.000**	**3.680.000**	**1.99**	-	-
4.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cold Storage	1 unit	1 unit	100	185.180.000	3.680.000	1.99	Tidak adanya penyedia karena jumlah uang tidak mencukupi	Pengadaan tidak jadi/dibatalkan
	JUMLAH				**100**	**4.635.507.940**	**4.413.966.147**	**95.22**		

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Manggarai, Jan 2023

2. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian terdiri dari 2 sub urusan, yaitu sub urusan pertanian dan sub urusan peternakan.

A. Sub Urusan Pertanian

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan sub urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2022, menetapkan 3 sasaran strategis, dengan indikator kinerja serta capaian seperti dalam tabel 3.112.

Tabel 3.112
Pengukuran Kinerja Urusan Pertanian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Produksi Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Produksi:				
		Padi (Ton GKG)	Ton GKG	113.000	110.804	98,06
		Jagung (Ton PK)	Ton PK	15.114	8.433	55,80
		Kedelai (Ton BK)	Ton BK	399	422	105,76
		Bawang Merah (Ton UB)	Ton UB	281	450	160,14
		Cabai (Ton BB)	Ton BB	231	269	116,45
		Kubis (Ton BB)	Ton BB	477	492	103,14
		Petsai (Ton BB)	Ton BB	477	478	100,21
		Kopi (Ton BK)	Ton BK	2.643	2.499,60	94,57
		Cengkeh (Ton BK)	Ton BK	9.046	427,55	4,73
		Jambu Mete (Ton BK)	Ton BK	1.518	1.661,74	109,47
		Kemiri (Ton BK)	Ton BK	1.702	1176,92	69,15
2.	Meningkatnya Kualitas Produk Pertanian	Persentasi Produk Pertanian Bersertifikat SNI (Persen)		100	100	100
		Rata-rata				**93,12**
		Kategori				**Sangat Baik**

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Manggarai, Jan 2023

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Jumlah Produksi**
  - Padi

    Dari 20.572,51 Ha luas panen padi baik padi sawah maupun padi lahan kering/ladang yang di kelola oleh masyarakat/petani menghasilkan produksi sebesar 110.804 ton atau 98,06% dari target 113.000 ton atau mengalami penurunan produksi jika di bandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 121,488 ton dari target 118.881 ton. Apabila dibandingkan dengan jumlah produksi

2022 terhadap 2021 maka ada penurunan produksi padi sebesar 10,53% dari 108,59% tahun 2021 menjadi 98,10 % tahun 2022.

Adanya penurunan produksi disebabkan karena luas panen padi sawah dan padi ladang mengalami penurunan karena alih fungsi lahan sawah, berkurangnya bantuan benih padi dari Dana Tugas Pembantuan dan curah hujan yang tinggi mengakibatkan serangan hama penyakit yang tinggi.

- Jagung

  Dari 1.671 Ha luas panen jagung yang dikelolah oleh masyarakat/petani menghasilkan produksi 8.433 ton atau 55,80 % dari target 15.114 ton atau jumlah produksi ini menurun, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 mencapai 9.498 ton dari target 14.496 ton. Apabila dibandingkan produksi tahun 2021 mengalami penurunan 7,67 % dari 63,47 % tahun 2021 turun menjadi 55,80 % di tahun 2022.

  Adanya penurunan produksi disebabkan karena tidak adanya bantuan benih jagung dari Dana Tugas Pembantuan.

- Kedelai

  dari 351 ha luas panen Kedelai yang dikelola oleh masyarakat/petani, jumlah produksi tahun 2022 adalah 422 ton atau 105,76 % dari target 399 ton atau jumlah produksi ini turun, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 mencapai 448 ton dari target 393 ton. Apabila dibandingkan jumlah produksi tahun 2022 terhadap 2021 maka mengalami penurunan 8,23 % dari 113,99 tahun 2021 menjadi 105,76 % tahun 2022.

  Adanya penurunan produksi disebabkan karena tidak adanya bantuan benih dari Dana Tugas Pembantuan.

- Bawang Merah

  Lokasi: Kecamatan Reok dan Satar Mese

  Capaian Kinerja Indikator jumlah produksi Bawang Merah pada tahun 2022 adalah 160,14 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 adalah 153,57% ,ada peningkatan 6,57 % di tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya intervensi APBD II untuk pengembangan Hortikultura komoditi bawang merah.

- Cabai

  Lokasi: Kecamatan Ruteng, Rahong Utara, Lelak, Wae Rii, Langke Rembong, Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar Mese Utara, Cibal.

  Capaian Kinerja Indikator jumlah produksi Cabai pada tahun 2022 adalah 116,45 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, maka mengalami penurunan 177,00 % dari 293,45 % tahun 2021 menjadi 116,50 % tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya berkurangnya program APBD I dan APBN karena kondisi keuangan negara yang kurang, curah hujan tinggi dan permintan pasar yang rendah membuat minat petani kurang untuk menanam cabai.

- Kubis

  Lokasi: Kecamatan Ruteng,Wae Rii, Langke Rembong dan Cibal.

  Capaian Kinerja Indikator jumlah produksi Kubis pada tahun 2022 adalah 103,14 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, maka mengalami penurunan 256,27 % dari 359,41 % tahun 2021 menjadi 103,10 % tahun 2022. Hal ini disebabkan curah hujan yang tinggi mengakibatkan petani lebih memilih untuk menanam komoditi sayuran yang tahan akan curah hujan tinggi dan menurunnya permintaan pasar.

- Petsai

  Lokasi: Kecamatan Ruteng, Rahong Utara, Lelak, Wae Rii, Langke Rembong, Satar Mese, Cibal, Reok Barat dan Reok.

  Capaian Kinerja Indikator jumlah produksi Petsai pada tahun 2022 adalah 100,21%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, maka mengalami penurunan 366,17% dari 466,38% di tahun 2021 menjadi 100,20% di tahun 2022. Hal ini disebabkan kerena minat petani menurun untuk menanam sebagai akibat dari rendahnya permintaan pasar.

- Kopi

  Lokasi: Kecamatan Ruteng, Lelak, Rahong Utara, Wae Rii, Langke Rembong,Satar Mese, Satar Mese Barat, Cibal, Reok Barat, Cibal Barat dan Satar Mese Utara

  Capaian Kinerja Indikator jumlah produksi Kopi pada tahun 2022 adalah 94,57%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja

tahun 2021, maka mengalami penurunan 1,17% dari 95,74%% tahun 2021 menjadi 94,60% tahun 2022. Hal ini disebabkan vase pembungaan mengalami hujan yang berlebihan, umur tanaman produktif sudah tua dibutuhkan peremajaan kembali.

- Jambu Mete

  Lokasi: Kecamatan Lelak, Rahong Utara, Wae Rii,Satar Mese, Satar Mese Barat, Cibal, Reok, Reok Barat, Cibal Barat dan Satar Mese Barat.

  Capaian Kinerja Indikator jumlah produksi Jambu Mete pada tahun 2022 adalah 109,47%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, maka mengalami peningkatan 1,00% dari 108,47% tahun 2021 menjadi 109,47 % tahun 2022. Hal ini disebabkan karena ketersediaan hujan yang cukup pada saat awal proses pembungaan.

- Kemiri

  Lokasi: Kecamatan Lelak, Rahong Utara, Wae Rii, Satar Mese, Satar Mese Barat, Cibal, Reok, Reok Barat, Cibal Barat dan Satar Mese Utara.

  Capaian Kinerja Indikator jumlah produksi Kemiri pada tahun 2022 adalah 69,10%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, maka mengalami kenaikan 10,59 %, dari 58,51 % di tahun 2021 menjadi 69,10% di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena tipe tanaman tahunan yang mengalami peningkatan produksi setelah mengalami penurunan di tahun sebelumnya.

Persentasi Produk Pertanian Bersertifikat SNI

Capaian indikator ini sebesar 100%, dimana semua produk pertanian yang diintervensi oleh pemerintah maupun yang beredar di pasar memiliki standar sesuai dengan ketentuan yang direkomendasikan oleh kementerian baik itu benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- **Pengelolaan Pendapatan**

  Realisisasi pendapatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2022, disajikan pada tabel 3.113.

Tabel 3.113
Pendapatan Dinas Pertanian Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**12.372.000**	**6.600.000**	**53,35**
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	12.372.000	6.600.000	53,35
2.	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**	**606.228.000**	**135.500.000**	**22.35**
	Bagi Hasil Penangkaran Padi Sawah, Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Tanah	286.000.000	112.500.000	**39.34**
	Demplot (Kaji Terap)	18.000.000	18.000.000	100
	Hasil Cengkeh	5.000.000	5.000.000	100
	Penangkaran Kopi dan Kakao	297.228.000	-	0
	TOTAL	**618.600.000**	**142.100.000**	**22,97**

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Manggarai, Jan 2023

- **Pengelolaan Belanja**

  Pada tahun 2022, Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan dan 29 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.**20.948.786.875**,- realisasi sebesar Rp.**18.629.762.017**,- dengan tingkat capaian sebesar **88,80**%. Ringkasan anggaran disajikan dalam tabel 3.114

Tabel 3.114
Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**20.560.733.375**	**18.257.581.021**	**88,80**
	Belanja Pegawai	10.413.318.407	10.296.711.795	98,87
	Belanja Barang dan Jasa	10.147.414.968	7.960.869.226	78,45
2.	**Belanja Modal**	**8.880.000**	**8.880.000**	**100**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.880.000	8.880.000	100
	TOTAL	**20.948.786.875**	**18.629.762.017**	**88,80**

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja Program dan Kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan disajikan dalam tabel 3.115.

Tabel 3.115

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Pertanian Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian**				**11.304.823.982**	**10.518.339.967**	**93,04**	-	-
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**104.280.000**	**104.028.000**	**99,76**	-	-
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Barang	10 Dokumen	10 Dokumen	100	1.000.000	1.000.000	100	-	-
1.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanaya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pertanian	102 Kali	102 Kali	100	103.280.000	103.028.000	99,76	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**10.352.009.529**	**10.241.111.795-**	**98,92**	-	-
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	1 Tahun	1 Tahun	100	10.337.749.529	10.226.851.795	98,92	-	-
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan	4 Orang	4 Orang	100	14.260.000	14.260.000	100	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**9.420.000**	**9.420.000**	**100**	-	-
1.3.1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Honor Pelaporan Barang	2 Orang	2 Orang	100	9.420.000	9.420.000	100	-	-
1.4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Esfisian**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**8.880.000**	**8.880.000**	**100**	-	-
1.4.1	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Finger Print	1 Unit	1 Unit	100	8.880.000	8.880.000	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**435.534.453**	**422.739.051**	**97,06**	-	-
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	7 jenis	7 jenis	100	1.532.500	1.532.500	100	-	-
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	16 jenis	16 jenis	100	114.561.800	114.153.600	100	-	-
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	9.936 Om/OMn	9.936 Om/OMn	100	37.970.000	37.970.000	100	-	-
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	100	25.487.900	25.487.900	100	-	-
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	100	1.920.000	840.000	100	-	-
1.5.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material Kebersihan	10 jenis	10 jenis	100	5.211.000	5.211.000	100	-	-
1.5.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaraya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Kali	21 Kali	100	248.851.253	237.544.051	95,46	-	-
1.6	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**84.700.000**	**52.545.655**	**62**	-	-
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	3 Jenis	100	4.500.000	4.137.577	91,95	-	-
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet	4 Jenis	4 Jenis	100	73.200.000	41.408.078	56,57	-	-
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan Laptop, Komputer dan Printer	28 Unit	28 Unit	100	7.000.000	7.000.000	100	-	-
1.7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**310.000.000**	**270.809.015**	**87,36**		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DInas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	180 Unit	180 Unit	100	208.000.000	169.101.015	81,30	-	-
1.7.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	15 Unit	15 Unit	100	102.000.000	101.708.000	99,71	-	-
2	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Sasaran: Terwujudnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**				**6.882.577.571**	**4.819.311.665**	**70**	-	-
2.1	**Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1 tahun	1 tahun	100	**6.882.577.571**	**4.819.311.665**	**70**	-	-
2.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tersedianya Cultivator,Mesin Rontok Padi, Traktor Roda Dua	2 Unit, 2 Unit, 20 Unit	2 Unit, 2 Unit, 20 Unit	100	895.170.000	839.984.000	93,84	-	-
2.1.2	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Aneka Sayur Untuk Penanganan Stunting, Pengembangan Florikultura, Pengembangan Komoditi Bagi Petani Milenial, Pengembangan Lahan Kering	4 Jenis, 1 Paket, 48 Kelompok tani, 45 Ha	4 Jenis, 1 Paket, 48 Kelompok tani, 45 Ha	100	5.987.407.571	3.979.327.665	66,46	Tidak persedianya benih dan alat pertanian di akhir tahun	-
3	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**					**535.040.000**	**524.120.000**	**97,96**		
3.1	**Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**529.640.000**	**524.120.000**	**98,96**		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
3.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanLP2B, Kawasan Pertanian Pangan BerkelanjutanKP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan LCP2B	Terlaksananya Penggunaan Lahan Tidur	50 Ha	50 Ha	100	529.640.000	524.120.000	98,96	-	-
3.2	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**5.400.000**	**0**	**0**	-	-
3.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Tersedianya Jaringan Irigasi	-	-	100	3.510.000	-	0	-	-
3.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Tersedianya Embung Untuk Pertanian	-	-	100	510.000	-	0	-	-
3.2.3	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Tersedianya Jalan Usaha Tani	-	-	100	1.380.000	-	0	-	-
4	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**					**449.035.972**	**443.609.320**	**98,79**	-	-
4.1	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**449.035.972**	**443.609.320**	**98,79**	-	-
4.1.1	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terlaksananya SLPHT Hortikultura, Pengendalian OPT, Tersedianya Obat-obatan	300 Orang, 500 Ha, 1 Tahun	300 Orang, 500 Ha, 1 Tahun	100	449.035.972	443.609.320	98,79	-	-
5	**Program Perizinan Usaha Pertanian**					**16.000.000**	**15.180.000**	**94,88**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
5.1	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Tahun**	**1 Tahun**		**16.000.000**	**15.180.000**	**94,88**	-	-
5.1.1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Usaha Pertanian	1 Paket	1 Paket		16.000.000	15.180.000	94,88	-	-
6	**Program Penyuluhan Pertanian**					**1.382.116.972**	**1.353.646.520**	**97,94**	-	-
6.1	**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.382.116.972**	**1.353.646.520**	**97,94**	-	-
6.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaskananya Penilaian Kredit Poin Bagi PPL, Perjalanan Dinas Tetap bagi PPL, Terlaksananya Programa	1 Paket, 1.236 OB, 13 Kali	1 Paket, 1.236 OB, 13 Kali	100	846.994.972	818.674.520	96,66	-	-
6.1.2	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pelatihan Kopi dan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	10 Kelas, 12 Kelas	10 Kelas, 12 Kelas	100	301.559.500	301.409.500	99,95	-	-
6.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Kaji Terap, OPerasional BPP	1 Paket, 12 BPP	1 Paket, 12 BPP	100	233.562.500	233.562.500	100,00	-	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Manggarai, Jan 2023

B. Sub Urusan Peternakan

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Peternakan menetapkan 3 sasaran strategis, dengan indikator dan capaian seperti dalam tabel 3.116.

Tabel 3.116
Pengukuran Kinerja Urusan Peternakan
Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	%
1	Meningkatnya Produksi hasil Peternakan	Produksi Daging	649.945 ton		947,14 ton	0.15
		Produksi telur	556.856 kg		164.572,87 kg	29.55
2	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak	Sapi	27339 Ekor	27339 ekor	100
			Kerbau	8394 Ekor	8394 ekor	100
			Kuda	196 Ekor	194 ekor	98,98
			Babi	44847 Ekor	44847 ekor	100
			Kambing	12648 Ekor	12648 ekor	100
			Ayam Buras	205184 Ekor	205184 ekor	100
			Itik/Bebek	5151 Ekor	5151 ekor	100
3	Meningkatnya kualitas produk pertanian dan peternakan	Persentase produk hasil peternakan yang besertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	100 persen		100 persen	100
	Rata-rata					**72,03**
	Kategori					**Baik**

Sumber: Dinas Peternakan Kab. Manggarai, Januari 2023

- **Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan Ternak** dengan indikator kinerja Produksi Daging dan Produksi Telur.

  Indikator produksi daging diperoleh dari pendataan hasil pemotongan ternak pada Rumah Potong Hewan dan pemotongan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Realisasi dari indikator kinerja sasaran ini sebesar 947.14 ton atau 947.139,25 kg dari target 649.945 ton dengan tingkat capaian sebesar 0.15%. Menurunnya capaian indikator ini disebabkan karena berkurangnya permintaan masyarakat akan daging.

  Sedangkan produksi telur mencapai 164.572,87 kg dari target 556.856 kg, dengan tingkat capaian 29.55%. Realisasi ini

diperoleh dari pendataan produksi telur dari masyarakat yang mengusahakan peternakan ayam petelur secara intensif.

- **Meningkatnya Populasi Ternak**
  - Pada tahun 2022 jumlah populasi ternak sapi mencapai 27.339 ekor, mengalami peningkatan sebesar 523 ekor dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 26.816 ekor.
  - Pada tahun 2021 populasi ternak kerbau sebanyak 8.247 ekor, bertambah sebesar 147 ekor pada tahun 2022 sehingga populasi ternak kerbau menjadi 8.394 ekor.
  - Pada tahun 2021 populasi kuda sebanyak 191 ekor, pada tahun 2022 ternak kuda bertambah 3 ekor sehingga populasinya menjadi 194 ekor. Angka ini belum mencapai target tahun 2022 sebesar 196 ekor.
  - Pada tahun 2022 populasi ternak babi bertambah sebanyak 1.420 ekor dari populasi tahun 2021 sebanyak 43.427 ekor pada tahun 2021, sehingga populasinya menjadi 44.847 ekor.
  - Pada tahun 2022 populasi ternak kambing bertambah sebanyak 353 ekor dari 12.295 ekor pada tahun 2021 sehingga populasinya menjadi 12.648 ekor.
  - Indikator kinerja sasaran Populasi Ternak ayam mencapai 225.183 ekor dari target 205.184 ekor, tingkat capaian kinerja 110%.
  - Populasi Itik/bebek adalah 5.151 ekor sesuai target yang ditetapkan.

b) **Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

- Pengelolaan Pendapatan

Tabel 3.117
Realisasi Anggaran Dinas Peternakan
Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Retribusi Jasa Umum**			
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan untuk tujuan komersial	385.500.000	209.965.000	54,466
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan untuk tujuan nonkomersial	63.000.000	53.655.000	85,167
2.	**Retribusi Jasa Usaha**			
a.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	154.900.000	163.850.000	105,78
b.	Retribusi Penjulan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak			
	Produksi Telur ayam Ras	620.600.000	30.214.800	4,8686
	Anak babi jantan dan betina (8-10 kg)	676.800.000	249.370.000	36,845
	Babi Afkir		178.840.000	
	Ayam Afkir	55.000.000,-	38.560.000	70,109
	TOTAL	**1.955.800.000,-**	**924.454.800,-**	**47,267**

Sumber: Dinas Peternakan Kab. Manggarai, Januari 2023

- Pada tahun 2022, Dinas Peternakan melaksanakan 5 program dan 14 kegiatan dan 27 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.6.131.006.635,- terealisasi sebesar Rp.5.955.803.535** atau sebesar **97.14%**. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.118.

Tabel 3.118
Realisasi Anggaran Dinas Peternakan
Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**6.068.158.155**	**5.899.189.961**	**97,22**
	Belanja Pegawai	2.837.473.058	2.748.519.692	**96,87**
	Belanja Barang dan Jasa	3.230.685.097	3.150.670.269	**97,52**
2.	**Belanja Modal**	**62.848.480**	**56.613.574**	**90,08**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.848.480	56.613.574	90,08
	TOTAL	**6.131.006.635**	**5.955.803.535**	**97,14**

Sumber: Dinas Peternakan Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.119.

Tabel 3.119
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Sub Urusan Peternakan Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda**				**3.368.461.543**	**3.248.209.670**	**96**	-	-
1.1	**Keg. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja**	**10 dokumen**	**10 dokumen**	**100**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100**	-	-
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	10 dokumen	10 dokumen	100	1.000.000	1.000.000	100	-	-
1.2	**Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Gaji. Tunjangan PNS dan Honor Pengelola APBD**	**37 orang**	**37 Orang**	**100**	**2.807.923.058**	**2.718.969.692**	**97**	-	-
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	100	2.782.123.058	2.693.169.692	97	-	-
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelola APBD	6 orang	6 orang	100	25.800.000	25.800.000	100	-	-
1.3	**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya sarana penunjang administrasi perkantoran dan perjalanan dinas dalam negeri**	**7 jenis**	**7 jenis**	**100**	**275.812.700**	**275.756.943**	**100.0**	-	-
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan listrik	2 jenis	2 jenis	100	800.000	800.000	100.0	-	-
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	35 Jenis	35 Jenis	100	80.629.900	80.629.900	100.0	-	-
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan dan peralatan rumah tangga	2 jenis	2 jenis	100	11.800.000	11.800.000	100.0	-	-
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makanan untuk rapat	696 OM	696 OM	100	42.320.000	42.320.000	100.0	-	-
		minuman harian dan rapat	42324 Omn	42324 Omn	100				-	-
1.3.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan dokumen	74686 lembar	74686 lembar	100	22.405.800	22.405.800	100.0	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.3.6	Penyediaan bahan /Material	Peralatan kebersihan kantor	16 Jenis	16 Jenis	100	6.757.000	6.757.000	100.0	-	-
1.3.7	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sinkronisasi data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	11 kali	11 kali	100	111.100.000	111.044.243	99.9	-	-
1.4	**Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah peralatan kantor**	**10 buah**	**10 buah**	**100**	**77.998.480**	**71.763.574**	**92**	-	-
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 buah	10 buah	100	77.998.480	71.763.574	92	-	-
1.5	**Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jasa surat menyurat dan rekning air. listrik dan jasa komunikasi**	**4 jenis**	**4 jenis**	**100**	**96.077.305**	**74.838.651**	**78**	-	-
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai 10000	780 lembar	780 lembar	100	8.040.000	8.028.000	99,99	-	-
		paket pengiriman	4 kilo	4 kilo	100				-	-
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik	Rekening Tagihan Pemakaian Air. Telepon. internet dan Listrik	4 Jenis	4 Jenis	100	88.037.305	66.810.651	76	-	-
1.6	**Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Gedung kantor. kendaraan dinas dan peralatan kantor**	**3 jenis**	**3 jenis**	**100**	**109.650.000**	**105.880.810**	**97**	-	-
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan . Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Suku cadang. BBM. service dan pajak kendaraan	24 Unit	24 Unit	100	66.000.000	62.230.810	94	-	-
1.6.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Komputer dan Laptop	5 unit	5 unit	100	3.650.000	3.650.000	100	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor yang memadai	6 Unit	6 Unit	100	40.000.000	40.000.000	100	-	-
2	**Prog. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Meningkatnya Produksi hasil Peternakan**				**1.699.372.200**	**1.657.266.000**	**98**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
2.1	**Keg. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kelompok peternak yang memperoleh bantuan permodalan**	**9.86**	**8.98**	**91.1**	**1.609.642.200**	**1.567.676.000**	**97**	-	-
2.1.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit ternak . Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Ternak	9250 ekor	9250 ekor	100	1.602.262.200	1.560.376.000	97	-	-
		Pakan Ayam	24750 kg	24750 kg	100				-	-
		Pakan Babi	38650 kg	38650 kg	100				-	-
2.1.2	Pengawasan peredaran Bahan Pakan/Pakan. Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Distributor dan pengecer pakan ternak	14 unit	14 unit	100	7.380.000	7.300.000	99	-	-
2.2	**Keg. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah kabupaten/kota**	**Persentase kelompok peternak (ternak besar) yang memiliki hijauan pakan ternak**	**1.36**	**2.37**	**174**	**89.730.000**	**89.590.000**	**100**	-	-
2.2.1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	unit usaha produksi benih/bibit ternak	20 unit	20 unit	100	13.640.000	13.640.000	100	-	-
2.2.2	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Hijauan Pakan Ternak	1.5 Ha	15 ha	100	76.090.000	75.950.000	100	-	-
3	**Prog. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana PERTANIAN**	**Meningkatnya Produksi hasil Peternakan**				**29.140.000**	**29.140.000**	**100**	-	-
3.1	**Keg. Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik**	**100**	**100**	**100**	**29.140.000**	**29.140.000**	**100**	-	-
3.1.1	Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Prasarana peternakan	**1 unit**	**1 unit**	100	29.140.000	29.140.000	100	-	-
4	**Prog. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masayarakat Veteriner**	**Meningkatnya Populasi ternak**				**965.673.892**	**952.828.865**	**99**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
4.1	**Keg. Penjamin kesehatan Hewan . penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan Menular dalam daerah kabupaten/kota**	**Tingkat kematian ternak**	**0.61**	**0.004**	**199.34**	**944.783.892**	**932.108.865**	**99**	-	-
4.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Vaksin. obat. bahan dan alat pengobatan ternak	4 jenis	4 jenis	100	944.783.892	932.108.865	99	-	-
4.2	**Keg. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan daerah kabupaten/kota**	**Persentase ternak yang tidak terserang penyakit**	**96.6**	**98.20**	**102**	**11.130.000**	**11.040.000**	**99**	-	-
4.2.1	Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	Pengawasan ternak antar daerah	2584 ekor	2584 ekor	100	11.130.000	11.040.000	99	-	-
4.3	**Keg. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase produk hasil peternakan yang ditangai sesuai standar ASUH**	**40.50**	**42.72**	**105**	**4.880.000**	**4.880.000**	**100**	-	-
4.3.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Unit usaha produk hewan	1 unit	1 unit	100	4.880.000	4.880.000	100	-	-
4.4	**Keg. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**Tingkat Kelahiran ternak**	**1.60**	**1.80**	**113**	**4.880.000**	**4.800.000**	**98**	-	-
4.4.1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Unit Kesejahteraan Hewan	12 unit	12 unit	100	4.880.000	4.800.000	98	-	-
5	**Prog. Penyuluhan Pertanian**	**Meningkatnya Produksi hasil Peternakan**				**68.359.000**	**68.359.000**	**100**	-	-
5.1	**Keg. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase peternak yang terlatih (kelompok)**	**0.62**	**1.03**	**166**	**68.359.000**	**68.359.000**	**100**	-	-
		Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	9.86	11.86	120				-	-
5.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pelatihan Formulasi Pakan ternak Babi	75 orang	125 orang	167	29.269.000	29.269.000	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
5.1.2	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	Penyuluhan dan Pembinaan	95 Kelompok Tani	95 Kelompok Tani	100	39.090.000	39.090.000	100	-	-
	TOTAL					**6.131.006.635**	**5.955.803.535**	**97.14**		

Sumber: Dinas Peternakan Kab. Manggarai, Januari 2023

3. Urusan Pariwisata

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai, menetapkan 2 sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dan Meningkatnya *Spend of Money*, dengan capaian indikator kinerja seperti dalam tabel 3.120.

Tabel 3.120
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan	10% (20.000)	23.458	117,29
2.	Meningkatnya *Spend Of Money*	Persentase Peningkatan *Spend Of Money* Wisatawan	1%	0%	0
		Rata-rata			58,64
		Kategori			Cukup

Sumber: Disparbud Kab. Manggarai, Januari 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan

   Pada tahun 2022, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menetapkan target peningkatan persentase peningkatan jumlah wisatawan sebesar 10% dari target RPJMD (200.000) dan realisasinya sebanyak 23.458 wisatawan atau 117,29%

2. Persentase Peningkatan *Spend Of Money* Wisatawan

   Pada tahun 2022, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Manggarai menetapkan target peningkatan persentase sebesar 1% dari tahun 2021 sebesar Rp.1.275.000,- dengan realisasi di tahun 2022 sebesar

Rp.1.275.000,-. Ini artinya belum mencapai target yang sudah ditetapkan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan *spend of money* wisatawan, antara lain:

- Mendorong setiap industri yang bergerak di sektor pariwisata untuk memperoleh sertifikasi *CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability).* Sertifikasi *CHSE* adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata dan Produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan. Pelaku Usaha dan Pelaku Pariwisata dapat mengakses halaman *website https://chse.kemenparekraf.go.id/* dan memilih "Daftar Sekarang" atau "Mulai Assessment" pada Halaman Utama Website yang akan mengarah kepada Halaman Sign-Up atau Pendaftaran.
- Mendorong para pekerja yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya para travel agent dan guide wisata untuk mengajak para wisatawan baik domestik maupun manca negara ke obyek-obyek dan destinasi di Kabupaten Manggarai, sehingga akan berdampak positif pada peningkatan lama tinggal dan *spend of money* wisatawan.

b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- Pengelolaan Pendapatan

Tabel 3.121
Realisasi Pendapatan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Retribusi Daerah	231.200.000	78.887.000	34,12
	TOTAL	**231.200.000**	**78.887.000**	**34,12**

Sumber: Disbudpar Kab. Manggarai, Januari 2023

- Pengelolaan Belanja

Pada tahun 2022, untuk urusan Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan 3 Program dan 5 Kegiatan, dengan

alokasi anggaran sebesar **Rp.2.048.818.470,-** realisasi sebesar **Rp.1.949.845.914,-** dengan tingkat capaian sebesar **95,17%.** Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.122.

Tabel 3.122
Anggaran Urusan Pariwisata
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**2.022.818.470**	**1.923.845.914**	**95,11%**
	Belanja Pegawai	3.000.000	3.000.000	100,00%
	Belanja Barang dan Jasa	1.995.718.470	1.896.745.914	95,04%
	Belanja Bantuan Sosial	24.100.000	24.100.000	100,00%
2.	**Belanja Modal**	**26.000.000**	**26.000.000**	**100,00%**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.000.000	26.000.000	100,00%
	TOTAL	**2.048.818.470**	**1.949.845.914**	**95,17%**

Sumber: Disbudpar Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.123.

Tabel 3.123
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Pariwisata Tahun 2022

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Sasaran: Terwujudnya Pengembangan Obyek Wisata**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**260.144.520**	**258.403.115**	**99,33%**	-	-
1.1	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya Penataan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**194.217.320**	**192.685.915**	**99,21%**	-	-
1.1.1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	182.602.020	181.220.615	99,24%	-	-
1.1.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Survei lokasi dan kondisi ODTW Mangrove Lemarang	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	3.870.300	3.870.300	100%	-	-
1.1.3	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Survei lokasi dan kondisi obyek wisata (Hutan Wisata Inembele, Air Terjun Pangka Dari, Kuburan Empo Paju)	3 Lokasi	3 Lokasi	100%	7.745.000	7.595.000	98,06%	-	-
1.2	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatannya Penataan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODWT)**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**50.771.900**	**50.591.900**	**99,65%**	-	-
1.2.1	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Kepariwisataan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	19.334.700	19.154.700	99,07%	-	-

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.2.1	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan	68 Kali	68 Kali	100%	31.437.000	31.437.000	100%	-	-
1.3	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya pembinaan terhadap jasa usaha pariwisata**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**15.155.300**	**15.155.300**	**100%**	-	-
1.3.1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Data Usaha Pariwisata (Hotel, Homestay, Restoran & Rumah Makan)	4 Komponen	4 Komponen	100%	15.155.300	15.125.300	99,80%	-	-
2	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Sasaran: Meningkatnya Arus Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Manggarai**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**559.040.330**	**478.472.830**	**85,59%**	-	-
2.1	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya Arus Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Manggarai**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**559.040.330**	**174.993.500**	**99,99%**	-	-
2.1.1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Publikasi potensi pariwisata melalui website, media sosial dan aplikasi	3 Media	3 Media	100%	58.350.000	58.350.000	100%	-	-
2.1.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Acara Festival (Festival Ekonomi Kreatif, Festival Jazz, Festival Produk Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif,Festival Seni, Budaya dan Musik)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	271.895.330	193.427.830	71,14%	-	-
2.1.3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Pengambilan data informasi potensi pariwisata berupa dokumentasi foto dan video	85 Kali	85 Kali	100%	39.595.000	39.595.000	100%	-	-
2.1.4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyusunan Pola Perjalanan Wisata Kab. Manggarai	1 Paket	1 Paket	100%	189.200.000	182.650.000	98,86%	-	-
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Sasaran: Terwujudnya kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha**							-	-
		Sasaran: Terlaksananya Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi masyarakat, guru, pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**1.229.633.620**	**1.212.969.969**	**98,64%**	-	-

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
3.1	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Terwujudnya kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**1.229.633.620**	**1.107.199.005**	**99,83%**	-	-
3.1.1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksanannya Pelatihan pembuatan cendaramata lokal	1 Pelatihan	1 Pelatihan	100%	112.416.900	109.596.900	97,49%	-	-
3.1.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Rapat koordinasi dengan Pokdarwis	9 Kelompok	9 Kelompok	100%	179.912.720	177.607.069	98,72%	-	-
3.1.3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Terlaksananya Kegiatan pelatihan Pelayanan Kepariwisataan	7 Pelatihan	7 Pelatihan	100%	937.304.000	925.766.000	98,77%	-	-
	JUMLAH		**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**2.048.818.470**	**1.949.845.914**	**95.17%**		

Sumber: Disbudpar Kab. Manggarai, Januari 2023

4. **Urusan Industri dan Perdagangan**

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan Urusan Industri dan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai. Capaian kinerja tahun 2022 diuraikan dalam tabel 3.124.

Tabel 3.124
Capaian Kinerja Urusan Industri dan Perdagangan
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Urusan Industri					
1.	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian	1.	Nilai produksi IKM (Fokus: Pertanian, Perikanan, Tenun, Mebel, dan Bambu)	40.919.819.400	58.261.802.000	142
		2.	Persentase produk industri tenun, mebel dan bamboo yang tersertifikasi	1	0	0
						71,2
	Urusan Perdagangan					
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan		Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan	28,77	18,90	65,7
2	Meningkatnya stabilitas harga barang perdagangan		Tingkat kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting	100	100	100
	Rata-rata					78,96
	Kategori					Baik

Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Manggarai, Januari 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Urusan Industri**

  Sasaran Strategis: Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap Perekonomian

  - Nilai produksi IKM (Fokus: Pertanian, Perikanan, Tenun, Mebel, dan Bambu)

    Capaian indikator ini melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp.58.261.802.000,- dari target Rp.40.919.819.400,- atau mencapai 142%. Capaian ini didukung oleh beberapa hal antara lain:

    - Tersedianya sumber daya aparatur yang memadai;
    - Intervensi anggaran baik APBD dan DAK;
    - Pelaku usaha memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bantuan mesin dan peralatan;
    - Kelompok IKM merupakan kelompok yang dirintis sendiri untuk memulai kegiatan

  - **Persentase Produk Industri Tenun, Mebel dan Bamboo yang Tersertifikasi**

    Realisasi indicator ini 0%, yang disebabkan oleh:

    - Tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan sertifikasi produk;
    - Kurangnya tenaga teknis khususnya yang berkompeten dalam penanganan kegiatan perindustrian;
    - Belum maksimalnya kemampuan dari kelompok penerima manfaat khusus produk perikanan dan produk bambu.

    Rencana Tindak Lanjut:

    - Bangunan showroom industri yang telah dibangun bertujuan menjadi tempat penjualan dan promosi hasil kerajinan IKM dari 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai serta dapat menjadi pusat pembelajaran bagi pelajar/mahasiswa yang ingin mengetahui berbagai jenis kerajinan di Kabupaten Manggarai;

- Monitoring dan evaluasi terhadap IKM untuk mengetahui pekembangan IKM yang telah dibantu dan untuk mengetahui IKM yang tidak aktif sehingga dapat dilakukan identifikasi ulang dan pendampingan;
- Pelatihan/bimbingan teknis bagi pelaku usaha/IKM baik aspek produksi maupun manajemen usaha sehingga dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas dari produk IKM;
- Kegiatan promosi dalam daerah maupun promosi luar daerah bagi IKM diKabupaten Manggarai.

Dalam mewujudkan sasaran **Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap Perekonomian,** Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perdagagan dan Perindustrian pada tahun 2022 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung langsung tercapainya indikator kinerja, antara lain:

- Bantuan mesin dan peralatan bagi pengrajin IKM dengan target perjanjian kinerja sebanyak 42 IKM dan realisasi 52 IKM yang terdiri dari:
  - Mesin dan peralatan meubel (8 paket);
  - Mesin dan peralatan pandai besi (1 paket);
  - Mesin dan peralatan menjahit (1 paket);
  - Mesin dan peralatan tenun (42 paket).

  Penerima bantuan mesin dan peralatan meubel, pandai besi, dan menjahit ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor: Hk/392/2022 Tentang Penetapan Kelompok Industri Kecil dan Menengah Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan Program Perencanaan Pembangunan Industri di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022. Daftar penerima bantuan dimaksud, dapat dilihat pada tabel 3.125.

Tabel 3.125
Data Kelompok Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan Mebel, Pandai Besi dan Menjahit Tahun 2022

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1.	Meubel Ngencung	Kel. Watu, Kec. Langke Rembong	Mesin dan Peralatan Meubel
2.	Meubel Sinar Pitak	Kel. Pitak, Kec. Langke Rembong	Mesin dan Peralatan Meubel
3.	Meubel Wakat Makmur	Desa Cumbi, Kec. Ruteng	Mesin dan Peralatan Meubel
4.	Meubel Naga Bonar	Desa Pong, Lengor, Kec. Rahong Utara	Mesin dan Peralatan Meubel
5.	Meubel Gibran	Desa Paka, Kec. Satar Mese	Mesin dan Peralatan Meubel
6.	Tukang Kayu Narang	Desa Cambir Leca, Kec. Satar Mese Barat	Mesin dan Peralatan Meubel
7.	Meubel Mohe Wae Rebo	Desa Satar Lenda, Kec. Satar Mese Barat	Mesin dan Peralatan Meubel
8.	Meubel St. Yosef Pekerja	Desa Satar Ruwuk, Kec. Satar Mese Barat	Mesin dan Peralatan Meubel
9.	IKM Penempa Parang Lala	Desa Cireng, Kec. Satar Mese Utara	Mesin dan Peralatan Meubel
10.	Kembang Mekar	Desa Bangka Ruang Kec. Roahong Utara	Mesin dan Peralatan Meubel

Sementara data penerima bantuan mesin dan peralatan tenun ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/324/2022 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan Tenun yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Fisik Industri Kecil dan Menengah – Tematik Penguatan Daerah Prioritas Pariwisata dan Sentra Industri Kecil dan Menengah Program Perencanaan Pembangunan Industri di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022.

Data kelompok penerima bantuan tersebut, dalam tabel 3.126.

Tabel 3.126
Data Kelompok Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan Tenun Tahun 2022

NO	NAMA IKM	ALAMAT
1.	Bantang Cama 1	Satar Lenda
2.	Bantang Cama 2	Satar Lenda
3.	Harapan Bersama	Satar Lenda
4.	Mawar	Satar Lenda
5.	Harapan Baru	Satar Lenda
6.	Wela Rana 1	Wongka
7.	Wela Rana 2	Wongka
8.	Anak Leca 1	Cambir Leca
9.	Anak Leca 2	Cambir Leca
10.	Anak Leca 3	Cambir Leca
11.	Anak Leca 4	Cambir Leca

NO	NAMA IKM	ALAMAT
12.	Anak Leca 5	Cambir Leca
13.	Reda 1	Cambir Leca
14.	Reda 2	Cambir Leca
15.	Reda 3	Cambir Leca
16.	Reda 4	Cambir Leca
17.	Nggiringgong 1	Cambir Leca
18.	Nggiringgong 2	Cambir Leca
19.	Mawar Narang 1	Cambir Leca
20.	Mawar Narang 2	Cambir Leca
21.	Kawe Mose	Cambir Leca
22.	Kembang Mekar	Cambir Leca
23.	Rotok 1	Hilihintir
24.	Rotok 2	Hilihintir
25.	Rotok 3	Hilihintir
26.	Rotok 4	Hilihintir
27.	Rotok 5	Hilihintir
28.	Rotok 6	Hilihintir
29.	Pong Pahar	Hilihintir
30.	Wae Maras 1	Hilihintir
31.	Muku Te'e	Hilihintir
32.	Kasi Asi Muku Te'e	Hilihintir
33.	Melati Muku Te'e	Hilihintir
34.	Melati Muku Te'e	Hilihintir
35.	Melati Muku Te'e	Hilihintir
36.	Keli	Hilihintir
37.	Citra Nio	Hilihintir
38.	Katuk NIo	Hilihintir
39.	Melati Nio	Hilihintir
40.	Kasih Ibu Nio	Hilihintir
41.	Angrek Nio	Hilihintir
42.	Familia Nio	Hilihintir

- Pembangunan Showroom kerajinan IKM, yaitu Produksi/Showroom beserta meubel dan furniture showroom Industri yang beralamat di Jl. Motang Rua Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai.
- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan:
  - Pelatihan pengolahan jahe kepada 1 IKM : IKM Wae Keno di Desa Bangka Tonggur Kec. Lelak;
  - Hibah Uang kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah
  - Kabupaten Manggarai sebesar Rp. 1.050.000.000;

- Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan manajemen Wirausaha kepada 90 pengrajin di 4 Desa : Desa Satar Lenda, Desa Wongka, Desa Cambir Leca, Desa Hilihintir
- Pelatihan Teknik Produksi dan atau Standarisasi Produk kepada 120 pengrajin di 4 Desa : Desa Satar Lenda, Desa Wongka, Desa Cambir Leca, Desa Hilihintir
- Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM kepada 20 pengrajin di 3 Desa : Desa Satar Lenda, Desa Cambir Leca, Desa Hilihintir
- Pengembangan dan Diversifikasi Produk kepada 92 IKM di 4 Kecamatan, sebagai berikut:
  - ✓ 7 IKM di Desa Rado Kecamatan Cibal;
  - ✓ 10 IKM di Kecamatan Langke Rembong;
  - ✓ 21 IKM di Desa Hilihintir, 5 IKM di Desa Satar Lenda, 10 IKM Desa Terong, 15 IKM Di desa Cambir Leca dan 5 IKM di Desa Wongka Kecamatan Satar Mese Barat;
  - ✓ 4 IKM di Desa bea Kondo, 10 IKM di Desa Todo, 5 IKM di Desa Mata Wae.

- Kegiatan Pengembangan Promosi Produk IKM Untuk Menjalin Kemitraan kepada 92 IKM di 4 Kecamatan, sebagai berikut:
  - ✓ 7 IKM di Desa Rado Kecamatan Cibal;
  - ✓ 10 IKM di Kecamatan Langke Rembong;
  - ✓ 21 IKM di Desa Hilihintir, 5 IKM di Desa Satar Lenda, 10 IKM Desa Terong, 15 IKM Di desa Cambir Leca dan 5 IKM di Desa Wongka Kecamatan Satar Mese Barat;
  - ✓ 4 IKM di Desa bea Kondo, 10 IKM di Desa Todo, 5 IKM di Desa Mata Wae

▪ Monitoring dan Evaluasi IKM serta monitoring Pembangunan showroom industri. Rekapitulasi IKM di 12 Kecamatan dalam tabel 3.127.

Tabel 3.127
Rekapitulasi IKM Per Jenis Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

No	Kecamatan	Tenun	Pandai Besi	Meubel	Jasa Service Kendaraan Roda 2 dan 4	Industri Rumah Tangga	Elektronik	Percetakan	Warung Makan	Las Besi	Air Minum	Beras/Penggilingan Padi	Pakan Ternak	Batako	Ecoprint	Konveksi/Menjahit	Pengolahan Pangan	Pupuk Bokasi	Anyaman/Souvenir	Minyak Atsiri	Jumlah
1.	Cibal	637	2	6	1			1		2		21			5	1					**672**
2.	Cibal Barat	23		3								2									**28**
3.	Langke Rembong	8	18	75	110	121	7	47	10	24	10	27	3	2	2	50	78	1	10		**585**
4.	Lelak	3		8	3	4						3				1	2				**24**
5.	Reok	7	2	9	10	4		2		2		19					3		1		**51**
6.	Reok Barat	5		4	1	2						1				2	1				**15**
7.	Ruteng	4	1	25	14	5		1		1		20	1	1			4	2			**78**
8.	Satar Mese	30		35	6	4		1				36		1	4	2	4	1	1		**123**
9.	Satar Mese Barat	76	1	10	2	3				1		20			1		2	1			**118**
10.	Satar Mese Utara	36	1	5						1		4									**47**
11.	Wae Ri'i		1	13	3	1				1		14				2	1	1			**38**
12.	Rahong Utara	2		8	1	2						6					2		1		**22**
	Total per Jenis	**812**	**23**	**201**	**150**	**146**	**7**	**52**	**10**	**32**	**10**	**173**	**4**	**4**	**12**	**57**	**97**	**6**	**13**		**1801**

- **Urusan Perdagangan**

Sasaran Strategis: Meningkatnya Konstribusi Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian

Capaian sasaran ini diukur dengan satu indikator, yaitu Persentase Peningkatan Kapasitas Pemasaran Produk Pertanian dan Perikanan, yang terealisasi sebesar 18,90% dari target 28,77%, tingkat capaian 65,7%. Faktor penghambat tercapainya kinerja, antara lain:

- Minimnya ketersediaan sarana prasarana perdagangan yang memadai;
- Kurangnya promosi terhadap produk-produk yang dihasilkan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini adalah:

- Monitoring pasar, yang meliputi monitoring dan evaluasi pasar, pendataan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Reo dan Pendataan gudang.

  Berikut kondisi Pasar di Kabupaten Manggarai tahun 2022:

Tabel 3.128
Data Pasar di Kabupaten Manggarai Tahun 2022

NO	NAMA PASAR	KECAMATAN	TAHUN BANGUN /REHAB	KONDISI BANGUNAN	WAKTU OPERASI	JUMLAH KIOS PERMANEN	JUMLAH PETAK DALAM LOS PERMANEN	JUMLAH PEDAGANG
1	Pasar Inpres Ruteng	Langke Rembong	2011, 2017	Masih Baik	Setiap Hari	35	198	54
2	Pasar Puni	Langke Rembong	2018	Masih Baik	Setiap Hari	49		41
3	Pasar Rakyat	Langke Rembong	2015	Masih Baik	Setiap Hari	49		41
4	Pasar Dintor	Satar Mese Barat	2019	Masih Baik	Hari Senin	13	12	36
5	Pasar Narang	Satar Mese Barat		Masih Baik	Hari Selasa		13	38
15	Pasar Iteng	Satar Mese		Masih Baik	Hari Sabtu	15	16	169
7	Pasar Langke Majok	Satar Mese Utara	2011, 2019	Masih Baik	Hari Kamis	7	64	9
8	Pasar Todo	Satar Mese Utara		Rusak Lantai Penjualan	Hari Rabu		12	45
9	Pasar Reo	Reok		Masih Baik	Setiap Hari	37	42	344
10	Pasar Terong	Satar Mese Barat	2018	Masih Baik	Tidak Beroperasi	16	12	
11	Pasar Bea Leba/Pasar Pagal	Cibal	2018	Masih Baik	Hari Kamis	13	42	166
12	Pasar Golo Woi	Reok Barat	2018	Masih Baik	Tidak Beroperasi	7	12	
13	Pasar Sambi	Reok Barat	2018	Masih Baik	Tidak Beroperasi	5	12	

- Monitoring 38 kelompok petani kopi, terdapat 18 kelompok yang telah menerapkan metode Marketing Mix 4P *(Product, Price, Place, Promotion*) melalui Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Manggarai (MPIG-KAFM).

Tabel 3.129
Kelompok Petani Kopi yang Menerapkan Metode Marketing Mix 4P

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	KELOMPOK TANI (MPIG)	JUMAH ANGGOTA	PRODUK
1	Ruteng	Bangka Lao	Ca Nai	40	Green Bean
2		Pong leko	Gete Tedeng		Biji Kering
3		Pong Leko	Suka Maju		Biji Kering
4		Golo Worok	Bantang Cama	31	Biji Kering
5		Meler	Compang Laja	20	Biji basah dan Kering
6	Lelak	Bangka Lelak	Bantang Cama	26	Biji Kering
7		Ndiwar	Rasa Sayang	20	Kopi Biji
8	Wae Rii	Wae Rii	Tunas Harapan	42	Kopi Biji
9		Poco	Harapan Baru	42	Kopi Biji
10		Golo Cador	Weang Gerak		Kopi Biji
11	Satar Mese	Lolang	Loo Poco	20	Kopi Biji
12		Lungar	Lungar 2	41	Kopi Biji
13	Cibal	Golo	Raka Cama	29	Kopi Biji
14		Golo Ncuang	Campe Saep		Kopi Biji
15	Cibal Barat	Bere	Ntangis Bere	40	Kopi Biji
16	Rahong Utara	Liang Bua	Maju Bersama	24	Kopi Biji
17	Satar Mese Utara	Ruang	Maju Bersama2	24	Kopi Biji
18		Lia	REPOK	40	Kopi Biji

- Monitoring kelompok tani yang memiliki jaringan pemasaran, terdapat 29 kelompok yang telah menerapkan metode Marketing Mix 4P (*Product, Price, Place, Promotion*), selengkapnya pada tabel 3.130.

Tabel 3.130
Kelompok Tani yang Memiliki Jaringan Pemasaran
Tahun 2022

NO	KELOMPOK TANI	KECAMATAN	DESA/KEL	KOMODITI
1	Emanuel	Langke Rembong	Wali	Tomat, Buncis, Lombok, Kol
2	Kartika			Tomat, Buncis, Lombok, Vanbox, Brokoli, Kol Bunga
3	Karya Lenteng	Rahong Utara	Compang Dari	Tomat, Cabe, Buncis, Sawi
4	Nendong Beo		Tengku Lese	Tomat, Cabe Buncis, Sawi
5	Milenial Ca Nai			Lombok, Picai, Sawi
6.	Mekar Sari		Golo Langkok	Jagung Manis, Tomat, Cabe keriting
7	Nisang Nai	Wae Ri'i	Bangka Jong	Kacang panjang, Terung, Cabe,kriting, Pakcoi, Kembang kol, Paprika
8	Simantri XIV		Bangka Kenda	Sawi, Kacang panjang, Tomat,Terung
9	Putra Ngeri 2		Ndehes	Terung, Sawi, Buncis

NO	KELOMPOK TANI	KECAMATAN	DESA/KEL	KOMODITI
10	Ting Satar		Satar Ngkeling	Sawi, Lombok, Tomat, Jagung
11	Langka Maju 2		Golo Mendo	Sayur, Tomat
12	Golo Ndarap		Compang Ndehes	Lombok Besar, Lombok
13	Wela Rana	Satar Mese	Papang	Tomat, Terung, Cabe
14	Wae Pumpuk		Ponggeok	Halia, Kol
15	KWT Sehati		Ponggeok	Sawi, Terung, Paria
16	Simantri VI		Umung	Kol bunga, Mentimun, Kubis
17	Simantri IX	Ruteng	Poco Likang	Tomat, Cabe, Buncis, Daun bawang
18	KWT Compang Tongke		Kakor	Tomat, Buncis, Sawi, Jagung manis
19	Compang Rai		Rai	Tomat, Buncis
20	Compang Bersaudara		Compang Namut	Tomat, Terung
21	Benteng Kuwu		Benteng Kuwu	Jahe, Picai, Cabe, Sawi
22	Sinar Mekar		Compang Dalo	Brokoli, Fanbox, Lombok besar, Wortel
23	Simantri/APH	Cibal	Rado	Parea, Cabe, Terung, Tomat
24	Wae Natu		Welu	Lombok, Timun Parea, Terung
25	Simantri 22		Pagal	Brokoli, Tomat, Buncis, Ketimun
26	Ratu Pencinta Damai		Golo	Cabe, Tomat
27	Simantri X	Lelak	Bangka Lelak	Tomat, Cabe, Buncis, Daun bawang
28	Wae Teku Tedeng		Ketang	Cabe, Keriting, Terung, Daun Bawang
29	Dorotuan	Reok	Salama	Jagung

- Terlaksananya Tera dan Tera Ulang ALat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), dengan target 48 unit terealisasi 82 unit atau 178,3%. Berikut data UTTP yang ditera/tera ulang di tahun 2022:

Tabel 3.131
UTTP yang Ditera/Tera Ulang Tahun 2022

NO	JENIS	JUMLAH	PERUSAHAAN
1	Tera Pompa BBM, Nozzle 54.865.09	12	PT. Berkat Bumi Mas
2	Tera Pompa BBM, Nozzle 54.865.03	10	PT. Citra Karya Anda
3	Tera Pompa BBM, Nozzle 54.865.01	12	PT. Hosan Atria Sejati
4	Tera Pompa BBM, Nozzle	6	PT.Rana Mese Mandiri
5	Tera Pompa BBM, Nozzle 54.865.13	8	PT. Berkat Bumi Mas
6	Tera Pompa BBM, Nozzle 54.865.07	8	PT. Wae Bacel Citra
7	Tera Pompa BBM, Nozzle 54.865.10	3	PT. Bintang Tiga
8	Tera Meter Arus Kapasita 69 M3	9	PT. Pertamina Patra Niaga Reo
9	Tera Meter Arus Kapasita 86 M3	1	PT. Pertamina Patra Niaga Reo
10	Tera Tangki Ukur Silinder Tegak	1	PT. Pertamina Patra Niaga Reo
11	Tera Timbangan Jembatan Kap. 300 kg	10	PT. Perrum Bulog
12	Tera Timbangan Jembatan Kap. 80 Ton	1	PT. Menara Armada Pratama
13	Tera timbagan Jembatan Kap. 40 Ton	1	PT. Wijaya Graha Mandiri
	JUMLAH	**82**	

Sasaran Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Perdagangan

Capaian untuk sasaran ini sebesar 100%. Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja antara lain:

- Tersedianya regulasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- Telah ditetapkannya PKS untuk pelaksanaan tugas kemetrologian;
- Pelaku usaha/mitra dengan dinas berjalan dengan baik dalam pelaksanaan pasar murah.

Rencana tindak lanjut untuk peningkatan capaian kinerja:

- Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kemetrologian, yaitu Penera dan Pengawas Tera, dan SDM PPBJ dan/atau PPNS-PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen);
- Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas;

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Sasaran Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Perdagangan ini adalah:

- Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kab/kota;
- Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota;

b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- Pengelolaan Pendapatan

Tabel 3.132
Realisasi Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	25.465.000	5.236.000	20,56
2.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	-	1.140.000	
	TOTAL	**25.465.000**	**6.376.000**	**25,04**

Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha dihapus karena :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:90/MDAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gedung, Pasal 6 poin (6) : Setiap proses permohonan pendaftaran

Tanda Daftar Gudang (TDG) baru, pendaftaran ulang TDG, perubahan atau pengganti TDG yang rusak, tidak dipungut biaya.

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 503/6491/SJ tanggal 17 Juli 2019, Hal : Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah poin 6:
  - Memerintahkan kepada perangkat daerah agar dalam memberikan izin tidak mempersyaratkan HO/SKDU/SITU;
  - Melakukan revisi Perda yang masih mempersyaratkan HO/SKDU/SITU

- Pengelolaan Belanja

  Pada tahun 2022, Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai melaksanakan melaksanakan 6 program dan 11 kegiatan serta 25 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.10.834.123.350**,- realisasi sebesar **Rp.9.536.530.832**,- atau sebesar 88,02%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.133.

Tabel 3.133
Anggaran Urusan Industri dan Perdagangan
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I	URUSAN PERDAGANGAN			
1.	**Belanja Operasi**	**3.487.411.839**	**2.371.558.069**	**68,003**
	Belanja Pegawai	1.751.670.943	1.694.473.803	96,73
	Belanja Barang dan Jasa	690.650.896	677.084.266	98,04
	Belanja Hibah			
	Belanja Subsidi	1.045.090.000	0	0
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	**-**
	JUMLAH I	**3.487.411.839**	**2.371.558.069**	**68,003**
II	URUSAN INDUSTRI			
1.	**Belanja Operasi**	**3.536.239.324**	**3.358.050.576**	**81,58**
	Belanja Pegawai	22.550.000	19.150.000	84,92
	Belanja Barang dan Jasa	2.463.689.324	2.390.262.840	97,02
	Belanja Hibah	1.050.000.000	948.637.736	90,35
	Belanja Subsidi	-	-	-
2.	**Belanja Modal**	**3.810.472.187**	**3.806.922.187**	**99,91**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.710.922.187	3.710.922.187	100
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.550.000	96.000.000	96,43
	JUMLAH II	**7.346.711.511**	**7.164.972.763**	97,52
	JUMLAH I + II	**10.834.123.350**	**9.536.530.832**	88,02

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.134.

Tabel 3.134
Capaian Kinerja Urusan Industri dan Perdagangan
Tahun 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
I	URUSAN PERDAGANGAN					3.487.411.839	2.371.558.069	68		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentasi urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96	100	104	2.178.122.915	2.118.493.229	97,26	-	-
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.000.000	1.000.000	100	-	-
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan OPD	4 dokumen	4 dokumen	100	1.000.000	1.000.000	100	-	-
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Pengelola APBD	1 tahun	1 tahun	100	1.841.092.915	1.783.195.323	96,86	-	-
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	100	1.720.620.943	1.665.473.803	96.79	-	-
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelola APBD	1 tahun	1 tahun	100	120.471.972	117.721.520	97,72	-	-
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Belanja Administrasi umum Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	100	275.386.000	275.231.456	99,94	-	-
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	8 jenis	8 jenis	100	6.000.000	5.985.000	99,75	-	-
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Alat Tulis dan perlengkapan kantor	43 jenis	43 Jenis	100	83.352.000	83.301.700	99,94	-	-
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan minum rapat	696 om/mi1740	696 om/mi 1740	100	29.580.000	29.580.00	100	-	-
1.3.4	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	65.500	65.500	100	20.020.000	20.010.000	99,95	-	-
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar dan bahan bacaan	1 jenis	1 Jenis	100	840.000	840.000	100,00	-	-
1.3.6	Penyediaan Bahan/ Material	Alat/bahan kebersihan	9 jenis	9 jenis	100	4.544.000	4.541.000	99,93	-	-
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Data Informasi hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	13kali	13 kali	100	131.050.000	130.973.756	99,94	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**				**16.644.000**	**15.261.450**	**91,69**	**-**	**-**
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai dan pengiriman	2 jenis	1 jenis	50	2.700.000	2.500.000	92,59	-	-
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening air, Telepon dan internet	3 rekening	3 rekening	100	13.944.000	12.761.450	91,5	-	-
1.5	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				44.000.000	43.805.000	99,56	-	-
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas Operasional yang layak	12	12	100	40.000.000	39.805.000	99,51	-	-
1.5.2	Pemelilharaan Peralatan Mesin lainnya	Komputer dan printer yang berfungsi dengan baik	16 unit	16 unit	100	4.000.000	4.000.000	100	-	-
2	**Program Peningkatan sarana Distribusi Perdangan**	**Presentasi Pasar tradisional yang memiliki sarana berkondisi baik**	**82**	**76.9230769**	**93,81**	**36.700.000**	**36.630.000**	**99,81**	**-**	**-**
2.1	**Pembangunan dan pengelolaan Sarana Disrtibusi Perdangan**					**36.7000.000**	**36.630.000**	**99,81**	**-**	**-**
2.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Monotoring Pasar	12	12	100	36.700.000	36.630.000	99,81	-	-
3	**Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**1. Meningkatnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting** **2. Prosentase kinerja realisasi pupuk**	**1.100** **2.90**	**1.100** **2.96.79**	**1.100** **2.108.**	**1.201.887.924**	**145.783.840**	**12,13**	**-**	**-**
3.1	**Pengendalian Harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/kota**					**1.180.192.924**	**124.598.840**	**10,56**	**-**	**-**
3.1.1	Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha Distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Telaksasananya pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	1 dokumen	1 dokumen	100	69.442.924	69.208.840	99,66	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
3.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	TERlaksananya operasi pasar	12	12	100	1.110.750.000	55.390.000	4,99	Belanja subsidi tidak terserap karena terkendala regulasi terkait penetapan harga subsidi pada kegiatan pasar murah kepada BUMS	Pasar murah tetap dilaksanakan di 12 titik dengan menggunakan harga distributor
3.2	**Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**Tersedianya data dan informasi penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi**				**21.695.000**	**21.185.000**	**97.65**	-	-
3.2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya monitoring dan pengawasa penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi	12	12	100	21.695.000	21.185.000	97.65	-	-
4	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentasi alat-alat ukur, takar, dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**3,13**	**0,05**	**1,75**	**20.101.000**	**20.101.000**	**100**	-	-
4.1	**Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**					**20.101.000**	**20.101.000**	**100**	-	-
4.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan	Terlakananya Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapanya (UTTP)	46	82	178,26	20.101.000	20.101.000	100	Ketiadaan Tenaga Kemtrologian di Kabupaten Manggarai	PKS dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang tentang kerjaasa kegiatan kemetrologian
5	**Program Standarisasi dan Perlindungan konsumen**	**1. Presentasi kelompok pedagang yang menerapkan metode marketing** **2. Persentasi kelompok tani yang menerapkan metode marketing** **3. Persentasi kelompok petani yang memiliki jaringan pemasara**	**11,1** **3,3** **3,3**	**11,1** **10,28** **19,86**	**100** **309,9** **601,9**	**50.600.000**	**50.550.000**	**99,90**		
5.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri					50.600.000	50.550.000	99,90		
5.1.1	Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten Kota	Meningkatnya pemasaran produk Dalam Negeri	2	2	100	27.100.000	27.100.000	99,85	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
5.1.2	Pemasaran dan Peningkatan sistem dan Jaringan Informasi Perdangan	Tersedianya data kelompok petani yang memiliki jaringan pemasaran	2	2	100	23.500.000	23.490.000	99,96	-	-
II	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI**					**7.346.711.511**	**7.164.972.763**	**97,53**		
1	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentasi peningkatan pelaku IKM pengelolaan pangan dan paska panen yang terlatih**	**36,4**	**33,33**	**91,57**	**7.346.711.511**	**7.164.972.763**	**97,53**		
		Persentasi IKM yang mendapatkan bantuan permodalan	**32,6**	**35,63**	**109,29**					
		Persentasi IKM yang menggunakan teknologi pengolahan moder	**33,3**	**0,45**	**1,4**					
		Tingkat ketersediaan bahan baku produksi-produksi tenun	**100**	**100**	**100**					
		Persentasi peningkatan pelaki industri tenun yang terlatih	**18,6**	**110**	**591,39**					
		Persentasi peningkatan pelaku indutri mebel dan bambu yang terlatih	**11**	**0**	**0**					
		Persentasi IKM yang meningkat sarana prasarana pendukungnya	**3,5**	**4,87**	**139,14**					
1.1	**Penyusunan dan Evalusi Rencana Pembangunan Indutri Kabupaten /Kota**					**7.346.711.511**	**7.164.972.763**	**97.53**		
1.1.1	**Koordinasi, Sinkonisasi, dan pelaksanaan pembanguna sumber daya Industri**	**Terlaksananya bantuan mesin dan peralatan bagi pengrajin IKM**	**42**	**52**	**123**	**909.213.000**	**906.553.000**	**99,71**	**-**	**-**
1.1.2	Koordinasi, Sinkonisasi dan pelaksanaan pembanguna sarana dan prasaran industri	Terlaksananya pembangunan showroom kerajinan IKM	1	1	100	3.834.420.187	3.828.270.187	99,84	-	-
1.1.3	Koordinasi, Sinkonisasi, dan pemberdayaan Industri dan peran serta masyarakat	Meningkatnya Kapasitas SDM	93	93	100	2.519.271.000	2.349.585.736	93,26	-	-
1.1.4	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan IKM	120	120	100	83.807.324	2.349.585.736	96,13	-	-
	TOTAL					**10.834.123.350**	**9.536.530.832**	**88,02**		

Sumber; Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Manggarai, Jan 2023

3.3.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. **Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**

a) **Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja**

Penanganan urusan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2022, Bappelitbangda Kabupaten Manggarai menetapkan dua (2) sasaran strategis dengan dua (2) indikator kinerja yang dapat digambarkan dalam tabel 3.135.

Tabel 3.135
Pengukuran Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya capaian target sasaran	Persentase realisasi sasaran	100% (54 Indikator)	48,15% (26 Indikator)	46,29
2.	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	Persentasi hasil litbang yang dimanfaatkan	100% (1 peneltian)	100% (1 peneltian)	100
		Rata-rata			73,14
		Kategori			Baik

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Manggarai, Januari 2023

- **Pesentase Realisasi Sasaran**

  Pada tahun 2022, terdapat 26 indikator sasaran RPJMD yang berhasil mencapai target dari total 54 indikator sasaran. Sedangkan 28 indikator sasaran belum mencapai target.

- **Persentasi Hasil Litbang yang Dimanfaatkan**

  Semua penelitian yang dihasilkan oleh Bappelitbangda Kabupaten Manggarai telah digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

b) **Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan 4 program, 16 kegiatan dan 52 subkegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.5.476.419.881,-** dan realisasi sebesar **Rp.5.189.558.636,-** dengan tingkat capaian sebesar 92,99%. Ringkasan anggaran pada tabel 3.125.

Tabel 3.125
Anggaran Bappelitbang Kab. Manggarai Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I	URUSAN PERENCANAAN			
1.	Belanja Operasi	5.036.063.076	4.789.322.225	92.57
	Belanja Pegawai	2.863.191.708	2.838.268.631	99,13
	Belanja Barang dan Jasa	2.172.871.368	1951053594	89,79
2.	Belanja Modal	97.769.905	97.768.000	99,99
	Belanja Modal Peralatan dan	97.769.905	97.768.000	99,99
	JUMLAH I	5.133.832.981	4.887.090.225	95,19
II	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1.	Belanja Operasi	342.586.900	302.468.411	88,29
	Belanja Pegawai	450.000	-	0
	Belanja Barang dan Jasa	342.136.900	302.468.411	88,41
2.	Belanja Modal	-	-	-
	JUMLAH II	342.586.900	302.468.411	88,29
	JUMLAH I+II	5.476.419.881	5.189.558.636	94,76

Sumber: Bappelitbang Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, disajikan pada tabel 3.136

Tabel 3.136
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Perencanaan Tahun 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	(%)	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	(%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
II	URUSAN PERENCANAAN									
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96%	96%	100	3.855.740.957	3.783.088.965	98,12	-	-
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Bappelitbangda	4 Dokumen	4 Dokumen	100	193.633.696	188.619.400	97,41	-	-
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perancanaan Perangkat Daerah	Tersedianya data sinkronisasi perencanaan, dokumen renstra dan renja	3 Dokumen	3 Dokumen	100	192.433.696	187.419.400	97,39	-	-
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Konerja SKPD	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1.200.000	1.200.000	100	-	-
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta honor pengelola keuangan	1 Tahun	1 Tahun	100	2.862.406.708	2.838.268.631	99,16	-	-
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (43 orang)	1 Tahun	1 Tahun	100	2.827.491.708	2.804.468.631	99,19	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	(%)	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	(%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Asministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	11 Orang	11 Orang	100	34.915.000	33.800.000	96,81	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Bappelitbang Kab. Manggarai**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**11.100.000**	**11.100.000**	**100**	-	-
1.3.1	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Finger Print	1 Unit	1 Unit	100	11.100.000	11.100.000	100	-	-
1.4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya barang dan jasa yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran**	**7 Item**	**7 Item**	**100**	**584.984.648**	**575.769.495**	**98,42**	-	-
1.4.1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	3 Jenis	3 Jenis	100	2.400.000	2.400.000	100	-	-
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	16 Jenis	16 Jenis	100	110.039.000	110.018.000	99,98	-	-
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	2052 OM	2052 OM	100	71.820.000	67.220.000	93,6	-	-
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	8 Jenis	100	73.490.000	73.489.800	100	-	-
1.4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	3 Jenis	3 Jenis	100	1.680.000	1.680.000	100	-	-
1.4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat kebersihan dan jasa cleaning service	13 Jenis/2 Orang	13 Jenis/2 Orang	100	62.105.648	59.693.000	96,12	-	-
1.4.7	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	22 Kali	22 Kali	100	263.450.000	261.268.695	99,17	-	-
1.5	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya peralatan penunjang urusan perkantoran**	**1 Item**	**1 Item**	**100**	**87.119.905**	**86.668.000**	**99,48**	-	-
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya Laptop, PC dan Printer	7 Unit	7 Unit	100	87.119.905	86.668.000	99,48	-	-
1.5.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2 Item	2 Item	100	62.870.000	41.856.421	66,58	-	-
1.5.3	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan paket pengiriman	3 Jenis	3 Jenis	100	4.670.000	1.766.996	37,84	-	-
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya rekening telepon, air, listrik dan internet	4 Jenis	4 Jenis	100	58.200.000	40.089.425	68,88	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	(%)	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	(%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.6	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana gedunng kantor**	**3 Item**	**3 Item**	**100**	**53.626.000**	**40.807.018**	**76,1**	-	-
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	24 Unit	24 Unit	100	38.000.000	25.982.018	68,37	-	-
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	20 Unit	20 Unit	100	5.176.000	4.825.000	93,22	-	-
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100	10.450.000	10.000.000	95,69	-	-
2	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase konsistensi RKPD dengan Renja, Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD**	**100%**	**100%**	**100**	**681.301.600**	**609.362.772**	**89,44**	-	-
2.1	**Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**100**	**548.483.200**	**496.535.772**	**90,53**	-	-
2.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penelahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang selaras dengan dokumen kebijakan lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	100	107.150.000	84.891.754	79,23	-	-
2.1.2	Sub kegiatan pelaksanaan konsultasi publik	Terlaksananya Forum Konsultasi Publik RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	13.072.000	13.072.000	100	-	-
2.1.3	Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan forum/lintas SKPD	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	13.767.000	13.767.000	100	-	-
2.1.4	Sub kegiatan pelaksanaan Musrenbang/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100	73.922.000	61.322.000	82,96	-	-
2.1.5	Sub kegiatan penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan	Terlaksananya koordinasi Musrenbang Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	39.663.000	39.503.000	99,6	-	-
2.1.6	Sub kegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen RKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	300.909.200	283.980.018	94,37	-	-
2.2	**Kegiatan analisa data dan informasi pembangunan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya data dan informasi**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**100**	**90.222.900**	**71.296.000**	**79,02**	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	(%)	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	(%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
2.2.1	Sub Kegiatan Analisa dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	10 Masukan	10 Masukan	100	3.599.000	3.599.000	100	-	-
2.2.2	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	50 Orang	50 Orang	100	50.672.000	37.552.000	74,11	-	-
2.2.3	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	50 Buku	50 Buku	100	35.951.900	30.145.000	83,85	-	-
2.3	**Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**100**	**42.595.500**	**41.531.000**	**97,5**	-	-
2.3.1	Sub kegiatan Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/kota	Tersedianya data pengendalian perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen		12.474.000	11.794.000	94,55	-	-
2.3.2	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Tersedianya data hasil monitoring	1 Dokumen	1 Dokumen	100	30.121.500	29.737.000	98,72	-	-
3.	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase realisasi target program**	**100**	**100**		**596.790.424**	**494.638.488**	**82,88**	-	-
3.1	**Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintah dan pembangunan manusia**	**62 Dokumen**	**62 Dokumen**	**100**	**227.471.724**	**185.449.524**	**81,53**	-	-
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Perekonomian				11.327.400	9.355.353	82,59	-	-
3.1.2	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tersedianya Dokumen Hasil Asistensi Bidang Perekonomian	2 Kali	2 Kali	100	24.120.800	23.350.000	96,8	-	-
3.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian	14 Kali	14 Kali	100	54.000.000	48.640.000	90,07	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	(%)	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	(%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
3.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Bidang SDA	30 Dokumen	30 Dokumen	100	23.177.300	15.553.557	67,11	-	-
3.1.5	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tersedianya Dokumen Hasil Asistensi Bidang SDA	2 Kali	2 Kali	100	23.549.900	21.865.013	92,85	-	-
3.1.6	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang SDA	30 Kali	30 Kali	100	14.519.000	13.460.000	92,71	-	-
3.2	**Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	**Tersedianya dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**100**	**150.694.400**	**132.223.923**	**87,74**	-	-
3.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	100	11.327.400	9.355.353	82,59	-	-
3.2.2	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tersedianya Dokumen Hasil Asistensi Bidang Perekonomian	2 Dokumen	2 Dokumen	100	24.120.800	23.350.000	96,8	-	-
3.2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	100	54.000.000	48.640.000	90,07	-	-
3.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Bidang SDA	1 Dokumen	1 Dokumen	100	23.177.300	15.553.557	67,11	-	-
3.2.5	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tersedianya Dokumen Hasil Asistensi Bidang SDA	2 Dokumen	2 Dokumen	100	23.549.900	21.865.013	92,85	-	-
3.2.6	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang SDA	1 Dokumen	1 Dokumen	100	14.519.000	13.460.000	92,71	-	-
3.3	**Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah**	**Tersedianya data dan informasi**	**18 Dokumen**	**18 Dokumen**	**100**	**218.624.300**	**176.965.041**	**80,94**	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	(%)	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	(%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
3.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100	34.132.600	32.997.733	96,68	-	-
3.3.2	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	100	48.610.000	25.823.413	53,12	-	-
3.3.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	100	52.008.700	50.776.000	97,63	-	-
3.3.4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	100	43.141.000	31.270.542	72,48	-	-
3.3.5	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	14 Dokumen	14 Dokumen	100	7.884.000	7.444.353	94,42	-	-
3.3.6	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	14 Laporan	14 Laporan	100	8.050.000	7.650.000	95,03	-	-
3.3.7	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	14 Laporan	14 Laporan	100	15.848.000	12.338.000	77,85	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	(%)	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	(%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
3.3.8	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	14 Laporan	14 Laporan	100	8.950.000	8.665.000	96,82	-	-
I	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								-	-
1	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan**	**100**	**100**	**100**	**342.586.900**	**302.468.411**	**88,29**	-	-
1.1	**Kegiatan Penelitian dan Pengemb.Bid. Ekonomi dan Pembangunan**	**Tersedianya dokumen penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan (Pengembangan BUMDes) dan dokumen fasilitasi kerjasama dengan Lembaga Penelitian**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100**	**202.044.300**	**192.776.432**	**95,41**	-	-
1.1.1	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	Tersedianya dokumen hasil penelitian di bidang Koperasi dan UKM	1 Dokumen	1 Dokumen	100	202.044.300	192.776.432	95,41	-	-
1.2	**Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial daN Kependudukan**	**Tersedianya booklet penelitian di bidang pariwisata dan Tersedianya laporan hasil monev penelitian di bidang pariwisata**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100**	**10.104.400**	**9.554.400**	**94,56**	-	-
1.2.1	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Tersedianya bookleat hasil penelitian	2 Dokumen	2 Dokumen		10.104.400	9.554.400	94,56	-	-
1.3	**Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Tersedianya laporan pengembangan inovasi daerah Kabupaten Manggarai dan laporan pengembangan inovasi internal Bappelitbangda**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100**	**130.438.200**	**100.137.579**	**76,77**	-	-
1.3.1	Sub Kegiatan Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya inovasi tingkat Bappelitbangda Kabupaten Manggarai	1 Dokumen	1 Dokumen	100	130.438.200	100.137.579	76,77	-	-
	TOTAL					5.717.915.335	5.317.210.336	92,99		

Sumber: Bappelitbangda Kab. Manggarai, Jan 2023

2. Urusan Keuangan

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai menetapkan 2 sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Adapun indikator dan capaian disajikan dalam tabel 3.137

Tabel 3.137
Pengukuran Kinerja Urusan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi keuangan Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	Penetapan APBD dan P-APBD yang tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	100
			Realisasi Penyerapan APBD	90%	93,66%	104,07
			LKPD yang sesuai dan tepat waktu	52	52	100
2.	Meningkatnya Pengelolaan Aset yang sesuai standar	Persentase pengelolaan asset yang sesuai standar	Laporan BMD OPD yang sesuai dan tepat waktu	52	52	100
	Rata-rata					**100,68**
	Kategori					**Memuaskan**

Sumber: BKAD Kabupaten Manggarai, Januari 2023

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Persentase Tertib Administrasi Keuangan**

  Capaian indikator ini dihitung melaui 3 (tiga) komponen, yaitu:

  - Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Manggarai = TEPAT WAKTU.
  - Realisasi Penyerapan APBD

    Realisasi belanja yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mencapai **93,66%** dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1.203.443.264.459,00.

    Dari beberapa realisasi belanja, Belanja Transfer mencatatkan realisasi belanja tertinggi dengan mencapai 99.99% dan Belanja Tidak Terduga menjadi jenis belanja dengan tingkat realisasi terendah jika dibandingkan dengan jenis belanja lainnya yakni mencapai 76,14%.

Realisasi belanja Daerah tahun 2022 sebesar 93,66% bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021-2026 mencapai 104.07**%**, dimana target yang harus dicapai adalah sebesar 90%.

- **Jumlah LKPD Sesuai dan Tepat Waktu**

Dalam rangka menghasilkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akuntabel, dibutuhkan sinergitas yang solid antara OPD dan BKAD selaku konsolidator.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2019 berbunyi bahwa, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Oleh karena itu, setiap OPD wajib menyerakhan LKPD tahun 2022 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat pada bulan Januari tahun 2022, sehingga LKPD Kabupaten dapat diselesaikan tepat waktu.

Untuk tahun 2022, sebanyak 52 OPD telah menyelesaikan dan menyampaiakan LKPD **tepat waktu**.

Realisasi capaian 3 (tiga) komponen di atas dapat dilihat pada tabel 3.138.

Tabel 3.138

No	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya Tertib Administrasi keuangan Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	Penetapan APBD dan P-APBD yang tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	100
			Realisasi Penyerapan APBD	90%	93,66%	104,7
			LKPD yang sesuai dan tepat waktu	52	52	100
Rata-rata						**101,36**

- **Persentase Pengelolaan Aset yang Sesuai Standar,** target tahun 2022 Kabupaten Manggarai adalah 100,00%, nilai capaian sebesar 100%.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa salah satu lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Regulasi adalah 100%. Capaian sasaran kinerja sasaran ini didukung oleh indikator kinerja Prosentase jumlah Perangkat Daerah yang Pengolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan regulasi dibandingkan dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah

b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Realisasi APBD Badan Keuangan Kabupaten Manggarai, digambarkan dalam tabel 3.139.

Tabel 3.139
Anggaran Badan Keuangan
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.027.456.670.207**	**1.001.870.107.277**	**97,51**
1	**Pendapatan Transfer**	**941.000.860.207**	**928.295.624.485**	**98,65**
1.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**900.812.876.993**	**902.068.026.862**	**100**
1.1.1	Dana Perimbangan	777.627.295.993	778.882.445.862	100,14
1.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0
1.1.3	Dana Desa	123.185.581,000	123.185.381.000	100
1.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**40.187.983.214**	**26.227.597.623**	**65,26**
	Pendapatan Bagi Hasil	40.187.983.214	26.227.597.623	65,26
	Bantuan Keuangan	0	0	0
2	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**86.455.810.000**	**73.574.482.792**	**85,10**
2.1	**Pendapatan Hibah**	**10.000.000.000**	**0**	**0**
2.2	**Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan**	**76.455.810.000**	**73.574.482.792**	**96,23**
II	**BELANJA DAERAH**	**200.035.441.782**	**196.112.087.641,72**	**98,04**
1.	**Belanja Operasi**	9.811.024.202	7.638.363.019,72	77,85
1.1	Belanja Pegawai	3.504.693.582	3.43.439.100	95,40
1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.306.330.620	3.567.392.987	67,23
1.3	Belanja Bunga	1.000.000.000	727.530.923,72	72,75
2.	**Belanja Modal**	**102.654.272**	**22.000.000**	21,43
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.654.272	22.000.000	21,43
3.	**Belanja Tidak Terduga**	7.000.000.000	5.329.997.314	76,14
3.1	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	5.329.997.314	76,14
4.	**Biaya Transfer**	183.121.763.308	183.121.727.308	100
4.1	Belanja Bagi Hasil	3.847.593.908	3.847.557.908	100
	Belanja Bantuan Keuangan	179.274.169.400	179.274.169.400	100
	SURPLUS/DEFISIT	**827.421.228.425**	**805.758.019.636,28**	**97,38**
III	**PEMBIAYAAN**			
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**74.809.603**	**74.809.717.603**	**100**
1.1	**Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun**	**68.559.000.049**	**68.559.000.049**	**100**

	Sebelumnya			
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	6.250.717.554	6.250.717.554	100
2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000	19.300.000.000	96,50
2.1	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	19.300.000.000	96,50
	Pembiayaan Netto	54.809.717.603	55.509.717.603	101,28
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	861.230.946.028	861.267.737.238,28	97,62

Sumber: BKAD Kab. Manggarai, Jan 2023

Pada tahun 2022, Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan 3 Program dan 12 Kegiatan. Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.140

Tabel 3.140
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Keuangan
Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi Perkantoran yang optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**4.685.226.234**	**4.190.173.898**	**89.43**	-	-
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**10.792.500**	**7.712.500**	**71.46**	-	-
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45 Buku	45 Buku	100	9.892.500	6.812.500	68.87	-	-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP, LKPJ dan LPPD	80 buku	80 buku	100	900.000	900.000	100	-	-
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**3.387.813.346**	**3.233.821.109**	**95.45**	-	-
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Honor PPK, Bendahara, THL, dan tambahan penghasilan THL	1 tahun	1 tahun	100	3.295.843.582	3.151.639.109	95.62	-	-
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS	1 tahun	1 tahun	100	91.969.764	82.182.000	89.36	-	-
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**364.543.300**	**329.856.900**	**90.48**	-	-
1.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mesin absensi dan Pakaian Dinas Harian Pegawai	104 stel/unit	54 stel	52	127.700.000	111.536.000	87.34	-	-

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pemahaman pengelola APBD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	10 kali	8 kali	80	201.000.000	186.570.000	92.82	-	-
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan Daerah	49 OPD	49 OPD	100	35.843.300	31.750.900	88.58	-	-
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**660.923.500**	**470.015.196**	**71.11**	-	-
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	5 jenis	100	5.970.000	5.965.000	99.92	-	-
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	45 jenis	45 jenis	100	200.523.500	141.551.500	70.59	-	-
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	2 jenis	2 jenis	100	2.720.000	1.200.000	44.12	penghematan belanja	
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan rapat, kegiatan dan minuman harian pegawai	15.072 om	6.028 om	39.99	150.375.000	60.125.000	39.98	penghematan belanja	
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	2 jenis	100	102.275.000	92.275.100	90.22	-	-
1.4.6	Penyediaan Bahan/Material	alat dan bahan pembersih	11 jenis	11 jenis	100	5.620.000	4.477.500	79.67	-	-
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi	20 kali	17 kali	85	193.440.000	164.421.096	85	-	-
1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**80.113.588**	**29.200.000**	**36.45**	-	-
1.5.1	Pengadaan Mebel	Mebel	8 unit	8 unit	100	26.400.000	24.000.000	90.91		
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Printer, PC, Laptop, TV, CCTV, Proyektor	13 unit	2 unit	15	53.713.588	5.200.000	9.68	Terdapat kendala pengiriman barang dari luar NTT di akhir tahun sehingga mengakibatkan adanya belanja modal pengadaan barang yang tidak jadi dilaksanakan	
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**81.840.000**	**48.301.493**	**59.02**	-	-
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Pengiriman Paket	2 jenis	2 jenis	100	13.840.000	6.562.435	47.42	penghematan belanja	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telpon, listrik, air dan internet	3 rekening	3 rekening	100	68.000.000	41.739.058	61.38	-	-

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**99.200.000**	**71.266.700**	**71.84**	-	-
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang berfungsi baik	27 unit	27 unit	100	55.000.000	37.905.500	68.92	-	-
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer/Laptop, Genset dan Mesin Potong Rumput yang berfungsi Baik	29 unit	19 unit	66	31.350.000	20.513.000	65.43	-	-
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang layak	1 paket	1 paket	100	12.850.000	12.848.200	99.99	-	-
2	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**					**194.044.450.216**	**191.395.247.479**	**98.63**	-	-
2.1	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**					**1.898.831.624**	**1.377.356.305**	**72.54**	-	-
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	100 buku	100 buku	100	106.474.000	61.308.500	57.58	-	-
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	100 buku	100 buku	100	104.248.000	75.028.000	71.97	-	-
2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	49 OPD	49 OPD	100	16.211.000	2.990.000	18.44	efisiensi belanja perjalanan dinas	
2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan SKPD	49 OPD	49 OPD	100	8.435.000	4.325.000	51.27	-	-
2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	49 OPD	49 OPD	100	46.490.000	37.830.000	81.37		
2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah	49 OPD	49 OPD	100	254.060.000	223.950.000	88.15		
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	200 buku	200 buku	100	698.219.824	541.147.079	77.50		

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasa lahan	Solusi
2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	220 buku	220 buku	100	516.267.000	424.667.726	82.26		
2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 dokumen	-	0	28.689.000	-	0	kegiatan tidak jadi dilaksankan	
2.1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Data dan Informasi hasil koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	1 tahun	1 tahun	100	47.445.000	6.110.000	12.88	efisiensi belanja perjalanan dinas	
2.1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Data dan Informasi hasil koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 tahun	1 tahun	100	25.942.800	-	0	kegiatan tidak jadi dilaksankan	
2.1.12	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Penganggaran Daerah yang akuntabel	100%	100%	100	46.350.000	-	0	kegiatan tidak jadi dilaksankan	
2.2	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**					**468.157.284**	**402.142.830**	**85.90**		
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Surat Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah	7 dokumen	7 dokumen	100	36.315.000	23.642.300	65.10		
2.2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	jumlah SP2D yang telah diproses sampai ke Bank NTT	8000 dokumen	6.260 dokumen	78	126.554.484	113.201.000	89.45		
2.2.3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan Dana Perimbangan	12 dokumen	12 dokumen	100	47.770.000	42.129.524	88.19		

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
2.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dokumen Penempatan Uang Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100	11.870.000	9.390.000	79.11		
2.2.5	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen Piutang dan Utang Daerah	1 tahun	1 tahun		2.766.000	920.000	33.26		
2.2.6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Data hasil rekon PFK, PPN dan PPh	2000 dokumen	2000 dokumen	100	45.346.000	34.530.006	76.15		
2.2.7	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Data Laporan Aliran Kas dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 dokumen	12 dokumen	100	118.950.000	115.400.000	97.02		
2.2.8	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Laporan bulanan	12 dokumen	12 dokumen	100	78.585.800	62.930.000	80.08		
2.3	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**					**512.848.000**	**434.092.798**	**84.64**		
2.3.1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tersedianya Laporan Bulanan, Laporan Semesteran dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15 dokumen	15 dokumen	100	339.070.000	330.134.798	96,21		

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
2.3.2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Buku Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 dokumen	6 dokumen	100	102.200.000	79.130.000	77.43		
2.3.3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi, Kebijakan Akuntansi dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100	12.550.000		0		
2.3.4	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Verifikasi semua Laporan Pertanggungjawaban Fungsional untuk semua OPD baik Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	7 dokumen	7 dokumen	100	59.028.000	24.828.000	42.06	Adanya penghematan makan minum lembur sesuai dengan kegiatan di Bidang Akuntansi	
2.4	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**					**191.121.763.308**	**189.179.255.546**	**98.98**		
2.4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersalurnya Dana Bantuan Keuangan ke Pemerintah	1 tahun	1 tahun	100	179.274.169.400	179.274.169.400	100		
2.4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 tahun	1 tahun	100	8.000.000.000	6.057.528.238	75.72		
2.4.5	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Desa	1 tahun	1 tahun	100	3.847.593.908	3.847.557.908	100		
2.5	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**					**42.850.000**	**2.400.000**	**5.60**		
2.5.1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terpeliharanya SIM	1 paket	0	0	42.850.000	2.400.000	5.60		
3	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**					**1.273.624.648**	**526.666.265**	**41.35**		
3.1	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**					**1.273.624.648**	**526.666.265**	**41.35**		
3.1.1	Penyusunan Standar Harga	Buku Standarisasi Harga	400 buku	400 buku	100	96.750.000	63.825.000	65.97		

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasa lahan	Solusi
3.1.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Data dan Informasi Pengelolaan Barang Milik Derah (BMD)	49 dokumen	49 dokumen	100	724.439.648	270.554.765	37.35	Penghematan perjalanan dinas dalam kota	
3.1.3	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Buku Inventaris Barang	49 OPD	49 OPD	100	30.135.000	24.865.000	82.51		
3.1.4	Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen hasil penilaian aset	49 OPD	49 OPD	100	107.460.000	14.150.000	13.17	Penghematan perjalanan dinas dalam kota	
3.1.5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Data dan Informasi Barang Milik Daerah yang dihapus dan dihibahkan	1000 BMD	350BMD	35	211.030.000	64.310.000	30.47	Penghematan perjalanan dinas dalam kota	
3.1.6	Rekons iliasi dalam rangka Penyus unan Lapora n Barang Milik Daerah	Data Rekon Aset/ Barang Milik Daerah	49 OPD	49 OPD	100	103.810.000	88.961.500	85.70		
	Jumlah					**200.003.301.098**	**196.112.087.642**	**98.05**		

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manggarai, Jan 2023

3. Badan Pendapatan

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai menetapkan sasaran strategis "Meningkatnya Pajak dan Retribusi Daerah" dengan 2 indikator kinerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.141.

Tabel 3.141
Capaian Kinerja Badan Pendapatan daerah
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1.	Indeks Kapasitas Fiskal	0,565	0,546	96,64
2.	Presentase Peningkatan PAD	1	-7.69	-7,69
	Rata-rata			**44,48**
	Kategori			**Kurang**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai, Januari 2023

- **Indeks Kapasitas Fiskal**

Kapasitas Fiskal merupakan gambaran dari kemampuan keuangan dari masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan Pendapatan yang penggunaannya sudah di tentukan dan belanja tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten didasarkan pada formula sebagai berikut:

KFD*kabupaten/kota-i* : Pendapatan – (Pendapatan yang pengunaanya sudah ditentukan+ belanja tertentu).

Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota didasarkan pada formula:

$$IKFD_{kabupaten/kota\text{-}i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota\text{-}i}}{(\sum KFD_{kabupaten/kota})/n}$$

Keterangan:
IKFD*kabupaten/kota-I* =Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota
KFD*kabupaten/kota-I* = Kapasitas Fiskal Daerah suatu Kabupaten/Kota
∑KFD*kabupaten/kota* = Total Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota
n = 508 daerah kabupaten/kota

Indek Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota dikelompokan kedalam 5 (lima) Kategori yaitu:

Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
IKFD < 0.530	Sangat Rendah
0.530 ≤ IKFD < 0.727	Rendah
0.727 ≤ IKFD < 1.053	Sedang
1.053 ≤ IKFD < 1.838	Tinggi
IKFD ≥ 1.838	Sangat Tinggi

Target Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Manggarai tahun 2022 sebesar 0,565 (kategori rendah) dan terealisasi sebesar 0,546 (rendah) dengan tingkat capaian 96,64%.

- **Presentase Peningkatan PAD**

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola langsung dan menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2022 ditargetkan terjadi peningkatan sebesar 1% (Rp.303.189.645,-) dari penerimaan PAD tahun 2021 (Rp.30.318.964.540) atau mencapai Rp.30.622.154.185,- namun berhasil terealisasi hanya sebesar Rp.27.985.176.035,- dengan rincian seperti pada tabel 3.142.

Tabel 3.142
Target dan Realisasi Pendapatan
Badan Pendapatan Tahun 2022

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	A. Pajak Daerah			
1.	Pajak Hotel	572.902.000	460.366.595	80,36
2.	Pajak Restoran	2.700.081.317	2.405.731.846	89,10
3.	Pajak Hiburan	50.142.763	1.530.000	3,05
4.	Pajak Reklame	168.642.335	161.736.500	95,91
5.	Pajak Penerangan Jalan	4.688.000.000	5.306.738.449	113,20
6.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	10.000.000.000	3.357.091.441	33,57
7.	Pajak Air Bawah Tanah	100.000.000	105.518.265	105,52
8.	PBB	4.617.870.962	3.962.309.157	85,80
9.	BPHTB dan Pemondahan Hak	962.155.950	1.204.950.511	125,23
	B. Retribusi Daerah			
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.386.062.895	1.465.286.125	105,72
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.279.771.748	558.565.500	17,03
3.	Retribusi Pasar/Pertokoan	1.759.585.613	1.178.393.500	66,97
	C. Lain-lain PAD yang sah			
1.	Deviden	6.580.221.250	3.371.631.128	51,24
2.	Jasa Giro	8.076.202.217	4.445.327.019	55,04
Total Penerimaan		**44.941.639.050**	**27.985.176.035**	**62,27**

Formulasi pehitungan persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah:

$$\text{Persentase Peningkatan PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun Berjalan - Realisasi PAD Tahun Lalu}}{\text{Realisasi Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai mengalami penurunan -7,69 (2.333.788.505) dari Target 1% (30.622.154.185)yang menjadi dari Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 sebesar 30.318.964.540. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 sebesar 27.985.176.035.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (Deviden dari Bank NTT) yang dilaporkan sebagai Pendapatan hanya sebesar 50%;
- Penurunan pagu belanja Modal yang berdampak pada rendahnya penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- Menurunnya daya beli masyarakat diakibatkan oleh pandemic covic-19;

Ada beberapa jenis Pembayaran Pajak tahun 2022 berdasarkan aplikasi masih di rekening titipan sebelum masuk kas Daerah, hal ini dilakukan pada 30 Desember 2022 namun dipindahbukukan pada tanggal 2 Januari 2023 sehingga diakui dan tercatat sebagai pendapatan di Tahun 2023(sebesar 553.604.421 dari 9 Pajak Daerah dan sebesar 80.913.361 dari PBB)

b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 melaksanakan 2 program dan 9 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.719.345.418,- realisasi sebesar Rp.5.029.493.252,- atau sebesar 87,94%, dengan rincian pada tabael 3.143

Tabel 3.143
Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**5.638.717.818**	**4.971.333.682**	**88,16**
	Belanja Pegawai	3.424.221.533	2.822.708.141	82.49
	Belanja Barang dan Jasa	2.214.496.285	2.148.625.541	97.03
2.	**Belanja Modal**	**80.627.600**	**58.159.570**	**72.13**
	TOTAL	**5.719.345.418**	**5.029.493.252**	**87.94**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Manggarai, Jan 2023

Pengelolaan pendapatan disajikan pada tabel 3.144

Tabel 3.144
Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Tahun 2022

No	Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	2021	43.723.203.627	30.318.964.540	67.01
2.	2022	44.941.639.050	27.985.176.033	62.27

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.145.

Tabel 3.145
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Anggaran	Realisasi	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**96**	**4.324.157.332**	**3.658.314.042**	**84.60**	-	-
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.200.000**	**1.200.000**	**100**	-	-
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	100	1.200.000	1.200.000	100	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**3.447.738.857**	**2.845.991.981**	**82.55**	-	-
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	33 Orang	75	3.392.571.533	2.797.208.141	82.45	Pejabat Eselon Eselon III A dan B (4 Orang) dilantik bulan Februari, Eselon IV dilantik Bulan April dan Mei (10 Orang) Yang Berpengaruh Terhadap Tidak Terserapnya Gaji dan Tunjangan ASN	Mengisi Jabatan Yang Lowong
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	100	55.167.324	48.783.840	88.43	Belum terisinya Jabatan Pembantu Bendahara Penerimaan	Mengisi Jabatan Yang Lowong
1.3	**Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Sasaran:** **Subjek dan Objek Retribusi Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**182.300.000**	**182.105.000**	**99.89**	-	-
1.3.1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	39.040.000	39.020.000	99.95	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Anggaran	Realisasi	%	Permasalahan	Solusi
1.3.2	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	7.500.000	7.485.000	99.80	-	-
1.3.3	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribus Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	135.760.000	135.600.000	99.88	-	-
1.4	**Kegiatan** **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**ASN Badan Pendapatan Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**32.650.000**	**32.650.000**	**100**	**-**	**-**
1.4.1	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	32.650.000	32.650.000	100	-	-
1.5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**484.581.400**	**483.022.611**	**99.68**	**-**	**-**
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	14.356.400	14.356.400	100	-	-
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	188.236.100	187.645.670	99.69	-	-
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	2.700.000	2.700.000	100	-	-
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	24.000.050	23.945.000	99.56	-	-
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	54.802.400	54.802.400	100	-	-
1.5.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1.165.000	525.000	45.06	Tidak Berlangganan	-
1.5.7	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	2.521.500	2.521.500	100	-	-
1.5.8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39 Laoran	39 Laoran	100	196.750.000	196.526.641	99.89	-	-
1.6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Sasaran:** **Tersedianya Printer, PC dan Laptop**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	66.67	**32.977.600**	**11.100.000**	**33.66**	Laptop Tidak Dibelanjakan Karena Harga DPA Lebih Rendah Dari Harga Pasar (2 Unit)	Penyesuaian Standar Harga dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Untuk Tahun Tahun Selanjutnya

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Anggaran	Realisasi	%	Permasalahan	Solusi
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	4 unit	66.67	32.977.600	11.100.000	33.66	Laptop Tidak Dibelanjakan Karena Harga DPA Lebih Rendah Dari Harga Pasar (2 Unit)	Penyesuaian Standar Harga dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Untuk Tahun Tahun Selanjutnya
1.7	**Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran:** **Tersedianya Materai, Jasa Pengiriman, Rekening Listrik, Rekening Air dan Internet**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**29.670.000**	**22.320.700**	**75.23**	**-**	**-**
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	100	3.670.000	3.665.000	99.86	-	-
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan	100	26.000.000	18.655.700	71.75	Pembayaran Dilakukan Secara Bersama Antara Badan Pendapatan Dan Badan Keuangan	Melakukan Koordinasi Dengan Badan Keuangan
1.8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Kendaraan Dinas, Peralatan dan Gedung yang berfungsi baik**	**1 tahun**	**1 tahun**	100	**113.039.475**	**79.923.750**	**70.70**	**-**	**-**
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang berfungsi baik	25 unit (Roda 2), 1 Unit (Roda 4)	20 unit	76.92	57.089.475	49.286.750	86.33	Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (1 Unit) dan Roda (5 Unit) Tidak Terpakai	Penyesuaian Secara Rill Perencanaan Anggaran dan Jumlah Kendaraan Yang Ada
1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Komputer dan Laptop	8 unit	8 unit	100	35.950.000	10.945.000	30.45	Tidak Dibelanjakannya Biaya Pemeliharaan Aplikasi SIMPATDA	Kembali Dianggarkan untuk tahun berikut
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Tersedianya Gedung Kantor yang layak	1 Paket	1 Paket	100	20.000.000	19.691.000	98.46	-	-
2	**Program** **Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.395.188.086**	**1.371.179.210**	**98.28**	**-**	**-**
2.1	**Kegiatan:** **Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Tersedianya Data dan Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.395.188.086**	**1.371.179.210**	**98.28**	**-**	**-**
2.1.1	Sub Kegiatan: Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					44.350.000	43.784.900	98.73	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Anggaran	Realisasi	%	Permasalahan	Solusi
2.1.2	Sub Kegiatan: Penyediaan Saran dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1 Unit		368.311.250	356.311.250	96.74	-	-
2.1.3	Sub Kegiatan: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajaka Daerah	Terssedianya Data Pajak dan Retribusi daerah	1 Tahun	1 Tahun	25.68	68.215.000	68.175.000	99.94	-	-
2.1.4	Sub Kegiatan: Penetapan Wajib Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan BPHTB Tersedianya Dokumen SPPT,STTS, DHKP,TTS, DPH dan Surat Keterangan BPHTB Tersedianya SKPD, SKRD, SSPD dan SSRD	1 Tahun	1 Tahun	135.8	182.280.100	174.480.100	95.72	-	-
2.1.5	Sub Kegiatan: Penagihan Pajak Daerah	Tercapainya Realisasi Penagihan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun	54	658.584.736	655.275.960	99.50	-	-
2.1.6	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tercapainya Target Pajak dan Retribusi serta tersedianya ASN yang berkompeten dan berdaya saing	1 Tahun dan 9 orang	1 Tahun dan 9 orang	100	73.447.000	73.152.000	99.60	-	-
	JUMLAH				**100**	**5.719.345.418**	**5.029.493.252**	**87.94**		

4. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Manggarai. Dalam perjanjian kinerja tahun 2022 menetapkan sasaran strategis **'Optimalnya Pelaksanaan Sistem Merit Dalam Manajemen Kepegawaian'** dengan 6 indikator kinerja. Capaian setiap indikator kinerja dijelaskan dalam tabel 3.146.

Tabel 3.146
Pengukuran Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Indeks Profesionalitas Pegawai	71 (Sedang)	47,73	67,73
2	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan	7,55%	5,12%	67,81
3	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi	85,50%	81,65%	95,50
4	Persentase Pegawai yang memiliki nilai SKP minimal baik	85,41%	87.05%	101,92
5	Tingkat pelanggaran disiplin pegawai	0,09	0,02	22,22
6	Persentase distribusi pegawai sesuai kebutuhan	100%	100%	100
	Rata – rata			**75,78**
	Kategori			**Baik**

Sumber: BKPSDMD Kab. Manggarai, Januari 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Standar Indeks profesionalitas** aparatur meliputi 4 dimensi yaitu kualifikasi pendidikan, kompetensi, penilaian kinerja dan tingkat disiplin aparatur. Ke 4 dimensi ini sudah mencakupi seluruh program prioritas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bertujuan agar Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara benar dan akurat. Capaian Indeks Profesionalitas Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai mencapai **43,73%.** Hasil Indeks Profesionalitas Pegawai ini diambil dari Aplikasi pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui link sistem informasi Indeks

Profesionalitas ASN dari Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara. Capaian 43,73% ini dikategorikan sangat rendah, dari keempat dimensi tersebut dimensi kompetensi yang memiliki bobot paling besar penyebab rendahnya dimensi ini karena adanya refocusing anggaran besar-besaran sehingga banyak anggaran terpangkas untuk kegiatan-kegiatan diklat, seminar dan sebagainya.

- **Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan**

  Kompetensi ASN merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran. Pegawai ASN Kabupaten Manggarai telah diikutkan berbagai diklat baik diklat penjenjangan (PIM), seleksi terbuka maupun diklat teknis fungsional.

  - Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

    Tahun 2021 Jumlah CPNS yang dikirim ke Propinsi untuk mengikuti Diklat Prajabatan sejumlah 199 (100%) dari target 199 orang sedangkan pada tahun 2022 sejumlah 178 orang dari target 209 orang.
  - Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM II sebanyak 2 Orang
  - Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional sebanyak 7 Orang
  - Jumlah ASN yang mengikuti seleksi terbuka sebanyak 40 Orang

  Realisasi dari indikator ini mencapai 4,46% dari target 7,55% atau sebesar 59,07% hasil ini didapat dari total jumlah ASN yang memiliki kompetensi sebanyak 227 orang di bagi jumlah seluruh ASN sebanyak 5.089 orang (PNS + PPPK)

- **Persentase ASN yang memiliki Kulifikasi Pendidikan Tinggi**

  Jumlah Aparatur Sipil Negara PNS yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi pada Tahun 2022 mulai dari jenjang Pendidikan DI, DII, DIII/Sarjana Muda, S1 dan S2/Profesi sebanyak 3.617 orang dari

4.430 PNS. Sedangkan untuk PPPK yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi mulai dari DI, DII, DIII/Sarjana Muda, S1 sebanyak 644 Orang dari 659 Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Formulasi perhitungan ASN yang memiliki kualifikasi Pendidikan Tinggi didapat dari Jumlah ASN yang memiliki Kualifkasi Pendidikan Tinggi dibagi dengan Jumlah seluruh Pegawai (ASN). Realisasi dari indikator ASN yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi di Tahun 2022 mencapai 83,72% dari Target sebesar 85,50% atau dalam persentase sebesar 97,92%

- **Persentase Pegawai yang memiliki nilai SKP minimal baik**

  Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ini menjadi penting untuk menjamin objektifitas pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian selama satu tahun.

  Penyusunan SKP ini diwajibkan bagi seluruh ASN seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pengganti Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen PNS. Realisasi Capaian Indikator Kinerja di tahun 2022 mencapai 87,05% dari target 85,41 %, hasil ini didapat dari Total Pegawai yang wajib membuat SKP dibagi Jumlah seluruh ASN.

- **Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai**

  Disiplin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Penegakan kedisiplinan pegawai merupakan sesuatu yang penting bagi suatu organisasi, karena dengan adanya kedisiplinan akan membuat pekerjaan yang dilakukan semakin efektif dan efisien.

  Adapun perbandingan tingkat kedisiplinan Pegawai pada tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut:

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin aparatur (pelanggaran kasus-kasus disiplin)	30 orang	30 orang	100%	11 Orang	11 Orang	100
Jumlah PNS yang menerima penghargaan (satyalencana)	200 orang	196 orang	98%	111 Orang	176 Orang	158,56
Rata-rata			99			129,28

❖ **Persentase Distribusi Pegawai Sesuai Kebutuhan**

Pada tahun 2022 realisasi distribusi pegawai mencapai 100 % dari target yang di tetapkan sebesar 100%. Formulasi capaian dari indikator ini didapat dari jumlah distribusi pegawai sesuai kebutuhan dibagi dengan jumlah seluruh distribusi pegawai dan dikali kan 100%. Total pendistribusian pegawai di tahun 2022 sebanyak 827 orang dengan rincian distribusi pegawai tahun 2022 berdasarkan Administrasi mutasi kepegawaian sebagai berikut:

- Jumlah pegawai pindah masuk 17 orang
- Jumlah pegawai pindah keluar 6 orang
- Jumlah pegawai pindah antar unit 145 orang
- Jumlah PPPK 659 orang

Penjelasan tambahan dari beberapa indikator diatas keadaan di tahun 2022:

- Pada tahun 2022 tidak ada seleksi CPNS
- Seleksi PPPK Kesehatan dengan kuota 200 orang dan yang lulus sebanyak 186 orang;
- Realisasi Untuk PNS Peserta Tugas belajar dan Ikatan Belajar pada tahun 2022 sebanyak 28 orang atau sebesar 84,85% dari target 33 orang, dengan rincian tugas belajar spesialis 6 orang, ikatan belajar mahasiswa kedokteran 22 orang.
- Jumlah PNS yang mendapat SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Berkala, SK Mutasi Pindah Masuk/Keluar dan Ujian Dinas sebanyak 1.707 orang.

- Jumlah PNS yang mendapat SK Pensiun pada tahun 2022 adalah sebanyak 237 orang terdiri dari BUP 209 orang , janda/duda 28 orang atau sebesar 116,75%.
- Jumlah PNS yang mendapat Kartu Identitas PNS sebanyak 1.218 orang.

b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, BKPSDM Kabupaten Manggarai melaksanakan 2 program, 9 kegiatan dan 27 subkegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.117.422.664,- realisasi sebesar Rp.6.575.328.420,- atau sebesar 92,38%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.147.

Tabel 3.147
Anggaran BKPSDM Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**7.057.902.664**	**6.573.808.420**	**93,14**
	Belanja Pegawai	2.391.992.468,-	2.341.302.869,-	97,93
	Belanja Barang dan Jasa	4.665.910.196,-	4.232.505.551,-	90,69
2.	**Belanja Modal**	**59.520.000,-**	**1.520.000,-**	**2,55**
	TOTAL	**7.117.422.664,-**	**6.575.328.420,-**	**92,38**

Sumber: BKPSDM Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.148.

Tabel 3.148
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2022

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**	**1 tahun**	**1 tahun**		**2.774.636.214**	**2.693.930.109**	**97,09**	**-**	**-**
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya bahan evaluasi PD**	**7 Laporan**	**7 Laporan**	**100**	**1.100.000**	**1.100.000**	**100**	**-**	**-**
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	7 Laporan	7 Laporan	100	1.100.000	1.100.000	100	-	-

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi keuangan PD**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**2.389.492.468**	**2.340.802.899**	**97,96**	-	-
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji	31 Orang/Bu	30 Orang/Bulan	96,77	2.363.892.468	2.315.202.899	97,74	-	-
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen SPP,SPM	2 dokumen	2 dokumen	100	25.600.000	25.600.000	100	-	-
1.2.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum PD	1 tahun	1 tahun	100	279.015.624	278.360.879	99,77	-	-
1.2.4	Sub kegiatan Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik kantor/penerangan bangunan kantor	2 Paket	2 Paket	100	3.230.000	3.225.000	99,85	-	-
1.2.5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	2 Paket	2 Paket	100	87.423.000	87.423.000	100	-	-
1.2.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman harian	2 Paket	2 Paket	100	18.000.000	18.000.000	100	-	-
1.2.7	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100	54.057.300	54.057.300	100	-	-
1.2.8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan kantor	1 Paket	1 Paket	100	32.725.324	32.490.340	99,28	-	-
1.2.9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen hasil rakor dan konsultasi	7 dokumen	7dokumen	100	83.580.000	83.165.239	99,50	-	-
1.3	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya kebutuhan jasa penunjang urusan PD**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**77.528.122**	**49.129.731**	**63,37**		
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	100	10.900.000	4.094.011	37,56	Kelengkapan dokumen kepegawaian diantar saat bertugas hanya beberapa dokumen saja yang dikirim melalui jasa pengiriman	-

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, listrik, air dan internet	48 Laporan	48 laporan	100	66.628.122	45.035.720	67,59	-	-
1.3.3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berfungsinya peralatan barang milik daerah	1 tahun	1 tahun	100	27.500.000	24.536.600	89,22	-	-
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang baik	6 unit	6 unit	100	20.000.000	19.551.600	97,76	-	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang baik	37 unit	23 unit	62,16	7.500.000	4.985.000	66,47	-	-
2	**Program Kepegawaian Daerah**		**1 tahun**	**1 tahun**		**4.342.786.450**	**3.881.398.311**	**89,38**		
		Indeks Profesionalitas Pegawai	71 Sedang	1 tahun	47,73				Data diambil berdasarkan Aplikasi dari BKN	
		Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan	7,55	1 tahun	5,12%					
		Persentase ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi	85,50	1 tahun	81,65					
		Persentase Pegawai yang memiliki nilai SKP minimal baik	85,41	1 tahun	87,05					
		Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,09	1 tahun	0,02				Terhitung ada 11 Orang pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin	Dari 11 kasus pelanggaran semuanya diselesaikan dengan baik Realisasi Target berdasarkan DPA 100%
2.1	**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Terwujudnya pengadaan,pemberhentian dan tersedianya informasi kepegawaian ASN**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**360.255.650**	**246.391.149**	**68,39**		
2.1.1	Sub kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah kuota CASN dan PPPK	230 Dokumen	230 Dokumen	80,87	247.701.550	149.229.328	60,25	Belanja Genset dibatalkan karena tidak sesuai dengan spec.	

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
2.1.2	Sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah ASN yang pensiun/janda, Duda	230 Dokumen	237 Dokumen	103,04	47.415.500	33.374.992	70,39	-	-
2.1.3	Sub kegiatan Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Terupdatenya data pegawai pada aplikasi SAPK	4.259 Dokumen	3.635 Dokumen	85,35	30.052.000	29.772.000	99,07	-	-
2.1.4	Sub kegiatan Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah ASN yang mendapat kartu Taspen,karis,karsu dan karpeg	300 Dokumen	1.218 Dokumen	406,00	17.594.600	17.308.029	98,37	-	-
2.1.5	Sub kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga yang di fasilitasi	100 Lembaga	1 Lembaga	0,01	17.492.600	16.706.800	95,51	-	-
2.1.6	Kegiatan Mutasi Promosi ASN	Terlaksananya mutasi promosi ASN	1 tahun	1 tahun	100	526.260.000	298.113.181	56,65		
2.1.7	Sub kegiatan Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah ASN yang naik pangkat,berkala dan mutasi	1.130 Dokumen	1.335 Dokumen	118,14	123.994.000	120.472.981	97,16		
2.1.8	Sub kegiatan Pengelolaan promosi asn	Jumlah ASN yang dipromosi	1.090 Dokumen	573 orang	52,57	402.266.000	177.640.200	44,16	Kegiatan assessment JPT ditunda.	
2.1.9	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Terwujudnya ASN yang memiliki kompetensi dibidangnya	1 tahun	1 tahun	100	3.360.929.900	3.263.504.535	97,10	-	-
2.1.10	Sub kegiatan Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar dan ikatan belajar yang memiliki ijasah ditahun berjalan	33 orang	28 orang	84,85	1.099.755.400	1.057.055.087	96,12	-	-
2.1.11	Sub kegiatan Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Jumlah peserta latsar	179 Dokumen	178 orang	99,44	1.922.078.000	1.910.119.101	99,38	-	-
2.1.12	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah peserta latsar	2 Orang	2 orang	100	231.272.000	193.561.981	83,69	-	-
2.1.17	Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah peserta latsar	7 Dokumen	7 Dokumen	100	86.420.500	81.365.144	94,15	-	-
2.1.18	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah peserta latsar	2.552 Orang	2.552 orang	100	21.404.000	21.403.222	100	-	-
2.1.19	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terwujudnya ASN yang mendapat reward dan punishment	1 tahun	1 tahun	100	95.340.900	73.389.446	76,98	-	-
2.1.20	Sub kegiatan Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	Jumlah ASN penerima penghargaan	100 orang	176 orang	176	21.740.000	21.740.000	100	-	-

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
2.1.21	Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin	11 Orang	11 Orang	100	73.600.900	51.649.446	70,18	-	-
	Jumlah					**7.117.422.664**	**6.575.328.420**	**92,38**		

Sumber: BKPSDM Kab. Manggarai, Jan 2023

5. Urusan Pengawasan

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2022, Inspektorat menetapkan sasaran strategis **'Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih dan Bertanggung Jawab'**, dengan capaian indikator kinerja seperti pada tabel 3.149.

Tabel 3.149
Pengukuran Kinerja Urusan Pengawasan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Rumus Pengukuran Indikator
1.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	77,34% (871)	71,25 % (582)	92,13	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti *dibagi* total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI) x 100%
2.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	39,29% (3.288)	47,26 % (3.956)	120,28	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti *dibagi* total rekomendasi hasil pemeriksaan APIP) x 100%
3.	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	100% (10)	100 % (10)	100	(Jumlah pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti *dibagi* total pengaduan masyarakat) x 100%
4.	Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan Pengawasan	50% (478)	46,86 % (224)	93,72	(Jumlah Obyek Pengawasan Yang ditindaklanjuti *dibagi* Jumlah Obyek Pemeriksaan 2022) x 100%
5.	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	-	Level Tertinggi adalah Level 5
6.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	-	Level Tertinggi adalah Level 5
	Rata-rata Capaian			101,53	
	Kategori		Memuaskan		

Sumber: Inspektorat Kab. Manggarai, Januari 2023

Berikut penjelasan atas capaian setiap indikator:

- **Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal**

  Data temuan hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Manggarai sejak tahun pemeriksaan 2005 s/d 2022 dan perkembangan realisasi tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi temuan hasil pemeriksaan tersebut keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagaimana tabel 3.150.

Tabel 3.150
Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Sampai Akhir Tahun 2022

Tahun IHPS	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti Dengan Alasan yang Sah
2005	9	19	19	0	0	0
2006	18	33	29	4	0	0
2007	24	35	31	3	0	1
2008	14	29	29	0	0	0
2009	33	83	69	11	2	1
2010	18	42	40	1	0	1
2011	21	57	36	21	0	0
2012	32	113	77	35	1	0
2013	32	78	53	25	0	0
2014	15	34	19	15	0	0
2015	19	48	31	1	16	0
2016	23	72	48	22	2	0
2017	16	40	22	17	1	0
2018	18	42	24	16	2	0
2019	10	18	12	6	0	0
2020	10	22	16	6	0	0
2021	24	38	20	7	11	0
2022	7	14	7	7	0	0
Jumlah	343	817	582	197	35	3
Persentasi	71,24%					

Terdapat 817 buah rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT atas 343 buah temuan dalam pemeriksaannya, yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai sebanyak 582 buah rekomendasi.

Rumusan Indikator :

$$= \frac{\textit{jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai akhir Tahun 2022}}{\textit{jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI sampai dengan akhir Tahun 2022}} \times 100\%$$

$$= \frac{582}{871} \times 100\% = 71{,}24\%$$

Capaian kinerja sebesar 71,24% merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan pada aspek efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD untuk fokus: pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten

- **Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal**

Data temuan hasil pemeriksaan APIP pada Pemerintah Kabupaten Manggarai sampai dengan Tahun 2022 dan perkembangan realisasi tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi temuan hasil pemeriksaan tersebut keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disajikan pada tabel 3.151.

Tabel 3.151
Hasil Pemeriksaan APIP
Keadaan s.d. 31 Desember 2022

No.	NAMA APFP	Jml LHP	Temuan	Saran	Selesai	% Selesai	Dalam Proses	Belum
A	B	C	d	E	G	H=(g/e)x100	I	J
1.	BPKP PERWAKILAN PROVINSI NTT	188	453	605	404	66,78%	22	181
2.	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI /KEMENTERIAN TEKNIS	8	38	61	25	40,98%	21	15
3.	INSPEKTORAT PROVINSI NTT	85	552	720	476	66,11%	38	206
4.	INSPEKTORAT DAERAH KAB. MANGGARAI	1.326	5.049	6.985	3.051	43,68%	3.194	3.194
	JUMLAH	**1.607**	**6.092**	**8.371**	**3.956**	**47,26%**	**1.282**	**3.133**

Keadaan sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat 8.371 buah rekomendasi yang diberikan oleh APIP atas 6.092 buah temuan dalam pemeriksaannya, yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh OPD/Obrik lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai sebanyak 3.956 buah rekomendasi.

Rumusan Indikator:

$$= \frac{jumlah\ rekomendasi\ atas\ temuan\ APIP\ yang\ ditindaklanjuti\ sampai\ akhir\ Tahun\ 2022.}{jumlah\ rekomendasi\ atas\ temuan\ APIP\ sampai\ dengan\ akhir\ Tahun\ 2022} \times 100\%$$

$$= \frac{3.956}{8.371} \times 100\% = 47{,}26\%$$

- **Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti**

  Data pengaduan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Manggarai selama Tahun 2022 keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

  Pengaduan Masyarakat sebanyak 10 buah Pengaduan

  Rumusan Indikator :

$$= \frac{jumlah\ pengaduan\ masyarakat\ yang\ ditindaklanjuti\ sampai\ akhir\ Tahun\ 2022}{jumlah\ Pengaduan\ sampai\ dengan\ akhir\ Tahun\ 2022} \times 100\%$$

$$= \frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

- **Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan Pengawasan**

  Data pengaduan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Manggarai selama Tahun 2022 keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

  Obyek Pemeriksaan Yang dilakukan Pengawasan 224 Obyek Pengawasan dari 478 Obyek Pengawasan

  Rumusan Indikator :

$$= \frac{jumlah\ obyek\ yang\ dilakukan\ pengawasan\ sampai\ akhir\ Tahun\ 2022}{jumlah\ Obyek\ Pengawasan\ Tahun\ 2022} \times 100\%$$

$$= \frac{224}{478} \times 100\% = 46{,}86\%$$

b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada Tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Manggarai melaksanakan melaksanakan 3 program dan 10 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.507.249.969,- realisasi sebesar Rp.3.482.800.198,- atau sebesar 959,30%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.152.

Tabel 3.152
Anggaran Inspektorat Kabupaten Manggarai Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**3.498.484.169,00**	**3.473.989.398,00**	**99,30**
	Belanja Pegawai	2.505.425.045,00	2.495.956.707,00	99,62
	Belanja Barang dan Jasa	993.059.124,00	978.032.691,00	-
2.	**Belanja Modal**	**8.810.800,00**	**8.810.800,00**	**-**
			8.810.800,00	100
	TOTAL	**3.507.294.969,00**	**3.482.800.198,00**	**99,30**

Sumber: Inspektorat Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.153.

Tabel 3.153
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Pengawasan Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Sasaran : Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Internal dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP**	**1 Tahun**	**1 Tahun**		**590.290.000**	**581.636.300**	**100**	-	-
1.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Terwujudnya Tata Pemerintah Yang Baik Efektif dan Efisien, Tindak Lanjut Rekemendasi Hasil Pengawasan Internal**	**100%**	**100%**	**100**	**491.284.000**	**482.630.300**	**98,24**	-	-
1.1.1	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dan Reviuw	4 Laporan	4 Laporan	100	40.526.000	40.526.000	100	-	-
1.1.2	Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dan Reviuw	2 Laporan	2 Laporan	100	21.356.000	21.356.000	100	-	-
1.2.3	Sub Kegiatan : Reviuw Laporan Kinerja	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dan Reviuw	7 Laporan	7 Laporan	100	39.626.500	39.626.500	100	-	-
1.1.4	Sub Kegiatan : Reviuw Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dan Reviuw	5 Laporan	5 Laporan	100	33.922.500	32.922.500	97,05	-	-
1.1.5	Sub Kegiatan : Pengawasan Desa	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dan Reviuw	19 Laporan	19 Laporan	100	190.004.000	189.504.000	100	-	-
1.1.6	Sub Kegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dan Reviuw	6 Laporan	6 Laporan	100	80.803.000	74.499.300	92,20	-	-
1.1.7	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tersedianya Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekternal dan Intenal	10 Laporan	10 Laporan	100	85.046.000	84.196.000	99,00	-	-
1.2	**Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Terwujudnya Tata Pemerintah Yang Baik Efektif dan Efisien, Tindak Lanjut Rekemendasi Hasil Pengawasan Internal**	**100%**	**100%**	**100**	**99.006.000**	**99.006.000**	**100,00**	-	-
1.2.1	Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan	2 Laporan	2 Laporan	100	3.600.000	3.600.000	100,00	-	-
1.2.2	Sub Kegiatan :Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dan Pemsus	10 Laporan	10 Laporan	100	95.406.000	95.406.000	100,00	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
2	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**3.175.326.783**	**3.003.533.457**		**-**	**-**
2.1	**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan Doukmen Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Evaluasi**	**100%**	**100%**	**100**	**13.273.750**	**9.573.750**	**72,13**	**-**	**-**
2.1.1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Dokumen Renstra	1 Laporan	1 Laporan	100	2.072.550	2.072.550	100,00	-	-
2.1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Doukmen Renstra, Renja, LKIP, LKPJ dan LPPD	3 Laporan	3 Laporan	100	1.001.200	1.001.200	100,00	-	-
2.1.3	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi	6 Laporan	6 Laporan	100	10.200.000	6.500.000	63,73	-	-
2.2	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**100**	**2.918.889.633**	**2.768.601.327**	**94,85**	**-**	**-**
2.2.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan OPD berjalan Optimal	1 Tahun	1 Tahun	100	2.860.604.309	2.710.549.511	94,75	-	-
2.2.2	Sub Kegiatan : Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji dan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan OPD berjalan Optimal	8 Orang	8 Orang	100	58.285.324	58.051.816	99,60	-	-
2.3	**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**100**	**35.500.000**	**18.780.000**	**52,90**	**-**	**-**
2.3.1	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Mesin Absensi dan Diklat Jabatan Fungsional							-	-
2.3.2	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Tenaga Fungsional Auditor dan PPUPD	6 Orang	6 Orang	100	35.500.000	18.780.000	52,90	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
2.4	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**100**	**137.343.400**	**137.235.975**	**100**	-	-
4.4.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penerangan Listrik Kantor Berfungsi Optimal	4 Buah	4 Buah	100	1.455.000	1.455.000	100,00	-	-
2.4.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersdianya Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	34 Buah	34 Buah	100	38.872.500	38.872.500	100,00	-	-
2.4.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian dan Rapat	3200 Org	3200 Org	100	21.000.000	21.000.000	100,00	-	-
2.4.4	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	100	7.038.900	7.038.900	100,00	-	-
2.4.5	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-		-			-	-
2.4.6	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor	16 Jenis	16 Jenis	100	2.677.000	2.677.000	100,00	-	-
	Sub Kegiatan : Peny	Tersedianya Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Regional dan Pusat	7 Laporan	7 Laporan	100	66.300.000	66.192.575	99,84	-	-
2.5	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**100**	**19.200.000**	**19.200.000**	**100**	-	-
2.5.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Administrasi SPJ dan Pengiriman Dokumen berjalan Lancar	2 Jenis	2 Jenis	100	3.400.000	3.400.000	100,00	-	-
2.5.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terjamin ketersedian Jasa Komunikasi, Air dan Listrik untuk keperluan Kantor	4 jenis	4 jenis	100	15.800.000	15.800.000	100,00	-	-
2.6	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**100**	**51.120.000**	**50.142.405**		-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
2.6.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan	Berfungsinya kendaraan Dinas/Operasional secara Optimal.	11 Unit	11 Unit	100	39.000.000	38.022.405	97,49	-	-
2.6.2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Berfungsinya Peralatan kerja yang baik	3 Jenis	3 Jenis	100	12.120.000	12.120.000	100,00	-	-
2.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Berfungsinya Gedung Kantor Secara Optimal							-	-
	TOTAL					**3.507.294.969,-**	**3.482.800.198,-**	**99,30**		

Sumber: Inspektorat Kab. Manggari, Januari 2023

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Penunjang Pemerintahan Umum salah satunya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan dalam tabel 3.154

Tabel 3.154
Pengukuran Kinerja Urusan Pemerintahan Umum

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target	Realisasi	%
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*
1.	Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan Kemasyarakatan	1.1.	Jumlah kasus yang dimediasi penyelesaiannya	12 Kasus	6 Kasus	50
		1.2.	Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP)	15 Kali	20 Kali	133
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, Pilkada, PiLeg) dan Kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi Politik	2.1.	Jumlah Peserta sosialisasi kehidupan beragama, solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa	50 (Peserta)	49 (Peserta)	98
		2.2.	Jumlah peserta sosialisasi Politik, Undang-undang Politik dan HAM	50 Orang	49 Orang	98
	Rata-rata					94,75
	Kategori				Sangat Baik	

Sumber: Badan Kesbangpolda, Januari 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Kasus yang Dimediasi Penyelesaiannya**

  Pada Tahun 2022 Kasus yang dimediasi penyelesaiannya sebanyak 6 kasus dari target 12 Kasus selama tahun 2022 atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 50%.

- **Jumlah Pengamanan Tertutup (Pamtup)**

  Selama tahun 2022 jumlah pengamanan tertutup yang telah dilaksanakan sebanyak 20 kali dari target 15 kali selama tahun 2022 atau dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 133,33%.

- **Jumlah Peserta Sosialisasi Kehidupan Beragama, Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat dan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa.**

  Jumlah Peserta sosialisasi kehidupan beragama, solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa. Pada Tahun 2022 Kesbangpolda menyelenggarakan 2 kali Kegiatan Sosialisasi terdiri dari:

  - Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dengan jumlah peserta 49 (LIhat daftar hadir di Cancar) orang dari target 50 orang. Kegiatan ini melibatkan usur Pemerintahan Desa, Pelajar, tokoh masyarakat dengan narasumber akademisi dan unsur Pemerintahan. Adapun tingkat capaiannya sebesar 98%.
  - Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan 49 Orang dari target 50 orang atau mencapai 98%

b) **Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan 6 program dan 11 kegiatan. dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.3.231.096.147.-** realisasi sebesar **Rp.3.131.154.829.-** atau sebesar **69.55%.** Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.155.

Tabel 3.155
Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**3.231.096.147.-**	**3.087.856.798.-**	**95.57**
	Belanja Pegawai	1.419.349.763.-	1.361.901.642.-	95.95
	Belanja Barang dan Jasa	1.233.038.824.-	1.161.675.836.-	94.21
	Belanja Hibah	578.707.560.-	564.279.320.-	97.51
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**3.231.096.147.-**	**3.087.856.798.-**	**95.57**

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.156.

Tabel 3.156
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Badan Kesbangpol Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja**				**1.529.906.263**	**1.472.120.642**	**96,22**	-	-
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20**	**20**	**100**	**12.211.000**	**12.211.000**	**100**	-	-
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Dokumen Renstra dan Renja 2. Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	14	14	100	11.211.000	11.211.000	100	-	-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP, RKT, PK, RENCANA AKSI, LPPD, LKPJ	6	6	100	1.000.000	1.000.000	100	-	-
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**20**	**20**	**100**	**1.423.549.763**	**1.366.101.642**	**95,96**	-	-
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	14	14	100	1.397.749.763	1.340.301.642	95,89	-	-
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola APBD	6	6	100	25.800.000	25.800.000	100	-	-
1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang optimal**	**19.631**	**19.631**	**100**	**83.045.500**	**83.035.500**	**99,99**	-	-
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8	8	100	1.030.000	1.030.000	100	-	-
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor dan Kertas	61	61	100	31.763.000	31.763.000	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Makan Kantor, 2. Minum Kantor	1160	1160	100	14.800.000	14.800.000	100	-	-
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Barang Cetakan, 2. Barang Penggandaan	18380	18380	100	9.490.000	9.490.000	100	-	-
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan/ Surat kabar	1	1	100	840.000	840.000	100	-	-
1.3.6	Penyediaan Bahan/Material	Alat Kebersihan Kantor	13	13	100	1.022.500	1.022.500	100	-	-
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sinkron Program Pusat, Provinsi dan Daerah	8	8	100	24.100.000	24.090.000	99,96	-	-
1.4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33**	**33**	**100**	**11.100.000**	**10.772.500**	**97,05**	-	-
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	30	30	100	300.000	300.000	100	-	-
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Internet, Listrik dan Air	3	3	100	10.800.000	10.472.500	96,97	-	-
1.4.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		35	35	100	76.977.324	76.751.836	99,71	-	-
1.4.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. BBM, Penggantian Suku Cadang, Pajak Kendaraan Roda 4, 2. BBM, Penggantian Suku Cadang, Pajak Kendaraan Roda 2, 3. Gaji, Iuran Kesehatan, JKK, JKM dan Tambahan Penghasilan THL	21	21	100	63.727.324	63.501.836	99,65	-	-
1.4.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer, printer dan Laptop	13	13	100	3.250.000	3.250.000	100	-	-
1.4.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor	1	1	100	10.000.000	10.000.000	100	-	-
2	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**MENINGKATNYA PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**-**	**607.227.560**	**590.499.320**	**97,25**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
2.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	**Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	**38**	**36**	**94,74**	**607.227.560**	**590.499.320**	**97,25**	-	-
2.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik	9	8	88,89	14.935.000	12.635.000	84,6	-	-
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik, 2. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	29	28	96,55	592.292.560	577.864.320	97,56	-	-
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**-**	**8.500.000**	**8.500.000**	**100**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
3.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**10**	**10**	**100**	**8.500.000**	**8.500.000**	**100**	-	-
3.1.1	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	pelaksanaan pemberdayaan Evaluasi dan pengawasan ormas	10	10	100	8.500.000	8.500.000	100	-	-
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**-**	**63.790.000**	**63.790.000**	**100**	-	-
4.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**48**	**48**	**100**	**63.790.000**	**63.790.000**	**100**	-	-
4.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesadaran masyarakat akan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	48	48	100	63.790.000	63.790.000	100	-	-
5	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**MENINGKATNYA KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**-**	**944.695.000**	**876.195.000**	**92,75**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
5.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**162**	**162**	**100**	**944.695.000**	**876.195.000**	**92,75**	-	-
5.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.Pengamatan dan Pemantauan secara cepat dan tepat hal yang mengarah ke gangguan kantrantibmas, 2.Terpantau dan terdatanya Aktifitas orang asing dan lembaga asing, 3.Ketertiban dan Kemanan Masyarakat	115	115	100	327.730.000	326.730.000	99,69	-	-
5.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Data dan Informasi yang akurat	11	11	100	13.700.000	13.700.000	100	-	-
5.1.3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Koordinasi Forkompimda	36	36	100	603.265.000	535.765.000	88,81	-	-
					99,99	**3.231.096.147**	**3.087.856.798**	**95,57**		

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Manggarai, Jan 2023

6. Urusan Sekretariat DPRD

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022, menetapkan sasaran strategis 'Terwujudnya Peningkatan Kepuasaan Pelayanan DPRD', dengan indikator "Prosentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan ungsi DPRD sesuai Standar", dengan target 30 dan realisasi sebesar 30 atau 100%. Indikator ini didukung dengan beberapa variabel kunci, yang tersaji pada tabel 3.157.

Tabel 3.157
Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*4*	*5*	*6*
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat, koordinasi dan konsultasi DPRD	129	132	102
2.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	15	15	100
3.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	13	6	46
4.	Tenaga Ahli Fraksi	8	8	100
5.	Kunjungan Kerja dalam daerah	12	16	133
6.	Pelaksanaan Reses	3	3	100
	Rata-rata			96
	Kategori		Baik	

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Manggarai, Januari 2023

b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada Tahun 2022, Sekretariat DPRD melaksanakan 2 Program, 11 kegiatan dan 28 subkegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.944.736.116,- realisasi sebesar Rp.31.764.657.710,- dengan tingkat capaian sebesar 90,90%. Ringkasan anggaran disajikan dalam tabel 3.158.

Tabel 3.158
Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**34. 926.810.296**	**31.746.731.890**	**90,90**
	Belanja Pegawai	19.519.846.572	18.412.988.855	94,33
	Belanja Barang dan Jasa	15.406.963.724	13.333.743.035	87,00
2.	**Belanja Modal**	**17.925.820**	**17.925.820**	**100**
	TOTAL	**34.944.736.116**	**31.764.657.710**	**90,90**

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan, sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.159.

Tabel 3.159
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD
Tahun 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda**				**23.932.378.706**	**22.174.223.096**	**92,65**	-	-
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**112.395.000**	**103.815.000**	**92,37**	-	-
1.1.1	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah				110.680.000	102.100.000	92,25	-	-
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	1 tahun	100	1.715.000	1.715.000	100,00	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**2.023.255.599**	**1.956.777.729**	**96,71**	-	-
1.2.1	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji bagi ASN	1 Tahun	1 Tahun	100	1.937.128.275	1.871.856.729	96,63	-	-
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100	86.127.324	84.921.000	98,60	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan adm perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**1.817.498.900**	**1.807.197.540**	**99,43**	-	-
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100	196.173.000	196.173.000	100,00	-	-
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100	1.212.000.000	1.211.520.000	99,96	-	-
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	100	99.145.900	99.145.900	100,00	-	-
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	100	10.080.000	3.360.000	33,33	Pengurangan / Pembatasan Jumlah atau Volume langgaran	Penyesuaian kembali volume langganan di Tahun 2023
1.3.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	100	300.100.000	296.998.640	98,97	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.4	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan adm perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**5.775.820**	**5.775.820**	**100**		
1.4.1	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terbangunnya fasilitas pendukung gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	100	5.775.820	5.775.820	100	-	-
1.5	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**263.800.000**	**211.333.408**	**80,11**	-	-
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	100	7.200.000	6.000.000	83,33		
1.5.2	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya sumberdaya listrik dan air	1 Tahun	1 Tahun	100	111.600.000	60.333.408	54,06	real cost	Dilakukan Penyesuaian kembali anggaran di Tahun 2023
1.5.3	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terwujudnya kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	100	145.000.000	145.000.000	100,00		
1.6	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**191.007.500**	**182.416.472**	**95,50**	-	-
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	1 Tahun	100	42.300.000	39.502.000	93,39	-	-
1.6.2	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya kendaraan dinas operasional / lapangan	1 Tahun	1 Tahun	100	41.000.000	36.498.372	89,02		
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	1 Tahun	1 Tahun	100	17.707.500	17.450.000	98,55		
1.6.4	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	100	90.000.000	88.966.100	98,85	-	-
1.7	**Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Cakupan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	**35 orang**	**35 orang**	**100**	**17.910.418.297**	**16.849.547.481**	**94,08**	-	-
1.7.1	Sub Keg. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	tersedianya gaji dan tunjangan DPRD	35 orang	35 orang	100	17.524.968.297	16.483.382.126	94,06	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.7.2	Sub Keg. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	tersedianya pakaian dinas dan atribut bagi ADPRD	35 pasang	35 pasang	100	315.450.000	314.925.000	99,83	-	-
1.7.3	Sub Keg. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	terlaksananya pemeliharaan kesehatan	35 orang	6 orang	17	70.000.000	51.240.355	73,20		
1.7.4	Sub Keg. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	terselengaranya rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	1 Tahun	1 Tahun	100	1.865.770.000	1.815.719.432	97,32	-	-
1.7.4	Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	tersedianya kebutuhan rumah tangga DPRD	1 Tahun	1 Tahun	100	26.415.000	23.850.000	90,29	-	-
2.	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi**					**10.728.400.000**	**8.808.224.828**	**82,10**	-	-
2.1	**Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Cakupan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**1.138.580.000**	**795.476.108**	**69,87**	-	-
2.1.1	Sub Keg. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	terlaksanya pembahasan Ranperda	1 Tahun	1 Tahun	100	1.138.580.000	795.476.108	69,87	Tidak ada Peembahasan Perda Umum (diluar APBD) pada Masa Sidang I Tahun Dinas 2022, sehingga Biaya Perjalanan Dinas Evaluasi Ranperda ke Propinsi tidak dapat di serap.	Dilakukan pemetaan kembali pembahasan Perda pada Tahun berikutnya.
2.1.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	terwujudnya peningkatan kapasitas DPRD berjalan optimal			100	6.286.110.000	4.726.793.720	75,19	-	-
2.1.3	Sub Keg. Pendalaman Tugas DPRD	terlaksananya Bimtek	35 orang	35 orang	100	6.025.950.000	4.466.943.720	74,13	Tidak terlaksananya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi dalam kegiatan Rapat Pembentukan Provinsi Flores di Kupang	Penyesuaian kembali program dan kegiatan di Tahun 2023
2.1.4	Sub Keg. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	tersedinya tenaga ahli fraksi	8 orang	8 orang	100	192.000.000	192.000.000	100,00	-	-
2.1.5	Sub Keg. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	terselenggaranya kegiatan hubungan masyarakat	12 Kali	13 Kali	100	68.160.000	67.850.000	99,55	-	-
2.1.6	*Sub Keg. Kunjungan Kerja Dalam Daerah*					363.410.000	345.655.000	95,11		
2.1.7	*Sub Keg. Pelaksanaan Reses*					2.940.300.000	2.940.300.000	100,00		
	JUMLAH				**100**	**34.944.736.116**	**31.764.657.710**	**90,90**		

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Manggarai, Jan 2023

1. Urusan Sekretariat Daerah

A. Bagian Pemerintahan

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, Bagian Pemerintahan menetapkan sasaran strategis: Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.160.

Tabel 3.160
Capaian Kinerja Bagian Pemerintahan
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintahan Daerah	1. Nilai LPPD	3,0551	2,7951	91,49
		2. Presentase Usulan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	99,91	100	100
	Rata-rata				95,74
	Kategori			Sangat Baik	

Sumber: Bagian Pemerintahan Kab. Manggarai, Januari 2023

Sebagaimana data pada tabel di atas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022, sebagai berikut :

Nilai dan Peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang disajikan merupakan nilai dan peringkat EKPPD tahun 2018 yang diperoleh pada tahun 2020. Nilai dan Peringkat EKPPD tahun 2019-2022, Pemerintah Kabupaten Manggarai sampai saat kami menyusun laporan ini belum menerima hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri.

b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Bagian Pemerintahan melaksanakan 2 Program, 6 Kegiatan dan 14 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.570.483.950,- realisasi sebesar Rp.548.512.445,- sisa anggaran Rp.21.971.505,- dengan tingkat capaian sebesar 96%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.161.

Tabel 3.161
Anggaran Bagian Pemerintahan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**570.483.950,-**	**548.512.445,-**	**96,15**
	Belanja Pegawai	10.200.000,-	8.400.000,-	82,35
	Belanja Barang dan	560.283.950,-	540.112.445,-	96,40
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**570.483.950,-**	**548.512.445,-**	**96,15**

Sumber: Bagian Pemerintahan Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.162.

Tabel 3.162
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Bagian Pemerintahan Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**210.157.000**	**193.345.495**	**92**	-	-
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.631.000**	**1.631.000**	**100**	-	-
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	1 tahun	100	1.631.000	1.631.000	100	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**10.200.000**	**8.400.000**	**82**	-	-
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan Daerah	3 orang	3 orang	100	10.200.000	8.400.000	82	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**156.926.000**	**155.485.775**	**99**	-	-
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46 jenis	46 jenis	100	31.778.000	31.778.000	100	-	-
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 tahun	1 tahun	100	12.500.000	12.500.000	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Kantor									
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	100	14.985.000	14.985.000	100	-	-
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	100	1.680.000	840.000	50	-	-
1.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	13 jenis	13 jenis	100	823.000	823.000	100	-	-
1.3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1 tahun	100	95.160.000	94.559.775	99,37	-	-
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**4.300.000**	**1.894.600**	**44,06**	-	-
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	100	4.300.000	1.894.600	44,06	-	-
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**37.100.000**	**34.334.120**	**92,54**	-	-
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit	9 unit	100	34.600.000	31.834.120	92	-	-
1.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	3 unit	3 unit	100	2.500.000	2.500.000	100	-	-
2	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**360.326.950**	**346.766.950**	**96**	-	-
2.1	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Sasaran: Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Tata Pemerintahan yang Baik dan Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**360.326.950**	**346.766.950**	**96**	-	-
2.1.1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan		1 tahun	1 tahun	100	85.120.000	77.840.000	91	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
2.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 tahun	1 tahun	100	77.515.000	77.425.000	99	-	-
2.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersedianya Dokumen LPPD, LKPJ dan SPM serta Penataan Otonomi Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100	197.691.950	191.501.950	97	-	-
	JUMLAH				**100**	**570.483.950**	**548.512.445**	**96,15**		

Sumber: Bagian Pemerintahan Kab. Manggarai, Januari 2023

B. Bagian Organisasi

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2022 dimana Perjanjian Kinerja tersebut mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026, terdapat 3 sasaran Strategis dengan 17 indikator kinerja. Dari 3 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja tersebut yang menjadi tanggungjawab Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai yaitu 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja rincian seperti pada tabel 3.163.

Tabel 3.163
Capaian Kinerja Bagian Organisasi Setda
Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	47,78	65,12	133,49
		Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya efektif (Skor 61-80)	100	100	100
Rata-Rata sasaran 1					116,74
Kategori/Interpretasi					Memuaskan
2.	Meningkatnya sistem pengen-dalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	34,66	44,44	128,23
Rata-Rata sasaran 2					128,23
Kategori/Interpretasi					Memuaskan
Rata-rata Sasaran 1 + 2					**122,49**
Kategori/Interpretasi					Memuaskan

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran **Meningkatnya Pengendalian Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja** diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator dengan rata rata capaian dari kedua indikator sasaran tersebut adalah **116,74%,** kategori **MEMUASKAN**. Uraian kedua indikator tersebut yaitu:

   a. **Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai SAKIP Minimal B**

      Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 65,12% dari target 47,78% dengan tingkat capaian 133,49%. Realisasi 65,12% ini diperoleh dari jumlah Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP kategori B hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai sebanyak 28 Perangkat Daerah dari total 43 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.

   b. **Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80).**

      Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan evaluasi kelembagaan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. Menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2019 melalui Bagian Organisasi Setda telah melaksanakan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Manggarai. Dari hasil evaluasi tersebut rata-rata seluruh Perangkat Daerah berada pada Peringkat Komposit 4 (P-4) dengan skor 61-80. Peringkat komposit P-4 mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

      Dengan demikian realisasi dari indikator sasaran ini masih menggunakan hasil evaluasi tahun 2019, dimana seluruh

Perangkat yang dievaluasi berada pada Peringkat Komposit 4 (P-4) dengan skor 61-80 atau mencapai 100%.

Tahun 2023 ini, Bagian Organisasi akan kembali melakukan evaluasi kelembagaan hasil penataan kelembagaan yang tahun 2022.

Tabel 3.164
Hasil Evaluasi Internal
Terhadap Penerapan SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2016-2022

No.	Tahun	Jumlah PD Sampel	Nilai Rata-Rata	Kategori		Keterangan
1.	2016	7 PD	71,04	BB	SANGAT BAIK	Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2015
2.	2017	10 PD	69,85	B	BAIK	Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2016
3.	2018	10 PD	71,04	BB	SANGAT BAIK	Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2017
4.	2019	12 PD	69,95	B	BAIK	Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2018
5	2020	16 PD	73,46	BB	SANGAT BAIK	Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2019
6	2021	21 PD	74,64	BB	SANGAT BAIK	Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2020
7.	2022	20 PD	67,40	B	BAIK	Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2021

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

Rata-rata hasil evaluasi tahun 2022 terhadap penerapan SAKIP 20 Perangkat Daerah tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelunya. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi/peraturan terkait evaluasi SAKIP dari Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 ke Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Beberapa perubahan terkait evaluasi AKIP tersebut adalah: 1) Perbedaan ruang lingkup dan tujuan; 2) Perbedaan komponen dan sub komponen penilaian dan 3) perbedaan lembar kerja evaluasi.

Tabel 3.165
Hasil Penilaian dari Kementerian PAN-RB
Terhadap Penerapan SAKIP Kabupaten Manggarai
Tahun 2016-2022

No.	Tahun	Nilai SAKIP	Kategori		Keterangan
1.	2016	58,59	CC	CUKUP BAIK	Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2015
2.	2017	60,57	B	BAIK	Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2016
3.	2018	60,65	B	BAIK	Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2017
4.	2019	61,06	B	BAIK	Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2018
5.	2020	61,60	B	BAIK	Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2019
6.	2021	62,08	B	-	Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2020
7.	2022	63,90	B	BAIK	Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2021

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 oleh Kementerian PANRB sesuai Surat Nomor B/1111/AA.05/2022 menunjukan nilai sebesar 63,90 dengan predikat **"B"**. Rincian hasil evaluasi tersebut. Komponen yang dinilai dalam evaluasi AKIP tergambar pada tabel 3.166.

Tabel.3.166
Komponen Evaluasi Kinerja

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21,41
2	Pengukuran Kinerja	30	16,99
3	Pelaporan Kinerja	15	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,45
	Nilai Hasil Evalasi	**100**	**63,90**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**B**

Sumber : LHE Kementerian PANRB, 2022

Tabel 3.167
Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota Se-NTT
Tahun 2022

KABUPATEN		SAKIP		
		NILAI	PREDIKAT	INTERPRETASI
Pemerintah Provinsi NTT		63,65	B	BAIK
1	Kota Kupang	64,44	B	BAIK
2	**Manggarai**	**63,90**	**B**	**BAIK**
3	Nagekeo	63,35	B	BAIK
4	Manggarai Barat	62,16	B	BAIK
5	Sikka	61,91	B	BAIK
6	Sumba Timur	61,41	B	BAIK
7	Manggarai Timur	60,85	B	BAIK
8	Timor Tengah Selatan	57,84	CC	CUKUP
9	Ngada	54,91	CC	CUKUP
10	Kabupaten Kupang	54,81	CC	CUKUP
11	Rote Ndao	53,89	CC	CUKUP
12	Ende	53,33	CC	CUKUP
13	Sumba Tengah	52,70	CC	CUKUP
14	Flores Timur	52,47	CC	CUKUP
15	Alor	51,79	CC	CUKUP
16	Belu	51,78	CC	CUKUP
17	Sumba Barat	51,55	CC	CUKUP
18	Timor Tengah Utara	51,15	CC	CUKUP
19	Malaka	50,28	CC	CUKUP
20	Lembata	50,23	CC	CUKUP
21	Sabu Raijua	47,48	C	KURANG
22	Sumba Barat Daya	43,44	C	KURANG

Sumber : LHE Kementerian PANRB, 2022

Sesuai tabel tersebut di atas, nilai SAKIP Kabupaten Manggarai menempati Peringkat **ke-2** dari 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Langkah-langkah mempertahankan dan menjaga konsistensi serta meningkatkan kualitas dan nilai SAKIP Kabupaten Manggarai :

1. Tetap menjaga komitmen dalam implementasi SAKIP dan sinergitas birokrasi serta meminimalisasi ego sektoral dan bekerja secara tim.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja melaui BIMTEK baik secara daring maupun luring.

3. Melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah secara terus menerus, khususnya Kecamatan tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan demikian Perangkat Daerah Kecamatan memahami SAKIP dan manfaat dari implementasi SAKIP.
4. Menerapkan sistem manajemen kinerja yang andal serta berbasis teknologi informasi melalui aplikasi https://sakip.manggaraikab.go.id yang saat ini sedang dalam proses penginputan data.

Untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pengendalian Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja** yang diukur melalui indikator Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B dan indikator Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80), pada tahun 2022, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai melakukan :

1. Melakukan penyusunan dokumen SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021-2022, dokumen SAKIP Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2022 dan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 bersama tim penyusun yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Manggarai dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.139.996.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

    - Penyusunan dokumen SAKIP Setda melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitsar Realisasi Kinerja SKPD dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.21.382.000,00 dari pagu anggaran perubahan Rp.21.382.000,00 atau 100%.

- Penyusunan Dokumen SAKIP Kabupaten Manggarai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.94.834.014,00 dari pagu anggaran perubahan sebesar Rp.100.365.000,00 atau 100%, termasuk anggaran pengadaan aplikasi e-sakip Kabupaten Manggarai.

- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.18.249.400,00 dari pagu anggaran perubahan sebesar Rp.18.249.400,00 atau 100%.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, pada tahun 2022 Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai melakukan:

- Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai bekerjasama dengan BPKP Perwailan NTT. Kegiatan ini diikuti oleh Para Kasubag. Perencanaan dan Keuangan/ PEP/Fungsional Perencana dari setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Manggarai;

- Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) baik di level Pemda maupun Perangkat Daerah.

- Melakukan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai dan Analisis Jabatan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.122.503.269,00 dari pagu anggaran perubahan sebesar

Rp.129.097.000 atau 94,89%, termasuk anggaran pengadaan aplikasi Anjab-ABK Kabupaten Manggarai.

Adapun Penataan Kelembagaan yang dilakukan tahun 2022 yaitu:

- Penataan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai sesuai hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai;
- Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai;
- Peraturan Bupati Manggarai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai;
- Peraturan Bupati Manggarai Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai.

Selain kegiatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pada tahun 2022 Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai juga melakukan penyetaraan jabatan struktural eselon IV (Jabatan Pengawas) ke Jabatan Fungsional dan melakukan penyesuaian penyetaraan jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

2. Sasaran **Meningkatnya Sistem Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik**, diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik.

   Realisasi dari indikator sasaran ini pada tahun 2022 adalah 44,44% dari target 33,66% dengan tingkat capaian 128,23% kategori

MEMUASKAN. Realisasi 44,44% ini diperoleh dari jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan dan memperoleh nilai IKM minimal Baik sebanyak 12 Perangkat Daerah dari 27 Perangkat Daerah wajib IKM.

Pencapaian kinerja sasaran tersebut di atas didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.32.564.060,00 atau 13,74% dari total pagu anggaran perubahan sebesar Rp.237.070.000,00. Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sangat kecil disebabkan karena pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) bulan. Dengan tidak dilaksananya kegiatan survey tersebut maka alokasi anggaran pada 2 (dua) item kegiatan pada sub kegiatan tersebut di atas yaitu Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain dan belanja perjalanan dinas dalam kota tidak terserap.
b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan penyerapan anggaran Rp.50.270.000,- atau 99,41% dari total anggaran perubahan sebesar Rp.50.570.000,-

b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Sesuai Dokumen Pelaksasanaan Perubahan Anggaran tahun 2022, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai melaksanakan 1 Program, 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan alokasi anggaran perubahan sebesar Rp.754.027.800,00, realisasi Rp.530.749.189,00 atau 70,39%. Dari 1 Pogram 6 kegiatan dan 17 Sub kegiatan tersebut, yang berhubungan langsung dengan

pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai sebanyak 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan pendukung/penunjang pencapaian kinerja sebanyak 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan

Selengkapnya alokasi anggaran Bagian Organisasi disajikan dalam tabel 3.168.

Tabel 3.168
Anggaran Bagian Organisasi
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**754.027.800,00**	**530.749.189,00**	**70,39**
	Belanja Pegawai	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	738.427.800,00	515.149.189,00	69,76
2.	**Belanja Modal**	-	-	-
	TOTAL	**754.027.800,00**	**530.749.189,00**	**70,39**

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.169.

Tabel 3.169
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran : Meningkatnya Pengendalian Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja				754.027.800	530.749.189		Beberapa item kegiatan yang tidak dilaksanakan dan efiesiensi penggunaan Anggaran	-
		Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	48,78	65,12	133,49				-	-
		Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	100	100	100				-	-
		Sasaran : Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik							-	-
		Sasaran : Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	34,66	44,44	128,23				-	-
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	100	21.382.000	21.382.000	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sasaran : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok	100	21.382.000	21.382.000	100	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**4 Dok**	**4 Dok**	**100**	**15.600.000**	**15.600.000**	**100**	-	-
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas	4 Dok	4 Dok	100	15.600.000	15.600.000	100	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya pelayanan administrasi umum**	**100**	**100**	**100**	**130.594.400**	**130.467.474**	**99,90**	**Selisih harga real dengan yang diinput dalam DPPA pada salah satu sub kegiatan**	-
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100	28.700.700	28.700.700	100	-	-
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	100	21.250.000	21.250.000	100	-	-
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100	26.639.700	26.639.700	100	-	-
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rasionalisasi Anggaran	Sudah dianggarkan lagi di DPA TA. 2023
1.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	1 Paket	1 Paket	100	3.114.000	3.114.000	100	-	-
1.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100	50.890.000	50.763.074	99,75	-	-
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**9.100.000**	**8.192.472**	**90,03**	**Selisih harga real dengan yang diinput dalam DPPA pada salah satu sub kegiatan**	-
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100	2.500.000	2.500.000	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	12 Laporan	100	6.600.000	5.692.472	86,25	Selisih harga real pembayaran harga internet dengan yang diinput dalam DPPA	-
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**14 Unit**	**14 Unit**	**100**	**42.000.000**	**36.686.500**	**87,35**	**Selisih pembayaran real pajak kendaraan bermotor dengan yang ada di DPPA**	-
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 unit	7 unit	100	38.500.000	33.186.500	86,20	Selisih pembayaran real Suku cadang dan pajak kendaraan bermotor dengan yang diinput di DPPA	-
1.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7 unit	7 unit	100	3.500.000	3.500.000	100	-	-
1.6	**Kegiatan Penataan Organisasi**	**Sasaran: Tersedianya dokumen kelembagaan, anjab, pelayanan publik dan tatalaksana, kinerja dan RB**	**13 Dok**	**13 Dok**	**100**	**535.351.400**	**318.420.743**	**59,48**	**Beberapa item kegiatan yang tidak dilaksanakan dan efiesiensi penggunaan Anggaran pada beberap sub kegiatan**	-
1.6.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dok	5 Dok	100	129.097.000	122.503.269	94,89	Merupakan selisih real harga tiket pesawat	-
1.6.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Lap	3 Lap	100	237.070.000	32.564.060	13,74	Karena Pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) bulan.	Dilaksanakan Tahun 2023
1.6.3	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	1 dokumen	100	18.249.400	18.249.400	100	-	-
1.6.4	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	86 Laporan	86 Laporan	100	50.570.000	50.270.000	99,41	Efisiensi Anggaran perjalanan Dinas Dalam Daerah	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.6.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100	100.365.000	94.834.014	94,49	Merupakan selisih real harga tiket pesawat	-
	JUMLAH				100	754.027.800	530.749.189	70,39		

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

C. Bagian Umum

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, Bagian Umum menetapkan sasaran strategis: "***Terwujudnya Pelayanan Bidang Kemasyarakatan***", dengan indikator kinerja adalah *Jumlah dialog Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat*, seperti dalam tabel 3.170.

Tabel 3.170
Capaian Kinerja Bagian Umum
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1.	Persentase Jumlah dialog Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dengan Tokoh Masyaraka, Tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat	100 %	98,17 %	98,17 %
	Rata-rata			98,17
	Kategori			Sangat Baik

Sumber: Bagian Umum Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Bagian Umum melaksanakan Satu (1) Program, Delapan (8) Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.031.820.570,- realisasi sebesar Rp.19.664.852.038,- dengan tingkat capaian sebesar 98,17%,-. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.171.

Tabel 3.171
Anggaran Bagian Umum Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**16.996.196.570,-**	**16.632.629.139,-**	**97,86**
	Belanja Pegawai	7.835.839.845,-	7.612.001.977,-	97,14
	Belanja Barang dan Jasa	9.160.356.725.,-	9.020.627.162,-	98,47
2.	**Belanja Modal**	**3.035.624.000,-**	**3.032.222.900,-**	**99,89**
	TOTAL	**18.042.305.606,-**	**17.258.616.292,92**	**98,17**

Sumber: Bagian Umum Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.172.

Tabel 3.172
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Bagian Umum Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**				-	-
1.1	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**7.835.839.845**	**7.612.001.977**	**97,14**	-	-
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta honor pengelolah Keuangan	1 tahun	1 tahun	100	7.786.039.845	7.563.101.977	97,14	-	-
1.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan Daerah	1 tahun	1 tahun	100	49.800.000	48.900.000	98,19	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**15.874.071**	**15.874.071**	**100**	-	-
1.2.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atributnya	5 Jenis	5 Jenis	100	15.874.071	15.874.071	100	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**3.135.357.100**	**3.135.357.100**	**100**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik	21 jenis	21 jenis	100	98.550.000	98.550.000	100	-	-
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Administrasi Kantor berjalan optimal	47 Jenis	47 Jenis	100	170.935.600	170.935.600	100	-	-
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3.460 OM	3.460 OM	100	668.370.000	668.370.000	100	-	-
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	8 jenis	8 jenis	100	116.821.000	116.821.000	100	-	-
1.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 jenis	5 jenis	100	29.400.000	29.400.000	100	-	-
1.3.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	21 jenis	21 jenis	100	86.440.500	86.440.500	100	-	-
1.3.7	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Ritus Adat dan tanda Penghargaan	3 Jenis	3 Jenis	100	566.000.000	566.000.000	100	-	-
1.3.8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 kali	96 kali	100	1.398.840.000	1.398.840.000	100	-	-
1.4	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**577.239.000**	**577.157.300**	**99,99**	-	-
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	200 buah	200 buah	100	164.250.000	164.208.900	99,99	-	-
1.4.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Komputer dan Personal Komputer lainnya, Perabot Kantor	4 Jenis	4 Jenis	100	412.989.000	412.948.400	99,99	-	-
1.5	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**2.796.667.328**	**2.719.830.546**	**97,25**	-	-
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai/Perangko	2 jenis	2 jenis	100	20.000.000	20.000.000	100	-	-
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunilasi, Sumber daya Air, dan Listrik	4 jenis	4 jenis	100	352.800.000	329.161.715	93,30	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sewa terop dan barang bercorak kesenian	2 jenis	2 jenis	100	17.500.000	17.500.000	100	-	-
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Tenaga Kontrak/THL dan Tamsil, Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	2 jenis	2 jenis	100	2.406.367.328	2.353.168.831	98,79	-	-
1.6	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.660.290.000**	**1.215.839.600**	**73,23**	-	-
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 tahun	1 tahun	100	85.120.000	77.840.000	91	-	-
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25 unit	25 unit	100	217.500.000	184.818.774	84,97	-	-
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	3 Jenis	3 Jenis	100	142.000.000	142.000.000	100	-	-
1.6.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2 Unit	2 Unit	100	1.216.190.000	1.215.839.600	99,99	-	-
1.7	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**773.054.224**	**748,443,756**	**96,82**	-	-
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH dan WKDH	1 tahun	1 tahun	100	196.655.817	172.045.756	87,49	-	-
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH	1 tahun	1 tahun	100	26.988.142	26.988.000	99,99	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasa lahan	Solusi
1.7.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya medical chek up KDH dan WKDH	1 tahun	1 tahun	100	100.000.000	100.000.000	100	-	-
1.7.4	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	1 tahun	1 tahun	100	449.410.265	449.410.000	99,99	-	-
1.8	**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtangga-an Sekretariat Daerah**		**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**3.237.499.000**	**3.232.655.745**	**99,99**	-	-
1.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan harian Rumah Tangga KDH	1 tahun	1 tahun	100	2.374.764.500	2.369.974.745	99,99	-	-
1.8.3	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan harian Rumah Tangga WKDH	1 tahun	1 tahun	100	862.734.500	862.681.000	99,99	-	-
	JUMLAH				**100**	**20.031.820.570**	**19.664.852.039**	**98,17**		

Sumber: Bagian Umum Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

D. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menetapkan sasaran strategis seperti pada tabel 3.173.

Tabel 3.173
Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah	1. Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
		2. Persentase Penyelesaian Persoalan Pengelolaan SDA sesuai kebutuhan	97%	100%	100
	Rata-rata				100
	Kategori			Memuaskan	

Sumber: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

Sebagaimana data pada tabel di atas, berikut penjelasan formulasi pengukuran Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam:

1. $$\frac{\text{Jumlah Kebijakan strategis yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh urusan}} \times 100$$

Jumlah Kebijakan strategis Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti ada 3 kebijakan, yaitu:

- Dibentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/ 94/2022 tanggal 11 Februari 2022.

  Surat keputusan ini sudah mencakup 3 urusan bidang perekonomian yaitu :

  - Ekonomi; mencakup pertumbuhan sektor pertanian, pertumbuhan sektor perikanan, Pertumbuhan sektor industri, pertumbuhan sektor Pariwisata dan pertumbuhan sektor perdagangan.

  - Pemerataan Kesejahteraan
  - Menurunnya kemiskinan
  -
- Rapat- rapat koordinasi pengendalian inflasi
- Surat untuk melakukan kegiatan operasi pasar

2. $$\frac{\text{Jumlah Persoalan Pengelolaan SDA yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh persoalan pengelolaan SDA}} \times 100$$

Jumlah penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sebanyak 3 sesuai ketentuan, yaitu:

- Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor :HK/62/ 2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo periode 2021 -2023
- Rasio Elektrifikasi
- Pengawasan Ketersediaan BBM

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan 2 program dan 7 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 335,793,772,- realisasi sebesar Rp. 314.852.270,- atau sebesar 93.76%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.174.

Tabel 3.174
Anggaran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**335.793.772,-**	**314.852.270,-**	**93.76**
	Belanja Pegawai	45.327.324,-	45.093.840,-	99.48
	Belanja Barang dan Jasa	290.466.448,-	269.758.430,-	92.87
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**335.793.772,-**	**314.852.270,-**	**93.76**

Sumber: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Januari 2022

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.175.

Tabel 3.175
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**177.033.772**	**162.131.840**	**92**	-	-
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**340.000**	**340.000**	**100**	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	1 tahun	100	340.000	340.000	100	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**45.327.324**	**45.093.840**	**99**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan Daerah	1 tahun	1 tahun	100	45.327.324	45.093.840	99	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**108.325.448**	**108.310.500**	**99,98**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 tahun	1 tahun	100	14.320.000	14.319.552	99,99	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	100	5.597.900	5.597.900	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	100	840.000	840.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	37 jenis	37 jenis	100	22.257.548	22.257.548	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1 tahun	100	65.310.000	65.295.500	99,97	-	-
1.3	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.041.000**	**981.000**	**94.23**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	100	510.000	450.000	88,23	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 jenis	8 jenis	100	531.000	531.000	100	-	-
1.4	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**22.000.000**	**7.406.500**	**33,66**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 unit	6 unit	100	20.000.000	5.406.500	27.03	Kendaraan DInas Operasional Roda 4 (empat) tidak ada karena dipinjam pakai sementara oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai sehingga biaya operasionalnya tidak digunakan.	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab..Manggarai akan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah Kab.Manggarai untuk mengambil kembali kendaraan roda 4 (empat) yang dipinjam oleh Badan Pendapatan Daerah karena kendaraan dinas tersebut masih tercatat sebagai aset Bagian Perekonomian dan SDA
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	5 unit	5 unit	100	2.000.000	2.000.000	100	-	-
2	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Sasaran: Terwujudnya Peningkatan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**158.760.000**	**152.720.430**	**96.19**	-	-
2.1	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Sasaran: Terlaksananya kebijakan perekonomian**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**110.500.000**	**104.740.430**	**94.78**	-	-
2.2	**Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD**		**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**3.740.000**	**3.680.000**	**98.39**	-	-
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 tahun	1 tahun	100	95.280.000	89.820.430	94.26	-	-
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Tahun	1 tahun	100	11.480.000	11.240.000	97.90	-	-
2.3	**Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Sasaran: Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**26 Kali**	**26 Kali**	**100**	**48.260.000**	**47.980.000**	**99.41**	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 kali	6 kali	100	10.120.000	10.060.000	99.40	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	14 kali	14 kali	100	21.600.000	21.540.000	99.72	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, SInkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	11 Kali	11 Kali	100	16.540.000	16.380.000	99.03	-	-
	JUMLAH				**100**	**335.793.772**	**314.852.270**	**93,76**		

Sumber: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kab. Manggarai, Januari 2023

E. Bagian Hukum

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, Bagian Hukum menetapkan sasaran strategis:

"Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum & HAM dan Pembenahan Sub Sistem Hukum Daerah", dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.176.

Tabel 3.176
Capaian Kinerja Bagian Hukum
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang tidak Dibatalkan	100 %	100 %	100

Sumber: Bagian Hukum Setda Kab. Manggarai, Januari 2022

Sebagaimana data pada tabel di atas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022, sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator dengan rata- rata capaian indikator capaian sasaran tersebut adalah 100% (seratus per seratus), kategori **Memuaskan**.

- Indikator Presentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan dengan target 100% (Seratus per serratus), realisasi 100% dan presentase capaian 100% (serratus per seratus).

Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum mengajukan 6 (enam) Peraturan Daerah (dengan catatan 3 Perda diusulkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai yakni Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021, Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 dan APBD Kabupaten Manggarai Tahun 2023). Dari keenam Peraturan Daerah tersebut, tidak terdapat Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh pemerintah pusat atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Keenam Peraturan Daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Manggarai di Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023.

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai pada Tahun 2022 melaksanakan 2 program, 5 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.143.005.844,- realisasi sebesar Rp1.100.167.806,- atau sebesar 96,25%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.177.

Tabel 3.177
Anggaran Bagian Hukum Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	**Belanja Operasi**	**1.143.005.844,-**	**1.100.167.806,-**	**96,25**
	Belanja Pegawai	23.400.000,-	20.400.000,-	87,18
	Belanja Barang dan Jasa	1.119.605.844,-	1.079.767.806,-	96,44
2	**Belanja Modal**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**1.143.005.844,-**	**1.100.167.806,-**	**96,25**

Sumber: Bagian Hukum Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.178.

Tabel 3.178
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Bagian Hukum Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda**							-	-
1.1	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**53.327.324**	**49.893.840**	**93,91**	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**164.826.196**	**164.505.068**	**99,81**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis	10 jenis	100	38.208.146	38.201.000	99,98	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 tahun	1 tahun	100	21.820.000	21.820.000	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3 jenis	3 jenis	100	18.186.300	18.186.300	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	100	1.680.000	1.680.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	5 jenis	5 jenis	100	3.081.750	2.773.450	90	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1 tahun	100	81.850.000	81.844.418	99,99	-	-
1.3	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**10.800.000**	**7.594.800**	**70,32**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	100	4.200.000	3.649.800	86,90	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 jenis	1 jenis	100	6.600.000	3.945.000	59,77	-	-
1.4	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**25.300.000**	**23.028.000**	**91,02**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	5 unit	100	21.800.000	20.262.000	92,94	-	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	3 unit	3 unit	100	3.500.000	2.766.000	79,03	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
2	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Sasaran: Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum & HAM dan Pembenahan Sub-Sistem Hukum Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**888.916.324**	**855.146.098**	**96,20**	**-**	**-**
2.1	**Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah**	**Sasaran: Terlaksananya Produk Hukum Daerah**	**- 10 Perda -50 Perbub -300 SK**	**-14 Perda -61 Perbub -390 SK -38 instruksi**	**100**	**436.462.324**	**429.736.098**	**98,46**	**-**	**-**
	Sub Kegiatan Belanja Barang Habis Pakai	Terlaksananya Belanja Barang Habis Pakai			100	25.960.000			-	-
	Sub Kegiatan Jasa	Terlaksananya			100	120.402.324			-	-
	Sub Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Biasa			100	290.100.000			-	-
2.2	**Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum**	**Sasaran: Terlaksananya Bantuan Hukum**	**3 Kasus**	**4 Kasus**	**100**	**369.150.000**	**345.130.000**	**93,49**	**-**	**-**
	Sub Kegiatan Belanja Barang Habis Pakai	Terlaksananya Belanja Barang Habis Pakai			100	23.850.000			-	-
	Sub Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Biasa			100	179.300.000			-	-
	Sub Kegiatan Belanja Jasa/Pihak Ketiga/ Jasa Advokasi Hukum	Terlaksananya Belanja Jasa/Pihak Ketiga/ Jasa Advokasi Hukum			100	150.000.000			-	-
2.3	**Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum**	**Sasaran: Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum**	**-14 Perda -61 Perbub -390 SK -11 instruksi**	**-14 Perda -61 Perbub -390 SK -38 instruksi**	**100**	**83.340.000**	**80.280.000**	**96,33**	**-**	**-**
	Sub Kegiatan Belanja Barang Habis Pakai	Terlaksananya Belanja Barang Habis Pakai			100	12.500.000			-	-
	Sub Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Biasa			100	70.840.000			-	-
	JUMLAH				**100**	**1.143.005.844**	**1.100.167.806**	**96,25**		

Sumber: Bagian Hukum Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

F. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Manggarai menetapkan sasaran strategis: **Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.179.

Tabel 3.179
Capaian Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	100% (70 kali)	57 kali	81,43
		a. Jumlah Kunjungan dan Dialog Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama masyarakat yang terfasilitasi	100% (40 kali)	32 kali	80
		b. Jumlah Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	100% (30 kali)	25 Kali	83.33
	Rata-rata				81,58
	Kategori				Baik

Sumber: Bagian Protokol dan Pimpinan, Januari 2023

Sebagaiamana data pada tabel di atas, dapat dilihat rincian capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. **Jumlah Kunjungan dan Dialog Bupati, Wakil Bupati Manggarai dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat**

   Pada tahun 2022 ini Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Manggarai menargetkan dialog Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dengan para tokoh masyarakat, tokoh Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 40 Kali. Dari target yang ditetapkan itu, jumlah dialog Bupati dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan pada tahun 2022 sebanyak 32 kali. Kegiatan tersebut semua difasilitasi oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan prosentase sebesar 80 Persen.

2. **Jumlah Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terfasilitasi**

Target Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2022 ini sebanyak 30 Kegiatan, baik kegiatan di dalam daerah maupun kegiatan luar daerah. Tetapi jumlah dana yang dianggarkan dalam anggaran Induk tahun 2022 sangat terbatas khususnya untuk memfasilitasi kegiatan di luar daerah sehingga beberapa agenda kegiatan tidak bisa difasilitasi oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Persentasi kegiatan yang terfasilitasi dengan baik adalah 83,33 Persen dengan persentase paling tinggi merupakan fasilitasi kegiatan di dalam daerah.

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada Tahun 2022, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan 1 Program, 7 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.604.657.022,- realisasi sebesar Rp. 592.354.167- dengan tingkat capaian sebesar 97%, realisasi fisik 97%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.180.

Tabel 3.180
Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**579.657.022,-**	**562.911.167,-**	**97,11**
	Belanja Pegawai	13.700.000,-	13.700.000,-	100
	Belanja Barang dan Jasa	565.957.022,-	549.211.167,-	97,04
2.	**Belanja Modal**	**25.000.000,-**	**24.603.000,-**	**98,41**
	TOTAL	**604.657.022,-**	**592.354.167,-**	**97,97**

Sumber: Bagian Protokol dan Pimpinan Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.181.

Tabel 3.181
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**604.657.002**	**592.354.167**	**97,97**	**-**	**-**
1.1	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**12.600.000**	**12.600.000**	**100**	**-**	**-**
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	3 Orang	3 Orang	100	12.600.000	12.600.000	100	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terbayarnya Diklat Aparatur Kehumasan	1 Orang	1 Orang	0,00	0	0	0,00	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**196.098.662**	**195.680.792**	**99,79**	**-**	**-**
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44 jenis	44 jenis	100	66.286.662	65.889.662	99,40	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100	9.220.000	9.220.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	100	18.735.000	18.735.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	50	840.000	840.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	16 jenis	16 jenis	100	5.677.000	5.677.000	100	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1 tahun	100	95.340.000	95.339,130	99,8	-	-
1.4	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**4.480.000**	**4.480.000**	**100**	**-**	**-**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor	6 Unit	6 Unit	100	4.480.000	4.480.000	100	-	-
1.5	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**3.363.000**	**3.363.000**	**100**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	3 jenis	3 jenis	100	3.363.000	3.363.000	100	-	-
1.6	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.660.290.000**	**1.215.839.600**	**73,23**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 unit	6 unit	100	22.000.000	20.840.625	94,73	-	-
1.7	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**365.755.360**	**355.029.750**	**96,2**	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi keprotokolan Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 tahun	1 tahun	100	61.800.000	61.760.000	99,94	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terselenggaranya Kegiatan KDH/WKDH	1 tahun	1 tahun	100	111.700.000	111.690.000	99,98	-	-
	Sub Kegiatan Pendokumentasian tugas Pimpinan	Tersedianya data kegiatan KDH/WKDH	1 tahun	1 tahun	100	192.255.360	181.579.750	94,45	-	-
	JUMLAH				**100**	**604.657,022**	**592.354.167**	**97,97**		

Sumber: Bagian Protokol dan Pimpinan Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

G. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, Bagian Pengadaan Barang/Jasa menetapkan sasaran strategis:

"Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah", dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.182.

Tabel 3.182
Capaian Kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tepat waktu	60,00%	11,35%	18,92
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	55,00%	11,20%	20,36
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	40,00%	16,38%	40,95

Sumber: Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Januari 2023

Sebagaimana data pada tabel di atas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

1. Presentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement merupakan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya. Pada tahun 2022, Jumlah seluruh paket pengadaan barang/jasa melalui e-procurement mencapai ***583 paket*** yang diumumkan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan ***5.136 paket*** yang diumumkan melalui Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

   Presentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement dapat diukur dengan Jumlah pengadaan yang menggunakan E-Procurement dibagi dengan Jumlah seluruh pengadaan dikali 100%, dengan demikian tingkat capain kinerja adalah sebesar ***583 paket/5.136 paket * 100%*** sama dengan ***11,35%***.

2. Presentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif merupakan paket kegiatan yang dilaksanakan melalui metode Tender/Seleksi dan E-Purchasing, sedangkan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan tanpa metode kompetitif merupakan paket kegiatan yang pengadaannya melalui metode Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung, dengan tujuan untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat waktunya (tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu).

   Pada tahun 2022, Jumlah seluruh paket pengadaan barang/jasa melalui e-procurement mencapai ***583 paket*** yang terdiri ***dari 215 paket*** yang dilakukan dengan Metode Tender/Seleksi dan E-Purchasing sedangkan ***368 paket*** yang dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung dan Swakelola, dari seluruh jumlah paket Pengadaan Barang/ Jasa terdapat ***8 paket*** pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu atau Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sehingga paket kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu adalah ***583 paket*** dikurangi ***8 paket*** sama dengan 575 paket.

   Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu dapat diukur dengan Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dibagi dengan Jumlah seluruh pengadaan dikali 100%, dengan demikian tingkat capain kinerja adalah sebesar ***575 paket/ 5.136 paket * 100%*** sama dengan ***11,20%.***

3. Pada nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan merupakan semua nilai belanja yang terdiri dari belanja Barang/ Jasa dan belanja Modal untuk semua jenis metode pemilihan penyedia, yang dapat diukur dengan Jumlah Nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dibagi dengan Total Nilai belanja dikali 100%, dengan demikian tingkat capaian kinerja adalah sebesar ***Rp.185.543.756.2644/ 1.132.928.772.819* 100%*** sama dengan ***16,38%.***

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Bagian Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan 2 program dan 8 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp.1.078.642.500,- realisasi sebesar Rp.1.021.759.000,- atau sebesar **94,73%** dengan tingkat capaian sebesar **94,73**%, realisasi fisik sebesar **94,73%.** Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.183.

Tabel 3.183
Anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**1.078.642.500,-**	**1.021.759.000,-**	**94,73**
	Belanja Pegawai	280.165.000,-	245.975.000,-	87,80
	Belanja Barang dan Jasa	782.327.500,-	759.634.000,-	97,10
2.	**Belanja Modal**	**16.150.000,-**	**16.150.000,-**	**100,00**
	TOTAL	**1.078.642.500,-**	**1.021.759.000,-**	**97,73**

Sumber: Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.184.

Tabel 3.184
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Bagian Pengadaan Barang dan jasa Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**720.967.500**	**703.144.000**	**97,53**	**Selisih harga real tiket dengan pagu anggaran dalam DPPA dan tidak terbayarnya honorarium**	
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100**	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Jenis	2 Jenis	100	1.000.000	1.000.000	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**19.976.900**	**19.976.900**	**100**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan Daerah	6 orang	6 orang	100	18.406.000	18.406.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	650.000	650.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100	920.000	920.000	100	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**73.650.000**	**59.303.400**	**80,52**	**Selisih harga real tiket dengan pagu anggaran dalam DPPA**	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 orang	5 orang	100	73.650.000	59.303.400	80,52	Selisih harga real tiket dengan pagu anggaran dalam DPPA	-
1.4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**171.213.800**	**169.138.100**	**99,67**	**Selisih harga real tiket dengan pagu anggaran dalam DPPA**	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39 jenis	39 jenis	100	26.089.800	26.089.800	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84 OM	84 OM	100	2.940.000	2.940.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	100	15.154.000	15.154.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Penyediaan Bahan/Material	4 jenis	4 jenis	100	1.280.000	1.280.000	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 dokumen	9 dokumen	100	125.750.000	123.674.300	98,35	Selisih harga real tiket dengan pagu anggaran dalam DPPA	Selisih harga real tiket dengan yang diinput dalam DPPA
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**16.900.000**	**16.450.000**	**97,34**	**Tidak terbayarnya honorarium Pejebat Penerima Hasil Pekerjaan kerena sudah dihapus didalam Pepres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa**	**-**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit	100	16.900.000	16.450.000	97,34	Tidak terbayarnya honorarium Pejebat Penerima Hasil Pekerjaan kerena sudah dihapus didalam Pepres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa	-
1.6	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**423.476.000**	**422.662.000**	**99,90**	**Selisih pembayaran yang diakibatkan oleh kenaikan Pajak 11%**	**-**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	100	1.600.000	1.600.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 rekening	2 rekening	100	421.876.800	421.062.400	99,81	Selisih pembayaran yang diakibatkan oleh kenaikan Pajak 11%	-
1.7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**14.750.000**	**14.613.200**	**98.29**	**Selisih dari real pembayaran pajak kendaraan**	**-**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dnas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	4 unit	100	4.000.000	3.863.200	96,58	Selisih dari real pembayaran pajak kendaraan	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	15 unit	15 unit	100	10.750.000	10.750.000	100	-	-
2	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi Perekonomian dan Pembangunan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**357.675.000**	**318.615.000**	**91.73**	**Tidak terlaksananya proses PBJ yang bersumber dari dana Pinjaman Daerah dan keterbatsan pelaku UMKM**	-
2.1	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Sasaran: Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**272.565.000**	**238.825.000**	**87,62**	**Tidak terlaksananya proses PBJ yang bersumber dari dana Pinjaman Daerah dan keterbatsan pelaku UMKM**	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	350 paket	350 paket	100	272.565.000	238.825.000	87,62	Selisih pembayaran honorarium POKJA PEMILIHAN tidak terbayar, karena belanja PBJ yang bersumber dari Dana Pinjaman Daerah tidak di tenderkan	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	9 orang	9 orang	100	40.950.000	38.850.000	94,87	Selisih pembayaran honorarium Pengelola LPSE karena mutase personil	-
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 jenis	2 jenis	100	44.160.000	40.940.000	92,71	Tidak semua kecamatan dilaksanakan pendampingan e-katalog local dikarenakan tidak adanya pelaku usaha yang memenuhi syarat dan Infrastruktur	-
	JUMLAH				**100**	**1.078.642.500**	**1.021.759.000**	**94,73**		

Sumber: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

H. Bagian Administrasi Pembangunan

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 Bagian Administrasi Pembangunan menetapkan sasaran strategis: **Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah**, dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.185.

Tabel 3.185
Capaian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Persentase usulan kebijakan bidang Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	100	100
	Rata-rata				100
	Kategori			Memuaskan	

Sumber: Bagian Administarsi Pembangunan , Januari 2023

Sebagaimana data pada tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: Indikator kinerja **Persentase usulan kebijakan bidang Pembangunan yang ditindaklanjuti:**

- Ada 2 kebijakan strategis bidang pembangunan yang ditindaklanjuti, yaitu
  1. Bidang Pengendalian

     Kebijakan bidang pengendalian adalah Instruksi Bupati Manggarai Nomor: HK/36/2021 tentang Akselerasi Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022.

     Instruksi ini mengatur seluruh tahapan pelaksanaan urusan Pembangunan pada APBD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.Instruksi ini juga sudah mencakup 7 urusan bidang Pembangunan.
  2. Bidang Evaluasi

     Kebijakan yang diambil pada bidang evaluasi adalah berupa Surat-surat penegasan dan undangan rapat-rapat evaluasi

pelaksanaan Pembangunan, yaitu : Surat penegasan tentang pelaksanaan proyek-proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Surat undangan rapat evaluasi penyerapan APBD secara keseluruhan yang dilaksanakan setiap minggu. Surat-surat tersebut sudah mencakup 7 urusan bidang Pembangunan.

- Sesuai RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026, urusan bidang Pembangunan terdiri dari 7 urusan, yaitu :
  1. Bidang Infrastruktur, mencakup: Pembangunan jalan, jembatan, air minum bersih, bantuan perumahan layak huni, Pembangunan Rumah Sakit Pratama Reo, Puskesmas, Pembangunan/rehabilitasi sekolah-sekolah, dan irigasi.
  2. Bidang Kesehatan, mencakup: penanganan stunting, pengadaan Alkes dan obat-obatan, dll.
  3. Bidang Pendidikan, mencakup: peningkatan mutu Pendidikan formal dan non formal.
  4. Bidang pertanian, mencakup: bantuan benih dan pupuk, pendampingan penyuluh pertanian.
  5. Bidang Peternakan, mencakup: bantuan ternak dan penampingan penyuluh peternakan.
  6. Bidang Perikanan, mencakup: bantuan benih ikan dan pendampingan penyuluh perikanan.
  7. Jaminan Sosial, mencakup: penanganan dan penanggulangan bencana, Jamkesda, dan belanja bantuan sosial

b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Bagian Pembangunan melaksanakan 2 Program (1 program prioritas dan 1 program penunjang) dan 5 Kegiatan serta 13 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.422,617,872,- realisasi sebesar Rp.420,046,632, dengan tingkat capaian sebesar

99,39%, realisasi fisik 99,39%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.186.

Tabel 3.186
Anggaran Bagian Pembangunan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**422,617,872,-**	**420,046,632,-**	**99,39**
	Belanja Pegawai	13.350.000,-	13.350.000,-	100
	Belanja Barang dan Jasa	409.267.872,-	406.696.632,-	99,37
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**422,617,872,-**	**420,046,632,-**	**99,39**

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.187.

Tabel 3.187

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Persentase Urusan Rutin Pemerintah Yang Terpenuhi Sesuai Standar**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**208.260.648**	**206.340.492**	**99,08**	-	-
1.1	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**13.350.000**	**13.350.000**	**100**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium Pengelola APBD	4 Orang	4 Orang	100	13.350.000	13.350.000	100	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**134.320.648**	**133.754.492**	**99,58**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	43 jenis	43 jenis	100	47.559.548	47.559.548	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Harian Pegawai	240 OM	240 OM	100	7.200.000	7.200.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	100	11.781.100-	11.781.100	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan material kebersihan kantor	10 jenis	10 jenis	100	1.253.000	1.253.000	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah	7 Kali	7 Kali	100	66.527.000	65.960.680	99,15	-	-
1.3	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**8.400.000**	**7.484.554**	**89,10**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	100	1.800.000	1.200.000	66,67	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa kawat/ Faksimili/ Internet Tipe 3	12 Bulan	12 Bulan	100	6.600.000	6.284.554	95,22	-	-
1.4	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terpeliharanya barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**52.190.000**	**51.751.610**	**99,16**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional yang baik	6 unit	6 unit	100	49.500.000	49.061.610	99,11	-	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	6 unit	6 unit	100	2.690.000	2.690.000	100	-	-
2	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Sasaran: Terwujudnya Program Perekonomian da Pembangunan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**214.357.224**	**213.706.140**	**99,87**	-	-
2.1	**Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan**	**Sasaran: Tersedianya Data Program Pembangunan**	**1 Dok**	**1 Dok**	**100**	**22.780.000**	**22.598.000**	**99,20**	-	-
2.2	**Kegiatan Pengendalian dan Eavaluasi Program Pembangunan**	**Sasaran: Tersedianya data progress fisik Perangkat Daerah**	**1 Dok**	**1 Dok**	**100**	**175.635.224**	**175.227.740**	**99,77**	-	-
2.3	**Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaksanaan Pembangunan**	**Sasaran: Tersedianya Dokumen Penyerapan APBD Kabupaten Manggarai sesuai target**	**1 Dok**	**1 Dok**	**100**	**15.942.000**	**15.880.400**	**96,61**	-	-
	JUMLAH				**100**	**422.617.872**	**420.046.632**	**99,39**		

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

I. Bagian Kesejahteraan Rakyat

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, Bagian Kesejahteraan Rakyat menetapkan sasaran strategis: **"Terwujudnya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat"**, dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.188.

Tabel 3.188
Capaian Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1.	Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase masyarakat kurang mampu yang sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan	100 % (23.631 orang)	100 % (23.631 orang)	100
		Persentase jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan Sehat (sosialisasi bahaya HIV/AIDS dan Narkoba	50 Orang (1 Lokasi)	100%	100
	Rata-rata				100
	Kategori			Memuaskan	

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Januari 2023

b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan 2 Program, 6 Kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11,905.689,144,- realisasi sebesar Rp.11,834,091,109,- dengan tingkat capaian sebesar 99,40%, realisasi fisik 100%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.189.

Tabel 3.189
Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**11.905.689.144,-**	**11.834.091.109,-**	**99.40**
	Belanja Pegawai	40.893.840,-	40.893.840,-	100
	Belanja Barang dan Jasa	11.114.794.312,-	11.044.697.269,-	99,37
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	750.000.992,-	748.500.000,-	99,80
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**11.905.689.144,-**	**11.834.091.109,-**	**99.40**

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.190.

Tabel 3.190
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**104.907.840**	**103.726.252**	**98,87**	-	-
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**555.000**	**555.000**	**100**	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	1 tahun	100	555.000	555.000	100	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**40.893.840**	**40.893.840**	**100**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan Daerah	7 orang	7 orang	100	40.893.840	40.893.840	100	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**156.926.000**	**155.485.775**	**99**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 jenis	36 jenis	100	17.925.500	17.925.500	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 tahun	1 tahun	100	1.500.000	1.500.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	100	1.000.000	1.000.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	100	840.000	840.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	10 jenis	10 jenis	100	523.500	523.500	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1 tahun	100	18.870.000	18.806.106	99,66	-	-
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**800.000**	**800.000**	**100**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 tahun	1 tahun	100	800.000	800.000	100	-	-
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**22.000.000**	**20.882.306**	**94,91**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	2 unit	100	20.000.000	18.882.306	94,41	-	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	12 unit	12 unit	100	2.000.000	2.000.000	100	-	-
2	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**11.800.781.304**	**11.730.364.857**	**99,40**	-	-
2.1	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Sasaran: Terwujudnya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**11.800.781.304**	**11.730.364.857**	**99,40**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 tahun	1 tahun	100	31.100.000	18.125.000	58,27	-	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1 tahun	1 tahun	100	11.683.966.104	11.628.115.240	99,52	-	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Tersedianya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1 tahun	1 tahun	100	85.715.200.	84.124.617	98,14	-	-
	JUMLAH				**100**	**11.905.689.144**	**11.834.091.109**	**99,40**		

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

J. Bagian Kerja Sama

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Manggarai menetapkan sasaran strategis: "**Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah**", dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.191.

Tabel 3.191
Capaian Kinerja Bagian Kerja Sama
Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1.	Meningkatnya Sistem pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	100	100	100
	Rata-rata				100
	Kategori			Memuaskan	

Sumber: Bagian Kerja Sama Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

Sebagaimana data pada tabel di atas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

- Indikator: Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani

  Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 100,00% dari target yang ditetapkan 100,00% dengan tingkat capaian 100,00%. Presentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani diukur dengan jumlah Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani di bagi Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang diprakarsai.

  Pada Tahun Anggaran 2022 Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang yang ditandatangani sebanyak 6 (enam) dibagi Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang diprakarsai sebanyak 6 (enam) Dokumen. dengan demikian tingkat capain kinerja sebesar 6 (enam) Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani/ 6 (enam) Perjanjian Kerja Sama yang Diprakarsai * 100% sama dengan 100,00%.

  Untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Sistem pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah** yang diukur melalui indikator *Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Ditandatangani*, pada tahun 2022, Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Manggarai melakukan Inisiasi Kerja Sama Antar Daerah dengan Daerah Lain, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi dengan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah dan Sub Kegiatan Fasiltasi Kerja Sama Dalam Negeri, Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Manggarai melaksanakan 2 Program, 5 Kegiatan dan 11 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.215,000,000,00,- realisasi sebesar Rp.214.304.500,00,- dengan tingkat capaian sebesar 99,68 %. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.192.

Tabel 3.192
Anggaran Bagian Kerja sama Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**215.000.000,00,-**	**214.304.500,00,-**	**99.68**
	Belanja Pegawai	9.100.000,00,-	9.100.000,00,-	100
	Belanja Barang dan Jasa	205.900.000,00,-	205.204.500,00,-	99,66
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**215.000.000,00,-**	**214.304.500,00,-**	**99.68**

Sumber: Bagian Kerja Sama Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.193.

Tabel 3.193
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Bagian Kerja Sama Setda Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan,Pembangunan Dan Kemasyarakatan Pengendalian Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**117.298.000,00**	**117.020.800,00**	**99,76**	**-**	**-**
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**750,000,00**	**750,000,00**	**100**	**-**	**-**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100	750,000,00	750,000,00	100	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**9.100.000,00**	**9.100.000,00**	**100**	**-**	**-**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	100	9.100.000,00	9.100.000,00	100	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**106.148.000,00**	**105.879.800,00**	**99,75**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100	9.790.000,00	9.748.000,00	99,57	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100	5.250.000,00	5.235.000,00	99,71	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100	6.000.000,00	5.973.000,00	95,55	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100	1.853.000,00	1.853.000,00	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100	83.255.000,00	83.255.000,00	99,78	-	-
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.300.000**	**1.300.000**	**100**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 tahun	1 tahun	100	1.300.000	1.300.000	100	-	-
2	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Sasaran: Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**97.702.000,00**	**97.283.700,00**	**99,57**	-	-
2.1	**Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Kerja Sama Antar Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Dalam Negeri dan luar Negeri**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**97.702.000,00**	**97.283.700,00**	**99,57**	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Yang Ditandatangani	5 Dok	5 Dok	100	77.672.000,00	77.397.700,00	99,65	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Yang Ditandatangani	1 Dok	1 Dok	100	350.000,00	350.000,00	100	-	-
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama	1 Lap	1 Lap	100	19.680.000,00.	19.536.000,00	99,27	-	-
	JUMLAH				**100**	**215.000.000,00**	**214.304.500,00**	**99,68**		

Sumber: Bagian Kerja Sama Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

9. Urusan Kecamatan

A. Kecamatan Langke Rembong

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Langke Rembong menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.194
Capaian Kinerja Kecamatan Langke Rembong
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	IKM Kecamatan	76,61	80,52	105,10
		Persentase Layanan Kecamatan Sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %	100
2.	Meningkatnya Fungsi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100
3.	Meningkatnya Fungsi Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemeberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100
	Rata-rata				100
	Kategori			Memuaskan	

Sumber: Kecamatan Langke Rembong Kab. Manggarai, Januari 2023

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan terdapat dua indikator penilaian. Pertama, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2022 nilai IKM kecamatan Langke Rembong yaitu 76,61. Hasil survey kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan di kecamatan Langke Rembong, nilai IKM kecamatan Langke Rembong mencapai 80,52 atau mencapai 105,10 % dengan kategori baik. Kedua, persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan. Untuk indikator yang ke dua, kecamatan Langke Rembong telah menetapkan

sebanyak 26 jenis produk pelayanan berupa surat keterangan yang dilegalisasi dalam standar pelayanan di kecamatan. Kecamatan Langke Rembong telah melaksanakan proses legalisasi semua produk pelayanan (realisasi 100 %) sesuai standar pelayanan dengan tetap memperhatikan persyaratan pelayanan yang ada.

2. Meningkatnya Fungsi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Indikatornya adalah persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti. Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk sasaran strategis ke dua di kecamatan Langke Rembong mencapai 100 %. Langkah-langkah koordinasi dalam rangka tugas pemerintahan umum bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan melalui kegiatan diseminasi yang dilaksanakan di 20 kelurahan. Hal lain yang dilaksanakan yaitu penanganan konflik sosial yang terjadi di kelurahan dalam wilayah kecamatan Langke Rembong untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Meningkatnya Fungsi Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa/Kelurahan. Indikatornya adalah Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti. Kecamatan Langke Rembong telah melaksanakan pembinaan terhadap seluruh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ada di wilayah kecamatan. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dimaksudkan antara lain Ketua RT, Ketua RW, PKK, LPMK dan Posyandu. Di bidang pembangunan telah dilaksanakan kegiatan Musrenbang RKPD di 20 kelurahan dan di tingkat kecamatan dengan menghasilkan dokumen pelaksanaan Musrenbang, pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam wilayah kecamatan, dan pelaksanaan kegiatan Sabtu Bersih di kelurahan untuk menjaga dan merawat hasil pembangunan di kecamatan Langke Rembong.

Realisasi capaian kinerja untuk sasaran strategis yang ke tiga mencapai 100 %.

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai pada Tahun 2022 melaksanakan 4 Program (3 program prioritas dan 1 program penunjang) dan 10 Kegiatan 18 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **11.105.391.655**,- realisasi sebesar Rp. **10.489.295.480**,- dengan tingkat capaian sebesar **94,45**%,. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.195.

Tabel 3.195
Anggaran Kecamatan Langke Rembong Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**11.105.391.655**	**10.489.295.480**	**94,45**
	Belanja Pegawai	8.129.532.787	7.521.840.564	92,52
	Belanja Barang dan Jasa	2.975.858.868	2.967.454.916	99,72
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	
	TOTAL	**11.105.391.655**	**10.489.295.480**	**94,45**

Sumber: Kecamatan Langke Rembong Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.196.

Tabel 3.196
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Langke Rembong Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Belanja Tidak Langsung					**8.107.032.787**	**7.503.240.564**	**92,55**		
	Belanja Langsung					**2.998.358.868**	**2.986.056.916**	**99,59**		
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**9.539.820.355**	**8.925.781.610**	**93,56**	**-**	**-**
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**10.943.400**	**10.943.400**	**100**	**-**	**-**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksanaya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	100	9.943.400	9.943.400	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	1 tahun	100	1.000.000	1.000.000	100	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**9.162.024.055**	**8.552.697.444**	**93,35**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	85 orang	85 orang	100	8.107.032.787	7.503.240.564	92,55	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor RT/RW, Honor THL, Upah Operator Roda Tiga (tiga)	488 orang	488 orang	100	1.054.991.268	1.049.456.880	99,48	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**216.018.000**	**214.517.050**	**99**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41 jenis	41 jenis	100	139.362.800	139.362.800	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	100	64.805.200	64.805.200	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Kali	1 Kali	100	11.850.000	10.349.050	87,33	-	-
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**48.450.000**	**45.690.800**	**94,31**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	100	9.600.000	9.600.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	100	38.850.000	36.090.800	92,90	-	-
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**102.384.900**	**101.932.916**	**99,56**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Jenis	4 Jenis	100	56.800.000	56.348.016	92,20	-	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	2 Jenis	2 Jenis	100	45.584.900	45.584.900	100	-	-
2	**Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**999.195.900**	**999.195.900**	**100**	-	-
2.1	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**477.093.900**	**477.093.900**	**100**	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Teelaksanya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	317.093.900	317.093.900	100	-	-
	Sub Kegiatan Sewa Gedung Kantor/Tempat Kerja	Tersedianya Sewa Gedung Kantor/Tempat Kerja	8 Unit	8 Unit	100	160.000.000	160.000.000	100	-	-
2.2	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unut Kerja Perangkat daerah yang Ada di Kecamatan**	**Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unut Kerja Perangkat daerah yang Ada di Kecamatan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**522.102.000**	**522.102.000**	**100**	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksanya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 tahun	1 tahun	100	261.702.000	261.702.000	100	-	-
2.3	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Sasaran: Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**260.400.000**	**260.400.000**	**100**	-	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan ururan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Pelaksanaan ururan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 tahun	1 tahun	100	260.400.000	260.400.000	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
3	Program Program Pemberdayaan Masyrakat Desa Dan Kelurahan	Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan	1 tahun	1 tahun	100	517.475.400	515.417.970	99,60	-	-
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Sasaran: Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	1 tahun	1 tahun	100	200.000.000	200.000.000	100	-	-
3.2	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Pra Sarana Kelurahan	Sasaran: Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Pra Sarana Kelurahan	1 tahun	1 tahun	100	317.475.400	315.417.970	99,35	-	-
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Sasaran: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 tahun	1 tahun	100	48.900.000	48.900.000	100	-	-
4.1	Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan	Sasaran: Terlaksanya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	100	48.900.000	48.900.000	100	-	-
	JUMLAH				100	11.105.391.655	10.489.295.480	94,45		

Sumber: Kecamatan Langke Rembonng Kab. Manggarai, Januari 2023

B. Kecamatan Wae Ri'i

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, kecamatan Wae Rii menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu **"Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan"** dengan indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.197
Capaian Kinerja Kecamatan Wae Rii
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dok	1 Dok	100
		2. Persentase Penerimaan PBB dari Kecamatan Wae Ri'i	204.339.242	156.467.123	75,57
		3. Informasi Pembangunan kepada Masyarakat	17 Desa	17 Desa	100
	Rata-rata				91,85
	Rata-rata			Sangat Baik	

Sumber: Kecamatan Wae Rii, Januari 2023

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat dijelaskan rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Dokumen Perencanaan. Target yang direncanakan pada tahun 2022 sebanyak 1 dokumen dengan realisasi 100% pada akhir tahun 2022. Dokumen perencanaan yang dimaksud merupakan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan Wae Rii tahun 2022.

b. Persentase Penerimaan PBB Kecamatan Wae Rii. Target capaian penerimaan PBB pada tahun 2022 adalah 100% dengan realisasi penerimaan sebesar 76,57%. Dalam mencapai target dari indikator ada beberapa elemen yang harus mengambil bagian atau peran aktif yakni:
   - Badan Keuangan Kabupaten Manggarai berkaitan dengan penerbitan DHKP dan SPPT Pajak PBB serta berkaitan dengan pemutakhiran data PBB;
   - Pemerintah Kecamatan berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan pemutakhiran dan penagihan PBB;
   - Pemerintah Desa berkaitan dengan pemutakhiran data, penagihan dan penyetoran PBB ke rekening Kas Daerah.

c. Tersebarnya informasi pembangunan kepada masyarakat. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 17 desa dalam melakukan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaandan Pengawasan Pemerintahan Desa. Realisasi dari indikator ini sebesar 100%. Semua desa di wilayah Kecamatan Wae Rii telah menerima informasi pembangunan dan informasi lainnya yang terkait. Penyebaran informasi pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan sebagai berikut:
   - Mendampingi pelaksanaan musrenbangdes RKPDes dan penyusunan RKPDes;
   - Melaksanakan evaluasi APBDes;
   - Memverifikasi dokumen SPP untuk rekomendasi pencairan di Bank NTT;
   - Memverifikasi dokumen SPJ;
   - Memfasilitasi pemekaran desa di wilayah Kecamatan Wae Rii;
   - Mendampingi tim verifiaksi faktual dan administrasi desa persiapan;

- Meverifikasi dokumen penerima BLT yang bersumber dari DANA DESA;
- Melakukan monitoring terhadap tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Wae Rii.

b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Kecamatan Wae Ri'i melaksanakan 4 Program dan 9 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.958.586.857,- realisasi sebesar Rp1.888.601.559,- dengan tingkat capaian sebesar 96,43%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.198.

Tabel 3.198
Anggaran Kecamatan Wae Ri'i
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**1.958.586.857**	**1.888.601.559**	**96,43**
	Belanja Pegawai	1.752.337.347	1.687.662.743	96,31
	Belanja Barang dan Jasa	206.249.510	200.938.816	97,43
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**1.958.586.857**	**1.888.601.559**	**96,43**

Sumber: Kecamatan Wae Ri'i Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.199

Tabel 3.199
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Wae Ri'i Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran: Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 tahun	1 tahun	100	1.812.919.347	1.744.634.059	96,32	-	-
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	100	1.020.000	1.020.000	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD (LKPj,LPPD, LAKIP, LRA, Neraca, dll)	5 Dok	5 Dok	100	1.020.000	1.020.000	100	-	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.752.337.347**	**1.687.662.734**	**96,31**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100	1.734.337.347	1.669.662.734	96,27	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor Pengelola APBD	5 orang	5 orang	100	18.000.000	18.000.000	100	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**216.018.000**	**214.517.050**	**99**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 jenis	12 jenis	100	10.982.000	10.982.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	1 Tahun	100	7.400.00	7.400.00	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.200 Lembar	10.200 Lembar	100	2.400.000	2.400.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor	7 jenis	7 jenis	100	570.000	570.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Kali	1 Kali	100	0,00	0,00	0,00	-	-
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**6.210.000**	**6.210.000**	**100**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya	2 jenis	2 jenis	100	810.000	810.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air	2 Rek	2 Rek	100	5.400.000	5.400.000	100	-	-
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**32.000.000**	**29.583.325**	**92,45**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/ operasinal yang layak	6 Unit	6 Unit	100	32.000.000	29.583.325	92,45	-	-
2	**Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**36.390.000**	**34.690.000**	**95,3**	-	-
2.1	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**27.720.000**	**26.020.000**	**93,8**	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan sinkronisasi Pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kabupaten	1 tahun	1 tahun	100	27.720.000	26.020.000	93,8	-	-
2.2	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**8.670.000**	**8.670.000**	**100**	-	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terwujudnya peningkatan PAD	1 tahun	1 tahun	100	8.670.000	8.670.000	100	-	-
3	**Program Program Pemberdayaan Masyrakat Desa Dan Kelurahan**	**Sasaran: Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100**	-	-
3.1	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Sasaran: Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**17 Desa**	**17 Desa**	**100**	**200.000.000**	**200.000.000**	**100**	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Data dan Informasi	17 Desa	17 Desa	100	200.000.000	200.000.000	100	-	-
4	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**89.277.500**	**89.277.500**	**100**	-	-
4.1	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Sasaran: Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**89.277.500**	**89.277.500**	**100**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Desa	17 Desa	100	16.660.000	16.660.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 Desa	17 Desa	100	12.580.000	12.580.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17 Desa	17 Desa	100	60.037.500	60.037.500	100	-	-
	JUMLAH				**100**	**1.958.586.857**	**1.888.601.559**	**96,43**		

Sumber: Kecamatan Wae Ri'i Kab. Manggarai, Januari 2023

C. Kecamatan Cibal

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kecamatan Cibal menetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Strategis dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.200
Capaian Kinerja Kecamatan Cibal
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya pemutahiran data dan penagihan PBB di Kecamtan Cibal	Jumlah Penerimaan PBB Kecamatan Cibal	Rp.174.292.087	Rp.176.787.928	87,82
2.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cibal	% kasus yang tertangani	100 %	100 %	100
3.	Terwujudnya penyelenggaraan diseminiasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan	Jumlah desa/kel diseminasi informasi	16 Desa/1 Kel	100%	100
4.	Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Desa dan kelurahan	16 Desa/1 Kel	100%	100
5.	Terwujudnya Pelaksanaan kegiatan Musrenbangcam tingkat Kecamatan Cibal	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	100%	100%	100
	Rata-rata				97,56
	Kategori			Sangat Baik	

Sumber: Kecamatan Cibal Kab. Manggarai, Januari 2023

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Dalam mencapai target dari indikator ada beberapa elemen yang harus mengambil bagian atau peran aktif yakni:
   a. Badan Keuangan Kabupaten Manggarai berkaitan dengan penerbitan DHKP dan SPPT Pajak PBB serta berkaitan dengan pemutakhiran data PBB.
   b. Pemerintah Kecamatan berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan pemutakhiran dan penagihan PBB.
   c. Pemerintah Desa berkaitan dengan pemutakhiran data, penagihan dan penyetoran PBB ke rekening Kas Daerah.
   d. Masyarakat berkaitan dengan kewajiban dan kesadaran untuk membayar pajak
2. Persentase Konflik Masyarakat yang Difasilitasi Penyelesaiannya. Pada tahun 2022 terdapat sejumlah 1 konflik yang berhasil difasilitasi, yaitu:
   - Tanah SMPN 10 Cibal dan SMAN 1 Cibal diklaim oleh Saudari Veronika Rewe sebagai tanah warisan dari alm. Martinus Poung suaminya. Telah dilaksanakan klarifikasi yang ke-3 (tiga) dan pihak Veronika Rewe meminta untuk direkontruksi ulang oleh BPN. Tanah dimaksud bersertipikat BPN Nomor 1 Tahun 2003 dan sah milik Pemerintah. Telah dikeluarkan 3 (tiga) kali peringatan oleh Pemerintah Kecamatan namun tidak diindahkan. Masalah ini sudah dilaporkan ke Tingkat Kabupaten untuk penanganan lebih lanjut dan diusulkan untuk melakukan penertiban aset Pemerintah.
   - Masalah tanah SDI Bea Noning Desa Golo Ncuang dimana tanah dimaksud pada tahun 2022 diklaim oleh Saudari Petronela Damul sebagai warisan dari alm. Gabirel Popa suaminya tetapi tidak memiliki bukti/dokumen. Telah dilakukan klarifikasi di Desa dan di Kantor Kecamatan Cibal pada tanggal 13 Januari 2023 dan yang bersangkutan tetap mengklaim bahwa tanah tersebut adalah warsan suaminya. Berdasarkan keterangan dari para tu'a adat Gendang Wangko,

Gendang Watang dan Gendang Poka bahwa tanah tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah oleh masyarakat desa Golo Ncuang yang salah satunya adalah saudari Marta Linut (mertua dari Petronela Damul) untuk pembangunan fasiltas umum pada tahun 1982 dan pada tahun itu juga dibangun gedung SDI Bea Noning. Demikian juga dengan keterangan dari saudari **Marta Linut** bahwa sebagaian tanah yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai merupakan miliknya (warisan dari almarhun suaminya Niko Nolo). Pemerintah Kecamatan telah mengeluarkan 2 (dua) kali surat peringatan kepada yang bersangkutan untuk melakukan pembongkaran terhadap pagar yang dibuat. Setelah dikeluarkan peringatan ke 3 (tiga) apabila tidak diindahkan maka akan dilakukan penertiban oleh Pemerintah.

3. Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi Masyarakat di 16 Desa/1 kelurahan. Pada tahun 2022, Pemerintah Kecamatan melakukan kegiatan diseminasi sekaligus pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa yakni:
   a. Mendampingi pelaksanaan musrenbangdes RKPDes dan penyusunan RKPDes;
   b. Melaksanakan evaluasi APBDes;
   c. Memverifikasi dokumen SPP untuk rekomendasi pencairan di Bank NTT;
   d. Memverifikasi dokumen SPJ;
   e. Meverifikasi dokumen penerima BLT yang bersumber dari DANA DESA.
4. Terlaksanya kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa dan Kelurahan, kegiatannya:
   a. Monitoring Kegiatan Posyandu di 16 Desa/1 Kelurahan;
   b. Pendataan Kelembagaan PKK Desa/Kelurahan, Pendataan Catatan Keluarga Kelompok Dasa Wisma, Data Stunting di 16 Desa/1 kelurahan;

5. Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan, kegiatannya Pelaksanaan Musrenbang di 16 Desa/ 1 Kelurahan dan kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamtan Cibal.

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Kantor Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai pada Tahun 2021 melaksanakan 4 Program 9 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.304.007.289,- realisasi sebesar Rp2.257.242.753,- atau sebesar 97,97%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.200.

Tabel 3.200
Anggaran Kecamatan Cibal Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	**Belanja Operasi**	**2.304.007.289,-**	**2.257.242.753,-**	**97,97**
	Belanja Pegawai	1.945.338.465,-	1.923.691.738-	98,88
	Belanja Barang dan Jasa	358.668.824,-	333.551.015,-	92,99
2	**Belanja Modal**	-	-	-
	TOTAL	**2.304.007.289,-**	**2.257.242.753,-**	**97,97**

Sumber: Kecamatan Cibal Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.201.

Tabel 3.201
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Cibal Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**2.185.634.289**	**2.141.029.953**	**97,95**	-	-
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**5.780.000**	**5.780.000**	**100**	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	1 tahun	100	5.780.000	5.780.000	100	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**2.014.065.789**	**1.991.212.738**	**98,86**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100	1.945.338.465	1.923.691.738	98,88	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor Pengelola Keuangan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100	68.727.324	67.521.000	98,24	-	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**117,408,500**	**108,987,000**	**92,82**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	1 Tahun	1 Tahun	100	4.750.000	4.750.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100	52.093.500	52.093.500	100	-	-
	Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan/Material	1 Tahun	1 Tahun	100	31.150.000	27.648.500	88,75,	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	100	3.515.000	3.515.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	100	1.080.000	1.080.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	100	24.820.000	19.900.000	80,17	-	-
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**9.700.000**	**4.811.000**	**49,59**	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	100	2.500.000	1.850.000	74	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air	1 Tahun	1 Tahun	100	7.200.000	2.961.000	41,12	-	-
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal**	**7 Unit**	**7 Unit**	**100**	**38.680.000**	**30.239.015**	**78,17**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	1 Tahun	100	33.000.000	26.669.015	80,81	-	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	1 Tahun	1 Tahun	100	5.680.000	3.570.000	62,85	-	-
2	**Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**43.403.000**	**41.243.000**	**95,02**	-	-
2.1	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**24.463.000**	**24.463.000**	**100**	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 tahun	1 tahun	100	24.463.000	24.463.000	100	-	-
2.2	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Sasaran: Terlaksananya urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**18.940.000**	**16.780.000**	**88,59**	-	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penagihan PBB	1 tahun	1 tahun	100	18.940.000	16.780.000	88,59	-	-
3	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan Urusan pemerintah Umum**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**22.320.000**	**22.320.000**	**100**	-	-
3.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**16.950.000**	**16.950.000**	**100**	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Kegiatan HUT Kemerdekaan RI	1 Kali	1 Kali	100	16.950.000	16.950.000	100	-	-
3.2	**Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masyarakat dan Masalah Sosial Lainnya**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**5.370.000**	**5.370.000**	**100**	-	-
4	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**52.650.000**	**52.650.000**	**100**	-	-
4.1	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Sasaran: Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah desa**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**52.650.000**	**52.650.000**	**100**	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 tahun	1 tahun	100	10.350.000	10.350.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasiliatsi Pelaksanaan Tugas Kepala desa dan Perangakat desa	1 tahun	1 tahun	100	7.450.000	7.450.000	100	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 tahun	1 tahun	100	34.850.000	34.850.000	100	-	-
	JUMLAH				**100**	**2.304.007.289**	**2.257.242.753**	**97,97**		

Sumber: Kecamatan Cibal Kab. Manggarai, Januari 2023

D. Kecamatan Cibal Barat

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibal Barat Tahun Anggaran 2022, menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja seperti dalam tabel3.202.

Tabel 3.202
Capaian Kinerja Kecamatan Cibal Barat
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB di Kec. Cibal Barat	Jumlah Penerimaan PBB Kecamatan Cibal Barat	94.539.818	94.539.818	100
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kec. Cibal Barat	% Kasus yang tertangani	10 desa	100%	100
3.	Terwujudnya Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terwujudnya Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	10 desa	100%	100
4.	Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	10 desa	100%	100
5.	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	1 dokumen	100%	100
	Rata-rata				100
	Kategori			Memuaskan	

Sumber: Kecamatan Cibal Barat Kab. Manggarai, Januari 2023

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Jumlah Penerimaan PBB Tahun 2022 Mencapai target realisasi 100%
2. Penyelesaian masalah adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menghilangkan masalah dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Ukuran keberhasilan dari indikator ini adalah terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah yang dilaporkan dari masyarakat pada tingkat kecamatan. Sasaran dari indikator ini adalah seluruh masyarakat 10 desa yang ada di kecamatan Cibal Barat.

3. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa adalah suatu kegiatan menfasiltasi, pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan efisien dan efektif sesuai norma standar, prosedur dan kriteria serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Posyandu atau Pos pelayanan terpadu adalah salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dari dan bersama masyarakat untuk memperdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak Balita Posyandu juga sebagai indikator dasar untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Sasaran indikator ini adalah Ibu dan Balita yang ada pada 10 desa di Kecamatan Cibal Barat. Ukuran keberhasilan dari indikator ini terlaksananya pelayanan posyandu secara rutin berupa mendampingi bidan dalam melaksanakan kegiatan penimbangan bayi, vaksinasi BCG, DPT, CAMPAK, POLIO, dll yang ada pada 10 desa di Kecamatan Cibal Barat.
5. Dokumen Perencanaan dimaksud adalah Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah. Dokumen ini merupakan turunan dari dokumen Renstra yang merupakan dokumen induk perencanaan pada perangkat daerah yang bersangkutan. Dokumen Renja berisikan rencana program dan kegiatan yang sudah termuat di dalam Renstra dan pelaksanaannya didahului dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan. Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka memastikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas tingkat Kecamatan dan desa diakomodir dalam tahun berkenan atau di waktu yang akan datang.

   Ukuran keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah terlaksananya Musrenbang Kecamatan Cibal Barat pada Triwulan satu dan tersedianya Dokumen Renja.

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai melaksanakan 5 program dan 10 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.423.560.791,- realisasi sebesar Rp.1.367.073.223,- atau sebesar 96,03%.

Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.203.

Tabel 3.203
Anggaran Kecamatan Cibal Barat Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**1.423.560.791,-**	**1.367.073.223,-**	**96,03**
	Belanja Pegawai	1.190.543.467,-	1.136.342.223,-	95,44
	Belanja Barang dan Jasa	233.017.324,-	230.731.000,-	99,01
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**1.423.560.791,-**	**1.367.073.223,-**	**96,03**

Sumber: Kecamatan Cibal Barat Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.204.

Tabel 3.204
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Cibal Barat Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Belanja Tidak Langsung					**1.423.560.791**	**1.367.073.223**	**96,03**		
	Belanja Langsung					**233.017.324**	**230.731.000**	**99,01**		
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai**	**Sasaran: Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**					
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.500.000**	**1.500.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	1 tahun	100	1.500.000	1.500.000	100	Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill	Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.232.100.791**	**1.136.342.223**	**95,44**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	15 Orang	100	1.190.543.467	1.136.342.223	95,44		
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor THL,	4 Orang	4 Orang	100	62.468.000	61.628.000	98,65		
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**62.468.000**	**61.628.000**	**98,652**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	15 jenis	15 Jenis	100	2.700.000	2.700.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Jenis	35 Jenis	100	35.260.000	35.260.000	100		
	Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 jenis	2 jenis	100	12.000.000	12.000.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	100	1.997.500	1.997.500	98,61		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	0,00	840.000	0,00	0,00	Hal ini disebabkan tidak adanya Aagen Surat Kabar di Kecamatan Cibal Barat	Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai Dengan kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Penyediaan Bahan/ Material	15 Jenis	15 Jenis	100	2.650.000	2.650.000	100		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	100	7.020.000	7.020.000	100		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**8.200.000**	**8.200.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100 lembar	100 lembar	100	1.600.000	1.600.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air	2 rekening	2 rekening	100	6.600.000	6.600.000	100		
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**23.250.000**	**23.250.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	7 Unit	100	21.000.000	21.000.000	100		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	9 unit	9 unit	100	2.250.000	2.250.000	100		
2	**Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**26.322.000**	**26.252.000**	**99,77**		
2.1	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**43.360.900**	**43.360.900**	**100**		
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Terlaksanya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	17.072.000	17.072.000	100		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan ururan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Pelaksanaan ururan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	15 Desa	15 Desa	100	9.250.000	9.180.000	99	Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill	Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
3	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan**	**Sasaran: Terlaksanya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**98**	**10.200.000**	**10.030.000**	**98**		
3.1	**Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Sasaran:**	**15 Desa**	**15 Desa**	**98**	**10.200.000**	**10.030.000**	**98**		
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksanya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Desa	15 Desa	98	10.200.000	10.030.000	98	Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill	Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan
4	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Sasaran: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**26.710.000**	**26.710.000**	**100**		
4.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**14.300.000**	**14.300.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,pelaksanaan UUD NKRI Tahun 1945,pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, Serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	Terlaksananya Kegiatan HUT Kemerdekaan RI	1 kegiatan	1 kegiatan	100	14.300.000	14.300.000	100		
4.2	**Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**Sasaran: Terlaksanya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**15 desa**	**15 desa**	**100**	**33,810,000**	**33,810,000**	**100**		
5	**Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**33.810.000**	**33.810.000**	**100**		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
5.1	**Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah desa**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**33.810.000**	**33.810.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksanaya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15 desa	15 desa	100	4.250.000	4.250.000	100		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksanaya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15 desa	15 desa	100	4.250.000	4.250.000	100		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksanaya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 desa	15 desa	100	4.250.000	4.250.000	100		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang - undangan	Terlaksanaya Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang - undangan	15 desa	15 desa	100	1.530.000	1.530.000	100		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksanaya Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15 desa	15 desa	100	4.250.000	4.250.000	100		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksanaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15 desa	15 desa	100	510.000	510.000	100		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksanaya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15 desa	15 desa	100	2.040.000	2.040.000	100		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksanaya.Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15 desa	15 desa	100	2.040.000	2.040.000	100		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 desa	15 desa	100	1.530.000	1.530.000	100		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksanaya.Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15 desa	15 desa	100	2.040.000	2.040.000	100		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksanaya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	15 desa	15 desa	100	2.040.000	2.040.000	100		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksanaya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15 desa	15 desa	100	2.040.000	2.040.000	100		
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksanaya fasilitasi,rekomendasi,dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	15 desa	15 desa	100	2.040.000	2.040.000	100		
	JUMLAH				**100**	**1.423.560.791**	**1.367.073.223**	**96,03**		

Sumber: Kecamatan Cibal Barat Kab. Manggarai, Januari 2023

E. Kecamatan Reok

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Reok menetapkan sasaran strategis dan inidkator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.205
Capaian Kinerja Kecamatan Reok
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB di Kec. Reok	Jumlah Penerimaan PBB Kecamatan Reok	Rp.455.663.253	Rp.217.294;294	47,69
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	6 Dokumen	5 Dokumen	83
3.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kec. Reok	% Kasus yang tertangani	6 Desa 4 Kelurahan	100%	100
4.	Terlaksananya pelayanan posyandu secara rutin	Monitoring Pelayanan Posyandu bagi Balita	6 Desa 4 Kelurahan	100%	100
5.	Terwujudnya Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyrakat desa/Kel	Jumlah Kelurahan Diseminasi Informasi	6 Desa 4 Kelurahan	100%	100
	Rata-rata				86,13
	Kategori			Sangat Baik	

Sumber: Kecamatan Reok Kab. Manggarai, Januari 2023

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Jumlah Penerimaan PBB adalah Besaran pajak bumi dan bangunan yang dapat ditagih dan dapat disetorkan sebagai pendapatan daerah. Ukuran keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah: realisasi

penerimaan PBB Kecamatan Reok pada akhir tahun 2022 adalah 47,69 %.

2. Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia

   Dokumen Perencanaan dimaksud adalah Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah. Dokumen ini merupakan turunan dari dokumen Renstra yang merupakan dokumen induk perencanaan pada perangkat daerah yang bersangkutan. Dokumen Renja berisikan rencana program dan kegiatan yang sudah termuat di dalam Renstra dan pelaksanaannya didahului dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan. Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka memastikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas tingkat Kecamatan dan desa diakomodir dalam tahun berkenan atau di waktu yang akan datang.

   Ukuran keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah: terlaksananya Musrenbang Kecamatan Reok pada Triwulan satu (yaitu bulan Februari 2022) dan tersedianya Dokumen Renja.

3. Persentase Masalah Yang diselesaikan

   Penyelesaian masalah adalah: usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menghilangkan masalah dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Ukuran keberhasilan dari indikator ini adalah: terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah yang dilaporkan dari masyarakat pada tingkat kecamatan.sasaran dari indikator ini adalah seluruh masyarakat 6 desa/4 kelurahan yang ada di kecamatan di Reok.

4. Monitoring Pelayanan Posyandu bagi Balita

   Posyandu atau Pos pelayanan terpadu adalah salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dari dan bersama masyarakat untuk memperdayakan danmemberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak Balita Posyandu juga sebagai indikator dasar untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat.

   Sasaran indikator ini adalah: Ibu dan Balita yang ada pada 6 desa/4 kelurahan di Kecamatan Reok. Ukuran keberhasilan dari indikator ini: terlaksananya pelayanan posyandu secara rutin berupa

mendampingi bidan dalam melaksanakan kegiatan penimbangan bayi,vaksinasi BCG, DPT, CAMPAK, POLIO, dll yang ada pada 6 desa/4 kelurahan di Kecamatan Reok.

5. Diseminasi Bagi Masyarakat Desa/Kelurahan

   Diseminasi adalah: Suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar memperoleh informasi,timbul kesadaran menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Indikator ini dilaksanakan pada 6 Desa/ 4 kelurahan berupa pembinaan dan monitoring kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada tingkat Kelurahan dan Desa di wilayah Kecamatan Reok. Sasaran indikator ini adalah Seluruh Masyarakat yang ada pada 6 desa/4 kelurahan di Kecamatan Reok. Ukuran keberhasilan dari indikator ini: tersebarnya informasi pembangunan bagi masyarakat di Kecamatan Reok

b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Kecamatan Reok melaksanakan 5 Program dan 11 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.274.623.603,- realisasi sebesar Rp.3.201.553.540,- dengan tingkat capaian sebesar 97,77%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.206.

Tabel 3.206
Anggaran Kecamatan Reok
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**3.274.623.603**	**3.201.553.540**	**97.77**
	Belanja Pegawai	2.762.345.403	2.722.353.915	98,55
	Belanja Barang dan Jasa	512.278.200	479.199.625	93,54
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	
	TOTAL	**3.274.623.603**	**3.201.553.540**	**97.77**

Sumber: Kecamatan Reok Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.207

Tabel 3.207
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Reok Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai**	**Sasaran: Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**2.992.728.598**	**2.933.337.535**	**98**		
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**15.940.000**	**15.940.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Terlaksanya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	100	13.940.000	13.940.000	100		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	1 tahun	100	2.000.000	2.000.000	100		
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**2.762.345.403**	**2.722.353.915**	**98,55**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	100	2.426.710.755	2.386.719.267	98		
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor THL,	1 tahun	1 tahun	100	335.634.648	335.634.648	100		
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**128.533.200**	**112.569.000**	**88**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	1 tahun	1 tahun	100	2.315.000	2.295.000	99		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	100	60.902.500	54.790.300	90		
	Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 tahun	1 tahun	100	42.000.000	33.120.000	79		
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan	Tersedianya Penyediaan Barang	1 tahun	1 tahun	100	18.670.200	18.670.200	100		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan								
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	100	0,00	0,00	0,00		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Penyediaan Bahan/ Material	1 tahun	1 tahun	100	4.645.500	4.645.500	100		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1 tahun	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**21.000.000**	**19.023.000**	**91**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 tahun	1 tahun	100	6.000.000	6.000.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air	1 tahun	1 tahun	100	15.000.000	13.175.000	88		
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**64.910.000**	**61.799.625**	**95**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 tahun	1 tahun	100	61.000.000	57.889.625	95		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	1 tahun	1 tahun	100	3.910.000	3.910.000	100		
2	**Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**98.520.000**	**98.440.000**	**99**		
2.1	**Kegiatan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan**	**Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**64.520.000**	**64.440.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi	Terlaksanya Koordinasi/Sinergi	1	1 Dokume	100	64.520.000	64.440.000	100		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Dokumen	n						
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 tahun	1 tahun	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**34.000.000**	**34.000.000**	**100**		
	Sub Kegaiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan	1 tahun	1 tahun	100	34.000.000	34.000.000	100		
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Sasaran: Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**78.475.000**	**73.066.000**	**93**		
3.1	**Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Sasaran: Terwujudnya Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**10 Desa**	**10 Desa**	**100**	**12.875.000**	**10.775.000**	**84**		
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksanya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Desa	10 Desa	100	12.875.000	10.775.000	84		
3.2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Sasaran: Tercapainya Pemberdayaan Kelurahan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**65.600.000**	**62.291.000**	**95**		
	Sub Kegiatan Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	1 tahun	1 tahun	100	65.600.000	62.291.000	95		
4	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Sasaran: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**84.700.000**	**78.010.000**	**92**		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
4.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**84.700.000**	**78.010.000**	**92**		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,pelaksanaan UUD NKRI Tahun 1945,pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, Serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	Terlaksananya Kegiatan HUT Kemerdekaan RI	1 kegiatan	1 kegiatan	100	12.950.000	12.950.000	100		
	Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan	Terlaksanya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan	10 desa	10 desa	100	71.750.000	65.060.000	91		
5	**Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**20.200.000**	**20.200.000**	**100**		
5.1	**Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**		**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**20.200.000**	**20.200.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksanaya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 tahun	1 tahun	100	20.200.000	20.200.000	100		
	JUMLAH				**100**	**3.274.623.603**	**3.201.553.540**	**97,77**		

Sumber: Kecamatan Cibal Barat Kab. Manggarai, Januari 2023

F. Kecamatan Reok Barat

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Reok Barat menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.208
Capaian Kinerja Kecamatan Reok Barat
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB di Kec. Reok Barat	Jumlah Penerimaan PBB Kecamatan Reok Barat	104.851.180	103.243.206	98
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kec. Reok Barat	% Kasus yang tertangani	10 Desa	100%	100
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyrakat desa/Kel	Jumlah Kelurahan Diseminasi Informasi	10 Desa	100%	100
4.	Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa	1 Organisasi	100%	100
5.	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100%	100%	100
	Rata-rata				99,6
	Kategori			Sangat Baik	

Sumber: Kecamatan Reok Barat Kab. Manggarai Tahun 2022

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Jumlah Penerimaan PBB Tahun 2022 mengalami penurunan realisasi dikarenakan:
    a. Dampak situasi covid 19, masih banyak masyarakat yang tidak mampu membayar Pajak Bumi dan Bangunan, pendapatan akibat rendahnya perputaran Uang di masyarakat;
    b. Subyek pajak berdomisili di luar wilayah;
    c. Adanya pendobelan Nama dan obyek Wajib Pajak;
    d. Penetapan nilai pajak tidak sesuai dengan luas tanah;
    e. Objek pajak yang sudah dijual tetapi belum adanya balik nama atas tanah yang sudah dijual.
2. Presentase kasus yang tertangani, kegiatannya: Penyelesaian Konflik di tingkat Kecamatan dan Desa diantaranya:

a. Penyelesaian masalah air minum bersih di Desa Lante dan di mediasi oleh pemerintah kecamatan.
b. Penyelesaian masalah tanah pribadi di Desa Lante dan di mediasi oleh pemerintah kecamatan.
c. Penyelesaian masalah air minum di Desa Torong Koe dan di mediasi oleh pemerintah kecamatan.

3. Penyelenggaran diseminasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan. Pemerintah Kecamatan melakukan kegiatan diseminasi sekaligus pembinaan penyelenggaran pemerintahan desa yakni:
    a. Mendampingi Pelaksanaan Musrenbangdes RKPDes dan penyusunan RKPDes pada 10 Desa;
    b. Melakukan evaluasi APBDes 10 Desa;
    c. Memverifikasi dokumen SPP untuk dokumentasi pencairan di bank NTT 10 Desa;
    d. Memverifikasi dokumen SPJ;
    e. Mendampingi tim verifikasi Faktual dan administrasi desa persiapan;
    f. Memverifikasi dokumen penerima BLT yang bersumber dari Dana Desa;
    g. Pada masa Pandemi mengadakan sosialisasi PPKM di 10 Desa;
    h. Monitoring Pelaksanaan Pembagian Sembako, BST dan BLT di 10 Desa;
    i. Monitoring pelaksanaan pemilihan BPD di 10 (sepuluh) Desa Yakni Desa Torongkoe, Desa Loce, Desa Sambi, Desa Lante, Desa Nggalak, Desa Kajong, Desa To'e, Desa Paralando, Desa Rura, dan Desa Lemarang.
    j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan pada tingkat Desa.
    k. Melakukan kajian terhadap hal hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat Desa.

4. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa, kegiatannya:
    a. Sosialisasi pengisian format data PKK oleh TP, PKK Kecamatan kepada TP, PKK Desa di 10 Desa;
    b. Pendataan Kelembagaan PKK Desa, Pendataan catatan kelompok Desa Wisma, data Stunting di 10 Desa.
    c. Peningkatan Kapasitas bagi para pengurus PKK di kecamatan dan di Tingkat Desa pada wilayah Kecamatan Reok Barat
5. Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan, kegiatannya Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kecamatan Reok Barat. Capaian kinerja ini adalah 100 %. Pencapaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni:
    a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbangdes RKPD;
    b. Pendampingan terhadap pelaksanaan Musrenbangdes RKPD;
    c. Pengumpulan usulan hasil Musrenbangdes RKPD;
    d. Mengkoordinasikan Musrenbangcam dan pramusrenbangcam Kecamatan Reok Barat;
    e. Penelaahan hasil Musrenbangdes RKPD, berdasarkan prioritas daerah dan pelaksanaan pra Musrenbang dan Musrenbangcam;
    f. Dari seluruh rangkaian tahapan tersebut telah menghasilkan 1 (satu) dokumen usulan Kecamatan yang berisi usulan kegiatan untuk 1 (satu) Kecamatan.

b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Kecamatan Reok Barat melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan dan 21 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.409.125,310,- realisasi sebesar Rp.1.333.401.920,- dengan tingkat capaian sebesar 94,63%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.209.

Tabel 3.209
Anggaran Kecamatan Reok Barat Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**1.409.125.310**	**1.333.401.902**	**94.63**
	Belanja Pegawai	1.197.488.410	1.127.675.020	94,17
	Belanja Barang dan Jasa	211.636.900	205.726.900	97,21
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**1.409.125.310**	**1.333.401.902**	**94.63**

Sumber: Kecamatan Reok Barat Kab. Manggarai, Jan 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.210.

Tabel 3.210
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Reok Barat Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai**	**Sasaran: Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.409.125.310**	**1.333.401.920**	**94,63**		
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**8.160.000**	**3.400.000**	**41,67**		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Terlaksanya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	100	8.160.000	3.400.000	41,67		
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.197.488.410**	**1.127.675.020**	**94,17**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	100	1.149.761.086	1.081.631.180	94,07		
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor THL,	5 Orang	5 Orang	100	47.727.324	46.043.840	96,47		
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**38.842.900**	**37.762.900**	**97,22**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	7 Jenis	7 Jenis	100	405.000	405.000	100		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51 Jenis	51 Jenis	100	29.891.000	29.891.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Perabot (Peralatan Rumah Tangga)	3 Jenis	3 Jenis	100	590.000	590.000	100		
	Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300 OM	300 OM	100	5.040.000	5.040.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	100	1.136.900	1.136.900	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	1 Jenis	0,00	1.080.000	0,000	0,00		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Penyediaan Bahan/ Material	19 Jenis	19 Jenis	100	700.000	700.000	100		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 kali	0 Kali	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**4.600.000**	**4.600.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 tahun	1 tahun	100	1.000.000	1.000.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air	1 tahun	1 tahun	100	3.600.000	3.600.000	100		
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**19.750.000**	**19.750.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 tahun	1 tahun	100	19.000.000	19.000.000	100		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	1 tahun	1 tahun	100	750.000	750.000	100		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
2	**Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**10.926.000**	**10.926.000**	**100**		
2.1	**Kegiatan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan**	**Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100**	**10.926.000**	**10.926.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Teelaksanya Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Sinkronisasi Pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100	10.926.000	10.926.000	100		
2.2	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**10 Desa**	**10 Desa**	**100**	**6.010.000**	**6.000.000**	**99,83**		
	Sub Kegaiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan	10 Desa	10 Desa	100	6.010.000	6.000.000	99,83		
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100**		
3.1	**Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Sasaran: Terwujudnya Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**1 Organisasi**	**1 Organisasi**	**100**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat	1 Organisasi	1 Organisasi	100	20.000.000	20.000.000	100		
4	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Sasaran: Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik dan penyelenggaraan HUT RI**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**11.688.000**	**11.688.000**	**100**		
4.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik dan penyelenggaraan HUT RI**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**11.688.000**	**11.688.000**	**100**		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	Terlaksananya penyelenggaraan HUT RI	1 kegiatan	1 kegiatan	100	10.588.000	10.588.000	100		
	Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan	Sasaran: Terlaksanya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan	10 desa	10 desa	100	1.100.000	1.100.000	100		
5	**Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**91.660.000**	**91.600.000**	**99,93**		
5.1	**Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Tersedianyan Data dan Informasi**	**10 desa**	**10 desa**	**100**	**91.660.000**	**91.600.000**	**99,93**		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Laporan	Laporan	100	79.560.000	79.560.000	100		
	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	10 desa	10 desa	100	12.100.000	12.040.000	99,50		
	JUMLAH				**100**	**1.409.125.310**	**1.333.401.920**	**94,63**		

Sumber: Kecamatan Cibal Barat Kab. Manggarai, Januari 2023

G. Kecamatan Rahong Utara

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Rahong Utara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.211
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Rahong Utara Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB di Kec. Rahong Utara	Jumlah Penerimaan PBB Kecamatan Rahong Utara	Rp.73.061.772	Rp.73.061.772	100
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	6 Dok	5 Dok	83
3.	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah yang dilaporkan	% Kasus yang tertangani	12 Desa	100%	100
4.	Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Monitoring Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	12 Desa	12 Desa	100
5.	Terwujudnya Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyrakat desa	Jumlah Desa Diseminasi Informasi	12 Desa	100%	100
	Rata-rata				96,6
	Kategori			Sangat Baik	

Sumber: Kecamatan Rahong Utara Kab. Manggarai, Januari 2023

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Penerimaan PBB Tahun 2022 sesuai dengan target.
2. Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan, kegiatannya Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa di 12 desa dan kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan Rahong Utara.
3. Presentase kasus yang tertangani, kegiatannya: Penyelesaian Konflik di tingkat Kecamatan dan Desa diantaranya masalah batas tanah, masalah warisan.

4. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi Kegiatan pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat, berupa:
   a. Monitoring Kegiatan Posyandu di tingkat RT/RW di 12 Desa
   b. Pendataan Kelembagaan PKK Kelurahan, Pendataan Catatan Keluarga Kelompok Dasa Wisma, Data Stunting di 12 Desa
5. Jumlah Kelurahan Diseminasi Informasi di 12 desa, kegiatannya: Diseminasi adalah: Suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar memperoleh informasi, timbul kesadaran menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Indikator ini dilaksanakan pada 12 desa berupa pembinaan dan monitoring kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada tingkat Desa di wilayah Kecamatan Rahong Utara. Sasaran indikator ini adalah Seluruh Masyarakat yang ada pada 12 desa di Kecamatan Rahong Utara. Ukuran keberhasilan dari indikator ini: tersebarnya informasi pembangunan bagi masyarakat di Kecamatan Rahong Utara

b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Kecamatan Rahong Utara melaksanakan 5 Program dan 10 Kegiatan 20 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.139.960.714,- realisasi sebesar Rp.1.215.206.389,- dengan tingkat capaian sebesar 92,80%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.212.

Tabel 3.212
Anggaran Kecamatan Rahong Utara Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**1.139.960.714**	**1.215.206.389**	**92,80**
	Belanja Pegawai	938.621.290	863.652.628	92,01
	Belanja Barang dan Jasa	201.339.424	194.177.350	96,44
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**1.139.960.714**	**1.215.206.389**	**92,80**

Sumber: Kecamatan Rahong Utara Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.213

Tabel 3.113
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Rahong UtaraTahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Belanja Tidak Langsung					**938.621.290**	**863.652.628**	**92,01**		
	Belanja Langsung					**201.339.424**	**194.177.350**	**96,44**		
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai**	**Sasaran: Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.034.750.714**	**953.319.978**	**92.13**		
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**8.840.000**	**3.910.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Terlaksanya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	100	5.500.000	5.500.000	100		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	1 tahun	100	997.000	997.000	100		
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.165.327.906**	**1.060.369.789**	**90,99**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	15 Orang	100	1.131.575.698	1.027.648.789	90,82		
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor THL,	2 Orang	2 Orang	100	33.752.208	32.721.000	96,94		
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**32.828.600.000**	**23.719.600**	**72,25**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	4 Jenis	4 Jenis	100	5.716.500	5.716.500	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29 Jenis	29 Jenis	100	14.243.600	14.134.600	99,23		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	2 Jenis	100	4.680.000	4.680.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	100	2.550.000	2.550.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Penyediaan Bahan/ Material	7Jenis	7 Jenis	100	1.585.000	1.585.000	100		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Luar Daerah	1 Jenis	1 Jenis	100	9.000.000	0,00	0,00		
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**52.179.000**	**39.810.000**	**76,30**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2 Jenis	2 Jenis	100	6.879.000	6.879.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air	3 Jenis	3 Jenis	100	45.300.000	32.931.027	72,70		
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**18.927.000**	**18.570.000**	**98,11**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Jenis	1 Jenis	100	15.000.000	15.000.000	100		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	2 Jenis	2 Jenis	100	3.927.000	3.570.000	90,91		
2	**Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**23.800.000**	**20.850.000**	**87,61**		
2.1	**Kegiatan Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**16.755.000**	**13.800.000**	**82,36**		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	16.755.000	13.800.000	82,36		
2.2	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**11.500.000**	**11.500.000**			
	Sub Kegaiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan	1 tahun	1 tahun	100	11.500.000	11.500.000			
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**		
3.1	**Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**	**Sasaran: Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**		
4	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Sasaran: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**12.300.000**	**11.600.000**	**94,31**		
4.1	**Kegiatan Penanganan Konflik sesuai Peraturan Perundang-undangan**	**Terlaksananya Penanganan Konflik sesuai Peraturan Perundang-undangan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**12.300.000**	**11.600.000**	**94,31**		
5	**Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**12 desa**	**12 desa**	**100**	**58.750.000**	**58.750.000**	**100**		
5.1	**Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Tersedianyan Data dan Informasi**	**12 desa**	**12 desa**	**100**	**58.750.000**	**58.750.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Desa	12 Desa	100	10.100.000	10.100.000	100		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	TerlaksanyaPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12 Desa	12 Desa	100	19.300.00	19.300.00	100		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Kordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksannya Kordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Desa	12 Desa	100	16.950.000	16.950.000	100		
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan	Terlaksannya Koordinasi Pelaksanaan pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan	12 Desa	12 Desa	100	12.400.000	12.400.000	100		
	JUMLAH				**100**	**1.332.585.506**	**1.215.206.389**	**91,19**		

Sumber: Kecamatan Rahong Utara Kab. Manggarai, Januari 2023

H. Kecamatan Ruteng

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Ruteng menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.214
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Ruteng
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB di Kec. Ruteng	Jumlah Penerimaan PBB Kecamatan Ruteng	Rp.1.104.689.867	Rp.915.805.687	82,90
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kec. Ruteng	% Kasus yang tertangani	18 desa/ 1 Kelurahan	100%	100
3.	Terwujudnya Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	18 desa/ 1 Kelurahan	100%	100
4.	Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	18 desa/ 1 Kelurahan	100%	100
5.	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	1 dokumen	100%	100
	Rata-rata				96,58
	Kategori				Sangat Baik

Sumber: Kecamatan Ruteng Kab. Manggarai, Januari 2023

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Jumlah Penerimaan PBB Tahun 2022 mengalami penurunan realisasi dikarenakan :
   a. Subyek pajak berdomisili diluar Wilayah;
   b. Adanya pendobelan Nama dan obyek Wajib Pajak;
   c. Penetapan nilai pajak tidak sesuai dengan luas tanah;
   d. Obyek pajak yang sudah dijual tetapi belum adanya balik nama atas tanah.
2. Penyelesaian masalah adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menghilangkan masalah dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut.Ukuran keberhasilan dari indikator ini adalahterlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah yang dilaporkan dari masyarakat pada tingkat kecamatan. Sasaran dari indikator ini adalah seluruh masyarakat 18 desa/1 kelurahan yang ada di kecamatan di Ruteng.
3. Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa adalah suatu kegiatan menfasiltasi, pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan efisien dan efektif sesuai norma standar, prosedur dan kriteria serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Posyandu atau Pos pelayanan terpadu adalah salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dari dan bersama masyarakat untuk memperdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak Balita Posyandu juga sebagai indikator dasar untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Sasaran indikator ini adalah Ibu dan Balita yang ada pada 18 desa/1 kelurahan di Kecamatan Ruteng. Ukuran keberhasilan dari indikator ini terlaksananya pelayanan posyandu secara rutin berupa mendampingi bidan dalam melaksanakan kegiatan penimbangan bayi,vaksinasi

BCG, DPT, CAMPAK, POLIO, dll yang ada pada 18 desa/kelurahan di Kecamatan Ruteng.

5. Dokumen Perencanaan dimaksud adalah Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah. Dokumen ini merupakan turunan dari dokumen Renstra yang merupakan dokumen induk perencanaan pada perangkat daerah yang bersangkutan. Dokumen Renja berisikan rencana program dan kegiatan yang sudah termuat di dalam Renstra dan pelaksanaannya didahului dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan. Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka memastikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas tingkat Kecamatan dan desa diakomodir dalam tahun berkenan atau di waktu yang akan datang. Ukuran keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah terlaksananya Musrenbang Kecamatan Ruteng pada Triwulan satu dan tersedianya Dokumen Renja.

b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Kecamatan Ruteng Manggarai melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan dan 29 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.073.653.193,- realisasi sebesar Rp.1.895.474.803,- atau sebesar 91,41%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.215.

Tabel 3.215
Anggaran Kecamatan Ruteng
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**2.073.653.193**	**1.895.474.803**	**91,41**
	Belanja Pegawai	1.592.898.968	1.494.478.903	93,82
	Belanja Barang dan Jasa	480.754.224	400.995.900	83,41
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**2.073.653.193**	**1.895.474.803**	**91,41**

Sumber: Kecamatan Ruteng Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.216.

Tabel 3.216
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Ruteng Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Belanja Tidak Langsung					**1.592.898.968**	**1.494.478.903**	**93,82**		
	Belanja Langsung					**480.758.224**	**400.995.900**	**93,41**		
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai**	**Sasaran: Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.837.305.292**				
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**16.573.000**	**9.603.000**	**57,94**		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksanaya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	100	4.523.000	4.013.000	88,72	Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill	Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 tahun	1 tahun	100	3.400.000	2.550.000	75,00	Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill	Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 tahun	1 tahun	100	4.250.000	850.000	20,00	Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill	Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dokumen DPA-SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD a	1 tahun	1 tahun	100	1.700.000	510.000	30,00	Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill	Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	1 tahun	100	2.700.000	1.680.000	62,22	Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill	Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.657.971.292**	**1.547.299.903**	**93,32**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	25 Orang	100	1.574.898.968	1.480.078.903	93,98	Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill	Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor THL,	25 Orang	25 Orang	100	83.072.324	67.221.000	80,92	Karena tidak ada staf pada kantor camat untuk menjadi bendahara Pembantu pada kantor camat ruteng	Ditahun yang akan datang disiapkan tenaga untuk menjadi pembantu bendahara pada kantor kecamata ruteng
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**111.831.000**	**61.786.500**	**55,25**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	6 jenis	6 Jenis	100	1.980.000	1.980.000	100	Tidak ada	Tidak ada
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46 Jenis	46 Jenis	100	46.851.000	41.252.500	88,05	Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill	Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 om	100 om	100	7.000.000	7.000.000	100	Tidak ada	Tidak ada

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	3 Jenis	100	9.050.000	8.924.000	98,61	Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill	Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Penyediaan Bahan/ Material	10 Jenis	10 Jenis	100	2.630.000	2.630.000	100	Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill	Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	100	44.320.000	0,00	0,00	Hal ini disebabkan karena tidak ada kegiatan rakor dan konsultasi keluar dan kedalam wil NTT sehingga dana nya tidak terserap	Diharapkan ditahun yang akan datang dana tersebut bisa dimanfaatkan
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**11.600.000**	**6.795.000**	**58,58**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Jenis	1 Jenis	100	2.000.000	2.000.000	100	Tidak ada	Tidak ada
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air	2 rekening	2 rekening	100	9.600.000	4.795.000	49,95	Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill	Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**39.330.000**	**36.685.500**	**93.28**		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	6 Unit	100	33.000.000	31.035.500	94,05	Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill	Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	3 Jenis	3 Jenis	100	6.330.000	5.650.000	89,26	Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill	Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan
2	**Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**43.360.900**	**43.360.900**	**100**	**Tidak ada**	**Tidak ada**
2.1	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**43.360.900**	**43.360.900**	**100**	**Tidak ada**	**Tidak ada**
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Terlaksanya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	22.960.900	22.960.900	100	Tidak ada	Tidak ada
	Sub Kegiatan Pelaksanaan ururan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Pelaksanaan ururan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	18 Desa	18 Desa	100	20.400.000	20.400.000	100	Tidak ada	Tidak ada
3	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan**	**Sasaran: Terlaksanya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**25.000.000**	**25.000.000**	**100**	**Tidak ada**	**Tidak ada**
3.1	**Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Sasaran: Terlaksanya Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**25.000.000**	**25.000.000**	**100**	**Tidak ada**	**Tidak ada**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksanya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Organisasi	3 Organisasi	100	25.000.000	25.000.000	100	Tidak ada	Tidak ada
4	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Sasaran: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**36.237.000**			**Tidak ada**	**Tidak ada**
4.1	**Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**5.977.000**	**5.977.000**	**100**	**Tidak ada**	**Tidak ada**
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,pelaksanaan UUD NKRI Tahun 1945,pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, Serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	Terlaksananya Kegiatan HUT Kemerdekaan RI	1 kegiatan	1 kegiatan	100	5.977.000	5.977.000	100	Tidak ada	Tidak ada
4.2	**Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**Sasaran: Terlaksanya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**18 desa**	**18 desa**	**100**	**30.260.000**	**28.730.000**	**94,94**	**Tidak ada**	**Tidak ada**
5	**Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**131.750.000**		**100**	**Tidak ada**	**Tidak ada**
5.1	**Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Terlaksananya Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**131.750.000**			**Tidak ada**	**Tidak ada**
	Sub Kegiatan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Terlaksanaya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 desa	18 desa	100	16.660.000	15.300.000	91,84	Tidak ada	Tidak ada

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksanaya fasilitasi,rekomendasi,dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	18 desa	18 desa	100	22.440.000	22.440.000	100	Tidak ada	Tidak ada
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksanaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	18 desa	18 desa	100	0,00	0,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksanaya.Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18 desa	18 desa	100	20.570.000	19.210.000	93,39	Tidak ada	Tidak ada
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18 desa	18 desa	100	25.500.000	25.007.000	98,07	Tidak ada	Tidak ada
	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Terlaksanaya fasilitasi,rekomendasi,dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	18 desa	18 desa	100	13.430.000	13.260.000	98,73	Tidak ada	Tidak ada
	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Terlaksanaya fasilitasi,rekomendasi,dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	18 desa	18 desa	100	16.150.000	17.340.000	107,37	Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill	Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan	Terlaksanaya fasilitasi,rekomendasi,dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	18 desa	18 desa	100	17.000.000	17.680.000	104,00	Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill	Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan
	JUMLAH				**100**	**2.073.653.192**	**1.895.474.803**	**91,41**		

Sumber: Kecamatan Ruteng Kab. Manggarai, Januari 2023

I. Kecamatan Lelak

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Lelak menetapkan sasaran strategis, dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.217.

Tabel 3.217
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Lelak
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyusunanan LKPJ, Lap Keuangan, DPA, RKA	4 Dokumen	4 Dokumen	100
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan	Persentase Jumlah Penagihan PBB	12 Desa	12 Desa	100
3.	Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Usulan pembangunan	12 Desa	12 Desa	100
4.	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyelesaian konflik masyarakat	3 Kasus	3 Kasus	100
5.	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemeberdayaan masyarakat	12 Desa	12 Desa	100
	Rata-rata				100
	Kategori			Memuaskan	

Sumber: Kecamatan Lelak Kab. Manggarai, Januari 2023

b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Kecamatan Lelak melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.155.942.043,- realisasi sebesar Rp. 1.077.838.096,- atau sebesar 93,24%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.218.

Tabel 3.218
Anggaran Kecamatan Lelak Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**1.155.942.043,-**	**1.077.838.096,-**	**93,24**
	Belanja Pegawai	988.493.004,-	916.082.004,-	92,67
	Belanja Barang dan Jasa	167.448.800,-	161.756.092,-	96,60
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**1.155.942.043,-**	**1.077.838.096,-**	**93,24**

Sumber: Kecamatan Lelak Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.219.

Tabel 3.219
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Lelak Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai**	**Sasaran: Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**10.200.000**	**10.200.000**	**100**		
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**10.200.000**	**10.200.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok	100	10.200.000	10.200.000	100		
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**988.439.243**	**916.082.004**	**92,67**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	100	954.687.035	882.329.796	95		
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor THL,	2 Orang	2 Orang	100	33.752.208	33.752.208	100		
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**56.322.800**	**56.322.800**	**100**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	5 Jenis	5 Jenis	100	685.000	685.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23 Jenis	23 Jenis	100	35.637.000	35.637.000	100		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	100	300.000	300.000	100		
	Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan/ Material	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100	17.000.000	17.000.000	100		
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**2.880.000**	**1.482.500**	**75**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2 Jenis	2 Jenis	100	480.000	480.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air	1 Rekening	1 Rekening	100	2.400.000	1.002.500	41		
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**22.500.000**	**21.422.000**	**99**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	6 Unit	100	21.000.000	19.922.000	98		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	7 Unit	7 Unit	100	1.500.000	1.500.000	100		
2	**Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**14.100.000**	**12.000.000**	**88**		
2.1	**Kegiatan Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan**	**Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**14.100.000**	**12.000.000**	**88**		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	100	14.100.000	12.000.000	88		
2.2	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**3.250.000**	**3.230.000**	**99**		
	Sub Kegaiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan	10 Desa	10 Desa	100	3.250.000	3.230.000	99		
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**13.700.000**	**13.700.000**	**100**		
3.1	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**13.700.000**	**13.700.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Desa	10 Desa	100	13.700.000	13.700.000	100		
4	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Sasaran: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**5.450.000**	**5.330.000**	**99**		
4.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**5.450.000**	**5.330.000**	**99**		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapakan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Konflik dan Penyelenggaraan HUT RI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	2.950.000	2.950.000	100		
	Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10 Desa	10 Desa	100	2.500.000	2.380.000	95		
5	**Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**10 Desa**	**10 Desa**	**100**	**39.100.000**	**39.100.000**	**100**		
5.1	**Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Tersedianyan Data dan Informasi**	**10 Desa**	**10 Desa**	**100**	**39.100.000**	**39.100.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Desa	10 Desa	100	13.600.000	13.600.000	100		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terwujudnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10 Desa	10 Desa	100	8.500.000	8.500.000	100		
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksannya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	10 Desa	10 Desa	100	17.000.000	17.000.000	100		
	JUMLAH				**100**	**1.155.942.043**	**1.077.838.096**	**93,24**		

Sumber: Kecamatan Lelak Kab. Manggarai, Januari 2023

J. Kecamatan Satar Mese Utara

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Satar Mese Utara menetapkan sasaran strategis "Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan", dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.220.

Tabel 3.220
Capaian Kinerja Kecamatan Satar Mese Utara
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat	11 Desa	11 Desa	100
		Terlaksananya perencanaan pembangunan Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Terwujudnya Peningkatan dan pengembangan keuangan daerah	11 Desa	11 Desa	100
		Tersebarnya infomasi kepada masyarakat	100%	100%	100
		Terwujudnya Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	11 Desa	11 Desa	100
		Terselenggaranya Perayaan HUT Kemerdekaan RI	1 Kali	-	0
	Rata-rata				83,33
	Kategori			Baik	

Sumber: Kecamatan Satar Mese Utara Kab. Manggarai, Januari 2023

b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten melaksanakan 5 program, 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.450.346.750,- realisasi sebesar Rp.1.432.664.457,- atau sebesar 98,78%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.221.

Tabel 3.221
Anggaran Kecamatan Satar Mese Utara Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**1.450.346.750,-**	**1.432.664.457,-**	**98,78**
	Belanja Pegawai	1.210.280.356,-	1.203.883.957,-	99.47
	Belanja Barang dan Jasa	240.066.394,-	228.780.500,-	95,30
2.	**Belanja Modal**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**1.450.346.750,-**	**1.432.664.457,-**	**98,78**

Sumber: Kecamatan Satar Mese Utara Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.222.

Tabel 3.222
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Satar Mese Utara Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai**	**Sasaran: Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.315.427.456**	**1.298.035.157**	**98,68**		
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**16.814.000**	**16.794.000**	**99,98**		
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Terlaksanaya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	100	15.814.000	15.794.000	99,87		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	1 tahun	100	1.000.000	1.000.000	100		
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.210.280.356**	**1.203.883.957**	**99,47**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	100	1.158.953.032	1.153.762.957	99,55		
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor THL,	1 tahun	1 tahun	100	51.327.324	50.121.000	97,65		
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**45.853.100**	**37.601.950**	**82,01**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	1 tahun	1 tahun	100	1.975.000	1.975.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	100	18.091.500	18.091.500	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 tahun	1 tahun	100	8.000.000	8.000.000	100		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 tahun	1 tahun	100	5.523.600	5.522.950	99,99		
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan material	Tersedianya Penyediaan Bahan/ Material	1 tahun	1 tahun	0,00	1.893.000	1.893.000	100		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Luar Daerah	1 tahun	1 tahun	100	10.370.000	2.120.000	20,44		
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**13.300.000**	**11.215.500**	**84,33**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 tahun	1 tahun	100	1.500.000	1.500.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air	1 tahun	1 tahun	100	11.800.000	9.715.500	82,33		
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**29.180.000**	**28.536.750**	**97,81**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 tahun	1 tahun	100	23.500.000	22.859.750	97,28		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	1 tahun	1 tahun	100	5.680.000	5.680.000	100		
2	**Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**22.275.000**	**22.275.000**	**100**		
2.1	**Kegiatan Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**9.855.000**	**9.855.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	100	9.855.000	9.855.000	100		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
2.2	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**12.420.000**	**12.420.000**	**100**		
	Sub Kegaiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan	10 Desa	10 Desa	100	12.420.000	12.420.000	100		
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**20.000.000**	**19.930.000**	**99,65**		
3.1	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**20.000.000**	**19.930.000**	**99,65**		
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Desa	10 Desa	100	20.000.000	19.930.000	99,65		
4	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Sasaran: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**35.261.000**	**35.201.000**	**99,83**		
4.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**35.261.000**	**35.201.000**	**99,83**		
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapakan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Konflik dan Penyelenggaraan HUT RI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	10.961.000	10.961.000	100		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			100	24.300.000	24.240.000	99,75		
5	**Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**10 Desa**	**10 Desa**	**100**	**57.383.000**	**57.223.300**	**99,72**		
5.1	**Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Tersedianyan Data dan Informasi**	**10 Desa**	**10 Desa**	**100**	**57.383.000**	**57.223.300**	**99,72**		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Desa	10 Desa	100	23.795.000	22.950.000	100		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terwujudnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10 Desa	10 Desa	100	11.040.000	11.000.000	99,64		
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksannya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	10 Desa	10 Desa	100	23.343.300	23.273.300	99,72		
	JUMLAH				**100**	**1.450.346.756**	**1.432.664.457**	**98,78**		

Sumber: Kecamatan Satar Mese Utara Kab. Manggarai, Januari 2023

K. Kecamatan Satar Mese Barat

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Satarmese Barat Tahun Anggaran 2022, menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja seperti dalam tabel3.223.

Tabel 3.223
Capaian Kinerja Kecamatan Satar Mese Barat
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pegembangan sistem laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase Penyusunanan LKPJ, Lap Keuangan, DPA, RKA	100 % (2dokumen)	100% (2dokumen)	100
2.	Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Penagihan PBB	100 % (12 desa)	100 % (12 desa)	100
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Diseminasi bagi Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase jumlah penyelenggaran diseminasi	100 % (12 desa)	100 % (12 desa)	100
4.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan pembangunan	100 % (12 desa)	100 % (12 desa)	100
5.	Peningkatan Penyelesaian Konflik Masyarakat	Persentase Penyelesaian konflik masyarakat	100 % (2 kasus)	100 % (2 kasus)	100
6.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Pemberdayaan masyarakat	100 % (12 desa)	100 % (12 desa)	100
	Rata-rata				100
	Kategori			Memuaskan	

Sumber: Kecamatan Satar Mese Barat, Januari 2023

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Dalam mencapai target dari indikator ada beberapa elemen yang harus mengambil bagian atau peran aktif yakni:
   - Badan Keuangan Kabupaten Manggarai berkaitan dengan penerbitan DHKP dan SPPT Pajak PBB serta berkaitan dengan pemutakhiran data PBB.
   - Pemerintah Kecamatan berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan pemutakhiran dan penagihan PBB.
   - Pemerintah Desa berkaitan dengan pemutakhiran data, penagihan dan penyetoran PBB ke rekening Kas Daerah.
   - Masyarakat berkaitan dengan kewajiban dan kesadaran untuk membayar pajak.
2. Presentase Konflik Masayarakat (Tidak Ada).

3. Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat di 12 Desa. Pada tahun 2022, Pemerintah Kecamatan melakukan kegiatan diseminasi sekaligus pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa yakni:
    - Mendampingi pelaksanaan musrenbangdes RKPDes dan penyusunan RKPDes
    - Melakasanakan evasluasi APBDes
    - Memverifikasi dokumen SPP untuk rekomendasi pencairan di Bank NTT
    - Memverifikasi dokumen SPJ
    - Memverfikasi dokumen penerimaan BLT yang bersumber dari DANA DESA
4. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa dan kelurahan, kegiatannya:
    - Monitoring kegiatan Posyandu di 12 Desa
    - Pendataan Kelembagaan PKK Desa/Kelurahan, Pendataan Catatan Keluarga Kelompok Dasa Wisma, Data Stunting di 12 Desa
5. Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan, kegiatannya Pelaksanaan Musrenbang di 12 Desa dan kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan SATAR MESE BARAT

b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Kantor Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai melaksanakan 4 program dan 9 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.294.437.006,- realisasi sebesar Rp.1.204.738.437,- atau sebesar 93,07%.

Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.224.

Tabel 3.224
Anggaran Kecamatan Satar Mese Barat Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**1.294.437.006,-**	**1.189.738.452,-**	**92,99**
	Belanja Pegawai	1.093.871.682,-	1.027.306.112,-	93,91
	Belanja Barang dan Jasa	185.565.324,-	162.432.340,-	100
2.	**Belanja Modal**	**15.000.000**	**15.000.000**	**100**
	TOTAL	**1.294.437.006,-**	**1.189.738.452,-**	**92,99**

Sumber: Kecamatan Satar Mese Barat, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 disajikan dalam tabel 3.225.

Tabel 3.225
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Satar Barat Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai**	**Sasaran: Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**14.200.000**	**14.200.000**	**100**		
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**7.610.000**	**7.610.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	1 tahun	100	5.780.000	5.780.000	100		
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.123.599.006**	**1.123.599.006**	**100**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	100	1.082.321.682	1.082.321.682	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor THL,	1 tahun	1 tahun	100	41.277.324	41.277.324	100		
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**59.769.000**	**59.769.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	1 tahun	1 tahun	100	1.181.000	1.181.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan	1 tahun	1 tahun	100	34.494.000	34.494.000	100		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
		Perlengkapan Kantor								
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 tahun	1 tahun		4.080.000	4.080.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 tahun	1 tahun	100	3.834.000	3.834.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Luar Daerah	1 tahun	1 tahun	100	16.180.000	16.180.000	100		
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**9.219.000**	**7.396.000**	**80,23**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 tahun	1 tahun	100	1.000.000	1.000.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air	1 tahun	1 tahun	100	7.200.000	5.377.000	93		
	Sub Kegiatan Penyedian bahan/material	Tersedianya Penyedian bahan/material	1 tahun	1 tahun	100	1.019.000	1.019.000	100		
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**20.680000**	**18.570.000**	**89,79**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	100	15.000.000	15.000.000	100		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	2 Unit	2 Unit	100	5.680.000	3.570.000	66,02		
2	**Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**7.000.000**	**7.000.000**	**100**		
2.1	**Kegiatan Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**7.000.000**	**7.000.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7.000.000	7.000.000	100		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
2.2	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**10.500.000**	**10.500.000**	**100**		
	Sub Kegaiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penagihan PBB	1 tahun	1 tahun	100	10.500.000	10.500.000	100		
3	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Sasaran: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**16.950.000**	**16.950.000**	**100**		
3.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**16.950.000**	**16.950.000**	**100**		
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapakan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Konflik dan Penyelenggaraan HUT RI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	4.150.000	4.150.000			
	Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masyarakat dan Masalah Sosial Lainnya	1 tahun	1 tahun	100	12.800.000	12.800.000	100		
4	**Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**11.680.000**	**11.680.000**	**100**		
4.1	**Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah desa**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**11.680.000**	**11.680.000**	**100**		
	JUMLAH				**100**	**1.294.437.006**	**1.204.738.437**	**93,07**		

Sumber: Kecamatan Satar Mese Barat Kab. Manggarai, Januari 2023

L. Kecamatan Satar Mese

a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kecamatan Satar Mese menetapkankan Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Strategis dan hasil pengukurannya yakni sebagai berikut:

Tabel 3.226
Capaian Kinerja Kecamatan Satar Mese
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya pemutahiran data dan penagihan PBB di Kecamtan Satar Mese	Jumlah Penerimaan PBB Kecamatan Satar Mese	Rp.262.114.746	Rp.242.802.381	92,6
2	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Kecamatan Satar Mese	% kasus yang tertangani	100 %	100 %	100
3	Terwujudnya penyelenggaraan diseminiasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan	Jumlah desa/kel diseminasi informasi	23 Desa	23 Desa	100
4	Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	23 Desa	23 Desa	100
5	Terwujudnya Pelaksanaan kegiatan Musrenbangcam tingkat Kecamatan Satar Mese	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	1 Dok	1 Dok	100
	Rata-rata				98,52
	Kategori			Sangat Baik	

Sumber: Kecamatan Satar Mese, Januari 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- Jumlah Penerimaan PBB Kecamatan Satar Mese

  Capaian kinerja indikator ini hanya 92,6%. Hal ini tergambar jelas dalam tabel di atas. Dalam mencapai target dari indikator ada beberapa elemen yang harus mengambil bagian atau peran aktif yakni:

  - Badan Keuangan Kabupaten Manggarai berkaitan dengan penerbitan DHKP dan SPPT Pajak PBB serta berkaitan dengan pemutakhiran data PBB.
  - Pemerintah Kecamatan berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan pemutakhiran dan penagihan PBB.
  - Pemerintah Desa berkaitan dengan pemutakhiran data, penagihan dan penyetoran PBB ke rekening Kas Daerah.
  - Masyarakat berkaitan dengan kewajiban dan kesadaran untuk membayar pajak

- Presentase Kasus yang Tertangani

  Pada tahun 2020 Pemerintah Kecamatan Satar Mese menyelesaikan 4 kasus/konflik masyarakat dari yang dilaporkan tahun 2021. Walaupun anggaran dirasionalisasi Pemerintah Kecamatan Satar Mese tetap melaksanakan tugas penyelesaiaan konflik untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Capaian kinerja dari indikator ini adalah 100 %. Masalah-masalah dimaksud yakni:

  - Masalah penolakan pembangunan pengembangan PLTP Ulumbu di desa Lungar dan Mocok.
  - Masalah Tanah di Topok Desa Ponggeok antara Bapak Nobertus Nabit dengan Damianus Nahi.
  - Masalah tanah antar Bapak Adolfus Gabur dan Bapak Lorensius Banggar.
  - Masalah penetapan DPT Pilkades di Desa Lolang dan Desa Koak.

  Walaupun masalah ini sudah difasilitasi tetapi perlu kami gambarkan permasalahan umum terutama masalah tanah diwilayah Kecamatan Satar Mese yaitu:

  - Masih banyak tanah yang belum disertifikat
  - Tanah P4SWM masih menjadi persoalan karena ada perbedaan antara buku Cabang, Buku Induk dan SK Gubernur

- Jumlah desa/kelurahan diseminasi informasi

  Capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Pada tahun 2022, Pemerintah Kecamatan melakukan kegiatan diseminasi sekaligus pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa yakni:

  - Mendampingi pelaksanaan musrenbangdes RKPDes dan penyusunan RKPDes
  - Melaksanakan evaluasi APBDes
  - Memverifikasi dokumen SPP untuk rekomendasi pencairan di Bank NTT

- Memverifikasi dokumen SPJ
- Memfasilitasi penyelenggaraan BPD pada 22 (dua puluh dua) desa dalam wilayah Kecamatan Satar Mese
- Meverifikasi dokumen penerima BLT yang bersumber dari DANA DESA

➢ Jumlah Lembaga/ Organisasi Desa yang Dibina

Capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Capaian kinerja ini sama dari tahun ke tahun yaitu 100%

➢ Jumlah Dokumen Perencanaan

Capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Pencapaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni pendampingan pelaksanaan Musrenbangdes RKPD, pengumpulan usulan hasil musrenbangdes RKPD, penelaahan hasil musrenbangdes RKPD berdasarkan prioritas daerah dan pelaksanaan Musrenbangcam. Dari serangkaian tahapan tersebut menghasilkan 1 (satu) dokumen usulan Kecamatan yang berisi usulan kegiatan untuk 1 (satu) Kecamatan

b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Kecamatan Satar Mese melakukan 5 Program, 10 Kegiatan dan 19 Sub kegiatan. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.950.987.437,-, terealisasi sebesar Rp.1.802.687.412,- dengan capaian sebesar 92,40%.

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.227.

Tabel 3.227
Anggaran Kecamatan Satar Mese Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**Belanja Operasi**	**1.950.987.437,-**	**1.802.648.412,-**	**92,40**
	Belanja Pegawai	1.756.507.537,-	1.637.853.212,-	93,24
	Belanja Barang dan Jasa	194.479.900,-	164.795.200,-	84,74
2.	**Belanja Modal**	**15.000.000**	**15.000.000**	**100**
	TOTAL	**1.950.987.437,-**	**1.802.648.412,-**	**92,40**

Sumber: Kecamatan Satar Mese, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 disajikan dalam tabel 3.228.

Tabel 3.228
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Satar Mese Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai**	**Sasaran: Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.859.222.437**	**1.730.312.412**	**93,07**		
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	1 tahun	100	0.00	0.00	0.00		
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**1.756.507.537**	**1.637.853.212**	**93,98**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	100	1.742.707.537	1.624.053.212	93,19		
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor THL,	1 tahun	1 tahun	100	13.800.000	13.800.000	100		
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**35.929.400**	**34.786.000**	**96,82**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	1 tahun	1 tahun	100	2.175.000	1.880.000	86,44		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	100	22.005.500	21.908.000	99,56		
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 tahun	1 tahun	100	8.750.000	8.000.000	91,43		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 tahun	1 tahun	100	2.999.400	2.998.000	99,95		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Luar Daerah	1 tahun	1 tahun	100	0,00	0,00	0,00		
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**35.785.500**	**35.207.000**	**98,38**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 tahun	1 tahun	100	580.000	580.000	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 tahun	1 tahun	100	22.005.500	21.908.000	99,56		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air	1 tahun	1 tahun	100	13.200.000	12.719.000	96,36		
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**31.000.000**	**22.466.200**	**72,47**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 tahun	1 tahun	100	31.000.000	22.466.200	100		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik	1 tahun	1 tahun	100	0,00	0,00	0,00		
2	**Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**50.790.000**	**32.930.000**	**64,84**		
2.1	**Kegiatan Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**17.560.000**	**6.510.000**	**37,07**		
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	17.560.000	6.510.000	37,07		
2.2	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**7.650.000**	**7.000.000**	**91,50**		

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Permasalahan	Solusi
	Sub Kegaiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penagihan PBB	1 tahun	1 tahun	100	7.650.000	7.000.000	91,50		
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**25.580.000**	**19.420.000**	**75,92**		
	Sub Kegaiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 tahun	1 tahun	100	25.580.000	19.420.000	75,92		
3	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Sasaran: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**17.855.000**	**16.325.000**	**91,43**		
3.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100**	**17.855.000**	**16.325.000**	**91,43**		
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapakan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Konflik dan Penyelenggaraan HUT RI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	10.375.000	10.375.000	100		
	Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masyarakat dan Masalah Sosial Lainnya	1 tahun	1 tahun	100	7.480.000	5.950.000	79,55		
4	**Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**23.120.000**	**23.120.000**	**100**		
4.1	**Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah desa**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**	**23.120.000**	**23.120.000**	**100**		
	JUMLAH				**100**	**1.950.987.437**	**1.802.648.412**	**92,40**		

Sumber: Kecamatan Satar Mese Kab. Manggarai, Januari 2023

3.4 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan strategis yang diambil Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 disajikan dalam tabel 3.229.

Tabel 3.229
Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah
2.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	• Untuk menjamin kepastian hukum dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka penyesuaian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; • Lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu dilindungi sebagai upaya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; • Setelah dilakukan inventarisasi kembali terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, ditemukan adanya perbedaan luasan secara eksisting dengan luasan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
3.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	▪ Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi; ▪ Untuk menjamin kepastian hukum dan untuk menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bangunan gedung di daerah.
4.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	▪ Merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 16 September 2022
5.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	▪ Merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD; ▪ Pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan
6.	Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai	▪ Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional, perhitungan kemampuan keuangan daerah menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan; ▪ Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 dikategorikan ***Rendah;*** ▪ Berdasarkan pertimbangan tersebut perleu melakukan penyesuaian Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
7.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	▪ Penyesuaian dalam penetapan kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai; ▪ Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3484/OTDA tanggal 31 Mei 2021 Hal : Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021.
8.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai	• Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaera dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/3484/OTDA tanggal 31 Mei 2021 Hal Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021, perlu melakukan penyederhanaan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai; • Penyederhaaan struktur organisasi, telah mendapat persetujuan Gubenur Nusa Tenggara Timur melalui Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 061/67/BO1.2 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi
9.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai	• Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada instansipemerintah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3484/OTDA tanggal 31 Mei 2021 Hal Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasinomor 25 Tahun 2021, perlu melakukan penyederhanaan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah kabupatenmanggarai; • Penyederhanaan organisasi perangkat daerah juga dilakukan dengan berpedoman pada Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 061/67/BO1.2 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi.
10.	Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan *(Whistle Blowing System)* Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan *(Whistle Blowing System)* Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai	Untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi serta dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
11.	Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan	Retribusi pelayanan persampahan dipungut atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan/atau pemusnahan sampah di lokasi TPA.
12.	Organisasi Dan Tata Kerja Staf Khusus Bupati Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 - 2026	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Bupati Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 - 2026	• Untuk menjamin tercapainya target pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026, diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan; • Dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mencapai target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026; • Untuk mendukung kelancaran pengambilan langkah-langkah konkret untuk mencapai target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) 2021-2026, perlu dibentuk Staf Khusus
13.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai	• Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 serta penjabarannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besarnya Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai; • Bahwa berhubung telah dialokasikannya penambahan anggaran Tunjangan Perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai dalam APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai perlu dilakukan perubahan.
14.	Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 12 Tahun 2022 tentang	Memperhatikan kecukupan kemampuan keuangan daerah serta tingginya mobilitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan tugas dan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai	Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai	fungsinya maka perlu dilakukan perubahan/penaikan atas besaran tunjangan transportasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
15.	Sistem Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 13 Tahun 2022 tentang Sistem Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai	• Ketentuan peraturan presiden nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan pelayanan publik dan pada setiap sarana pengaduan harus tersedia informasi tentang mekanisme atau tata cara secara langsung, dan/atau elektronik yang mudah diperoleh dan dipahami oleh penerima pelayanan; • Berdasarkan amanat ketentuan pasal 4 ayat (2) peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 46 tahun 2020 tentang *road map* sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional tahun 2020-2024, implementasi *road map* sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional tahun 2020-2024 di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh oleh menteri/kepala lembaga dan kepala daerah masing-masing
16	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Penyesuaian terhadap pemekaran perangkat daerah, nomenklatur perangkat daerah.
		Peraturan Bupati Manggarai Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Adanya penyesuaian Kerangka Acuan Kerja (KAK), sesuai hasil rakontek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
17.	Perubahan Kedua Atas Tarif Retribusi	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 18 Tahun 2022	Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan dan memperhatikan perkembangan indeks harga dan ekonomi masyarakat, dipandang

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Pelayanan Kesehatan	tentang Perubahan Kedua atas Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan	perlu menyesuaikan kembali tarif retribusi pelayanan kesehatan.
18.	Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Manggarai perlu ditetapkan penyesuaian harga jual produksi usaha daerah khususnya harga jual ternak babi, ayam dan telur ayam;
19.	Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Serta Dana Operasionsal Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Serta Dana Operasionsal Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai	• Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai, tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah; • Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
20.	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
21.	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai	Dalam rangka kelancaran pelaksanaan bantuan sosial bagi penyandang masalah-masalah sosial, maka perlu menetapkan standarisasi penerima bantuan sosial berupa uang.
22.	Teknis Pemberian	Peraturan Bupati	Melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022	Manggarai Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022
23.	Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai	Guna penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai dan dengan telah diundangkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, perlu mengatur tentang pelarangan terhadap Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Manggarai yang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
24.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Untuk pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, perlu dilakukan penyesuian terhadap rekening belanja pegawai.
25.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa	Dalam rangka menjamin kepastian hukum pengangkatan perangkat desa, pemberhentian perangkat desa, pemberhentian sementara perangkat desa serta mutasi jabatan perangkat desa
26.	Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 27 Tahun 2022 Tentang	• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2021 tentang

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Pembangunan Kepariwisataan Daerah	Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Kepariwisataan Daerah	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 2022-2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Kepariwisataan Daerah; • Melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisataan.
27.	Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022	Perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
28.	Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Pendukung Pelayanan Kesehatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Pendukung Pelayanan Kesehatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	• Upaya peningkatan motivasi dan prestasi kerja para tenaga kontrak, tenaga harian lepas dan tenaga pendukung pelayanan kesehatan lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai sesuai kemampuan keuangan daerah; • Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Tenaga Kontrak, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Pendukung Pelayanan Kesehatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022.
29.	Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Manggarai perlu ditetapkan penyesuaian harga jual produksi usaha daerah khususnya harga jual ternak babi.
30.	Isu Prioritas, Indikator dan Ukuran Keberhasilan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Isu Prioritas, Indikator dan Ukuran Keberhasilan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai	• Untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sepakat untuk membangun Indonesia mulai dari desa; • Desa ramah perempuan dan peduli anak merupakan desa yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan,

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia; • Dalam rangka penetapan desa ramah perempuan dan peduli anak, perlu ditetapkan pengaturan isu prioritas, indikator dan ukuran keberhasilan.
31.	Penghargaan Kepada Perseorangan, Organisasi Pariwisata Serta Badan Usaha yang Berprestasi Luar Biasa atau Berjasa Besar dalam Meningkatkan Pembangunan, Kepeloporan dan Pengabdian di Bidang Kepariwisataan Budaya Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Penghargaan Kepada Perseorangan, Organisasi Pariwisata Serta Badan Usaha yang Berprestasi Luar Biasaa Berjasa Besar Dalam Meningkatkan Pembangunan, Kepeloporan dan Pengabdian di Bidang Kepariwisataan Budaya Manggarai	• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2021 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2022-2025 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan Kepada Perseorangan, Organisasi Pariwisata serta Badan Usaha yang Berprestasi Luar Biasa atau Berjasa Besar Dalam Meningkatkan Pembangunan, Kepeloporan dan Pengabdian di Bidang Kepariwisataan Budaya Manggarai; • Memberikan penghargaan Kepariwisataan Budaya Manggarai kepada perseorangan, organisasi pariwisata serta badan usaha adalah untuk memotivasi, menumbuh-kembangkan kreativitas serta sebagai pengakuan atas jasa dan prestasi dalam kepeloporan, pengabdian dan pengembangan Kepariwisataan Budaya Manggarai; • Pedoman dalam pemberian penghargaan kepada berbagai pihak yang telah peduli melestarikan nilai-nilai sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan lingkungan yang berlaku di wilayah Daerah. **Tujuan:** • Merangsang dan menumbuh-suburkan kegiatan pariwisata dan budaya, baik secara langsung maupun tidak langsung; • Mendorong terwujud/tercapainya Daerah sebagai pusat pengembangan kehidupan keaneka-ragaman sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dalam semangat Bhineka Tunggal Ika; • Menguatkan komitmen masyarakat dalam meningkatkan peran sertanya guna mendukung Kepariwisataan Budaya Manggarai menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
32.	Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai	Dalam rangka melaksanakan ketentuan Lampiran huruf O angka 1 huruf i dan angka 2 huruf c angka 1) huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Tahun Anggaran 2022	
33.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023	Berdasarkan amanat dalam Pasal 104 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023.
34.	Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2023	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2023	• Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Manggarai Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; • Berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
35.	Penyusunan Data Agregat Kependudukan di Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Data Agregat Kependudukan di Kabupaten Manggarai	• Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Data Agregat Kependudukan di Kabupaten Manggarai; • Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. • Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			Pencatatan Sipil.
36.	Pedoman Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Manggarai	Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Manggarai
37.	Pemberian Insentif dan Disinsentif Kepada Orang Yang Berjasa Atau Menghambat Pembangunan Prasarana Pariwisata	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Kepada Orang yang Berjasa Atau Menghambat Pembangunan Prasarana Pariwisata	Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 2022-2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Kepada Orang yang Berjasa atau Menghambat Pembangunan Prasarana Pariwisata
38.	Perjalanan Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022	• Dengan adanya perubahan standarisasi uang trasnportasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Manggarai Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022; • Perjalanan dinas merupakan salah satu bentuk tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, sehingga perlu diatur sesuai ketentuan yang berlaku yang diselaraskan dengan situasi dan kondisi daerah Kabupaten Manggarai.
39.	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	• Berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; • TPP ASN merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah yang dihasilkan. TPP bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN di Kabupaten Manggarai. • Pemerintah Kabupaten Manggarai memberikan TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan obyektif lainnya. TPP berdasarkan dibayarkan menggunakan kelas jabatan yang telah ditetapkan dengan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			Peraturan Bupati Manggarai Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai.
40.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manggarai	• Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara berdayaguna, berhasil guna dan memadai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; • Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisien sisistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE, yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
41.	Pedoman Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ben Mboi	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ben Mboi	Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Ben Mboi, diperlukan fleksibilitas pengadaan barang/jasa pada RSUD dr. Ben Mboi.
42.	Perubahan Atas Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	• Dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kebutuhan di Kabupaten Manggarai perlu ditetapkan penyesuaian tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor; • Perubahan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ini dilakukan dengan memperhatikan indeks harga pasar dan perkembangan perekonomian saat ini di Kabupaten Manggarai
43.	Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	• Dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Manggarai perlu ditetapkan penyesuaian harga jual produksi usaha daerah khususnya harga jual ternak babi; • Perubahan tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah ini dilakukan dengan memperhatikan indeks harga pasar dan perkembangan perekonomian saat ini

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			di Kabupaten Manggarai. Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan sesuai harga pasar anak babi jantan dan betina (8-10 (delapan sampai dengan sepuluh) kilogram) dengan harga pasar saat ini adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harga pasar babi afkir (siap potong) saat ini adalah Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu) per kilogram berat hidup.
44.	Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai	Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel dan untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tugas dan tanggung jawab Komite Eksekutif adalah: 1. Menetapkan kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko Daerah; 2. Menetapkan profil Risiko Kunci Daerah beserta dengan rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis Daerah secara tahunan; 3. Menetapkan selera Risiko *(risk appetite)* dan kriteria Risiko yang berlaku di Daerah; 4. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko di Daerah. 5. Memastikan bahwa Proses Manajemen Risiko berjalan efektif di Daerah; 6. Tugas dan tanggung jawab Komite Pelaksana adalah menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko Daerah sebagai pedoman implementasi Manajemen Risiko bagi seluruh unit di lingkungan Pemerintah Daerah; 7. Kebijakan dan pedoman yang perlu disusun oleh Komite Pelaksana antara lain berupa selera Risiko dan kriteria Risiko Kabupaten Manggarai, pedoman tentang pengukuran Risiko, pedoman penyusunan profil Risiko, pedoman pemantauan penanganan Risiko Kabupaten Manggarai, dan pedoman penyusunan *lost event database*. Kebijakan dan pedoman yang disusun oleh Komite Pelaksana selanjutnya disampaikan kepada Komite Eksekutif sebagai usulan untuk dibahas dan ditetapkan.
45.	Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Pendukung dan Pegawai Kebutuhan Khusus Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Pendukung Dan Pegawai Kebutuhan Khusus Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai	Sebagai upaya peningkatan motivasi dan prestasi kerja para pegawai tidak tetap, tenaga pendukung dan pegawai kebutuhan khusus non Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai sesuai kemampuan keuangan daerah.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Manggarai		
46.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022	• Dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berkenaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 tidak sesuai dan perlu diubah; • Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang merupakan lanjutan dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022. Perlunya dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2022 didasarkan pada adanya hasil evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran pembangunan dalam tahun berjalan (tahun 2022) yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; adanya pergeseran kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; adanya kegiatan lanjutan tahun 2021 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2022; • Perubahan RKPD memiliki posisi yang strategis untuk menjembatani berbagai kebutuhan prioritas masyarakat bagi kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkesinambungan serta ketersediaan dana pembangunan
47.	Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai	• Dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 03 September 2022 mempengaruhi pada perhitungan biaya operasional kendaraan, maka dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang dalam wilayah Kabupaten Manggarai yang diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar Angkutan Kota dan Tarif Jarak Angkutan Perdesaan di Kabupaten Manggarai; • Kenaikan harga BBM sangat

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat, salah satunya bidang transportasi. Bidang transportasi sangat erat kaitannya dengan ketersediaan dan harga BBM. Kenaikan atau turunnya harga BBM akan berdampak langsung terhadap biaya transportasi. Dan dengan kenaikan dimaksud, akan berdampak terhadap penghasilan yang akan diterima oleh pengusaha transportasi; • Dengan adanya dampak ikutan terhadap bidang transportasi dimaksud, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif dasar angkutan kota dan tarif jarak angkutan perdesaan yang berlaku di Kabupaten Manggarai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar Angkutan Kota dan Tarif Jarak Angkutan Perdesaan di Kabupaten Manggarai.
48.	Rencana Induk Manggarai Kota Cerdas Tahun 2022-2026	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Manggarai Kota Cerdas Tahun 2022-2026	• Dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu pengelolaan sumber daya yang inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan melalui Kabupaten Manggarai Kota Cerdas; • Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Manggarai diberi kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika yang berupa kota cerdas, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai tentang rencana Induk Manggarai Kota Cerdas (*Master Plan Smart City* Kabupaten Manggarai); Strategi pembangunan *Smart City* Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan : a. Strategi pembangunan tata kelola birokrasi *(smart governance)*, melalui : 1. Pengembangan pelayanan *public online*; 2. Penguatan implementasi SPBE; 3. Penguatan dukungan regulasi pemanfaatan dana desa. b. Strategi pembangunan pemasaran daerah (*smart branding*), melalui : 1. Membangun dan mengembangkan 2. Destinasi wisata di Daerah; 3. Membangun infrastruktur dan ekosistem pariwisata Manggarai yang terintegrasi dan mempesona; 4. Menghadirkan platform *dashboard* dan portal investasi Daerah yang

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			interaktif, atraktif dan informatif; dan 5. Membangun *platform marketplace* di Daerah untuk memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah secara kondusif dan nyaman. c. Stategi pembangunan perekonomian (*smart economy*), melalui : 1.Meningkatkan daya saing ekonomi di dukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas Daerah; 2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pengembangan potensi lokal unggulan; dan 3. Mengembangkan platform *E-commerce* dengan mekanisme pembiayaan yang terintegrasi dengan perbankan. 4. Pendidikan dan *link and match* dengan dunia usaha; dan 5. Menciptakan pelayanan kegawatdaruratan yang terpadu dengan kemudahan dan akses kepastian. d. Strategi pembangunan pemeliharaan lingkungan *(smart environment)*, meliputi: 1. Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara; 2. Membangun ruang terbuka hijau; 3. Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga dan industri secara aman, ramah dan berkelanjutan; dan 4. Meningkatkan tata kelola energi yang efisien dan bertanggung jawab melalui pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan
			e. Strategi pembangunan ekosistem permukiman penduduk *(Smart Living)*, melalui : 1. Mewujudkan keharmonisan pembangunan dalam pemanfaatan ruang guna menciptakan kota layak huni yang ramah; 2. Menguatkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan fasilitas, akses, kapasitas tenaga kesehatan dan pelayanan promotif dan preventif; dan 3. Mewujudkan ekosistem transpotasi yang menjamin mudahnya mobilitas bagi individual, publik mupun unutk pemenuhan kebutuhan logistik Daerah. f. Strategi pembangunan lingkungan masyarakat *(smart society)*, meliputi : 1. Mewujudkan kota yang santun melalui interaksi sosial yang agamis dan toleran; Menghadirkan pelayanan pendidikan yang inklusif didukung suprastruktur dan infrastruktur pendidikan, kapasitas tenaga
49.	Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 60 Tahun 2022	Dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap sumber penganggaran serta tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Tenaga Kontrak, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Pendukung Pelayanan Kesehatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Pendukung Pelayanan Kesehatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	bagi Tenaga Kontrak, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Pendukung Pelayanan Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Manggarai Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Tenaga Kontrak, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Pendukung Pelayanan Kesehatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022.
50.	Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai	• Dalam rangka peningkatan produktivitas, efisiensi, efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu mengatur kembali jam masuk dan keluar kantor pegawai ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai; • Peraturan Bupati tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai menjadi acuan umum bagi seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten Manggarai dalam mengatur serta melaksanakan hari dan jam kerja di lingkungan instansi masing-masing. Pengaturan hari kerja yang baru lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai bermaksud memberikan acuan umum bagi PD dalam hal keseragaman waktu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD dan kemudahan konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lintas PD. Selain itu, pengaturan hari kerja bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi dan efektifitas kerja serta kesejahteraan pegawai ASN
			• Sehubungan dengan pertimbangan dimaksud, maka Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 Tahun 2019 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai diubah guna penyesuaian jam masuk dan jam keluar kantor serta penyesuian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
51.	Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai	• Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah manajemen perubahan berupa pembangunan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur; • Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai • Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tujuan dan kondisi birokrasi yang diinginkan telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi birokrasi ini merupakan wujud dari komitmen berkelanjutan pemerintah. Secara khusus, pada tahun 2025 diharapkan Indonesia berada pada fase yang benar-benar bergerak menuju negara maju yang mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis serta diharapkan mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025
52.	Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai	• Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; • Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di daerah, sekaligus untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif.
53.	Perjalanan Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup	• Adanya perubahan satuan biaya transportasi dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan keluar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur; • Dengan adanya kenaikan harga tiket pesawat udara yang disebabkan tingginya permintaan dibandingkan dengan kapasitas penumpang yang bisa ditampung sangat terbatas, menyebabkan inflasi tinggi di sektor penerbangan. Inflasi ini dibuktikan dengan tingginya harga tiket pesawat udara;

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022	• Kenaikan harga tiket pesawat udara perlu disikapi dengan bijak sehubungan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyesuaian harga tiket dalam dan keluar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan sebagai landasan hukum bagi pelaku (Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara) yang melakukan perjalanan dinas. Oleh karena itu, penyesuaian dimaksud harus ditetapkan dalam peraturan bupati agar berkekuatan hukum dan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaannya.
54.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Manggarai Kabupaten Manggarai Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Sebagai pedoman pelaksanaan APBD
55.	Pedoman Pelaksanaan Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Dalam Kegiatan Pasar Murah	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Dalam Kegiatan Pasar Murah	• Bahwa untuk menekan terjadinya inflasi agar kebutuhan pokok masyarakat tidak begitu tinggi sehingga penerima manfaat dapat menjangkau harga beli terhadap kegiatan pasar murah, maka perlu dilakukan subsidi atas bahan kebutuhan pokok; • Bahwa dalam rangka pelaksanaan subsidi atas bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pedomannya.
56.	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Manggarai	• Bahwa untuk meningkatkan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas sesuai kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara berkesinambungan, perlu dilakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi (TPBIS); • Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mensyaratkan komitmen dan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia perpustakaan. Hal ini diharapkan menciptakan kesadaran masyarakat untuk berkembang dan keswadayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga mampu meminimalisir ketergantungan pada pihak-pihak di luar dirinya. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia (ham). Transformasi ini bertujuan terciptanya masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi soial. Sementara tujuan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu membangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan. Dalam strategi transformasi layanan perpustakaan ini mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin. Untuk aksinya ruang berbagi pengalaman, ruang belajar yang kontekstual dan ruang berlatih keterampilan kerja.
57.	Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ben Mboi	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ben Mboi	• Meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien, fleksibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi; dan • Meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada rsud melalui pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan rujukan medis dan non medis, serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktek bisnis yang sehat; • Rumah sakit mempunyai peraturan internal rumah sakit atau biasa disebut dengan *hospital by laws*. • Peraturan internal rumah sakit atau *hospital by laws* mengatur mengenai organisasi pemilik atau yang mewakili, peran, tugas dan kewenangan pemilik atau yang mewakili, peran, tugas dan kewenangan direktur rumah sakit, organisasi staf medis, peran, tugas dan kewenangan staf medis.
58.	Perubahan Atas Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai	• Setelah dilakukan inventarisasi kembali terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan Keputusan Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, terdapat perbedaan luasan secara eksisting dengan luasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Sekitar 1 milyar penduduk dunia akan mengalami kelaparan jika produksi pangan tidak ditingkatkan sebanyak 3 kali lipat pada kurun waktu tahun 2000-2050. Permasalahan utama terjadinya ancaman krisis pangan di Indonesia adalah menurunnya kesuburan tanah dan berkurangnya luas lahan karena adanya konversi lahan sawah ke non sawah. Kabupaten Manggarai telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perda ini mengamanatkan dilindunginya lahan pertanian untuk menjamin kedaulatan pangan secara berkelanjutan. Bentuk perlindungan lahan pertanian tersebut yaitu dengan ditetapkannya kawasan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada wilayah desa di 12 (dua belas) kecamatan, yang dikelompokkan dalam lahan pertanian dan lahan cadangan pertanian.
59.	*Road Map* dan Rencana Aksi Daerah Penanganan *Stunting*, Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 75 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Dan Rencana Aksi Daerah Penanganan *Stunting*, Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Manggarai	• Dalam rangka mendukung strategi Nasional percepatan penurunan *Stunting* guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu menyusun strategi percepatan penurunan *Stunting* di Daerah; • Bahwa pelaksanaan kegiatan penurunan angka prevalensi *Stunting*, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun serta kematian ibu dan bayi yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan; • Percepatan penurunan *Stunting*, AKI dan AKB memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah, pemerintah desa/kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, awak media dan pemangku kepentingan
60.	Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan	• Dengan tidak efektifnya pemungutan retribusi pelayanan persampahan oleh Lurah/Kepala Desa sehubungan dengan penghapusan kewenangan pemungutan retribusi oleh Kepala Desa/Lurah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan; • Retribusi pelayanan persampahan dipungut atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan/atau pemusnahan sampah di lokasi Tempat Penampungan Akhir; • Peraturan Bupati Manggarai Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan, yang berlaku saat ini perlu diubah dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan serta hasil evaluasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai penyelengga Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan. Penghapusan kewenangan Kepala Desa/Lurah dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan dialihkan kepada DLH, menjadi dasar penyesuaian Peraturan Bupati Manggarai Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan. Selain itu, penyesuaian lampiran juga disesuaikan sesuai dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah
61.	Pengelolaan Pinjaman Daerah Kabupaten Manggarai Dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pinjaman Daerah Kabupaten Manggarai Dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	• Pinjaman daerah dilakukan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pelayanan public; • Perencanaan pinjaman daerah untuk membiayai kegiatan yang memiliki korelasi kegiatan dengan dokumen perencanaan daerah yang tertuang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
62.	Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Manggarai	• Dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan penurunan *stunting* guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan *Stunting* di Daerah; • Pelaksanaan kegiatan penurunan *Stunting*

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan; • Percepatan penurunan *Stunting* memerlukan Intervensi Spesifik, Intervensi Sensitif dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah, pemerintah desa/kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
63.	Pedoman Penetapan Nama Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai	• Dalam rangka pelaksanaan penataan nama jalan dalam wilayah Kabupaten Manggarai sehingga mudah diidentifikasi agar dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan, maka perlu ditetapkan pedomannya; • Nama jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan. Untuk lebih mempermudah identifikasi rumah atau gedung diberi nomor atau gedung besar diberi nama Gedung; • Setiap jalan dan sarana umum tertentu di daerah diberi nama sebagai wujud penghargaan terhadap tokoh nasional dan tokoh masyarakat tertentu yang telah meninggal dunia dan berjasa kepada bangsa dan negara serta Daerah; • Pemberian nama jalan dan sarana umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diambil dari nama flora, fauna dan nama geografis serta dapat pula diambil dari nama lainnya sepanjang tidak menimbulkan pertentangan baik unsur politik maupun suku, agama, ras serta antar golongan serta nama lainnya yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa.
64.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Manggarai Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023	Sebagai pedoman pelaksanaan APBD

3.8 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2021

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Manggarai atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Manggarai Akhir Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam tabel 3.230.

Tabel 3.230
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Manggarai
atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Manggarai Akhir Tahun Anggaran 2021

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1		2	3	4
1.		**Dinas Pendidikan**		
		Urusan Pendidikan		
	1	Untuk APK, PAUDNI, APK SD/MI, APK SMP/MTs, APM SD/MI,APM SMP/MTs sudah mencapai target berdasarkan indikator kinerja. Sedangkan Rasio Siswa tidak mencapai target, hal ini dikarenakan kurangnya anak usia sekolah dibandingkan dengan jumlah ruang kelas yang tersedia. Terhadap hal ini direkomendasikan antara lain:		
	-	Pembangunan ruang kelas berdasarkan skala prioritas sehingga tidak terjadi penumpukan bangunan fisik sedangkan muridnya kurang. Disisi lain masih banyak sekolah yang rombongan belajarnya banyak tetapi kekurangan ruangan kelas	Dinas PPO telah melakukan pertimbangan rasio antara jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas yang ada, sehingga pembangunan RKB baik PAUD 2 ruang, SD 5 ruang maupun SMP 16 ruang pada tahun 2022 dilakukan berdasarkan skala prioritas secara bertahap dari tahun ke tahun sesuai kemampuan keuangan dan prioritas. (Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, sub kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru anggaran sebesar Rp. 1.118.165.367,- dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sub kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru dengan anggaran sebesar Rp. 3.867.287.150,-)	Penambahan ruang kelas baru pada sekolah yang rombongan belajarnya banyak tetapi kekurangan ruangan kelas bertujuan agar terpenuhinya ruang kelas yang layak dan mampu menampung murid
	-	Menempatkan Guru ASN	Tahun 2022 telah	Memenuhi kekurangan guru ASN

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		merata ke desa-desa, realitasnya banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru PNS khususnya di desa-desa	ditempatkan guru-guru P3K sebanyak 604 yang tersebar di SD dan SMP Kabupaten Manggarai untuk memenuhi kekurangan guru ASN khususnya di desa-desa (Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 235.635.962.814,-)	khususnya di desa-desa
	-	Terhadap sekolah-sekolah yang jabatan kepala sekolahnya masih dijabat oleh Pelaksana Tugas untuk sesegera mungkin untuk mengangkat kepala sekolah definitive dengan memperhatikan kualifikasi dan kepangkatan sesuai dengan aturan perundang-undangan	Pada tahun 2022 telah dilantik kepala sekolah di kabupaten manggarai sejumlah orang (PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dengan anggaran sebesar Rp. 45.500.000,-)	Memenuhi jabatan kepala sekolahnya masih dijabat oleh Pelaksana Tugas
	2	Indikator rasio guru dengan siswa belum mencapai target. Terhadap hal ini, dinas perlu serius untuk melakukan inventarisir sekolah-sekolah yang kekurangan siswa sehingga penentuan pembangunan fisik ditetapkan berdasarkan jumlah murid sehingga tidak terjadi kesenjangan jumlah murid dengan jumlah ruangan kelas	Telah dilakukan verifikasi data dan pemenuhan pembangunan ruang kelas secara bertahap	Sesuai dengan ketetntuan yang berlaku
		Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
		Untuk Bidang Kepemudaan dan Olah Raga belum menjadi perhatian Pemerintah Daerah baik pembinaan organisasi pemuda maupun pembinaan olahraga. Selama ini ada kegiatan pertandingan olah raga di desa-desa itu semata-mata karena inisiatif dari masyarakat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia dan hari-hari besar keagamaan (Paskah dan Pentekosten). Hal ini berdampak pada rendahnya		

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		kreativitas pemuda baik secara individu maupun secara organisasi dan minimnya prestasi olahraga di daerah ini. Terhadap hal ini direkomendasikan beberapa hal, sebagai berikut		
	-	Pemerintah Daerah membackup kegiatan organisasi pemuda	Tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan bimtek pada anak usia muda dengan kegiatan koordinasi, sinkroniasasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Akan disesuaikan anggaran di tahun berikutnya guna memenuhi indikator IKU pada RPJMD
	-	Memberikan berbagai jenis pelatihan kepemimpinan bagi kaum muda	Tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan bimtek pada anak usia muda dengan kegiatan koordinasi, sinkroniasasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Akan disesuaikan anggaran di tahun berikutnya guna memenuhi indikator IKU pada RPJMD
	-	Menjadwalkan pertandingan antar sekolah dan antar kecamatan baik untuk pelajar maupun untuk pemuda	Telah dilakukan pendataan secara bertahap	Akan disesuaikan anggaran di tahun berikutnya guna memenuhi indikator IKU pada RPJMD
2.		**Dinas Kesehatan**		
		Merujuk pada data yang disampaikan bahwa pada tahun 2021 AKB sebanyak 96 kasus. Hal ini disebabkan oleh status Gizi ibu hamil, faktor lingkungan dan kurangnya pendidikan masyarakat dalam hidup sehat dan akses pelayanan yang masih terbatas. Demikian juga usia harapan hidup orang Manggarai tidak menunjukkan peningkatan bahkan cenderung menurun, ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat Manggarai masih harus terus ditingkatkan. Dengan merujuk pada capaian indikator kinerja tersebut, maka direkomendasikan beberapa hal:		
	-	Prioritaskan program promosi kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di kota dan di desa-desa/kelurahan	Melalui pembiayaan tahun 2022 sudah dianggarkan kegiatan promosi kesehatan yang pelayanannya dapat menjangkau sampai ke Tingkat Desa/kelurahan	Promosi kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	-	Menyiapkan petugas (dokter, perawat, bidan, sanitarian dan gizi) pada setiap Puskesmas dan (perawat dan bidan) di Pustu/Polindes serta diwajibkan untuk tinggal di lokasi agar dapat memberikan pelayanan pada saat dibutuhkan. Demikian juga penyuluh KB harus tinggal di desa binaan	Memberikan penegasan kepada kepala puskesmas agar setiap petugas puskesmas, pustu dan polindes di desa untuk menempati sarana kesehatan yang ada di tempat tugasnya sehingga kegiatan pelayanan pada masyarakat dapat berjalan dan pada tahun 2022 Dinas mengalokasikan formasi P3K untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas.	Pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar
	-	Melaksanakan kegiatan BIMTEK dan Pelatihan kepada petugas puskesmas	Melaksanakan kegiatan BIMTEK dan Pelatihan kepada petugas puskesmas	Peningkatan SDM
	-	Obat-obatan dan peralatan lainnya di Puskesmas dan Pustu harus selalu tersedia dan lengkap	Pengadaan obat dari sumber dana DAK sudah mengakomodir kebutuhan obat dari puskesmas dan jaringannya serta telah melaksanakan kegiatan pendistribusian obat ke puskesmas dan jaringannya	Pendistribusian obat-obatan sesuai kebutuhan
	-	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil	Penyediaaan PMT untuk ibu hamil pada Tahun 2022	
	-	Tingkatkan monitoring dan evaluasi secara berjenjang	Melaksankan MONEV terpadu ke Puskesmas dan melakukan kegiatan Evaluasi kegiatan setiap semester di Dinas Kesehatan	
3.		**RSUD Ruteng**		
		Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit: indeks kepuasan masyarakat dari target 100%, realisasi 80.19%. Sedangkan persentase Capaian Pelaksanaan Pelayanan sesusi SPM sebesar 72,69 %. Terhadap pencapaian ini, direkomendasikan		
	-	Agar tingkatkan pelayanan sesuai dengan standar-standar yang dipakai	RSUD Ruteng berupaya meningkatkan capaian kinerja dengan melaksanakan pelayanan sesuai SOP yang berlaku	Menerapkan pelayanan sesuai SOP
	-	Dalam penanganan Pasien Gawat Darurat direkomendasikan agar mengutamakan keselamatan pasien daripada Administrasi	RSUD Ruteng berupaya untuk memperbaiki pelayanan di IGD dengan mematuhi SOP pelayanan pasien Emergensi dan mengoptimalkan aplikasi SIM-RS sehingga memudahkan proses administrasi. Telah dianggarkan pada	Kepatuhan terhadap SOP dan pengembangan SIM-RS

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			Tahun 2022 dalam Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (Belanja pengembangan SIM-RS)	
	-	Tingkatkan kualitas sumberdaya petugas agar dapat memberikan pelayanan dengan ramah dan berkualitas	RSUD Ruteng berupaya untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan Komunikasi Efektif bagi petugas RS. Yang akan direncanakan pada Anggaran Perubahan 2023. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelatihan Komunikasi Efektif bagi petugas Rumah Sakit.
4.		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
		Memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja di beberapa bidang Pekerjaan umum yang mencapai target bahkan ada yang melampaui target yang terdapat dalam RPJMD. Namun pada sisi lain masih ditemukan adanya kondisi jalan, air minum, bendungan dan irigasi, drainase, dan jembatan yang secara kualitatif belum memenuhi harapan. Kondisi lain bahwa masih banyaknya program pembangunan jaringan air yang belum selesai dikerjakan dan masih banyaknya proyek-proyek fisik yang masih dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Terhadap kondisi ini, direkomendasikan beberapa hal:		
	-	Pengawasan teknis untuk semua proses pekerjaan harus lebih intensif	Meningkatkan Intensitas kehadiran Konsultan Pengawas Teknik/direksi teknis di lapangan	
	-	Sering ditemukan di Desa yang menunjukan bahwa proses pengerjaan jaringan air minum bersih tidak memenuhi standar mutu sehingga tidak berfungsi dengan baik. Untuk itu agar proses pengawasan ditingkatkan sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan	**a. Untuk aspek perencanaan Teknis** Memastikan bahwa sumber mata air berkualitas baik melalui uji kualitas air melalui dinas terkait, elevasi sumber mata air harus lebih tinggi dengan daerah layanan, pembebasan lahan pada sumber mata air harus sudah diselesaikan di tingkat pemerintah desa setempat, hasil perencanaan teknis dituangkan dalam gambar – gambar teknis yang detail untuk setiap bagian pekerjaan sehingga	

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			memudahkan pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan fisik dengan baik sehingga kualitas pekerjaan penyediaan mata air minum bersih tercapai dengan baik. **b. Untuk aspek pengawasan Teknis** Biaya pengawasan teknis juga perlu dipertimbangkan besarannya untuk meningkatkan kualitas hasil pengawsan teknis. Biaya pengawasan teknis untuk konsultan pengawasan dapat ditetapkan pada batasan minimal tetentu yang layak untuk mendapatkan kualitas hasil pengawasan teknik yang baik **c. Pemeliharaan Pasca serah terima pertama** Perlu melibatkan organisasi pengurusan air minum (OPAM) pada masing-masing desa tempat lokasi pekerjaan fisik dinas pupr dalam proses pemanfaatan dan pemeliharaan sehingga keberlangsungan penyediaan air minum dapat tetap terjamin dan berkelanjutan	
	-	Jalan utama menuju Kantor Kecamatan perlu ditingkatkan dengan kualitas HRS, dan memperhatikan pelebarannya serta drainasenya	Ruas jalan ini akan menjadi perhatian pemerintah, khususnya Dinas PUPR	
	-	Perlu adanya keterpaduan antara rencana pembangunan jembatan dan ketersediaan jalan menuju jembatan yang akan dibangun	Akan menjadi perhatian pemerintah khususnya dinas PUPR agar pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan, tidak terkendala dengan jalur jalan yang belum ditingkatkan	
	-	Tingkatkan kwalitas pengerjaan jalan dan jembatan sesuai dengan standar ke-PU-an	Ruas jalan ini akan menjadi perhatian pemerintah, khususnya Dinas PUPR	
	-	Pemanfaatan alat berat di PU harus benar-benar terukur dan bertanggungjawab	Pengelolaan peralatan yang ada pada dinas PUPR, disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku	
	-	Pemerintah serius menangani proyek-proyek fisik agar tidak ada lagi proyek-proyek	Untuk Pekerjaan air minum bersih TA 2021 yang bersumber dari Dana Alokasi	

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		yang KDP	Umum (DAK) terdapat 25 paket pekerjaan fisik. Dari 25 paket pekerjaan tersebut sampai dengan akhir tahun 2021 yang sudah selesai dikerjakan sesuai waktu pelaksanaan dalam kontrak sebanyak 20 paket pekerjaan. Sedangkan yang tidak selesai sampai dengan berakhirnya tahun anggaran (31 Desember 2021) sebanyak 5 paket pekerjaan sehingga berstatus Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Terdapat 5 paket pekerjaan yang tidak selesai tersebut, sudah selesai dikerjakan pada awal tahun anggaran 2022, denga data penyelesaian pekerjaan sebagai berikut : 1. Pekerjaan penambahan sumur dalam terlindungi/broncaptering Desa Satarluju kec. Satarmese barat, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 383.922.000,- telah dilakukan serah terima pertama (PHO) pada tanggal 7 januari 2022 dengan nomor : PUPR.09.04/27/I/2022 antara Penyedia Jasa konstruksi atas nama CV. Wela Pembe dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR 2. Pekerjaan penambahan sumur dalam terlindungi/broncaptering Desa Satarluju kec. Satarmese barat, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 670.558.000,- telah dilakukan serah terima pertama (PHO) pada tanggal 7 januari 2022 dengan nomor : PUPR.09.04/26/I/2022 antara Penyedia Jasa konstruksi atas nama CV. Radi Putra dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR 3. Pekerjaan penambahan sumur dalam terlindungi/broncaptering Desa Nao kec. Satarmese Utara, dengan nilai kontrak sebesar Rp.	

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			473.075.000,- telah dilakukan serah terima pertama (PHO) pada tanggal 7 januari 2022 dengan nomor : PUPR.09.04/23.a/I/2022 antara Penyedia Jasa konstruksi atas nama CV. Wae Dalit dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR 4. Pekerjaan Pengembangan Jaringan distribusi dan sambungan rumah Desa Barang kec. Cibal, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 530.283.000,- telah dilakukan serah terima pertama (PHO) pada tanggal 7 januari 2022 dengan nomor : PUPR.09.04/20.a/I/2022 antara Penyedia Jasa konstruksi atas nama CV. Tunas Murni dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR 5. Pekerjaan Pengembangan Jaringan distribusi dan sambungan rumah Desa Ulubelang kec. Satarmese, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 325.535.000,- telah dilakukan serah terima pertama (PHO) pada tanggal 6 januari 2022 dengan nomor : PUPR.09.04/18.a/I/2022 antara Penyedia Jasa konstruksi atas nama CV. Electra dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR. Masa pemeliharaan sesuai dokumen PHO adalah selama 365 hari kalender terhitung sejak tanggal PHO	
	-	Pembangunan Lapen dan HRS harus disertakan dengan pembangunan drainase	Salah satu kendala yang kita hadapi adalah lebar jalan kabupaten belum sesuai standar. Hal ini mengakibatkan jalan yang dibangun tidak bisa dibuatkan salurannya. Harapan kedepan semua jalan kabupaten yang ada, diperlebar sesuai dengan standar, sehingga konstruksi jalan yang akan dibangun	

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			dapat dilengkapi dengan bangunan-bangunan pelengkap (bahu jalan, saluran drainase)	
	-	Ditemukan masih banyak proyek-proyek KDP, kedepannya tidak ada lagi proyek-proyek yang KDP	Akan menjadi perhatian dan kami akan terus berupaya agar pelaksanaan pekerjaan fisik tetap sesuai waktu kontrak.	
	-	Kontraktor yang tidak bekerja dengan baik untuk diblaklist	Rekomendasi ini akan diperhatikan dengan baik dalam pelaksanaannya.	
	-	Rekan kerja harus diperhatikan dengan baik oleh dinas	Rekomendasi ini akan kami perhatikan dengan baik dalam pelaksanaannya agar pihak ketiga dapat melaksanakan dan menyelesaikan kontrak kerja sesuai dengan hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian kerja dan tepat waktu dalam penyelesaiannya.	
	-	Untuk jalur-jalur jalan yang strategis untuk dialihkan statusnya untuk menjadi jalan propinsi	Akan menjadi perhatian dinas PUPR	
5.		**Dinas Perumahan**		
		Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
		Memberikan apresiasi kepada SKPD terkait atas peningkatan jumlah rumah tangga pengguna air bersih sesuai dengan indikator Kinerja dari urusan ini. Namun persoalan pasokan air bersih menjadi persoalan umum karena sering macet akibat debit air yang tersedia tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga pengguna air bersih. Terhadap hal inidirekomendasikan:		
	-	Agar peningkatan prosentase jumlah rumah tangga pengguna air bersih harus diimbangi dengan ketersediaan pasokan air bersih	Pada Tahun 2021 OPD Tidak melaksanakan program dan kegiatan tersebut karena tidak ada indikator prosentase jumlah rumah tangga pengguna air bersih.	
	-	Hendaknya bidang ini mengoptimalkan tugas dan fungsinya untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber dana lainnya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Manggarai khususnya pada Bidang Perumahan selalu berusaha mengoptimalkan tugas dan fungsinya dengan selalu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah	

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			layak huni baik yang bersumber dari Dana DAU ataupun Dana DAK	
		Urusan Pertanahan		
		Masih banyak masalah tanah milik Pemerintah Daerah yang keberadaanya belum jelas karena itu direkomendasikan		
	-	Segera menyelesaikan status kepemilikan tanah Pemerintah Daerah yang masih bermasalah	Akan menjadi perhatian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Manggarai. Kasus tanah yang lainnya masih dalam tahap penyelesaiaanya dan secara bertahap Dinas Perumahan akan melaksanakan pensertifikatan tanah milik pemerintah	
	-	Untuk tanah yang menjadi aset daerah yang belum disertifikat segera dilakukan sertifikasi secara bertahap	Akan menjadi perhatian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Manggarai. Secara bertahap Dinas Perumahan akan terus berusaha untuk selalu mengalokasikan dana untuk dapat melaksanakan pensertifikatan tanah milik pemerintah	
6.		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**		
		Memberikan apresiasi terhadap realisasi yang mencapai target dari indikator-indikator yang ada pada sektor ini. Yang menjadi catatan adalah penentuan angka target dan realisasi pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif. Hal ini disebabkan dukungan dari indikator lain yang belum optimal. Karena itu direkomendasikan		
	-	Tingkatkan promosi secara online potensi-potensi unggulan daerah di bidang pertanian, peternakan dan perikanan darat dan laut agar menggairahkan iklim investasi	Sedang diupayakan pengembangan aplikasi berbasis digital untuk mempromosikan potensi unggulan daerah.	Memudahkan para investor untuk mengakses informasi berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
	-	Memberikan kemudahan-kemudahan dalam kaitan perizinan dan aspek lain agar menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini	1. Penyusunan Standar Pelayanan 2. Pengembangan Proses Perizinan dan non perizinan berbasis digital berupa: a. Aplikasi OSS-RBA	Memudahkan para investor untuk mengakses informasi berkaitan dengan perizinan dan non perizinan.

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			b. Yang sedang dikembangkan : • PUSPITA: informasi persyaratan perizinan dan non perizinan. • SKM: survey kepuasan masyarakat • Pengaduan Masyarakat • Buku Tamu • Pakta Integritas bagi pelaku usaha • Pengembangan perizinan berbasis website.	
7.		**Dinas Perikanan**		
		Urusan Perikanan		
		Memberikan apresiasi kepada Pemerintah karena beberapa indikator pada sektor ini mencapai angka target. Direkomendasi untuk menjadi perhatian kedepan antara lain		
	-	Tingkatkan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya untuk mengimbangi konsumsi ikan masyarakat yang semakin tinggi	1. Produksi Perikanan Tangkap, dengan Program: Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kegiatan: Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil. Target: 7.084,21 ton Realisasi: 7.505,56 ton (105,95%) 2. Produksi Perikanan Budidaya, dengan Program: Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Target: 157,51 ton Realisasi: 158,30 ton (100,50%)	Peningkatan produksi perikana tangkap dan budidaya
	-	Pemberian bantuan alat tangkap ikan agar diberikan kepada kelompok sasaran yang jelas yaitu kepada kelompok Nelayan. Hindari pemberian bantuan alat tangkap kepada Pegawai Negeri Sipil	Program: Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan: Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pemberian bantuan alat tepat sasaran

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			Pada tahun 2022 Dinas Perikanan telah memberikan bantuan kepada nelayan dan bukan PNS, karena sebelum bantuan diberikan Dinas Perikanan telah melakukan tahapan seleksi dan survey kelompok calon penerima	
	-	Ada perhatian serius dari dinas terkait untuk meningkatkan budidaya rumput laut di kawasan yang potensial	Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang kewenangan Pengelolalaan Wilayah Laut antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten disebutkan bahwa Pengelolalaan Wilayah laut 0 s/d 12 Mil Laut merupakan kewenangan Provinsi, sehingga dengan demikian Dinas Perikanan Kab. Manggarai tidak menganggarkan pengelolaan rumput laut, karena wilayah tersebut merupakan Wewenang Provinsi	Urusan kelautan sudah menjadi kewenangan provinsi
	-	Melakukan pembinaan terhadap kelompok yang sudah dibentuk dan sudah menerima bantuan dari pemerintah	Pembinaan terhadap kelompok sudah dan akan terus dijalankan baik untuk kelompok yang sudah dibentuk maupun yang sudah menerima bantuan dari pemerintah	Peningkatan SDM dalam produksi perikanan
8.		**Dinas Lingkungan Hidup**		
		Memberikan apresiasi kepada SKPD terkait karena realisasi beberapa indikator mencapai angka target. Dalam kenyataan di lapangan persoalan sampah masih belum optimal di selesaikan karena itu direkomendasikan		
	-	Agar segera melakukan pewilayaan penanganan sampah diperkotaan menurut wilayah Kelurahan	Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melakukan pelayanan persampahan sesuai dengan wilayah kelurahan dengan pegaturan kendaraan dump truck melayani jalur – jalur utama dalam kelurahan, sedangkan motor roda 3 melayani pegangkutan pada jalur – jalur lingkungan yang tidak mudah diakses kendaraan dumptruk.	
	-	Sampah-sampah dibuang	Pembuangan sampah masih	

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		pada TPA yang telah dibangun	dilakukan secara open dumping, namun Pemerintah Daerah telah melakukan upaya - upaya penataan sampah di TPA dengan melakukan pemadatan sampah di TPA	
	-	Optimalkan penggunaan kendaraan pengangkut sampah ke TPA	Optimalisasi penggunaan kendaraan pengangkutan sampah baik kendaraan dumptruck, amroll truck dan motor roda tiga teah dilakukan sejalan dengan ketersediaan bahan bakar. Pelayanan dilakukan setiap hari, Senin ss/d Minggu, pagi jam 07.00 s/d 12.00 dan sore hari jam 14.00 – 16.00 ditambah dengan pelayanan di Cancar, Pagal dan Reo	
	-	Pengadaan tanah untuk TPA dan sarana pendukung pengangkut sampah untuk beberapa Kecamatan yang ada	Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengalokasikan anggaran pengadaan tanah dan perluasan lahan untuk TPA yang disesuaikan dengan prioritas dan ketersedian anggaran untuk tahun 2022 dialokasikan untuk kecamatan Langke Rembong dan Kecamatan Reok	
	-	Manfaatkan secara maksimal mesin pengolah sampah di TPA	Mesin pengolah sampah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena sampah yang dibuang ke TPA belum dipilah sesuai jenisnya, dan pemerintah daerah kekurangan tenaga untuk memilah sampah yang dibuang di TPA	
	-	Revitalisasi Embung Wae Kebong untuk pemenuhan kebutuhan Air minum bagi warga	Akan menjadi Perhatian Pemerintah ke depan.	
	-	Jadikan TPA Ncolang sebagai tempat pengolahan sampah	Akan menjadi prioritas perhatian pemerintah pada tahun yang akan datang	
	-	Rencanakan penganggaran untuk pembuatan TPA Ncolang	Akan menjadi Perhatian Pemerintah ke depan.	
9.		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
		Kinerja urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sudah mencapai target RPJMD. Namun masih ada hal-hal		

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		yang perlu direkomendasikan sebagai berikut		
	-	SKPD terkait bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan dan Desa untuk tingkatkan sosialisasi tentang kepemilikan dokumen kependudukan	Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait sosialisasi tentang kepemilikan dokumen kependudukan di desa-desa yang tersebar di 12 kecamatan.	Masyarakat paham dan mengerti tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan persyaratan pendukung kepengurusann dokumen kependudukan.
	-	Manfaatkan tempat kosong disamping Kantor Capil untuk dibangun ruang tunggu bagi masyarakat yang mengurus dokumen	Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum menindaklanjuti rekomendasi terkait pembangunan ruang tunggu bagi masyarakat karena belum ada anggaran	
	-	SKPD terkait membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan agar warga yang mengurus dokumen kependudukan tidak berdesak-desakan dan memberikan pelayanan yang ramah dan tepat waktu	Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menindaklanjuti rekomendasi terkait pembuatan Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan	Masyarakat yang mengurus dokumen mendapatkan pelayanan yang ramah dan tepat waktu. Juga sudah dijadwalkan pembagian 2 shift agar masyarakat tidak berdesak-desakan dalam kepengurusan dokumen kependudukan.
	-	Untuk meringankan kerja Catatan Sipil, Perlu memperluas jaringan pelayanan ke Kecamatan-Kecamatan	Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum menindaklanjuti rekomendasi terkait perluasan jaringan pelayanan ke kecamatan-kecamatan karena terbatasnya anggaran	
10.		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		
		Memberikan apresiasi kepada Pemerintah karena dalam bidang ini beberapa indikator mencapai target. Namun untuk indikator jumlah KK miskin yang tertangani, jumlah kelompok masyarakat yang dibina, dan jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang dibentuk dan dibina masih rendah. Terhadap tiga hal ini direkomendasikan peningkatan jumlah kelompok sasaran kegiatan secara maksimal dengan mempertimbangkan regulasi tentang KK miskin, regulasi tentang kelompok binaan		

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		dan ekonomi desa. Adapun beberapa rekomendasi tambahan yang menjadi perhatian kedepan adalah sebagai berikut		
	-	Tingkatkan pelatihan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa dan pelaksanaan APBD Desa	Kegiatan sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan fasilitasi penyusunan RPJMDes/RKPDes dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan peserta yang diundang adalah Kepala Desa dan BPD dari masing-masing Desa di Wilayah Kecamata. Materi yang dibawakan yaitu Peraturan Perundang-Undangan tentang pengelolaan Keuangan Dana Desa, Mekanisme Pengelolaan BLT Dana Desa (persyaratan KPM, pendataan KPM penyaluran BLT DD, dan pelaporan/pertanggungjawaban pelaksanaan BLT DD), Peraturan Perundang-Undangan tentang penyusunan RPJMdes/RKPdes, serta fasilitasi penyusunan APBDes telah dilaksanakan	1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan desa; 2. Terlaksananya sosialisasi terkait pengelolaan BLT Dana Desa (Persyaratan KPM, Pendataan KPM, Penyaluran BLT DD, dan Pelaporan/Pertanggungjawaban Pelaksanaan BLT DD); 3. Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPJMDesa dan RKPDes; 4. Tersedianya dokumen RPJMDes dan RKPDes dari 94 Desa yang baru dilantik tahun 2021.
	-	Pelaksanaan Bimtek bagi aparat Desa menjadi prioritas terutama berkaitan dengan pembuatan APBDesa	Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa telah dilakukan pada tahun 2022, berkat Kerjasama Pemerintah Daerah dengan LSM yang ada di Manggarai selama 3 (tiga) hari	Terlaksananya kegiatan BIMTEK untuk para Kades se-Kabupaten Manggarai
	-	Tingkatkan sosialisasi undang-undang nomor 6 tentang Desa dan Perda baru tentang Pemilihan Kepala Desa	Untuk meminimalisir terjadinya sengketa Dinas PMD terus mengoptimalkan sosialisasi Perda pada setiap periode pemilihan Kepala Desa serta meningkatkan fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa mulai dari syarat pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa	Adanya pemahaman yang baik sehingga terciptanya situasi yang kondusif dalam setiap periode pemilihan Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa.
	-	Optimalkan pendampingan BUMDES agar dapat menjadi Central Ekonomi bagi masyarakat desa	Dinas PMD PMD Kabupaten Manggarai melalui Bidang penguatan kelembagaan dan partisipasi Masyarakat telah melakukan pembinaan dan evaluasi di 41 BUMDESA tersebar di 11 Kecamatan di	1. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat; 2. Menumbuhkembangkan BUMDesa sebagai Lembaga yang

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			Kabupaten Manggarai	Tangguh, unggul, efektif dan efisien sehingga dipercaya, mengakar dan akuntabel; 3. Melestarikan, mengembangkan dan mendayagunakan kearifan local dengan mengutamakan Prakarsa serta inisiatif local dalam penumbuhkembangan BUMDesa; 4. Menerapkan konsep partisipatif social dan ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan; 5. Meningkatkan perekonomian masyarakat, PADesa, melalui usaha BUMDesa.
11.		**Dinas Perhubungan**		
		Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator urusan bidang Perhubungan ada indikator yang mencapai target RPJMD dan ada yang belum mencapai target. Terhadap hal ini direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut		
	-	Optimalkan pemanfaatan semua terminal penumpang yang sudah dibangun baik di kota Ruteng maupun di kota kecamatan agar kendaraan menurunkan dan menaikkan penumpang di terminal	Jumlah terminal kondisi sampai tahun 2022 yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Manggarai adalah 3 terminal,yaitu terminal lando, terminal karot dan terminal reo.Upaya yang telah dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan terminal tersebut adalah : - menempatkan petugas/pegawai Dinas Perhubungan di masing-masing terminal untuk mengatur/mengarahkan kendaraan yang masuk maupun keluar terminal (Program Penyelenggaraan Lalulintas Angkutan Jalan Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Mengurangi kemacetan pada ruas jalan dalam kota; menambah pendapatan melalui retribusi pelayanan di lingkungan terminal

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			(Fasilitas Utama dan Pendukung). - Melakukan operasi pengawasan dan penertiban kendaraan umum yang wajib masuk/keluar terminal sebagai titik star dan titik akhir untuk menaikan dan menurunkan penumpang; - melakukan pemantauan secara berkala dalam rangka memacu kinerja para pegawai yang bertugas di terminal (Program Penyelenggaraan Lalulintas Angkutan Jalan Kegiatan: Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Sub Kegiatan: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal)	
	-	Memberikan tindakan tegas kepada kendaraan penumpang yang melanggar aturan dengan menertibkan kendaraan penumpang yang menurunkan dan menaikkan penumpang di dalam kota bagi kendaraan luar kota. Apabila pelanggaran dilakukan secara berulang-ulang sebaiknya izin trayek dicabut	- Pada tahun 2022, kegiatan penertiban kendaraan khusus angkutan pedesaan masih dilakukan dengan cara mengarahkan kendaraan untuk memanfaatkan terminal. Dan selanjutnya dengan beroperasinya Uji KIR Kendaraan, maka kedepan akan dilakukan tindakan pencabutan izin trayek bagi kendaraan yang melanggar. - Sedangkan khusus untuk kendaraan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang menaikkan dan menurunkan penumpang dalam kota, salah satu kegiatan penertiban dilakukan melalui kegiatan rekayasa lalu lintas dan pengaturan tempat/lokasi parkir, untuk menghindari parkir liar dalam kota Ruteng, sambil terus berkoordinasi dengan UPTD Perhubungan NTT, sebagai unit kerja	Meningkatkan kelancaranan arus lalu lintas

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			Dinas Perhubungan Provinsi NTT yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kendaraan AKDP. Dan terkait penertiban izin trayek untuk kendaraan AKDP tidak dapat dilakuan karena bukan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten melainkan kewenangan pemerintah provinsi. Kendala yang dihadapi dalam upaya penertiban kendaraan dalam kota adalah tidak tersedianya terminal dalam kota yang menjadi simpul akhir untuk menaikan dan menurunkan penupang dalam kota.	
	-	Tertibkan parkir kendaraan ekspedisi dijalan umum agar tidak mengganggu lalu lintas umum	Upaya penertiban kendaraan ekspedisi yang melakukan parkir di tepi jalan umum, telah dilakukan melalui : - kegiatan operasi penertiban dijalan secara rutin; - Teguran lisan kepada pengemudi/sopir dan - Penyampaian teguran tertulis kepada pengusaha angkutan barang. (Program Penyelenggaraan Lalulintas Angkutan Jalan Kegiatan: Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota)	Meningkatnya keselamtan keselamatan lalu lintas.
	-	Tegakkan Perda tentang retribusi parkir untuk meningkatkan PAD	Pada tahun 2022 seluruh sumber PAD yang dikelola oleh Dinas Perhubungan telah dilaksanakan sesuai tarif Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang retribusi tempat Khusus Parkir.	Kelancaran arus lalu lintas dan menambah PAD
	-	Pemerintah kabupaten Manggarai perlu berkoordinasi dengan	Terkait pemanfaatan tambatan perahu di dermaga Rebeng, langkah yang telah	Pemanfaatan dermaga Rebeng untuk peningkatan ekonomi dan kelancaran trasnportasi laut

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		pemerintah propinsi tentang pemanfaatan tambatan perahu di dermaga Rebeng-Dintor agar tidak mubazir	dilakukan: - Dinas Perhubungan telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Manggarai untuk memanfaatkan dermaga Rebeng sebagai pelabuhan/dermaga pariwisata. - Terus mendorong para pelaku usaha/pemilik/pengusaha perahu motor untuk memanfaatkan terminal akan segera melakukan koordinasi ke tingkat provinsi terkait pemanfatan dermaga untuk angkutan antar kabupaten dalam provinsi.	
	-	Tambatan Perahu yang berada di Dintor untuk segera dimanfaatkan	Terkait pemanfaatan tambatan perahu di dermaga Dintor, Dinas Perhubungan terus melakukan himbauan dengan pemilik perahu motor dan mendorong para pelaku usaha/pemilik/pengusaha perahu motor tersebut untuk memanfaatkan tambatan perahu tersebut.	Pemanfaatan dermaga Rebeng untuk peningkatan ekonomi dan kelancaran trasnportasi laut
	-	Kalau terjadi refocusing harus memperhatikan kinerja agar refocusing yang dilakukan tidak mengorbankan kinerja	Pada tahun 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai tidak mengalami refocusing anggaran. Dan selanjutnya,dalam pelaksanaan perencanaan dan penanggaran, Dinas akan memperhatikan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan capaian kinerja Dinas.	Terwujudnya sasaran dan capaian kinerja Dinas
	-	Penataan transportasi khususnya tempat parkir mobil yang tidak beraturan	Salah satu upaya penataan parkir ditahun 2022 adalah Pelaksanaan kegiatan rekayasa lalulintas, yang diantaranya menghasilkan : - Perubahan jalur dengan membentuk arah lalu lintas satu arah dibeberapa ruas jalan tertentu; Penyediaan ruang parkir dibadan jalan baik dengan menggunakan marka maupun dengan kegiatan sosialisasi langsung dijalan.	Terwujudnya kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas
12.		**Dinas Kominfo**		

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Urusan Komunikasi dan Informatika; Statistik, Persandian		
		Terhadap bidang ini direkomendasikan:		
	-	Pengelolaan situs Pemda agar kontennya selalu di update	- Program Informasi Dan Komunikasi Publik Kegiatan 'Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten, dengan total anggaran Rp. 58.880.000;	- Diskominfo selalu mengupdate data pada website Pemda dan Tahun 2022 sudah ditambah dengan Media Sosial Diskominfo telah melakukan penyebarluasan informasi yaitu IG Dinas Kominfo, FB ,youtube
	-	Dibangun spot-spot wifi gratis sebanyak mungkin untuk mensupport masyarakat dalam mendapatkan informasi yang banyak dan meluas	- Program Informasi Dan Komunikasi Publik Kegiatan 'Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten, dengan total anggaran Rp. 103.580.000;	Penyediaan tdk secara langsung oleh Dinas Kominfo tetapi melalui kerjasama dengan Kementerian Kominfo dlm hal ini melalui Badan Aksesbilitas telekomunikasi Indonesia yg sampai dengan tahun 2022 jml nya sudah mancapai 51 titik yg menyebar di fasilitas kesehatan,pendidikan,ktr pemerintahan dan fasilitas publik lainnya
13.		**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**		
		Urusan Pariwisata		
		Pada sektor ini DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah karena target pada sektor ini tercapai dan beberapa kegiatan melampaui target. Direkomendasi untuk menjadi perhatian kedepan antara lain		
	-	Maksimal pengelolaan dan penataan semua obyek wisata yang ada, dan menempatkan petugas retribusi di tempat wisata	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kab. Manggarai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai telah melakukan pengelolaan dan penataan di obyek-obyek wisata yang ada dengan melakukan pembinaan terhadap POKDARWIS, Kelompok Ekonomi Kreatif, dan para pelaku usaha / pekerja di sektor pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan dan peningkatan PAD di sektor pariwisata.	Peningkatan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target indikator dalam perjanjian kinerja.

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	-	Mengupayakan peningkatan lama tinggal wisatawan dengan melakukan atraksi budaya yang terjadwal	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kab. Manggarai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai telah mengupayakan melalui program dan kegiatan OPD yang bertujuan untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Manggarai. Dan berdasarkan data yang didapatkan, lama tinggal wisatawan di Kabupaten Manggarai telah mengalami peningkatan dari dua hari menjadi tiga hari.	Peningkatan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target indikator dalam perjanjian kinerja.
	-	Tingkatkan promosi wisata baik melalui media online maupun di tempat-tempat strategis	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kab. Manggarai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai telah melakukan promosi secara rutin melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Youtube. Lalu menanggapi era digital saat ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerja sama dengan pihak pengembang aplikasi mobile sudah meluncurkan aplikasi berbasis mobile (Android) bernama Mai Cee dengan harapan bisa mempermudah wisatawan era digital dan sebagai media promosi wisata Kabupaten Manggarai.	Peningkatan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target indikator dalam perjanjian kinerja.
		Urusan Kebudayaan		
	-	Berkembang pesatnya teknologi informasi dan arus global yang tidak bisa dibendung akhir-akhir ini berdampak pada degradasinya budaya daerah seiring dengan kurang optimalnya perhatian terhadap pelestarian budaya daerah.Terhadap hal ini direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:		
	-	SKPD terkait menginventarisasi budaya-budaya Manggarai	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kab. Manggarai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan pendataan terhadap cagar-cagar budaya yang ada di Kabupaten Manggarai. Kemudian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Manggarai juga melakukan pembinaan dan	Peningkatan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target indikator dalam perjanjian kinerja.

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			sosialisasi kepada para penjaga situs untuk selalu menjaga situs-situs cagar budaya yang ada agar lestari.	
	-	Bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi membuat penelitian tentang budaya, selanjutnya dibuat dalam bentuk buku untuk bahan bacaan atau referensi	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kab. Manggarai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan yang juga melibatkan mahasiswa, khususnya mahasiswa Kabupaten Manggarai dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan.	Peningkatan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target indikator dalam perjanjian kinerja.
	-	Membentuk dan membina sanggar-sanggar budaya yang konsen pada kegiatan budaya tradisional Manggarai	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kab. Manggarai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai telah melakukan pembinaan secara rutin terhadap sanggar-sanggar yang sudah dibentuk.	Peningkatan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target indikator dalam perjanjian kinerja.
	-	Merencanakan pagelaran budaya dengan terjawal setiap tahun yang melibatkan Pelajar dan Mahasiswa dan masyarakat umum	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kab. Manggarai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai telah mengupayakan rekomendasi yang dimaksud dengan menyelenggarakan acara pagelaran caci dan malam budaya.	Peningkatan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target indikator dalam perjanjian kinerja.
	-	Publikasi dan promosikan secara online kegiatan budaya yang sudah terjadwal untuk menarik wisatawan nusantara dan manca negara	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kab. Manggarai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai telah melakukan promosi secara rutin melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Youtube.	Peningkatan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target indikator dalam perjanjian kinerja.
14		**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**		
		Direkomendasikan agar media arsip selain arsip fisik dalam bentuk dokumen juga dibuat dalam bentuk elektronik. Selain itu, ketersediaan buku-buku harus sesuai dengan perkembangan dan kurikulum yang tersedia. Demikian halnya dengan Mobil perpustakaan keliling agar menyediakan buku-buku yang terupdate	- Penyimpanan arsip secara elektronik telah dilaksanakan melalui kegiatan digitalisasi arsip di bidang pengembangan dan system jaringan. Untuk saat ini, arsip yang didigitalisasi adalah arsip vital seperti : Sertifikat tanah dll.	Kegiatan digitalisasi arsip di bidang pengembangan dan system jaringan. Untuk saat ini, arsip yang didigitalisasi adalah arsip vital seperti : Sertifikat tanah dll.
			Bahan Pustaka/buku yang	Dinas Kearsipan dan

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			tersedia pada Perpustakaan umum daerah Kabupaten Manggarai adalah buku-buku hasil pengadaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai telah menerima 750 judul buku/1.500 eksemplar sebagai penerima manfaat bantuan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial TPBIS) dari Perpusnas RI Tahun 2022, yang terdiri dari : buku karya umum, filsafat dan psikologi, buku agama, Ilmu Sosial, buku Bahasa, ilmu alam dan matematika, Ilmu teknologi dan terapan, kesenian hiburan dan olahraga, kesastraan, geografi dan sejarah. Untuk buku-buku kurikulum akan ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan kurikulum Pendidikan.	Perpustakaan Kabupaten Manggarai telah menerima 750 judul buku/1.500 eksemplar bantuan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial TPBIS) dari Perpusnas RI Tahun 2022, yang terdiri dari : buku karya umum, filsafat dan psikologi, buku agama, Ilmu Sosial, buku Bahasa, ilmu alam dan matematika, Ilmu teknologi dan terapan, kesenian hiburan dan olahraga, kesastraan, geografi dan sejarah. Untuk buku-buku kurikulum akan ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan kurikulum Pendidikan.
			Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) menyediakan buku-buku hasil hibah dari Perpusnas RI Tahun 2017 dan hasil hibah Mobil Perpustakaan Keliling Tahun 2020 yang terdiri dari 250 judul buku/500 eksemplar. Perlengkapan multimedia 1 unit smart TV 32 Inch, 1 unit UPS, 1 unit Genset, 1 unit multimedia speaker, 1 paket Digital Library System (DLS) 4 unit tablet adroid. Mobil Perpustakaan ini dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan sekolah- sekolah yang ada di Kabupaten Manggarai.	Buku-buku hasil hibah dari Perpusnas RI Tahun 2017 dan hasil hibah Mobil Perpustakaan Keliling Tahun 2020 yang terdiri dari 250 judul buku/500 eksemplar. Perlengkapan multimedia 1 unit smart TV 32 Inch, 1 unit UPS, 1 unit Genset, 1 unit multimedia speaker, 1 paket Digital Library System (DLS) 4 unit tablet adroid. Mobil Perpustakaan ini dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan sekolah- sekolah yang ada di Kabupaten Manggarai.
15.		**Dinas Peternakan**		
		DPRD Kabupaten Manggarai mengapresiasi kinerja dari dinas ini. Namun dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat, maka dinas ini perlu merencanakan penyediaan anggaran untuk bantuan ternak bagi warga masyarakat. Karena untuk 2 tahun terakhir, dinas ini tidak menyediakan anggaran	Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Peternakan mengalokasikan anggaran untuk membantu warga masyarakat/keluarga penderita stunting pada 6 Kecamatan dan 34 Desa. Anggaran yang disiapakan sebesar: Rp. 180.000.000,- untuk belanja ayam buras calon induk dan	Intervensi berkaitan dengan masalah stunting

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		untuk pengadaan bantuan ke masyarakat	Rp.18.000.000,- untuk belanja pakan ayam. ◈ **Program:** Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian ◈ **Kegiatan:** Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
16.		**Dinas Pertanian**		
		Pada bidang pertanian terdapat sejumlah realisasi yang tidak mencapai angka target antara lain: Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan, Holtikultura (buah-buahan dan sayur-sayuran), Tanaman Perkebunan. Karena itu direkomendasikan antara lain		
	-	SKPD terkait melakukan perencanaan yang serius untuk program-program strategis	Perencanaan terhadap program-program strategis sudah dilaksanakan merujuk pada program strategis Kementerian Pertanian	
	-	Perbanyakan benih unggul untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu	Untuk pengadaan benih sudah menggunakan benih unggul bersertifikat	
	-	Perencanaan penggunaan pupuk oleh kelompok harus riil dan tepat waktu serta sesuai dengan musim tanam	Sudah di lakukan penginputan kebutuhan pupuk berdasarkan NIK/orang dengan kebutuhan dan jadwal tanam	
	-	Pengamatan dan pengendalian hama penyakit supaya ditingkatkan	Sudah surati Bupati Manggarai Cq. Kepala BKPSDM terkait kekurangan Petugas Pengamat Hama dan Penyakit	
	-	Tingkatkan pengembangan Holtikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pasar	Sudah dilakukan pengembangan hortikultura sayuran dan buah bagi kelompok tani	
17.		**Dinas Perdagangan dan Industri**		
		Distribusi Sektor industri Pengolahan terhadap PDRB walau angka mencapai target namun mesti tetap menjadi perhatian agar prosentasenya dapat naik secaca signifikan.		

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Untuk cakupan bina kelompok jumlah kelompok yang dibina cukup banyak. Direkomendasikan		
	-	Pemerintah lebih serius mendorong keterlibatan masyarakat terhadap pertumbuhan dan pengembangan industri pengolahan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota. Anggaran: Rp.7.346.711.511	Nilai produksi IKM dengan realisasi 133% dari target menunjukkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pertumbuhan industry pengolahan tahun 2022
	-	Iventarisasi kelompok industri kecil dan industri rumah tangga lainnya yang belum terakomodir untuk diberikan pembinaan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota. Anggaran: Rp.7.346.711.511	Sebanyak 93 IKM dan 120 pengrajin yang terakomodir mendapatkan pembinaan di tahun 2022
	-	Melakukan pembinaan terhadap kelompok ekonomi produktif yang sudah dibentuk, seperti: kelompok meubeler, kelompok tenun dan pemerintah memperhatikan harga pasar	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota. Anggaran: Rp.7.346.711.511	
		Memfungsikan pasar-pasar yang sudah dibangun oleh Disperindagkop di Puni		
		Pemerintah memprogramkan pembangunan pasar di bagian barat dan timur kota Ruteng dan dipilih tempat yang strategis agar pedagang tidak berjualan di areal parkir dan jalan umum pasar Ruteng		
		Urusan Fungsi Penunjang		
18.		**Bappelitbang**		
		Urusan Perencanaan		
		Memberikan apresiasi kepada SKPD atas tersedianya dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, dan KUA, PPAS). Namun alokasi anggaran dalam rangka menyukseskan visi dan misi Kepala Daerah belum optimal. Terhadap kondisi ini Panitia khusus rekomendasikan beberapa hal - Tingkatkan kwalitas SDM bagi staf perencanaan - Melakukan verifikasi dengan baik dan benar terhadap semua dokumen perencanaan	Program: Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Sub Kegiatan: 1. Sub Kegiatan Koordinasi Penelahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya Rp. 107.150.000,00 2. Sub kegiatan pelaksanaan	Menjaga konsistensi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan prosentase kesesuaian perencanaan dengan aspirasi masyarakat

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	-	Program dan kegiatan yang direncanakan pada setiap SKPDdipastikan sesuai dengan dokumen RKPD dan RPJMD - Memperhatikan usulan pokir DPRD untuk diakomodir dalam perencanaan kegiatan setiap OPD	konsultasi publik Rp. 13.072.000,00 3. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan forum/lintas SKPD Rp. 4. Sub kegiatan pelaksanaan Musrenbang/Kota Rp. 73.922.000,00 5. Sub kegiatan penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan Rp. 39.663.000,00 6. Sub kegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Rp. 300.909.200,00	
19.		**Badan Keuangan dan Aset Daerah**		
		Urusan Keuangan		
		Penataan administrasi keuangan selama ini cukup baik hal ini dibuktikan dengan penggunaan sistem pengelolaan keuangan daerah secara elektronik sehingga menjadi transparan, efektif dan efisien. Untuk kedepan direkomendasikan hal-hal antara lain:		
	-	Pembayaran gaji PNS dan anggota DPRD harus tepat waktu, gaji guru kontrak, guru komite, tenaga operator dan tenaga kependidikan dilakukan menggunakan transfer Bank	Proses Penatausahaan Keuangan melalui Belanja Wajib dan Mengikat antara lain Pembayaran Gaji PNSD, Gaji Pejabat Negara (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan pada Hari Kerja Pertama dalam Bulan. Pembayaran Gaji dan Tunjangan dimaksud termasuk pembayaran Iuran-Iuran Wajib baik berupa potongan-potongan yang melekat pada pembayaran gaji maupun iuran-iuran JKK dan JKM yang berdasarkan ketentuan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun	

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			2015 tentang JKK dan JKM bagi PNSD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Lingkup Pemerintah Daerah. Jadwal penyampaian Daftar Gaji kepada seluruh Perangkat Daerah setiap tanggal 26 untuk bulan berikutnya, dengan demikian Perangkat Daerah dapat menyampaikan SPM Gaji kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada hari terakhir dalam Bulan (untuk Gaji Bulan Berikutnya). Sedangkan Penerbitan SP2D atas Pembayaran Gaji dilakukan pada Hari Pertama Bulan berjalan, sehingga diharapkan sebelum tanggal 5 dalam bulan berjalan Gaji dan Iuran-Iuran telah dibayarkan melalui transfer ke masing-masing rekening tujuan. Kendala keterlambatan pembayaran gaji adalah adanya keterlambatan pengajuan SPM Gaji dari Perangkat Daerah dan hal ini sangat berdampak pada proses pembayaran gaji menjadi tidak tepat waktu.	
	-	SDM penata administrasi keuangan harus berkualifikasi akuntansi	Terkait SDM Penata Administrasi Keuangan harus berkualifikasi Akuntansi, dapat kami jelaskan bahwa Pegawai Penata Administrasi Keuangan (Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendahara) pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai belum seluruhnya berlatar belakang/berkualifikasi Akuntansi sehingga hal ini juga yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, dan hal ini akan menjadi perhatian kami kedepan untuk berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Manggarai dan	

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			Perangkat Daerah terkait penempatan/pengangkatan Pegawai Penata Administrasi Keuangan pada OPD-OPD	
	-	Meminta bupati Manggarai untuk mengevaluasi kinerja Kaban Keuangan. Melihat kenyataan selama ini bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan regulasi.Salah satu contoh penetapan KKD yang tidak mengacu pada regulasi yang pas	Dasar hukum penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pasal 2; KKD terdiri atas 3 kelompok yaitu; - Tinggi - Sedang - Rendah Pasal 3; ayat 1 : Penentuan kelompok KKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai ASN; ayat 2 : Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas PAD, Dana Bagi Hasil dan DAU; ayat 3 : Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai ASN. Pasal 4; ayat 1: Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksdud dalam pasal 3 merupakan realisasi APBD 2 tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan (Realisasi TA. 2020). Pasal 5: ayat 2: Kemampuan Keuangan Daerah bagi kabupaten /kota dikelompokan sebagai berikut :	

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			- diatas 550.000.000.000 dikelompokkan pada KKD tinggi; - 300.000.000.000 s/d 550.000.000.000 dikelompokkan KKD sedang; - dibawah 300.000.000.000 dikelompokkan KKD rendah. b. Surat Menteri Dalam Neg Nomor 18 Tahun 2017 te Menteri Dalam Negeri Nc Pada point 8; Perhitungar - Penentuan kelompok KKD di ASN. - Pendapatan Umum Daerah t yang bersumber dari Transfe pada kelompok Pendapatan Kabupaten/Kota serta Dana F Belanja Pegawai terdiri atas b ASN seperti gaji pokok ASN, Umum, Tunjangan Beras, Tu Kerja/Kematian, Tunjangan F Pemerintah Kabupaten Mang sejak tahun 2018.	
	-	Menempatkan Pegawai di badan keuangan sesuai dengan kompetensi	Saat ini jumlah pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai sebanyak 44 orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Pejabat Struktural 15 orang, yang mana dari jumlah tersebut terdapat 14 orang pejabat struktural yang berlatarbelakang kompetensi di bidang Ekonomi/Keuangan dan 1 orang Sarjana Ilmu Pemerintahan sedangkan Pejabat Fungsional sebanyak 6 orang yang terdiri dari 5 orang Sarjana Ekonomi dan 1 orang Sarjana Ilmu Pemerintahan, sisanya adalah Staf/Pelaksana yang berlatar belakang Sarjana Ekonomi, Sarjana Sosial, Sarjana Muda Ekonomi, dan SMA/SMEA. Terhadap latar belakang PNS yang ada ini, rata-rata semua memiliki kompetensi yang memadai terhadap pengelolaan Keuangan dengan didukung masa kerja yang cukup di bidang Pengelolaan Keuangan, namun kendala yang	

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			dihadapi adalah jumlah pegawai yang ada saat ini masih belum sebanding dengan beban kerja yang ada sehingga hal ini yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas tidak bisa dilaksanakan secara maksimal	
20		**Dinas Pendapatan**		
		Urusan Pendapatan		
		Untuk mendorong tingkatnya pendapatan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai merekomendasikan beberapa hal, antara lain:		
	-	Pemerintah daerah mereview kembali penetapan pajak hotel dan restaurant yang selama ini menggunakan system gelondong	Pada Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah melakukan penetapan pajak Hotel dan Restoran secara Self Assesment yaitu dengan memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan, menghitung, melapor dan membayar sendiri kewajiban pajaknya, dengan dasar penetapan berdasarkan omset wajib pajak	
21.		**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan SDM**		
		Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		
		Kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan pegawai dan reformasi birokrasi cukup baik, namun perlu ditingkatkan pada waktu-waktu yang akan datang demi terwujudnya pengelolaan kegiatan yang profesional dan berkualitas. Untuk kedepan direkomendasikan hal-hal antara lain		
	-	Penyebaran Tenaga PNS terutama guru harus merata ke wilayah-wilayah desa. Kondisi yang terjadi bahwa guru-guru PNS di desa-desa sangat kurang	Capaian Kinerja BKPSDMD pada tahun 2022 secara keseleruhan mencapai angka 74,98%. Ada beberapa indikator yang melebihi target namun ada pula indikator yang belum mencapai target. Terkait dengan Rekomendasi dari DPRD Kabupaten	

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			Manggarai berkaitan dengan distribusi guru PNS yang tidak merata di desa-desa memang sangat berdampak terhadap penurunan kualitas pelayanan mutu pendidikan. BKPSDMD berupaya mengatasi masalah ini dengan cara penyebaran ASN dari sekolah yang ada lebih guru ke sekolah yang masih membutuhkan dengan mempertimbangkan juga jarak tempuh dengan tempat tinggal, dengan demikian dapat memperlancar dan meningkatkan kinerja. Mengingat banyak juga guru dan Kepala Sekolah yang pensiun BKPSDMD berusaha memaksimalkan tambahan tenaga pendidik melalui formasi PPPK untuk ditempatkan di desa-desa	
	-	Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi	Penempatan ASN oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi. Hal ini dikarenakan kurangnya pegawai yang memenuhi persyaratan untuk dapat ditempatkan pada jabatan. faktor penghambatnya adalah terbatasnya pegawai yang memiliki kompetensi dan pelaksanaan diklat yang belum terpenuhi bagi pejabat. Namun untuk menindaklanjuti permasalahan ini BKPSDMD Kabupaten Manggarai telah menerapkan system merit dalam upaya penemapatan ASN. apa yang dimaksud dengan system merit tersebut yaitu dengan menempatkan seseorang ASN berdasarkan kompetensi. Hal ini sesuai dengan sasaran strategis BKPSDMD yaitu Optimalnya Pelaksanaan Sistem Merit Dalam Manajemen Kepegawaian	
22.		**Inspektorat**		

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Urusan Pengawasan		
		Kinerja pemerintah daerah dalam bidang pengawasan mesti terus didorong agar semakin maksimal. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi keterbatasan jumlah dan profesionalisme aparatur dalam bidang pengawasan yang masih terbatas. Terhadap hal ini direkomendasikan hal-hal sebagai berikut		
	-	Tenaga PNS yang profesional sebagai pengawas ditambah sehingga jumlah obyek pemeriksaan bertambah, apalagi sekarang jumlah dana yang dikelola oleh desa cukup besar	Pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada penambahan Auditor baru diRencanakan Pada Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) Orang Pegawai akan mengikuti diklat Pembentukan untuk menjadi Auditor Pertama dengan biaya State Accountability Revitalization (STAR)	
	-	Tingkatkan sumber daya auditor melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan manajemen pengawasan	Pada Tahun Anggaran 2022, 6 (empat) Orang Pegawai mengikuti Diklat Penjenjangan dan Diklat Subtantif dan Tahun 2023 di Rencanakan 3 (Tiga) Orang Pegawai akan mengikuti diklat Penjenjangan dan Diklat Subtantif	
	-	Tingkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan baik fisik dan non fisik, karena ada pekerjaan dari SKPD tertentu diselesaikan melewati tahun fiskal hal ini melanggar regulasi yang ada tentang tahun anggaran	Akan menjadi perhatian ke depannya	
	-	Melakukan pemeriksaan dengan cermat/teliti di lapangan (lokasi kegiatan) untuk mengetahui besarnya kerugian Negara	Akan menjadi perhatian ke depannya	
	-	Melakukan Audit secara regular terhadap pengelolaan Dana Desa	Pada tahun 2022 dilakukan Pengawasan pada 14 Desa dan pada tahun 2023 direncanakan akan dilakukan pengawasan/Pemeriksaanp 145 Desa dengan Fokus pengawasan/Pemeriksaan pada penyertaan Modal Pemdes Kepada BUMDes	
23.		**Sekretariat DPRD**		
		Kinerja Pemerintah daerah		

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		pada bidang ini sudah mencapai target, namun masih ada kekurangan-kekurangan yang membutuhkan perhatian pada waktu yang akan datang, antara lain:		
	-	Mekanisme pelayanan administrasi agar selesai tepat waktu	Dilakukan peningkatan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	Peningkatan pencapaian target kinerja dan pelayanan.
	-	Untuk urusan keuangan supaya menempatkan orang yang berkompeten dan memahami alur kerja tentang keuangan	Dilakukan peningkatan kapasitas melalui pengembangan aplikasi dan inovasi serta metode pengelolaan keuangan	Peningkatan pencapaian target kinerja dan pelayanan.
24.		**Urusan Sekretariat Daerah**		
		Bagian Hukum		
		Terhadap urusan bagian hukum beberapa rekomendasi yang disampaikan, antara lain	-	
	-	Pemberian jasa bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu (ekonomi lemah) yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Ruteng harus selektif terutama kasus yang diperkarakan	Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Namun untuk merealisasikan hal ini, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum, ini mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengamanatkan bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksud diatur dengan Peraturan Daerah. Sementara di Kabupaten Manggarai sampai saat ini belum memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum	Pembentukan perda sebagai dasar pengalokasian anggaran pemberian jasa bantuan hukum

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	-	Tingkatkan sosialisasi dan publikasi hukum dan peraturan daerah ke desa-desa serta programkan kembali kegiatan Kadarkum dengan melibatkan masyarakat yang cukup besar	Bagian Hukum setiap tahunnya mempunyai program Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan dengan beberapa agenda kegiatan seperti penyuluhan hukum di 10 Desa/tahun angaran, desiminasi Peradilan Tata Usaha Negara ke 1 Kecamatan/tahun angaran, pembinaan desa sadar hukum (KADARKUM) untuk 1 Desa Binaan/tahun angaran dan desiminasi norma adat ke 1 Kecamatan/tahun anggaran. Kegiatan ini melibatkan beberapa Narasumber dari Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan dan Tokoh Adat/Masyarakat dengan peserta kegiatan sebanyak 50 orang/kegiatan	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum dan perda
	-	Gandakan seluruh Perda untuk pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan dan seluruh anggota DPRD agar pada saat Reses dan kunjungan kerja dapat mensosialisasikan kepada masyarakat	Penggandaan buku Himpunan Lembaran Daerah yang berisikan seluruh Peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun Anggaran, Bagian Hukum telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,-/tahun anggaran untuk penggandaan 100 buku Himpunan Lembaran Daerah untuk dibagikan ke 10 Kecamatan. Sedangkan untuk Desa/Kelurahan dan anggota DPRD serta seluruh masyarakat Manggarai, dapat diakses langsung pada portal resmi Kabupaten Manggarai dengan alamat website *https://manggaraikab.jdihn.go.id*	Pedoman bagi pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan, anggota DPRD saat mesosialisasikan kepada masyarakat.
25.		**Urusan Kecamatan**		
		Kecamatan Cibal		
	-	Untuk kinerja dari kecamatan ini, tim perumus menyampaikan apresiasi, tetapi perlu memperhatikan tanah-tanah sekolah yang masih dalam konflik dan sesegera mungkin untuk melakukan sertifikasi tanah sehingga terciptanya iklim	Dalam penanganan tanah SMPN 10 Cibal dan SMAN 1 Cibal Tanah SMPN 10 Cibal, Pemerintah Kecamatan Cibal telah 3 kali memberikan peringatan kepada Saudari Veronika Rewe yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah warisan dari	Proses belajar mengajar di kedua sekolah ini berjalan normal

No		Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Pendidikan yang kondusif	alm. Martinus Poung suaminya. Tanah dimaksud bersertipikat BPN Nomor 1 Tahun 2003 dan sah milik Pemerintah. Masalah ini sudah dilaporkan ke Tingkat Kabupaten untuk penanganan lebih lanjut dan diusulkan untuk melakukan penertiban aset Pemerintah.	
			Terkait tanah SDI Bea Noning Desa Golo Ncuang yang diklaim oleh diklaim oleh Saudari Petronela Damul sebagai warisan dari alm. Gabirel Popa suaminya, Pemerintah Kecamatan telah mengeluarkan 2 (dua) kali surat peringatan kepada yang bersangkutan untuk melakukan pembongkaran terhadap pagar yang dibuat. Setelah dikeluarkan peringatan ke 3 (tiga) apabila tidak diindahkan maka akan dilakukan penertiban oleh Pemerintah.	
		Kecamatan Satar Mese		
	-	Mengapresiasi kinerja dari urusan ini, namun pemerintah segera menunjukkan PJS untuk beberapa desa yang PJS nya masuk masa pensiun sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan yang berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.	Tahun 2022 sudah tidak ada kekosongan jabatan.	Pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

3.6 Penghargaan

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Tahun 2022 telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Sinergi dan kolaborasi bersama akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya serta media telah mewujudkan Kabupaten Manggarai dianugerahi berbagai penghargaan. Adapun penghargaan dan prestasi yang telah dicapai pada periode tahun 2022 dimaksud, adalah sebagai berikut:

- Pasar Inpres Ruteng sebagai "Pasar Pangan Aman berbasis Pengawas Obat dan Makanan" oleh BPOM di Kupang;
- Program Ketahanan Pangan melalui Budidaya Kedelai;
- Kabupaten dengan 5 Puskesmas Tidak Ada Kasus Kematian Ibu selama Tahun 2018-2022;
- Penghargaan dari Kementerian Keuangan RI sebagai Daerah dengan Kinerja Pengelolaan Dana Desa Terbaik urutan pertama tahun 2022;
- Penghargaan STBM Award 2022 Kategori Peningkatan Sanitasi;
- Penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk Ketua TP PKK Kabupaten Manggarai sebagai Inovator Kepemimpinan Perempuan Dalam Pembangunan Sanitasi yang Kesetaraan Gender dan Inklusi pada Ajang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Award Tahun 2022;
- Predikat B (Baik) untuk Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Opini "**Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP)** dari BPK RI Perwakilan Provinsi NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021.

BAB IV
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1.1 Tugas Pembantuan yang Diterima

a) Bidang Pertanian

- Dasar Hukum
  - SP DIPA-018.08.4.249165/2022 tanggal 17 November 2022
  - SP DIPA-018.03.4.249158/2022 tanggal 17 November 2022
- Capaian Program dan Kegiatan

  Pada tahun anggaran 2021 Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT dalam bentuk Tugas Pembantuan, dengan alokasi anggaran dan realisasi seperti dalam tabel 4.1

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan yang Diterima
Bidang Pertanian Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
I	TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT				
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan rincian:				
	1. Embung Pertanian mendukung Tanaman Pangan	unit	1	1	100
	2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	unit	5	5	100
II	**Program Peningkatan dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dengan rincian:**				
	1. Bantuan benih Padi Inbrida Sawah	Ha	1000	1000	100
	2. Bantuan Sarana Budidaya Padi Biofortifikasi	Ha	1.000	1.000	100
	3. Bantuan Sarana Budidaya Sorgum	Ha	100	100	100
	4. Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP) Padi	Ha	12	12	100
	5. Bantuan Pemerintah Power Thresher Padi	Ha	2	2	100
	6. Bantuan Pemerintah Power Thresher Multiguna Kedelai 8 Unit	Ha	8	8	100
	7. Bantuan Pemerintah Power Thresher Multiguna Kedelai Mobilev2 Unit	Ha	2	2	100
	8. UPHcKedelai 1 Unit	Ha	1	1	100
II	TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI				
	1. Tanam Jagung Panen Sapi	Ha	100	100	100

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, Jan 2022

- Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
  - Permasalahan

    Dalam pelaksanaan tugas pembantuan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai pada tahun 2021, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

    1. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya;
    2. Anggaran untuk APBN sejak tahun 2017 dikelola oleh Pihak Provinsi sehingga kesulitan dalam proses pelaksanaan kegiatan baik pelaksanaan maupun dalam proses pencairan keuangan.

- Upaya Penyelesaian

  Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

  1. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;
  2. Disarankan pada tahun mendatang Kabupaten memiliki anggaran APBN sendiri atau DIPA.

1.2 Tugas Pembantuan yang Diberikan: Tidak ada

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 didorong untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat. Selain itu, LKPJ juga menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menetapkan tujuan dan merumuskan kebijakan pembangunan selanjutnya, sebab LKPJ menyediakan data dan informasi tentang berbagai aspek pembangunan Kabupaten Manggarai.

Berbagai keberhasilan pembangunan telah dicapai dalam mewujudkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan daerah, meskipun harus dicapai dengan berbagai tantangan dan hambatan. Prestasi dan capaian yang kita dicapai merupakan hasil kerja keras bersama antara Pemerintah (eksekutif), Legislatif dan masyarakat. Namun, harus diakui selain keberhasilan yang telah dicapai, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, tidak semua permasalahan dapat diatasi dan dapat memenuhi harapan semua pihak. Masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Oleh karena itu, analisa dan evaluasi mesti digunakan sebagai pijakan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik untuk mendukung tercapainya *Good Governance* pada masa mendatang.

Penyelenggaraan pemerintahan adalah komitmen bersama untuk melayani, memberdayakan dan membangun masyarakat. Dengan semangat kebersamaan menuju perubahan, saya mengajak seluruh komponen masyarakat, khususnya kepada seluruh aparatur pemerintah daerah, untuk terus menggelorakan komitmen serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Manggarai untuk mewujudkan harapan-harapan dan kebutuhan yang lebih besar pada masa yang akan datang.

Pada gilirannya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 ini selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai yang terhormat untuk dibahas melalui mekanisme Rapat DPRD Kabupaten Manggarai.

Oleh karena itu, catatan-catatan strategis, saran yang bersifat konstruktif dan inovatif dari DPRD Kabupaten Manggarai, merupakan rekomendasi penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Manggarai. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022, dapat dijadikan tonggak pembangunan pada masa yang akan datang, sehingga tercipta **Manggarai yang Maju, Adil dan Berdaya Saing.**

Ruteng, 30 Maret 2023

BUPATI MANGGARAI,

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, S.E., M.A

KABUPATEN MANGGARAI
1958

Cama Lewang Ngger Pe'ang, Cama Po'e Ngger One
Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa